

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TA 2018



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunianya akhirnya BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan tugas penyusunan Buku Laporan Tahunan Penyelenggaraan Program Kerja Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya BPBD Prov. Jawa Tengah menyampaikan Ucapan terimakasih kepada:

1. BNPB yang telah memberikan Penguatan bagi BPBD Prov. Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, khususnya dalam bentuk sarana mobilitas, peralatan, logistik dan anggaran (penguatan kelembagaan, dana siap pakai, maupun dana rehabilitasi dan rekonstruksi) sehingga Penanganan Bencana di Jawa Tengah dapat berjalan dengan sukses.
2. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ka. Bappeda Prov Jateng, dan Ka. BPKAD Prov Jateng yang telah memberikan dukungan anggaran, sarana mobilitas, gedung kantor dan personil, serta kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta motivasi yang selalu diberikan melalui group whatsapp, rakor dan twitter kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun BPBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.
3. DPRD Prov Jawa Tengah terutama Komisi E DPRD Prov Jateng yang membidangi kesejahteraan sosial telah memberikan dukungan anggaran dan sarana pendukung PB melalui alokasi anggaran untuk kebijakan PB sekaligus kunjungan lapangan secara bersama-sama.
4. Unsur pengarah SKPD maupun dari masyarakat profesional atas kerjasama dan koordinasi yang sangat baik dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana, maupun penanganan darurat dan pasca bencana.
5. TNI/POLRI atas kerjasama dalam penanggulangan bencana dan penanganan kejadian bencana baik di lapangan maupun dalam posko.

6. Seluruh Komunitas Relawan yang telah banyak membantu dan berkontribusi langsung dalam penanggulangan bencana yang langsung berhubungan dengan masyarakat terdampak bencana maupun di bidang mitigasi.
7. Seluruh Pemangku Kepentingan atas kerjasamanya selama ini, sehingga kolaborasi dalam penanggulangan bencana dapat berjalan dengan lancar termasuk dunia usaha melalui CSRnya.

Kami menyadari bahwa usaha dan upaya telah kami lakukan secara maksimal. Apabila masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penanganan bencana di Jawa Tengah, segala bentuk saran dan kritik merupakan masukan yang sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang. Sebagai lembaga yang 10 tahun berdiri, kami menyadari bahwa pengalaman dan kekurangan dilapangan merupakan guru terbaik untuk memacu kami agar menjadi lebih baik lagi.

Buku laporan ini dibuat sebagai upaya kami dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menjaga akuntabilitas kinerja yang tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Harapan kami buku ini dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Prov. Jawa Tengah mulai dari Pra-bencana, Tanggap Darurat, maupun Pasca-bencana serta pelayanan pada masyarakat.

Dengan tersusunnya buku ini mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi para pejabat berikutnya, serta berbagai pihak yang berkepentingan sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang sudah dilaksanakan di samping pertanggung jawaban anggaran yang sudah dilaksanakan di BPBD Prov. Jateng. Sekian

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

**KALAKHAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Drs. SUDARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600512 198903 1 012**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
A. PENDAHULUAN	12
1. Latar Belakang	12
a. Kondisi Wilayah dan Kebencanaan Jawa Tengah	12
b. Kajian Risiko Bencana	15
2. Dasar Hukum	21
3. Tugas Pokok dan Fungsi	23
a. Tugas Pokok	23
b. Fungsi	24
4. Rencana Strategis BPBD	26
a. Visi Jawa Tengah 2019 - 2024	26
b. Misi	26
c. Tujuan	26
d. Sasaran	26
5. Sumber Anggaran	27
6. Personel BPBD	28
B. PROGRAM DAN KEGIATAN PB 2018	30
1. Urusan, Program dan Kegiatan	30
2. Tempat Dan Waktu Kegiatan	36
3. Tahapan dan Rencana Kerja Kegiatan	36
4. Metode Kegiatan	37
5. Sasaran Kegiatan	38
C. CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN PB	40
1. Realisasi Fisik dan Keuangan	40
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	44
a. Seksi Pencegahan	45

b. Seksi Kesiapsiagaan	85
3. Bidang Penanganan Darurat	114
a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi	114
b. Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat.....	123
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	145
a. Seksi Rehabilitasi	146
b. Seksi Rekonstruksi.....	154
5. Bidang Logistik dan Peralatan	170
a. Seksi Logistik.....	170
b. Seksi Peralatan.....	188
6. Bagian Tata Usaha	201
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian	203
b. Subbagian Keuangan.....	219
c. Subbagian Program.....	220

D. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TENGAH

.....	263
1. Kejadian Bencana di Jawa Tengah.....	263
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2018	264
a. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana	264
b. Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor	266
c. Erupsi Gunung Api.....	274
d. Gempa Bumi Kabupaten Banjarnegara	282
e. Bencana Kekeringan.....	286
3. Peringatan HKBN 2018.....	292
4. Dukungan Event Pemangku Kepentingan PB	295
5. Alokasi Dana PB di Jawa Tengah.....	298
a. APBD Provinsi Jawa Tengah.....	298
b. Bantuan Gubernur Jawa Tengah	300
c. APBN TA 2018.....	304
4. Data Personel BPBD Kabupaten/Kota	307
5. Sinergi Penanggulangan Bencana.....	308
a. <i>Technical Assistance And Training Teams (TATTs)</i>	308

b. Bantuan Bencana dari Provinsi Jawa Tengah.....	310
6. Prestasi dan Penghargaan 2018	319
a. Jateng Fair 2018.....	319
7. Tantangan, Permasalahan dan Solusi.....	320
E. PENUTUP.....	323
1. Kesimpulan.....	323
2. Saran.....	323
F. LAMPIRAN.....	325

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah	13
Tabel 2 Indeks Bencana Kabupaten/Kota Se-Jateng	14
Tabel 3 Kelas Bahaya Bencana Jateng	16
Tabel 4 Kelas Kerentanan Bencana Jateng.....	17
Tabel 5 Kelas Kapasitas/Ketahanan Bencana Jateng	19
Tabel 6 Kajian Risiko Bencana Jawa Tengah	20
Tabel 7 Tugas Pokok Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah.....	24
Tabel 8 Fungsi Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah	25
Tabel 9 APBD TA 2018 BPBD Prov Jawa Tengah.....	27
Tabel 10 Perbandingan APBD TA 2017 - 2018	27
Tabel 11 Jumlah Pegawai Tahun 2018.....	28
Tabel 12 Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah.....	28
Tabel 13 Urusan, Program dan Kegiatan Bidang PB.....	30
Tabel 14 Program dan Kegiatan Pada BPBD Jawa Tengah TA 2018	30
Tabel 15 Realisasi Keuangan APBD TA 2018	40
Tabel 16 Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2018.....	42
Tabel 17 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018	44
Tabel 18 Capaian RPJMD.....	44
Tabel 19 Pelaksanaan Kegiatan Idensos Tahun 2018	53
Tabel 20 Beberapa Kejadian Bencana Gempa Bumi.....	57
Tabel 21 Pelaksanaan Kegiatan Mastana Tahun 2018	71
Tabel 22 Kegiatan Seksi Pencegahan 2018	79
Tabel 23 Lokasi Rambu Jalur Evakuasi.....	98
Tabel 24 Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi s.d 2018.....	99
Tabel 25 Peralatan EWS.....	103
Tabel 26 Pemasangan ALAT EWS (Early Warning System).....	103
Tabel 27 Kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2018	105
Tabel 28 Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi.....	123
Tabel 29 Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Darurat Tahun 2018.....	144
Tabel 30 Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2018.....	154
Tabel 31 Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2018.....	169
Tabel 32 Kegiatan Seksi Logistik Tahun 2018	188
Tabel 33 Kegiatan Seksi Peralatan Tahun 2018.....	193
Tabel 34 Inventarisasi ketersediaan Peralatan PB.....	194
Tabel 35 Kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.....	203
Tabel 36 Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2018	206
Tabel 37 Kegiatan Subbagian Keuangan.....	219
Tabel 38 Kegiatan Subbagian Program.....	260
Tabel 39 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah 2018	263
Tabel 40 Perbandingan Kejadian Bencana 2016-2018	264
Tabel 41 Wilayah Terdampak Banjir Kab. Tegal.....	267

Tabel 42 Dampak Banjir Kabupaten Tegal.....	268
Tabel 43 Wilayah Terdampak Banjir Kab. Tegal.....	269
Tabel 44 Korban Meninggal Bencana Tanah Longsor.....	271
Tabel 45 Korban Luka-Luka Bencana Tanah Longsor	272
Tabel 46 Korban Hilang dalam Bencana Tanah Longsor.....	272
Tabel 47 Lokasi pengungsi di 6 titik pengungsian Akibat Bencana Tanah Longsor di Kab. Brebes	273
Tabel 48 Rencana Giat Penanganan Bencana Gempa Bumi Hari	283
Tabel 49 Kerusakan Infrastruktur dan Fasilitas Umum	284
Tabel 50 Data Pengungsian Dampak Gempabumi Kab. Banjarnegara	285
Tabel 51 Daerah Potensi Kekeringan di Jateng	288
Tabel 52 Daerah terdampak Kekeringan Jawa Tengah.....	291
Tabel 53 Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah 2018	299
Tabel 54 Alokasi Dana PB Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018	300
Tabel 48 Kriteria dan Nilai Bantuan Bencana (Pergub 77 Tahun 2014).....	301
Tabel 56 Bantuan Gubernur Jawa Tengah 2018.....	302
Tabel 57 Alokasi Dana RR di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.....	305
Tabel 58 Alokasi Dana PB di Kabupaten/Kota Jawa Tengah	306
Tabel 52 Pegawai BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.....	307
Tabel 60 Program Kegiatan TATT's Tahun Anggaran 2018.....	309
Tabel 61 Tantangan Permasalahan dan Solusi PB.....	322
Tabel 62 Indeks Risiko Bencana Indonesia.....	326

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Indeks Rawan dan Risiko Bencana Jawa Tengah	14
Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah	29
Gambar 3 Hasil Peta Risiko Bencana Kekeringan 2018	48
Gambar 4 Penyusunan Peta Risiko Bencana Kekeringan	48
Gambar 5 Gladi Manajemen Bencana	52
Gambar 6 Dokumentasi Idensos tahun 2018	56
Gambar 7 Penyusunan Renkon Bencana	64
Gambar 8 PRBBK Inklusif Disabilitas	69
Gambar 9 Pengembangan Mastana 2018	74
Gambar 10 Kegiatan Pencegahan & Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Merapi Tahun 2018	78
Gambar 11 Dialog Interaktif dan Taping Dialog Interaktif Tahun 2018	87
Gambar 12 Kegiatan Pengembangan Forum PRB	90
Gambar 13 Koordinasi PRB dan Pelaksanaan Kegiatan	93
Gambar 14 Koordinasi dan Pengembangan CSR untuk Reduksi Bencana Tahun 2018	95
Gambar 15 Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Jawa Tengah	100
Gambar 16 Perangkat EWS Bencana Tanah Longsor	104
Gambar 17 Kegiatan LATGAB P.E.P.P di Kabupaten Temanggung	117
Gambar 18 Kegiatan LATGAB P.E.P.P di Kabupaten Batang	117
Gambar 19 Pantauan Mudik/Lebaran, Suro, dan Tahun baru	120
Gambar 20 Posko Radio BPBD Prov Jateng	122
Gambar 21 Kegiatan Pengembangan Pusdalops Bencana	128
Gambar 22 Kegiatan Evaluasi Dana Siap Pakai BNPB Siaga Darurat Bencana Angin, banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017/2018	139
Gambar 23 Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Pada Musim Hujan dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018	139
Gambar 24 Rapat Rapat Antisipasi Dampak Musim Hujan di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018-2019	140
Gambar 25 Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Tengah	140
Gambar 26 Banjir di Kab. Blora	142
Gambar 27 Erupsi Merapi di Kab. Klaten	142
Gambar 28 Tanah Longsor di Kab. Purworejo	143
Gambar 29 Tanah Longsor di Kab. Wonosobo	143
Gambar 30 Kegiatan Tim Reaksi Cepat bencana Jawa Tengah	144
Gambar 31 Acara Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana	149
Gambar 32 Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kabid dan Kasi BPBD se-Jawa Tengah dan OPD terkait	151

Gambar 33 Rakor Rehabilitasi Pascabencana Jawa Tengah.....	153
Gambar 34 Inventarisasi sector terdampak bencana Jawa Tengah	156
Gambar 35 Kegiatan JITU PASNA	158
Gambar 36 Kegiatan Rakor Rekonstruksi pasca bencana.....	161
Gambar 37 Kegiatan Sinergitas Multisektor.....	166
Gambar 38 Kegiatan Sinergitas Multisektor.....	169
Gambar 39 Rakor Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengelolaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah.....	173
Gambar 40 Kegiatan pengoperasional mobil lapangan.....	176
Gambar 41 Pengelolaan Logistik Dan Pergudangan	178
Gambar 42 Layanan Dapur Umum Pada Event Ukm Cullinary Festival Tahun 2018	180
Gambar 43 Jateng Fair 2018	182
Gambar 44 Pesta Rakyat Jawa Tengah 2018.....	183
Gambar 45 Layanan Dapur Umum Pada Dukungan Penanganan Darurat Bencana Gempa Dan Tsunami Di Prov Sulawesi Tengah.....	185
Gambar 46 Gladi pengelolaan dapur umum dan apel kesiapsiagaan bencana Kab. Demak tahun 2018	186
Gambar 47 Layanan dapur umum dan apel kesiapsiagaan bencana kab. Grobogan tahun 2018.....	187
Gambar 48 Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan	191
Gambar 49 Peningkatan Pengelolaan dan Praktik Peralatan PB.....	193
Gambar 50 Pemohon Informasi Publik.....	205
Gambar 51 Rakor Sinergitas Penanggulangan Bencana	208
Gambar 52 Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas.....	210
Gambar 53 Rakor Peningkatan Kapasitas Personil Damkar	213
Gambar 54 Rakor Sinergitas Penyelenggaraan Penanggulangan.....	215
Gambar 55 Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Untuk Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Bencana.....	219
Gambar 56 Media Gethering Refleksi Penanggulangan Bencana.....	221
Gambar 57 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PB dan Manajemen	223
Gambar 58 Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas	226
Gambar 59 Sosialisasi Program Cash Management System (CMS)	228
Gambar 60 Sinergi PB Berbasis Masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah Tangguh Bencana.....	233
Gambar 61 Gerakan Revolusi Akademik melalui PRB untuk Mewujudkan Jateng Tangguh Bencana.....	236
Gambar 62 Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan BPBD se-Jawa Tengah Tahun 2018.....	239
Gambar 63 Rapat Koordinasi Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	243
Gambar 64 Pameran Pembangunan PRPP “Magical Dieng”	244
Gambar 65 Forum Organisasi Perangkat Daerah.....	248
Gambar 66 Forum Organisasi Perangkat Daerah Renstra BPBD.....	250

Gambar 67 Bintek Pengisian Indeks Ketahanan Daerah	254
Gambar 68 Uji Kompetensi/Sertifikasi Penanggulangan Bencana.....	256
Gambar 69 Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana Kekeringan Tahun 2018.....	259
Gambar 70 Talk Show Masyarakat Merapi Tangguh Bencana.....	260
Gambar 71 Perbandingan Kejadian Bencana Jateng	264
Gambar 72 Banjir 6 Kecamatan di Kabupaten Tegal.....	269
Gambar 73 Dampak banjir Kota Tegal.....	270
Gambar 74 Dampak banjir Kab. Brebes	273
Gambar 75 Letusan Kawah Sileri Kab. Banjarnegara	275
Gambar 76 Erupsi Gunung Merapi 2018	281
Gambar 77 Gempa Bumi di Kabupaten Banjarnegara.....	286
Gambar 78 Persiapan dan Peringatan HKBN 2018.....	295
Gambar 79 Stand Pameran PRPP Jateng Fair 2018	296
Gambar 80 Dukungan BPBD untuk Pesta Rakyat Jawa Tengah.....	298
Gambar 81 Pengiriman Bantuan dan Relawan Ke Lombok NTB.....	313
Gambar 82 Bantuan Kemanusiaan BPBD Prov. Jateng untuk warga Palu, Sulawesi Tengah.....	317
Gambar 83 Bantuan Kemanusiaan Korban.....	319
Gambar 84 Penghargaan Jateng Fair 2018.....	320

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

a. Kondisi Wilayah dan Kebencanaan Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah $\pm 32.548 \text{ km}^2$, atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Luas wilayah tersebut dihuni oleh sekitar 34,25 juta jiwa penduduk (BPS Jateng, 2017) yang menempati 29 Kabupaten, 6 Kota, 573 kecamatan, 8.559 desa/kelurahan. Karakteristik wilayah Jawa Tengah dapat dibedakan atas pegunungan, perbukitan, dan dataran (dataran pantai dan dataran alluvial). Dataran alluvial dan pantai mendominasi di daerah sisi utara Jawa Tengah, sedangkan daerah pegunungan di Jawa Tengah meliputi Pegunungan Muria, Kendeng. Sedangkan untuk gunung berapi antara lain adalah Gunung Merapi, Slamet, Gunung Dieng, Gunung Sindoro Sumbing dan Gunung Merbabu. Kondisi dan karaktersitik wilayah Jawa Tengah cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis mempunyai potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah. Namun disisi yang lain, kondisi tersebut juga berpotensi untuk menimbulkan ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam, serta bencana sosial, seperti ancaman bencana gempabumi, letusan gunung api, tsunami, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan serta gas beracun.

BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menilai potensi ancaman bencana telah melakukan upaya pendataan/inventarisasi daerah rawan bencana yang meliputi bencana hidrometeorologis, dan bencana lain yang sering terjadi di Jawa Tengah. Mendasarkan data BPS tahun 2017 penduduk di Jawa Tengah tercatat sebesar 34.257.865 jiwa (9.719.925 KK), dan jika data tersebut disesuaikan pada masyarakat yang menempati daerah terancam bencana adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1
Daerah Rawan Bencana di Jawa Tengah

No	Bencana	Kab		Kec		Desa/Kel		KK	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Banjir	32	85,71	295	51,5	1.674	19,5	743.264	7,70
2	Longsor	29	82,85	320	55,8	2.136	24,9	642.001	6,4
3	Kekeringan	27	74,28	219	38,2	1.314	15,3	677.952	6,8
4	Angin puting beliung	15	42,85	132	23	752	8,8	282.212	2,9
5	Gempabumi	21	37,14	114	19,9	1.499	17,5	1.416.145	15,1
6	Tsunami	4	11,42	20	3,5	127	1,5	128.186	1,3
7	Gunung api	23	31,42	47	8,2	276	3,2	200.634	2,1
8	Gas Beracun	3	8,57	13	2,3	44	0,5	33.744	1,3
9	Kebakaran Hutan/Lahan	22	62,85	122	21,3	749	8,7	169.498	1,7

Sumber: BPBD Prov Jateng, 2013

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana tinggi, baik indeks rawan maupun indeks risiko bencana. Indeks rawan pada urutan 1, sedangkan dari indeks risiko pada urutan ke 13. Data indeks rawan bencana Jawa Tengah yang diterbitkan BNPB tahun 2011 menempatkan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 34 Kabupaten/Kota pada posisi rawan tinggi dan 1 Kota rawan sedang. Sementara pemutakhiran data indeks risiko bencana yang dilakukan BNPB tahun 2013, diperoleh bahwa 26 (dua puluh enam) provinsi termasuk kategori risiko tinggi, dan Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-13 (risiko tinggi). Mendasarkan kondisi tersebut diatas, terdapat penurunan peringkat Jawa Tengah pada kategori rawan dan risiko bencana, yaitu peringkat nasional risiko bencana 13 sedangkan pada peringkat rawan nomor urut 1. Artinya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan selama 3 tahun (2011 – 2013) sangat berpengaruh terhadap penentuan pengurangan risiko bencana. Upaya-upaya mitigasi terus dilakukan mengingat Jawa Tengah sebagai daerah yang mempunyai tingkat

ancaman dan risiko bencana yang tinggi dari berbagai jenis bencana. Tingginya ancaman dan risiko bencana di Jawa Tengah menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium bencana. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa upaya penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan atas dasar bahwa masyarakat Jawa Tengah banyak yang menempati daerah rawan bencana.



Indeks Rawan Bencana (BNPB 2011)



Indeks Risiko Bencana (BNPB 2013)

Gambar 1 Indeks Rawan dan Risiko Bencana Jawa Tengah

Indeks risiko bencana dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian bencana. Perhitungan indeks risiko bencana ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (*exposure*) dari setiap bahaya (*single hazard*) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (*multi hazard*), dengan memperhatikan parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana. Indeks risiko bencana 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2
Indeks Bencana Kabupaten/Kota Se-Jateng

No	Kabupaten/Kota	Indeks Rawan 2011**			Indeks Risiko 2013 *		
		Skor	Kelas	Rangking Nas	Skor	Kelas	Rangking Nas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cilacap	132	Tinggi	3	215	Tinggi	17
2	Purworejo	91	Tinggi	46	215	Tinggi	18
3	Tegal	64	Tinggi	180	213	Tinggi	26

No	Kabupaten/Kota	Indeks Rawan 2011**			Indeks Risiko 2013 *		
		Skor	Kelas	Rangking Nas	Skor	Kelas	Rangking Nas
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Brebes	101	Tinggi	25	211	Tinggi	29
5	Banyumas	123	Tinggi	8	207	Tinggi	36
6	Pemalang	78	Tinggi	101	206	Tinggi	37
7	Kebumen	113	Tinggi	12	203	Tinggi	49
8	Demak	69	Tinggi	153	184	Tinggi	95
9	Kota Semarang	87	Tinggi	60	184	Tinggi	96
10	Pekalongan	76	Tinggi	116	183	Tinggi	97
11	Pati	98	Tinggi	31	174	Tinggi	153
12	Rembang	77	Tinggi	107	172	Tinggi	164
13	Batang	62	Tinggi	193	168	Tinggi	175
14	Kendal	73	Tinggi	139	167	Tinggi	190
15	Jepara	105	Tinggi	21	163	Tinggi	209
16	Grobogan	75	Tinggi	126	162	Tinggi	220
17	Purbalingga	62	Tinggi	192	159	Tinggi	226
18	Boyolali	92	Tinggi	43	159	Tinggi	227
19	Banjarnegara	75	Tinggi	127	150	Tinggi	289
20	Blora	58	Tinggi	222	150	Tinggi	290
21	Kota Pekalongan	52	Tinggi	272	148	Tinggi	306
22	Wonogiri	89	Tinggi	55	146	Tinggi	313
23	Magelang	94	Tinggi	42	143	Sedang	326
24	Semarang	103	Tinggi	23	143	Sedang	327
25	Temanggung	70	Tinggi	149	143	Sedang	328
26	Sragen	76	Tinggi	118	142	Sedang	334
27	Wonosobo	105	Tinggi	20	135	Sedang	358
28	Kudus	78	Tinggi	103	132	Sedang	378
29	Karanganyar	102	Tinggi	24	130	Sedang	388
30	Klaten	106	Tinggi	19	123	Sedang	414
31	Kota Tegal	46	Tinggi	322	117	Sedang	441
32	Kota Magelang	44	Tinggi	343	108	Sedang	459
33	Sukoharjo	82	Tinggi	76	93	Sedang	482
34	Kota Salatiga	34	Sedang	404	91	Sedang	485
35	Kota Surakarta	60	Tinggi	207	80	Sedang	490

Sumber : * = BNPB, IRBI Tahun 2011, ** BNPB IRBI 2013

b. Kajian Risiko Bencana

Kajian risiko bencana Jawa Tengah 2016 -2020 yang difasilitasi BNPB menilai aspek risiko bencana di Jawa Tengah berdasarkan aspek bahaya/ancmana, kerentanan dan kapasitas/ketahanan daerah, dalam

bentuk indeks. Indeks pengkajian risiko bencana terdiri dari indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas. Penentuan indeks berdasarkan pada parameter-parameter sebagai alat ukur setiap komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas, kecuali indeks kapasitas daerah didapatkan dari pengambilan data terkait dengan kondisi daerah dalam menghadapi bencana melalui kesepakatan SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota di daerah. Masing-masing indeks memiliki nilai indeks dan kelas indeks yang dikelompokkan pada menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. nilai indeks 0-0,333 adalah kelas rendah,
- b. nilai indeks >0,333-0,666 adalah kelas sedang,
- c. nilai indeks >0,666-1 adalah kelas tinggi.

Hasil perhitungan kajian risiko bencana menurut kelas bahaya/ancaman, kerentanan dan kapasitas, adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kelas Bahaya Bencana Jateng

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	2	3
1	Epidemi dan Wabah Penyakit	Sedang
2	Kekeringan	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Gempa Bumi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
7	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
8	Banjir	Tinggi
9	Banjir bandang	Tinggi
10	Tanah Longsor	Tinggi

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya
1	2	3
11	Tsunami	Tinggi
12	Letusan Gn Api Sumbing	Sedang
13	Letusan Gn Api Sindoro	Tinggi
14	Letusan Gn Api Merapi	Tinggi
15	Letusan Gn Api Slamet	Tinggi
16	Letusan Gn Api Dieng	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020

Kajian aspek kerentanan berkaitan dengan sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan di suatu kawasan terancam bencana. Sosial budaya merupakan dasar untuk mendapatkan penduduk terpapar, sedangkan fisik, ekonomi, dan lingkungan sebagai dasar perhitungan kerugian. Setiap komponen memiliki variasi di setiap bencana. Pengkajian kerentanan terkait dengan informasi keterpaparan, yang terdiri dari kepadatan penduduk dan kelompok rentan (rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio penduduk miskin, dan rasio orang cacat yang merupakan bagian dari perhitungan komponen sosial budaya dalam penentuan indeks penduduk terpapar. Hasil kajian kerentanan bencana di Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 4
Kelas Kerentanan Bencana Jateng

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan lingk	Kelas Kerentanan
1	2	3	4	5	6
1	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi	-	-	Tinggi
2	Kekeringan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	Tinggi	-	-	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
5	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

No	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan lingk	Kelas Kerentanan
1	2	3	4	5	6
6	Kebakaran Hutan & Lahan		Sedang	-	-
7	Gelombang Ekstrem & Abrasi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Banjir bandang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
10	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
11	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
12	Letusan Gunung Api Sumbing	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
13	Letusan Gunung Api Sindoro	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
14	Letusan Gunung Api Merapi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
15	Letusan Gunung Api Slamet	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
16	Letusan Gunung Api Dieng	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020

Kapasitas daerah merupakan salah satu dasar untuk upaya pengurangan risiko bencana yang difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian. Upaya pengurangan risiko bencana salah satunya dapat didukung oleh peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Penilaian kapasitas untuk tingkat provinsi dilihat dari kapasitas masing-masing daerah. Kapasitas daerah berlaku sama untuk seluruh bencana, yang meliputi:

- 1) Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya
- 2) Mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana

- 3) Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun ketahanan dan budaya aman dari bencana
- 4) Mengurangi faktor-faktor risiko dasar
- 5) Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana agar timbul respon yang efektif di semua tingkatan bagi masyarakat terancam

Penilaian kapasitas daerah mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Berdasarkan aturan tersebut diketahui proses pengkajian terhadap indeks kapasitas Provinsi Jawa Tengah. Pengkajian kapasitas Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada 5 (lima) prioritas program pengurangan risiko bencana. Sedangkan aspek kapasitas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuk cukup, yaitu indeks 3 (skala 1 s.d 5) .

Hasil kapasitas untuk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tabel di atas memiliki total nilai prioritas 52,31 sehingga berada pada level 3. Pencapaian terhadap level tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta komunitas PB telah memiliki komitmen terkait pengurangan risiko bencana dengan didukung kebijakan sistematis. Namun demikian, capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif bencana.

Tabel 5
Kelas Kapasitas/Ketahanan Bencana Jateng

No	PRIORITAS	NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	2	3	4
1	Memastikan Bahwa PRB Menjadi Sebuah Prioritas Nasional dan Lokal Dengan Dasar Kelembagaan Yang Kuat Untuk Pelaksanaannya	58.56	3
2	Mengidentifikasi, Mengkaji Dan Memantau Risiko Bencana Dan Meningkatkan Peringatan Dini	42.88	2

No	PRIORITAS	NILAI PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS
1	2	3	4
3	Menggunakan Pengetahuan, Inovasi Dan Pendidikan Untuk Membangun Suatu Budaya Keselamatan Dan Ketahanan Di Semua Tingkat	45.52	2
4	Mengurangi Faktor-Faktor Risiko Yang Mendasar	57.26	3
5	Memperkuat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Demi Respon Yang Efektif Di Semua Tingkat	57.35	3
	Jumlah Total	52.31	
	Indeks Ketahanan Daerah	3	

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020, BNPB 2015

Mendasarkan pada hasil-hasil kajian ancaman, kerentanan dan kapasitas maka diperoleh kajian risiko di Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 6
Kajian Risiko Bencana Jawa Tengah

No	BENCANA	KELAS RISIKO
1	2	3
1	Epidemi Dan Wabah Penyakit	Sedang
2	Kekeringan	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Gempabumi	Tinggi
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi
7	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tinggi
8	Banjir	Tinggi
9	Banjir Bandang	Tinggi
10	Tanah Longsor	Tinggi
11	Tsunami	Sedang
12	A. Letusan Gn Api (Dieng, Merapi, Slamet)	Tinggi
	B. Letusan Gn Api (Sindoro, Sumbing)	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Jateng 2016-2020, BNPB 2015

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), masyarakat dan lembaga usaha. UU No. 24 tahun 2007 tentang

penanggulangan bencana memberikan amanat untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Tugas pokok BPBD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Oleh sebab itu dalam penanggulangan bencana, BPBD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, pemahaman terhadap realitas dan potensi, kerentanan dan kapasitas bencana mutlak diperlukan. Hal ini merupakan modal awal dalam melakukan pengelolaan risiko bencana.

Pengelolaan risiko bencana sebagai upaya penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang memerlukan partisipasi multisektoral serta yang terkoordinasi dari berbagai lapisan, meliputi masyarakat, terdampak bencana sampai dengan para pengambil keputusan dan kebijakan penanggulangan bencana. Hal ini diamanatkan pula dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan terkoordinasi. Dalam konteks kajian risiko bencana, BNPB telah melakukan kajian risiko bencana 2013 dan diwujudkan dalam bentuk indeks risiko bencana. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

2. Dasar Hukum

- a. UU RI No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- b. UU RI No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- c. UU RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

- e. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- f. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- g. Perpres RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB.
- h. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah.
- i. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 12 Tahun 2017 tentang APBD Prov Jawa Tengah TA 2018 tanggal 29 Desember 2017
- j. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Prov Jawa Tengah TA 2018 tanggal 19 Oktober 2018
- k. Perda Provinsi Jawa Tengah No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- l. Perda Provinsi Jawa Tengah No 3. Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 101 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara pemberian bantuan akibat bencana di Prov Jateng
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 79 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Prov Jawa Tengah TA 2018
- r. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/009205 tahun 2015 Tentang Penanganan Darurat Bencana di Jawa Tengah.

- s. DPA dan DPPA APBD Prov. Jawa Tengah pada BPBD Jawa Tengah TA 2018;
- t. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/4 Tahun 2016 tanggal 15 Oktober 2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Jawa Tengah terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 – 31 Maret 2017.
- u. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/3 Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan/Kekurangan air Bersih di Prov. Jawa Tengah terhitung mulai tanggal 15 Juli 2017 – 31 Oktober 2017.
- v. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/5 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Angin, Banjir dan Tanah Longsor di Prov. Jawa Tengah terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2017 – 31 Maret 2018.
- w. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 360.2/0009274/2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Tetap Gubernur Jawa Tengah Untuk Penanganan Bencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No: 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Tugas pokok di bagian/Bidang BPBD Prov Jateng sebagai berikut.

Tabel 7
Tugas Pokok Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah

No	BAGIAN/BIDANG	TUGAS
1	2	3
1	Bagian Tata Usaha	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan kepegawaian
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
3	Bidang Penanganan Darurat	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi
5	Bidang Logistik dan Peralatan	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penyediaan logistik dan peralatan

Selain masing-masing tugas sesuai bagian/bidang tersebut, tiap-tiap bidang/bagian melaksanakan pula tugas-tugas lain yang diberikan oleh KALAKHAR BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambaran tugas pokok dan fungsi Tata Usaha dan Bidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Fungsi Bagian/Bidang BPBD Prov Jawa Tengah

No	BAGIAN/ BIDANG	FUNGSI
1	2	3
1.	Bagian Tata Usaha	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana; 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana
3.	Bidang Penanganan Darurat	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana darurat;
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

No	BAGIAN/ BIDANG	FUNGSI
1	2	3
		pelaksanaan di bidang rekonstruksi
5.	Bidang Logistik dan Peralatan	1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan logistik; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan peralatan

4. Rencana Strategis BPBD

Visi dan misi BPBD Provinsi Jawa Tengah sesuai Rencana strategis BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

a. Visi Jawa Tengah 2019 - 2024

JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA “(TETEP) Mboten Korupsi. Mboten Ngapusi”.

b. Misi

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

c. Tujuan

Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

d. Sasaran

- 1) Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
- 2) Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
- 3) Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;

- 4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah;
- 6) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

5. Sumber Anggaran

Pembiayaan program dan kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dana APBD Prov Jawa Tengah Tahun anggaran 2018 baik melalui mekanisme APBD Murni maupun APBD Perubahan. Pembiayaan belanja daerah (Belanja tidak langsung dan belanja langsung) sebagaimana APBD Perubahan pada TA 2018 adalah sebesar Rp.37.418.538.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
APBD TA 2018 BPBD Prov Jawa Tengah

No	Belanja	APBD		+ / -	
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	
a	BTL	7.810.538.000	7.810.538.000	-	
b	BL	26.758.000.000	29.608.000.000	2.850.000.000	+ 10.65 %
c	Total	34.568.538.000	37.418.538.000	2,850,000,000	+ 10.65 %

Belanja langsung pada APBD TA 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD TA 2017 (Rp. 11.441.000.000,-) alokasi belanja pada APBD pada tahun 2018 mengalami kenaikan Rp.18,167,000,000,- (+158,79%). Gambaran perbandingan APBD tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan APBD TA 2017 - 2018

No	Belanja	APBD		+ / -	
		TA 2017	TA 2018		
1	2	3	4	5	
a	BTL	8.582.707.000,-	7.810.538.000	-772,169,000	-9%

No	Belanja	APBD		+ / -	
		TA 2017	TA 2018		
1	2	3	4	5	
b	BL	11.441.000.000,-	29.608.000.000	18,167,000,000	+158.79 %
c	Total	20.023.707.000,-	37.418.538.000	17,394,831,000	+86.87%

6. Personel BPBD

Penyelenggaraan program dan kegiatan penanggulangan bencana didukung personel/sumberdaya manusia di BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai kualifikasi dan kompetensi. Selain dari unsur PNS/ASN, personel di BPBD Prov Jawa Tengah didukung dengan personel tenaga teknis/*outsourcing*. Jumlah personel dan tingkat pendidikan sumberdaya manusia (SDM) di BPBD Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah Pegawai Tahun 2018

No	Pegawai	Jumlah		Pendidikan Terakhir						Total
		Pria	Wanita	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PNS	40	8	20	10	2	10	5	1	48
2	Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Outsourcing</i>	23	9	0	26	2	4	-	-	32
	Total	63	17	20	36	4	14	5	1	80

Sumber: Data Pegawai BPBD s.d Desember 2018

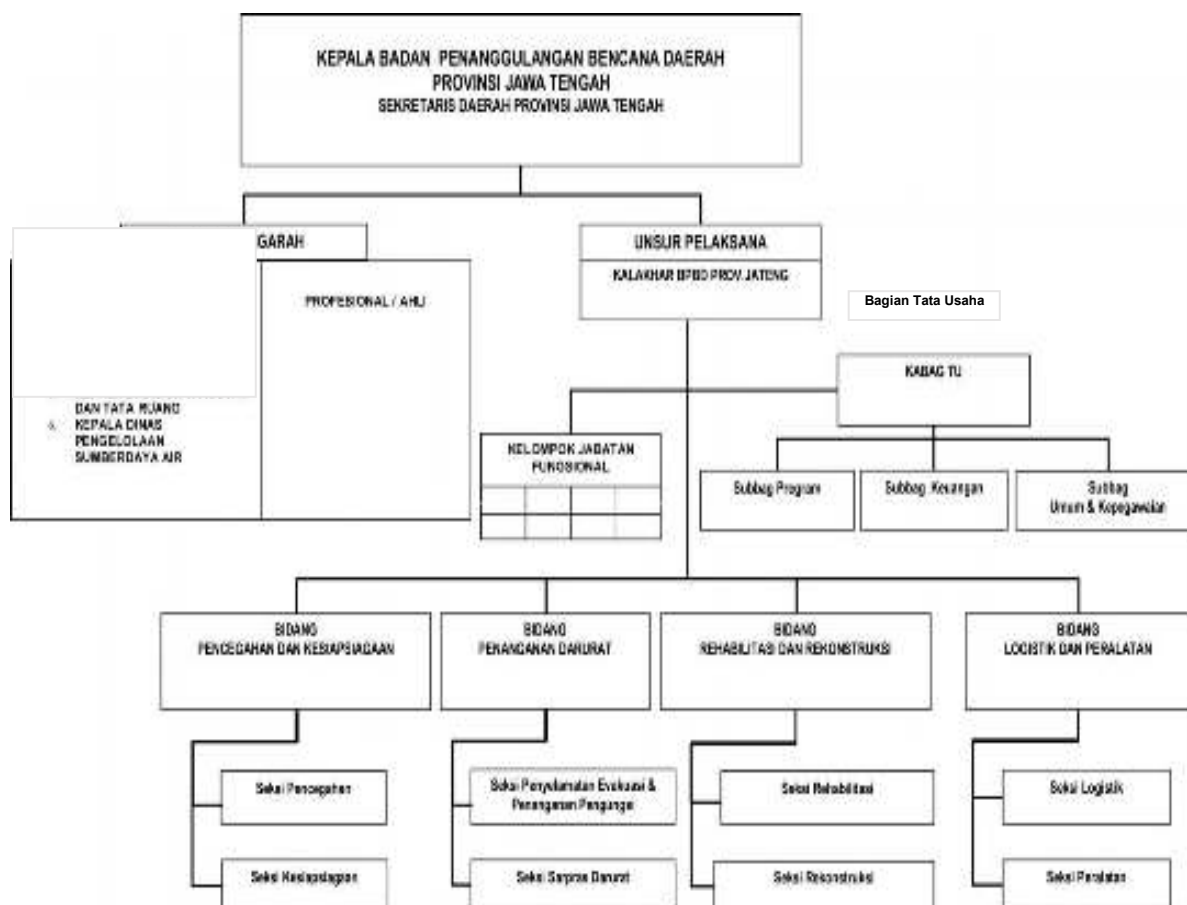
Sedangkan sumberdaya manusia yang merupakan Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPBD Provinsi Jawa Tengah menurut pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Pangkat/Golongan PNS di BPBD Prov. Jawa Tengah

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
1	Golongan IV	: 11 orang
a	Pembina Utama Madya (IV/d)	: 1 orang
b	Pembina Utama Muda (IV/c)	: - orang
c	Pembina Tk I (IV/b)	: 3 orang
c	Pembina (IV/a)	: 7 orang
2	Golongan III	25 orang

No	Pangkat / Gol	Jumlah
1	2	3
a	Penata Tk I (III/d)	: 10 orang
b	Penata (III/c)	: 7 orang
c	Penata Muda Tk I (III/b)	: 6 orang
d	Penata Muda (III/a)	: 2 Orang
3	Golongan II	11 Orang
a	Pengatur Tk I (II/d)	: - Orang
b	Pengatur (II/c)	: 7 Orang
c	Pengatur Muda Tk I (II/b)	: 1 Orang
d	Pengatur Muda (II/a)	: 3 Orang
4	Golongan I	1 Orang
a	Juru Tk I (I/d)	: 1 Orang
b	Juru (I/c)	: - Orang
c	Juru Muda Tk I (I/b)	: - Orang
d	Juru Muda (I/a)	: - Orang
JUMLAH		: 48 Orang

Struktur organisasi, kelembagaan BPDB Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi BPBD Prov Jawa Tengah

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PB 2018

1. Urusan, Program dan Kegiatan

BPBD Prov Jawa Tengah menyelenggarakan urusan wajib Sosial bidang penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, sehingga program dan kegiatan BPBD Prov Jawa Tengah terdapat dalam beberapa urusan pemerintahan. Tahun 2018, terdapat 5 (lima) urusan, 8 (delapan) Program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikelola BPBD Prov Jawa Tengah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 13
Urusan, Program dan Kegiatan Bidang PB

No	URUSAN	PROGRAM	Kegiatan
1	2	3	4
1	Sosial	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	31
2	Perhubungan	Pos, Telekomunikasi, Meteorologi, Dan SAR	5
3	Komunikasi & Informatika	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa	1
4	Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	4
5	Non Urusan (Pendukung Program)	a) Pelayanan Administrasi Perkantoran	13
		b) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	4
		c) Peningkatan Disiplin Aparatur	1
		d) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4

Sasaran dan keluaran yang dicapai masing-masing program dan kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 14
Program dan Kegiatan Pada BPBD Jawa Tengah TA 2018

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	4	5
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1	Penyediaan Jasa Surat-menyerut	Tersedianya pelayanan administrasi surat menyerut 1 tahun	Lancarnya pelaksanaan kegiatan surat menyerut di Kantor BPBD Jateng

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	4	5
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	Terselenggaranya kegiatan perkantoran dengan lancar terkait listrik, air dan telepon
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/premi asuransi barang milik daerah	Terjaminnya asset barang milik daerah di BPBD Prov. Jateng
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Terwujudnya pelak-sanaan tugas jasa kebersihan kantor/ rumah dinas di Set. BPBD dengan baik
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK selama 1 Tahun	Lancarnya tugas administrasi perkantoran di BPBD Prov. Jateng
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 Tahun	Terlaksananya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1 tahun	Terpenuhinya kelancaran kegiatan administrai perkantoran
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan RT selama 1 tahun	Terpenuhinya kelancaran kegiatan perkantoran di BPBD Prov. Jateng
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan di Kantor BPBD Jateng	Meningkatnya pengetahuan aparatur dan bahan referensi pengetahuan bidang kebencanaan
10	Penyediaan Makanan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan di Kantor BPBD Jateng	Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan berbagai pelaksanaan kegiatan
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di luar Daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan diluar daerah	Terselenggaranya berbagai kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dalam rangka penyelenggaraan PB di Jateng
12	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya pembayaran jasa pelayanan perkantoran di Kantor BPBD Jateng	Terselenggaranya kegiatan jasa pelayanan perkantoran secara tertib dan lancar
13	Penyediaan Logistik dan Sarana Pendukung Poliklinik	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan kantor	Kegiatan perkantoran yang berjalan dengan tertib dan lancar
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor BPBD Prov Jateng	Terawatnya kondisi gedung kantor Set BPBD Prov. Jateng

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	4	5
2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional BPBD Prov.Jateng	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional BPBD Prov.Jateng
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor /Rmh tangga BPBD	Terawatnya peralatan kantor dan rumah tangga Set BPBD Prov. Jawa Tengah
4	Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana BPBD Prov. Jateng	meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor BPBD Prov. Jateng
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	Tertibnya pelaksanaan kegiatan BPBD
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya diklat formal bagi aparatur, masyarakat, pelajar dan relawan PB Jateng	Meningkatnya kapasitas aparatur,masyarakat dalam penanggulangan bencana Jateng
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan UU untuk aparatur BPBD se-Jateng	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan PB
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya BinteK Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya kapasitas PB melalui sosialisasi PRB bagi disabilitas Prov. Jateng
4	Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumberdaya Manusia	Terlaksananya diklat/ seminar/ simposium/ workshop bagi aparatur Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan kapasitas karyawan Kantor BPBD Prov.Jateng yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan
V PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA			
1	Penyusunan Studi-Studi Bidang Kebencanaan (<i>Disaster Study</i>)	Seminar hasil-hasil penelitian terkait kebencanaan di Jateng	Meningkatnya upaya PRB dan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana
2	Perencanaan Bidang Kebencanaan	Terciptanya rencana pembangunan yang terintegrasi,terkoordinasi, dan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kebencanaan Provinsi Jawa Tengah
3	Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan	Terselenggara paritipasi pameran pembangunan bidang Penanggulangan Bencana	Sinergi dan diseminasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan PB Jateng

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	4	5
4	Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan	Terselenggara kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Sinergi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Lintas Wilayah dan Sektor
VI	PROGRAM POS, TELEKOMUNIKASI, METEOROLOGI DAN SAR		
1	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan	Terselenggaranya pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebencanaan Prov. Jateng	Terintegrasi, terkendali dan terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan kebencanaan secara terpadu dan brkesinambungan
2	Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Terselenggara Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi	Terciptanya para relawan dan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan profesional dalam PB
3	Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR	Terselenggaranya Latihan Komando Tanggap Darurat Bencana dan Latihan Komando Tim Reaksi Cepat (TRC) PB bagi aparatur, relawan dan masyarakat Jateng	Terciptanya relawan masyarakat dan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan profesional dlm penanganan bencana
4	SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura	Terselenggaranya Operasi SAR pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus (Lebaran dan Lomboan/ Sedekah Laut)	Lancarnya kegiatan dan aktivitas masyarakat pada event-event tertentu (Lebaran dan Lomboan/ Sedekah Laut)
5	Koordinasi dan Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana di Jawa Tengah	Terkoordinasi & terpantaunya kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana di Jawa Tengah
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		
1	Penyusunan Peta Resiko Bencana Provinsi Jawa Tengah	Tersusunnya peta risiko bencana kekeringan di 6 kabupaten/Kota di Jateng	Teridentifikasinya daerah rawan bencana untuk mitigasi & pengurangan risiko bencana kekeringan di 6 kab/kota
2	Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Terselenggaranya 1 kali dialog interaktif kebencanaan di radio dan hari kesiapsiagaan Bencana nasional	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap bahaya bencana dan penanggulangannya
3	Gladi Manajemen Bencana	Terselenggaranya gladi manajemen bencana bagi aparatur, relawan dan masyarakat umum lainnya di Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta terkoordinasinya mekanisme komando tanggap darurat PB

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	4	5
4	Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat	Terselenggaranya evaluasi, pemantauan penyusunan pedoman penanganan darurat di Provinsi Jawa Tengah	Terintegrasinya pedoman penanganan darurat kab/kota dan dropping air bagi masyarakat terdampak kekeringan
5	Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana	Terlaksananya koordinasi teknis penyelenggaraan PB	Terpantaunya kegiatan penyelenggaraan PB di Jawa Tengah sebagai bahan kebijakan
6	Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan PB	Terselenggara rapat koordinasi penyusunan rencana strategis dan Indikator kinerja BPBD	tersusunnya rencana dan indikator kinerja utama BPBD Jawa Tengah
7	Kordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah	Terselenggaranya rakor rehabilitasi dan dokumen analisis manfaat dan dampak rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jateng	Terantau dan terkoordinasinya kegiatan rehabilitasi pasca bencana di Jateng
8	Kordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng	Terselenggara rapat koordinasi penanganan rekonstruksi pascabencana Jateng	Meningkatnya keg rekonstruksi bencana Jawa Tengah
9	Pembelajaran Wawasan Kebencanaan	Terciptanya pem-belajaran dan ujian keahlian penyelenggaraan PB	Seritifikasi keahlian PB oleh LSP PB Jateng
10	Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah	Terselenggaranya kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Prov. Jateng	Terselenggaranya kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Prov. Jateng
11	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	Terlaksana identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana di Prov Jawa Tengah	Teridentifikasinya daerah rawan bencana se- Jawa Tengah
12	Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana	Terlaksananya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Provinsi Jawa Tengah	Terwujudnya peningkatan kapasitas Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di Prov Jateng
13	Koordinasi Pengembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk Reduksi Bencana	Terlaksana rakor pengembangan dan pemanfaatan CSR dalam bencana	Meningkatnya kepedulian dan dukungan dunia usaha dalam Penanggulangan bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat
14	Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)	Tersedia dokumen rencana kontinjensi PB Banjir	Meningkatnya ketangguh-an masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana banjir
15	Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)	Terselenggaranya fasilitasi pengurangan risiko bencana berbasis pesantren di Jateng	Meningkatnya kapasitas dan ketangguhan masyarakat dalam PB

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	4	5
16	Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terselenggara monitoring pelaksanaan rehab rekon	Meningkatnya kualitasrehab rekon pasca bencana
17	Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana	Terpasangnya 90 Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana di Jateng	Meningkatnya kapasitas dan ketangguhan masyarakat dan kesiapan menghadapi bencana
18	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (<i>Early Warning System</i>) Berbasis Masyarakat	terpasangnya 5 alat Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (<i>Early Warning System</i>) Berbasis Masyarakat	Meningkatnya upaya mitigasi dan kesiapan masyarakat terhadap ancaman bencana,
19	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana	Tersedianya posko siaga dan penanganan darurat di Provinsi Jawa Tengah	Terpantaunya kejadian bencana di Jawa Tengah sehingga dapat dilakukan antisipasi dan reaksi cepat dalam PB
20	Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana	Terselenggaranya bantuan penanganan darurat oleh TRC PB Provinsi Jateng	Terselenggaranya kegiatan operasional TRC di seluruh Jawa Tengah
21	Pengembangan Kebijakan dan Kemitra-an PB antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dg Pemangku Kepentingan PB	Terselenggaranya kegiatan PRB untuk penyandang disabilitas	Meningkatnya pengetahun 100 orang peserta diasblitas dalam penanganan bencana
22	Pemulihan, dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Terlaksananya pelatihan rehab rekons bagi masyarakat terdampak bencana	Terwujudnya koordinasi, pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi Pasca bencana
23	Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment dan JITU PASNA	Terselenggaranya pelatihan DaLA dan JITU Pasna bagi pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah	Terwujudnya kemampuan aparaturn dalam menghitung kerugian dan kerusakan akibat bencana di Jateng secara cepat dan tepat
24	Koordinasi Penanganan bencana	terselenggaranya koordinasi dan konsolidasi logistik dan material bencana	Tersinergi dan sinkronnya upaya PRB di Jawa Tengah
25	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Terbentuknya 8 desa tangguh bencana dari daerah rawan bencana	Meningkatnya ketangguhan masyarakat di daerah rawan bencana
26	Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB	Terselenggaranya koordinasi daerah logistik dan peralatan bencana serta data dan informasi peralatan PB di Jateng	Terpasdu dan sinergi pengelolaan sumberdaya PB

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1	2	4	5
27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng	Terlaksananya pengadaan peralatan bencana Provinsi Jawa Tengah	Terwujudnya kesiapsiagaan (antisipasi) peralatan dalam menghadapi bencana
28	Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana	Terselenggaranya rapat koordinasi daerah logistik dan peralatan bencana Provinsi Jateng	Terwujudnya tatanan pengelolaan manajemen logistik dan peralatan bencana yang ideal di Kab/Kota se-Jateng
29	Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Logistik masyarakat Terdampak Bencana	Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Logistik Bencana di Jawa Tengah	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terdampak bencana
30	Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng	Terselenggaranya Koordinasi dan sinkronisasi sektor terdampak bencana	Tersinerginya upaya rehab rekaon pasca bencana di Jawa Tengah
31	Pencegahan dan Kesiapsiagaan PB Kawasan Gunung api	Terselenggara koordinasi, pencegahan & kesiapsiagaan PB Kawasan api	Terwujudnya, koordinasi, pencegahan & kesiapsiagaan PB Kawasan gn api
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA		
1	Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi JawaTengah	Tersebar nya publikasi dan informasi kpd masyarakat dalam PB melalui media TV, Radio, dan publikasi lain	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam PB melalui informasi kebencanaan di media cetak TV, radio, dan publikasi (poster)

2. Tempat Dan Waktu Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, dan untuk koordinasi dan konsultasi disesuaikan dengan kewenangan instansi terkait maupun undangan.

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018

3. Tahapan dan Rencana Kerja Kegiatan

Tahapan dan rencana kerja kegiatan secara umum dibedakan menjadi persiapan, pelaksanaan serta pelaporan.

a. Persiapan

Persiapan kegiatan dilaksanakan antara lain adalah :

- 1) Penyusunan dan penetapan pelaksana kegiatan melalui Surat Keputusan Kalakhar BPBD Jawa Tengah
- 2) Pencermatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan
- 3) Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan selama 1 tahun anggaran
- 4) Penyusunan dan pembagian jadwal kegiatan pada masing-masing Bidang/Bagian

b. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pra pelaksanaan
 - a) Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) kegiatan
 - b) Surat undangan narasumber
 - c) Surat undangan peserta
- 2) Pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bentuk kegiatan (Sosialisasi, rapat koordinasi, workshop, seminar, dialog interaktif, gladi, loklatih, FGD, dll)
- 3) Evaluasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan

c. Penyusunan Laporan

- 1) Laporan kegiatan pada masing-masing sub kegiatan
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan keseluruhan kegiatan.
- 3) Publikasi kegiatan melalui website (www.bpbd.jatengprov.go.id). Media sosial (twitter, facebook, instagram, whatsapp)

4. Metode Kegiatan

- a. Koordinasi dan pengamatan langsung di Kabupaten/Kota terutama di BPBD Kabupaten/Kota atau SKPD yang membidangi penanggulangan bencana bagi yang belum membentuk BPBD Kabupaten/Kota
- b. Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pusat, yaitu :
 - 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- 2) Kementerian Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
 - 3) Kementerian Keuangan RI
 - 4) Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait termasuk instansi vertikal di Jateng (PVMBG, BPPTKG, BMKG, LKPP, BASARNAS, BPKP Jawa Tengah, dll)
 - 5) TNI/POLRI
- c. Koordinasi dengan SKPD terkait dilingkungan Provinsi Jawa Tengah terutama SKPD yang termasuk dalam pengampu kebencanaan
- 1) unsur pengarah dari unsur pemerintah:
 - a) Dinas Sosial (Dinsos),
 - b) Dinas Kesehatan (Dinkes),
 - c) Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM),
 - d) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya
 - e) Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air dan Penataan Ruang ,
 - 2) SKPD terkait dengan kebencanaan:

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Badan Kesbangpol, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Jateng, Biro Administasi Pembangunan Daerah Setda Prov Jateng.

5. Sasaran Kegiatan

- a. Unsur Pengarah dari unsur Pemerintah daerah (SKPD) Prov Jateng
- b. SKPD teknis terkait
- c. Data dan informasi bencana Jawa Tengah
- d. BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- e. Para pemangku kepentingan PB Jawa Tengah
- f. Masyarakat yang berdomisili di daerah rawan bencana

- g. Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan
- h. Relawan
- i. Pramuka
- j. PMI
- k. PDAM
- l. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)
- m. Dinas Kebakaran
- n. Satpol PP Kab/Kota Se Jateng

C. CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN PB

1. Realisasi Fisik dan Keuangan

Capaian realisasi fisik kegiatan BPBD Prov Jateng TA 2018 sebesar 97,65% (Rp. 28.901.112.500,-) sedangkan realisasi keuangan sebesar 86,95% (Rp. 25,745,104,900,-) dengan rincian, sbb.

Tabel 15
Realisasi Keuangan APBD TA 2018

No	Belanja	Anggaran	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
a	Belanja Tidak Langsung	7.810.538.000	7.439.788.771	95.25	370.749.229
b	Belanja Langsung	29.608.000.000	25.745.104.900	86.95	3.862.895.100
c	Jumlah	37.418.538.000	33.184.893.671	88.68	4.233.644.329

Belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sejumlah 48 orang pegawai. Realisasi keuangan terserap sebesar **Rp. 7.439.788.771,- (95,25%)**. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp. 370.749.229,- (4,75%)**. Efisiensi belanja dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan belanja sesuai dengan pegawai di BPBD Prov Jateng.

Alokasi anggaran belanja langsung untuk 8 (delapan) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan **Rp. 29.608.000.000,-** secara fisik tercapai **94,61 %**, dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 25.745.104.900,- (97,61%)**. Capaian realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan, yaitu pengadaan kendaraan dinas berupa 1 (satu) unit truk toilet. Hal ini disebabkan :

- proses pengadaan truck toilet melalui e-purchasing/e- katalog (LKPP) hanya terdapat 1 (satu) penyedia dan penyedia tersebut tidak sanggup untuk memenuhi barang pesanan s.d 31 Desember 2018.
- BPBD Prov Jawa Tengah telah berkonsultasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk menemukan solusi, dan disarankan pengadaan

melalui lelang cepat. Namun demikian, masih terdapat hambatan lain, yaitu :

- 1) proses lelang cepat belum dapat dilakukan sepenuhnya di ULP Prov Jateng karena system yang digunakan di ULP Prov Jawa Tengah belum siap (lelang cepat hanya digunakan pada SPSE versi terbaru/Versi 4, sedangkan SPSE Prov Jawa tengah masih versi 3).
- 2) Waktu yang diperlukan untuk lelang cepat adalah 3-7 hari untuk memperoleh pemenang/penyedia barang/jasa, namun untuk pengerjaan barang pesanan dimaksud, penyedia memerlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang artinya akan melebihi batas akhir tahun anggaran 31 Desember 2018
- 3) Sesuai dengan ekatalog bahwa hanya terdapat 1 (satu) penyedia barang/jasa, maka ketika lelang cepat dilaksanakan dan memperoleh pemenang, dikhawatirkan produk tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena penyedia yang terpilih akan mencari produk/unit truck ke penyedia tunggal sesuai di ekatalog sehingga langkah ini tidak jadi dilaksanakan.
- 4) Kondisi saat ini, BPBD Prov Jateng masih mempunyai 1 unit truck toilet yang masih operasional dengan berbagai keterbatasan, sehingga meskipun kondisinya terbatas maka karena tidak ada sumberdaya pendukung lain maka kendaraan tersebut tetap dioptimalkan untuk pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan kendaraan truck toilet TA 2018 tidak jadi dilaksanakan. Kegagalan pelaksanaan kegiatan telah disampaikan kepada Ketua TAPD dan untuk memenuhi kendaraan dimaksud, BPBD Prov Jawa Tengah meminta untuk dialokasikan kembali pada APBD TA 2019.

Efisiensi anggaran belanja langsung kegiatan antara lain terdapat pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, honorarium narasumber/instruktur, belanja makan dan minum rapat,

dan sewa ruang rapat/pertemuan. Efisiensi belanja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan
- b. Optimalisasi sumberdaya sehingga dapat mencapai target fisik dengan penghematan dukungan sumberdaya keuangan.

Realisasi keuangan pada belanja program/kegiatan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 16
Realisasi Keuangan Kegiatan BPBD TA 2018

No	Realisasi Capaian (%)	Jumlah		Ket
1	2	3		4
1	95.01 – 100	26	Kegiatan	39.39 %
2	90.01 – 95	8	Kegiatan	12.12 %
3	00.00 < 90	32	Kegiatan	48.49 %
	TOTAL	66	Kegiatan	100

Mendasarkan capaian/realisasi keuangan kegiatan pada tabel tersebut, terdapat 32 (tiga puluh dua) kegiatan dengan serapan kurang dari 90%, dan serapan terendah adalah kegiatan Kegiatan Pembelajaran wawasan kebencanaan. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk uji kompetensi para pemangku kepentingan PB se Jawa Tengah baik dari unsur BPBD maupun relawan yang terlibat dalam PB. Namun dari target 50 orang hanya 10 orang yang dinyatakan lulus sehingga tingkat penyerapannya kurang dari target. Penyerapan anggaran pada kegiatan ini kurang optimal pada belanja honorarium asesor/fasilitator sertifikasi /uji kompetensi.

Penyelenggaraan program kegiatan penanggulangan bencana di Jawa Tengah telah dititikberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana. Dalam konteks penanganan bencana sejak dini (pra bencana), paradigma pengurangan risiko bencana menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan PB. Risiko suatu bencana ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh sebab itu program dan kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana

dilaksanakan dengan strategi yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

a. Mengurangi ancaman/bahaya

Ancaman merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana berupa kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Kegiatan ini dilakukan antara lain melalui identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana. Penyusunan Peta risiko bencana dilakukan untuk jenis bencana kekeringan di kabupaten, identifikasi daerah rawan bencana.

b. Mengurangi kerentanan

Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana dilakukan dengan membentuk desa siaga bencana, pengembangan budaya sadar bencana, pemantauan dan pelaporan kebencanaan, simulasi dan gladi bencana.

c. Meningkatkan/Penguatan Kapasitas

Suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas akan menurunkan tingkat risiko bencana. Termasuk kapasitas adalah dengan adanya system peringatan dini, kelembagaan BPBD, kelompok relawan, dll.

Program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah tahun 2018 digunakan untuk mencakup penanggulangan bencana baik pra, saat dan pasca bencana. Program dan kegiatan kebencanaan difokuskan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan BPBD Prov Jateng dilaksanakan untuk melaksanakan visi dan misi BPBD Prov Jawa Tengah serta mendukung capaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah 2013 - 2018. Program prioritas bidang penanggulangan bencana yang dicapai tahun 2018 adalah sbb:

Tabel 17
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	4
1	Jumlah Desa Tangguh Bencana	8 desa
2	Jumlah Unit EWS Terpasang	8 unit
3	Jumlah Rambu Jalur Evakuasi Terpasang	150 unit
4	Jumlah Peserta Bintek SAR Dan Latihan Gabungan	5.000 orang
5	Jumlah Paket Logistik Untuk Masyarakat Terdampak Bencana	1.900 paket
6	Jumlah Tangki Bantuan Air Bersih	1.216 tanki

Tabel 18
Capaian RPJMD

URUSAN	PROGRAM	Indikator	Target RPJMD	Capaian
		Kinerja Program	2013 - 2018	s.d 2018
1	2	3	4	5
Sosial	Penyelenggaraan PB	Kabupaten / Kota memiliki Sarpras PB (35 Kab/Kota)	100%	100 %
		Desa Tangguh bencana	68	68
Perhubungan	Pos, Tele-komunikasi dan SAR	Terlaksananya fasilitasi Pengembangan pelayanan Pos, Telekomunikasi dan SAR	100%	100 %
Perencanaan pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	10 dok	10 dok

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahun anggaran 2018 melaksanakan 1 (satu) program yaitu program penyelenggaraan PB dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 9.965.000.000,-. Penyelenggaraan PB pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan upaya pada pra bencana, yang terdiri dari situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana telah dilakukan oleh BPBD Prov Jawa Tengah. Sasaran utama dari kegiatan dibidang penanggulangan bencana, antara lain adalah Identifikasi dan informasi potensi bahaya/

ancaman bencana diwujudkan dalam bentuk dokumen dan peta risiko bencana serta mempersiapkan masyarakat agar waspada dan siaga menghadapi ancaman bencana di sekitar tempat tinggal. Data dan informasi bencana merupakan dokumen awal dalam upaya melakukan pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat baik. Sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan merangkul para pemangku kepentingan antara lain masyarakat, dunia usaha. Tahapan dan proses pelaksanaan kegiatan disusun secara runtut dan sistematis, antara lain melalui identifikasi, sosialisasi daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur serta upaya merangkul sektor non pemerintah (dunia usaha) untuk ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah melalui simulasi, gladi dan pembentukan desa tangguh bencana. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 2 (dua) seksi yaitu seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan, sebagai berikut

a. Seksi Pencegahan

1) Penyusunan Peta Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

a) Gambaran kegiatan

Kebijakan pengurangan risiko bencana membutuhkan kajian risiko terhadap bencana-bencana yang berpotensi terjadi di suatu daerah. Tanpa adanya kajian, besar kemungkinan kebijakan yang diterapkan tidak efektif. Kajian risiko bencana disusun berdasarkan data akurat sesuai dengan pengetahuan ilmiah, sejarah, maupun pengetahuan lokal. Pengkajian risiko bencana meliputi: pengkajian tingkat ancaman; pengkajian tingkat kerentanan; pengkajian tingkat kapasitas; pengkajian tingkat risiko bencana; 5). kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana. Mengacu pada hal-tersebut di atas pada Tahun 2018 ini BPBD Provinsi Jawa Tengah menyusun Peta Risiko bencana Kekeringan secara

bertahap dan berkelanjutan untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan diagendakan akan selesai pada Tahun 2019. Hasil-hasil kajian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan kebijakan bidang penanggulangan bencana

b) Tujuan

Membantu para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait baik Provinsi dan Kab/Kota dalam pengambilan suatu kebijakan dalam penanggulangan bencana dan meningkatkan kemampuan manajemen dalam pemetaan dan kajian risiko bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan.

Menyusun Peta Risiko Bencana Kekeringan Jawa Tengah Tahun 2018 di 4 (empat) kabupaten/kota terpilih, yaitu:

- Peta risiko Bencana Kekeringan Kab Batang;
- Peta risiko Bencana Kekeringan Kota Pekalongan;
- Peta risiko Bencana Kekeringan Kota Tegal;
- Peta risiko Bencana Kekeringan Kab Sragen;

c) Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan peta risiko bencana dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu Sosialisasi, FGD (I,II), pengumpulan, pengolahan data, pembuatan peta, ekspose hasil dan hasil penyusunan penyusunan peta risiko bencana kekeringan. Kegiatan Sosialisasi Peta Risiko dilaksanakan di Kota Salatiga. Peserta sosialisasi berasal dari 4 kabupaten/Kota terpilih, yang meliputi unsur BPBD Kab/Kota (untuk Kota Salatiga dari Satpol PP Kota Salatiga), Bappeda Kab/Kota, Dinas PU (SDA/ESDM) Kab/Kota, Dinas Pertanian Kab/Kota, PDAM Kab/Kota.

Kegiatan Sosialisasi Peta Risiko menghadirkan Narasumber dengan Materi sebagai berikut :

- BMKG Jateng, dengan materi Evaluasi Musim Hujan 2017 dan Prakiraan Musim Kemarau 2018.
- UPN Veteran Yogyakarta dengan materi Konsep Penyusunan Peta Risiko Bencana Kekeringan.

Sosialiasi ini menyepakati bahwa tentang pentingnya penyusunan daerah risiko bencana kekeringan di Jawa Tengah dan masing-masing pemangku kepentingan akan bekerjasama untuk berbagi data dan informasi terkait potensi, ancaman bencana kekeringan di wilayahnya masing-masing.

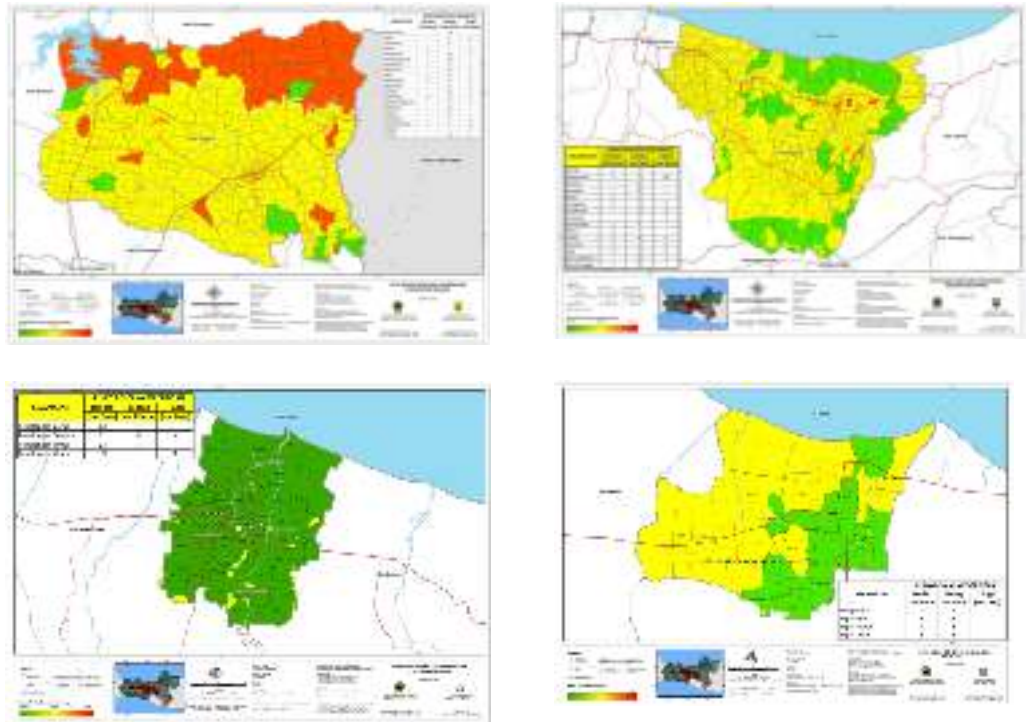
Kegiatan focus group discussion (FGD) dilaksanakan 2 (dua) kali untuk mendalami kegiatan pengurangan risiko bencana kekeringan yang selama ini dilakukan pemangku kepentingan.

- FGD I; Dilaksanakan di Kebumen, pada tanggal 22 Mei 2018, dengan peserta para pemangku kepentingan di Kota Pekalongan yang meliputi BPBD, Bappeda, DPU (SDA/ESDM), Dinas Pertanian dan PDAM serta BPBD Kota Pekalongan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan FGD.
- FGD II Dilaksanakan di Banjarnegara pada tanggal 24 Mei 2018 dengan peserta para pemangku kepentingan di Kabupaten Semarang. Dengan peserta sosialisasi sebanyak 30 orang peserta dari OPD dilingkungan Kabupaten Batang dan Kota Tegal yang terdiri : BPBD, Bappeda, DPU (SDA/ESDM), Dinas Pertanian dan PDAM serta BPBD Kota Pekalongan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan FGD.

d) Hasil

Peta Risiko Bencana Kekeringan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kabupaten Sragen.

Sebagai ilustrasi peta risiko bencana yang sudah dibuat dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3 Hasil Peta Risiko Bencana Kekeringan 2018

e) Foto dokumentasi



Sosialisasi Peta Risiko



FGD I



FGD



Ekspose/Uji Publik

Gambar 4 Penyusunan Peta Risiko Bencana Kekeringan

2) Gladi Manajemen Bencana

a) Gambaran kegiatan

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 membawa 3 (tiga) perubahan mendasar dalam pergeseran paradigma (Pandangan) dan fokus perhatian.

- Dari tanggap darurat ke pengurangan risiko bencana; (reaktif ke preventif);
- Dari kemurahan hati sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah, ke perlindungan, dan keselamatan adalah hak asasi rakyat;
- Kebencanaan bukan merupakan hanya tanggung jawab pemerintah, sekarang menjadi urusan bersama, Pemerintah, Masyarakat dan Pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menghadapi ancaman Gempa Bumi dan Tsunami tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama di 4 (empat) Kabupaten yang berada di pesisir selatan Jawa Tengah menyusun dokumen rencana kontinjensi bencana tsunami dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten masing-masing bersama pemangku kepentingan yang lain untuk menyelenggarakan kegiatan saat pra bencana maupun penanganan darurat bencana. Untuk mendapatkan dokumen yang baik dan siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana, maka dokumen rencana tersebut perlu diuji cobakan melalui gladi ruang maupun gladi lapangan. Melalui pelaksanaan gladi diharapkan mendapatkan masukan dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan hasil penyusunan rencana kontinjensi bencana tsunami yang sudah disusun bersama.

b) Tujuan

- Menguji cobakan dokumen rencana kontinjensi bencana tsunami yang telah disusun oleh 4 (empat) Kabupaten yang berpotensi terjadi bencana tsunami yaitu ; Cilacap, Kebumen, Wonogiri dan

Purworejo serta Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah;

- Mengevaluasi dan mendapatkan masukan dokumen renkon yang sudah ada guna penyempurnaan dokumen yang lebih baik dan siap digunakan;
- Sebagai pelatihan dan sosialisasi kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen rencana kontijensi bencana tsunami baik tingkat kabupaten maupun provinsi;
- Identifikasi kesenjangan prosedural dan kebijakan;
- Penegasan peran dan tanggungjawab
- Identifikasi masalah luar biasa dan solusinya
- Identifikasi kebutuhan/kekurangan sumber daya
- Mengevaluasi efektifitas pelatihan dan evaluasi kebutuhan pelatihan
- Meningkatkan kesiapan respon

c) Pelaksanaan

- Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 bertempat di Hotel Mexolie, Kebumen.
- Kegiatan Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Bencana Tsunami dilaksanakan 11-12 April 2018 bertempat di Hotel Sanjaya Inn Purworejo.
- Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Cilacap dilaksanakan pada tanggal 19-20 April 2018 bertempat di Fave Cilacap, Jl. Budi Utomo No. 38 Cilacap.
- Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada tanggal 17-18 April 2018 bertempat di Hotel Mexolie Kebumen, Jl. Merak II No.8 Panjer.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Tsunami untuk Kab. Wonogiri dilaksanakan

pada tanggal 2 Oktober 2018 bertempat di Kantor BPBD Kab. Wonogiri, Jl. Jendral Sudirman No. 503 Wonogiri.

- Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Renkon Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 29-30 Oktober 2018 bertempat di Hotel Aston Imperium Purwokerto Jl. Observe Isdiman No. 33 Glempang Purwokerto.
- *Initial Planning Conference* (IPC) dilaksanakan pada tanggal 17 November 2018 bertempat di Swiss Bell Inn, Sari Petojo Solo.
- *Tabletop Exercise Rencana Kontingensi* (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 bertempat di Hotel Mexolie Jl. Merak II Kebumen.
- Kegiatan *Tabletop Exercise* (TTX) Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018 bertempat di Hotel Mexolie Jl. Merak II Kebumen.
- Finalisasi Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 BPBD Provinsi Jawa Tengah, Jln Imam Bonjol No. 1 F Semarang.

d) Hasil

- Meningkatnya Kapasitas, Kesadaran, Kepekaan, Aparat dan Masyarakat terhadap meningkatnya ancaman Bencana di wilayahnya yang rawan bencana tsunami yaitu; Kab. Cilacap, Kebumen, Wonogiri dan Perworejo;
- Tersedianya Masyarakat dan aparat pemerintah yang terlatih untuk melakukan Pengurangan Risiko Bencana serta koordinasi untuk menghadapi ancaman dan Risiko bencana dengan pihak terkait bencana di wilayahnya dan Terlaksananya Gladi Manajemen Bencana.

e) Foto dokumentasi



Gambar 5 Gladi Manajemen Bencana

3) Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

a) Gambaran kegiatan

Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematis membutuhkan pemahaman dan komitmen bersama baik Aparatur, Masyarakat dan Badan Usaha. Walaupun tidak dapat diprediksi, namun ada pemahaman pembelajaran yang dapat dipetik, yaitu bahwa bencana selalu menimbulkan risiko kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Seperti contoh, bencana banjir yang melanda suatu wilayah, potensi kerusakan yang ditimbulkannya antara lain adalah lingkungan menjadi tidak sehat dan rawan terjangkit penyakit, lahan-lahan pertanian akan terendam air sehingga jelas merugikan kaum petani dan mungkin dapat menyebabkan hilangnya sumber penghidupan masyarakat. Selain kerusakan lingkungan, kerugian lain yang ditimbulkan oleh sebuah bencana adalah kerugian harta benda. Seperti contoh, bencana gempa bumi dengan kekuatan yang besar akan mampu meluluhlantakkan bangunan-bangunan sehingga akan banyak sekali masyarakat yang kehilangan rumah tempat tinggal sehingga harus rela menempati tenda-tenda darurat hanya untuk sekedar berteduh dan bertahan hidup sambil menanti datangnya bantuan dari pihak luar.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengenali suatu bencana dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan bencana kemudian bersama dengan masyarakat

lain merumuskan langkah-langkah penyelamatan sekaligus penanggulangan pada saat terjadi bencana. Tentu dalam merumuskan langkah-langkah tersebut tidak dapat sekedar berorientansi untuk waktu sesaat namun harus memiliki pemikiran jauh kedepan atau jangka panjang, hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah dokumen perencanaan yang strategis untuk pengurangan risiko bencana pada satu daerah.

b) Tujuan

Untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c) Pelaksanaan

Tabel 19
Pelaksanaan Kegiatan Idensos Tahun 2018

No	Kab/Kota	Kali	Peserta
1	2	3	4
1	Kab Pekalongan	4	420
2	Kab Banjarnegara	2	210
3	Kab Banyumas	1	105
4	Kab Batang	4	420
5	Kab Brebes	1	105
6	Kab Cilacap	3	315
7	Kab Demak	5	525
8	Kab Grobogan	1	105
9	Kab Karanganyar	4	420
10	Kab Klaten	6	630
11	Kab Magelang	6	630
12	Kab Pati	3	315
13	Kab Pemalang	3	315
14	Kab Purbalingga	6	630
15	Kab Rembang	6	630
16	Kab Semarang	2	210
17	Kab Sragen	2	210
18	Kab Sukoharjo	5	525
19	Kab Tegal	2	210
20	Kab Temanggung	1	105

No	Kab/Kota	Kali	Peserta
1	2	3	4
21	Kab Wonogiri	11	1,155
22	Kab Wonosobo	3	315
23	Kota Pekalongan	1	105
24	Kota Semarang	23	2,415
25	Kota Surakarta	2	210
26	Kota Tegal	1	105
TOTAL		111	11,344

- Peserta Kegiatan Idensos DRB 26 Kabupaten/Kota di Jateng
Terdiri sejumlah 11.340 orang terbagi di 26 Kabupaten/Kota yang tinggal di Daerah Rawan Bencana, terdiri dari unsur Forkompinca, Aparatur Desa/Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Masyarakat, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Unsur Perempuan dan Penyandang Disabilitas.
- Materi kegiatan Idensos DRB antara lain, yaitu:
 - Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah;
 - Kebijakan Anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah masing-masing;
 - Peran BPBD Kab/Kota dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah masing-masing;
 - Peran Masyarakat dalam Penanganan Bencana;
 - Peran Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana.
 - Narasumber atau Pemateri :
 - DPRD Provinsi Jawa Tengah;
 - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah;
 - DPRD Kab/Kota se-Jateng;
 - Kepala OPD/Instansi Terkait;
 - Akademisi;
 - Tokoh Masyarakat;
 - Penggiat Kebencanaan;

- Dunia Usaha;
- Moderator Kegiatan Idensos DRB adalah dari Akademisi, Kelompok masyarakat Profesional dan Ahli (Praktisi).

d) Hasil

- Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (Idensos DRB) Tahun 2018 telah memfasilitasi 11.340 orang di 26 Kabupaten/kota, yang tinggal di daerah rawan bencana terdiri dari unsur Forkompinca, Aparatur Desa/Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Masyarakat, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Unsur Perempuan dan Penyandang Disabilitas.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan aparat pemerintah tentang kondisi kerawanan bencana di lingkungannya;
- Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di 26 Kabupaten/Kota, 108 titik Kecamatan ($\pm$ 324 Desa);
- Terlaksananya upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- Terwujudnya sikap kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, lembaga usaha serta aparat pemerintah terhadap ancaman bencana yang mengintai;
- Melalui kegiatan sosialisasi ini warga masyarakat tetap hidup nyaman, aman, dan selamat dari ancaman bencana (Living in Harmony with Disaster).

e) Foto dokumentasi



Gambar 6 Dokumentasi Idensos tahun 2018

4) Penyusunan Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*)

a) Gambaran kegiatan

Karakteristik fisik Provinsi Jawa Tengah mempunyai bentuk bervariasi yang tidak lepas dari proses pembentukannya. Dampak terjadinya tumbukan lempeng, di Provinsi Jawa Tengah terdapat busur gunung berapi yang tumbuh pada zona lemah sehingga di atasnya terdapat beberapa gunung berapi.

Dampak dari tumbukan lempeng tektonik adalah terjadinya pengangkatan dan pelipatan lapisan geologi pembentuk pulau sehingga membentuk geomorfologi yang bervariasi seperti dataran landai, perbukitan dan dataran tinggi. Kondisi geologi yang demikian menjadikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi ancaman bencana. Gempa bumi di Klaten, tsunami di pantai selatan Jawa, erupsi gunung berapi Merapi dan tanah longsor di Banjarnegara merupakan sebagian bukti kebencanaan yang pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang berdekatan dengan zona tumbukan lempeng termasuk daerah yang rentan

terhadap gempa tektonik. Beberapa kejadian gempa dengan magnitude lebih dari skala 5 SR dalam kurun waktu 25 tahun terakhir telah mengguncang di Jawa Tengah, antara lain:

Tabel 20
Beberapa Kejadian Bencana Gempa Bumi
di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kejadian Gempa	Pusat Gempa	Kekuatan	Korban		Kerugian		Ket
				MD	Luka-luka	Rumah Hancur	Rumah Rusak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10 Juni 1867	-	-	5	-	372	-	Meruntuhkan Taman Sari, Tugu Keraton dan Gedung Agung
2	23 Juli 1943	8,60 LS – 109,90 BT	-	213	2.096	2.800	-	Getaran terasa dari Garut s.d Surakarta
3	14 Maret 1981	7,20°LS - 09,30°BT	6 SR					kedalaman 33 km
4	25 Mei 2001	8,620LS/110,110BT	6,2 SR					
5	19 Agustus 2004	9,220-109,580BT	6,3 SR					kedalaman 55 km
6	19 Juli 2005		5,5 SR					kedalaman 33 km
7	27 Mei 2006	8,0070 LS – 110,280 BT	5,9 SR	1.059	> 1900	99.730	104.111	Menyebabkan tsunami
8	18 April 2018	7.21°S 109.65°E	4.4 SR	2	21		316	Gempa bumi Banjarnegara 2018

Sumber: Bappenas

b) Tujuan

Penyusunan dokumen rencana kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penanganan darurat bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien terutama sebagai dasar mobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stakeholder) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.
2. Sebagai salah satu rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan penguatan kapasitas kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

c) Pelaksanaan

- Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah.

Sosialisasi Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada hari senin, 26 Februari 2018 bertempat di Hotel Mexolie, Kebumen.

Dengan sekitar ± 97 orang peserta dari OPD/dunia Usaha Provinsi dan Kabupaten : Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri

Narasumber dengan Materi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Plt. Gubernur Jawa Tengah dengan materi “Tahapan Proses Penyusunan Renkon Tsunami Provinsi Jawa Tengah 2018”
- 2) Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara, dengan materi “Potensi Gempabumi Dan Tsunami Selatan Jawa”

- Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Purworejo.

Kegiatan diawali dengan Rapat Koordinasi Tim Teknis Penyusun Renkon Tsunami & pelaksana TTX 3 Kabupaten (Kab. Purworejo, Kebumen, Cilacap). Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 10 April 2018 di Hotel Sanjaya Inn Purworejo.

- Gladi ruang/TTX Renkon Tsunami.

Hasil dari review awal dokumen Renkon Tsunami Kabupaten Purworejo kemudian di gladikan ruangan. Pelaksanaan Gladi

ruang/TTX Renkon Tsunami dilaksanakan pada tanggal 11-12 April 2018 bertempat di Hotel Sanjaya Inn Purworejo.

Peserta kegiatan Gladi ruang/TTX terdiri :

- 16 OPD/Instansi Pemkab Purworejo;
- 5 BUMN/BUMD;
- 12 Organisasi Penyitas Kebencanaan;
- 2 Orang penyandang disabilitas Purworejo;
- 10 Orang dari BPBD Kab. Purworejo

Tim Pelaksana TTX Renkon Tsunami :

- 2 Orang sebagai AAR (After Action Review);
- 1 Orang Notulen;
- 1 Orang Time Keeper;
- 5 Orang Tim Observer;
- 3 Orang sebagai Skenario Manajer;
- 1 Orang Senior Controller.

Metode diskusi dengan para peserta yang digunakan adalah FGD (Focus Discussion Group), dengan dipandu Fasilitator.

- Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Kebumen.

Pelaksanaan Gladi ruang/TTX Renkon Tsunami Kebumen dilaksanakan pada tanggal 17-18 April 2018 di Hotel Mexolie Kebumen, Jl. Merak II No.8 Panjer.

Peserta kegiatan Glad ruang/TTX terdiri :

- 18 OPD/Instansi Pemkab Kebumen;
- 6 BUMN/BUMD;
- 11 Organisasi Penyitas Kebencanaan;
- 1 Orang penyandang disabilitas Kebumen;
- 8 Orang dari BPBD Kab. Kebumen;
- 8 Kecamatan Terdampak.

Tim Pelaksana TTX Renkon Tsunami di Kebumen :

- 2 Orang sebagai AAR (After Action Review);

- 1 Orang Notulen;
- 1 Orang Time Keeper;
- 5 Orang Tim Observer;
- 3 Orang sebagai Skenario Manajer;
- 1 Orang Senior Controller.

Metode diskusi dengan para peserta yang digunakan adalah FGD (*Focus Discussion Group*), dengan dipandu 2 Fasilitator.

- Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Cilacap.

Pelaksanaan Gladi ruang/TTX Renkon Tsunami Cilacap dilaksanakan pada tanggal 19-20 April 2018 di Fave Cilacap, Jl. Budi Utomo No. 38 Cilacap.

Peserta kegiatan Glad ruang/TTX terdiri :

- 19 OPD/Instansi Pemkab Cilacap;
- 5 BUMN/BUMD;
- 6 Organisasi Penyitas Kebencanaan;
- 2 Orang penyandang disabilitas Kebumen;
- 8 Orang dari BPBD Kab. Cilacap;
- 10 Kecamatan Terdampak

Tim Pelaksana TTX Renkon Tsunami di Kebumen :

- 1 Orang sebagai AAR (After Action Review);
- 1 Orang Notulen;
- 1 Orang Time Keeper;
- 5 Orang Tim Observer;
- 2 Orang sebagai Skenario Manajer;
- 1 Orang Senior Controller.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Tsunami untuk Kab. Wonogiri.

Rapat koordinasi dilaksanakan karena Kabupaten Wonogiri belum memiliki rencana kontijensi bencana tsunami. Namun demikian, karena beberapa desa di Kabupaten Wonogiri

memiliki ancaman bencana tsunami, maka Renkon bencana tsunami provinsi Jawa Tengah tetap mengakomodir dalam penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Tsunami. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018 bertempat di Kantor BPBD Kab. Wonogiri, Jl. Jendral Sudirman No. 503 Wonogiri.

- Finalisasi Penyusunan Rencana Kontijensi Tingkat Kabupaten dan Penyusunan Draft Renkon Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah.

Finalisasi draft Rencana Kontijensi dilaksanakan dalam rangka Menyepakati Skenario Dampak, Kebijakan dan Strategi, Menepakati Struktur Komando serta Penempatan TES, TEA. Kegiatan ini dilaksanakan dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2018 di Hotel Dafam, Jl Imam Bonjol Semarang.

- Penyusunan Draft Renkon Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 29-30 Oktober 2018 di Hotel Aston Imperium Purwokerto Jl. Observe Isdiman No. 33 Glemgang Purwokerto.

Kegiatan ini diikuti sekitar $\pm$ 97 orang peserta dari OPD/dunia Usaha Provinsi dan Kabupaten : Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri

Narasumber dalam kegiatan terdiri dari :

- Sekda Prov. Jawa Tengah
- Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB dengan tema “Kebijakan Nasional Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tsunami”
- Kepala Stasiun Geofisika Klas III Banjarnegara dengan tema “Potensi Ancaman Tsunami Selatan Jawa

- Final Planning Conference (FPC)
Final Planning Conference (FPC) dilaksanakan pada tanggal 20 November 2018 di Mexolie Hotel Kebumen, Jln. Merak II No. 8 Panjer Kab. Kebumen.
- Tabletop Exercise Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
Kegiatan Academic Session Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 di Hotel Mexolie Jl. Merak II Kebumen.
- Finalisasi Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
Finalisasi Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal Desember 2018 di Ruang Rapat Lantai 4 BPBD Provinsi Jawa Tengah, Jln Imam Bonjol No. 1 F Semarang.

d) Hasil

- Sosialisasi definisi, prinsip, proses penyusunan rencana kontinjensi.
- Sosialisasi potensi Tsunami oleh Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Banjarnegara.
- Mengidentifikasi para pemangku kepentingan, potensi sumberdaya dan inventarisasi kebutuhan data.
- Hasil yang dicapai adalah Gladi ruang/TTX dapat berjalan dengan lancar, review dan kesepakatan dokumen renkon Purworejo yang masih dalam tahap proses penyusunan $\pm 75 \%$.

e) Foto dokumentasi



Sosialisasi Rencana Kontingensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 di Kebumen, 26 Februari 2018



Gladi Ruang (Tabletop Exercise/TTX) Rencana Kontijensi Kab Purworejo, 11-12 April 2018



Gladi Ruang (Tabletop Exercise/TTX) RenKon Kab Kebumen, 17-18 April 2018



Tabletop Exercise/TTX RenKon Kab Cilacap, 19-20 April 2018



Rakori Rencana Kontijensi Kab Wonogiri, 2 Oktober 2018



Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Renkon Bencana Tsunami, Banyumas, 29-30 Oktober 2018



Pelaksanaan Initial Planning Conference (IPC)) Penyusunan Renkon Bencana Tsunami, Swiss Bell Inn Solo, 17 Nov 2018



Final Planning Conference (FPC))
Penyusunan Renkon Bencana
Tsunami, Kebumen, 18 Nov 2018



Academic Session Penyusunan
Renkon Bencana Tsunami,
Kebumen, 21 November 2018



Tabletop Exercise (TTX) Renkon
Bencana Tsunami, Kebumen, 22
November 2018



Finalisasi Penyusunan Renkon
Bencana Tsunami, Semarang, 3
Desember 2018

Gambar 7 Penyusunan Renkon Bencana

5) Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

a) Gambaran kegiatan

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah salah satu system pendekatan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana. Tujuan utamanya untuk mengurangi risiko fatal korban manusia, sosial, ekonomi dan juga lingkungan alam serta penyebab pemicu bencana. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah suatu proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanannya dan meningkatkan kemampuannya. PRBBK merupakan proses internalisasi PRB di tingkat komunitas rentan yang dirancang secara partisipatoris dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya lokal,

dilakukan untuk membangun pondasi rasa aman yang segala kegiatannya mendorong untuk ketercukupan kebutuhan dasar serta membangun berbagai perangkat dan kegiatan untuk mengurangi risiko bencana.

Komunitas adalah kelompok masyarakat yang mempunyai ikatan sosial dan solidaritas yang kuat, karena mempunyai satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama, misalnya tinggal dilingkungan yang sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena bahaya, yang pada akhirnya mempunyai kekawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana.

PRBBK Inklusif Disabilitas merupakan kegiatan pemberian prioritas untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas pada semua fase penanggulangan bencana, yaitu pra, saat tanggap darurat dan pasca bencana atau pemulihan. PRBBK Inklusif Disabilitas tidak hanya sebagai metode, namun sebagai perspektif dalam setiap kegiatan yang berbasis pada pelayanan penyandang disabilitas secara inklusif. Dan dengan semakin berkembangnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko bencana pada penyandang disabilitas di masyarakat, maka dilaksanakan kegiatan untuk memperkuat ketangguhan dan mengembangkan budaya keselamatan dalam pengurangan bencana melalui kegiatan PRBBK maka harapan untuk pelayanan inklusif disabilitas akan tercapai.

Hal inilah yang mendasari pentingnya pembelajaran PRBBK khususnya bagi masyarakat komunitas penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan

berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarekan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti mengakses layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal penanggulangan bencana. Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB nomor 14 Tahun 2014, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatas fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Bahkan di pasal 3 dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi, penyiksaan, eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan prinsip persamaan hak, termasuk memperoleh pelayanan sosial dalam rangka kemandirian. Harapan kedepannya masyarakat penyandang disabilitas yang tinggal di daerah rawan bencana akan merasa pentingnya budaya sadar bencana, sehingga akan tercipta perubahan perilaku dalam menghadapi bencana terlebih pada kondisi kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam pelayanan penyandang disabilitas yang inklusif.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun Anggaran 2017 ini melaksanakan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Inklusif Disabilitas di wilayah Solo Raya, sehingga diharapkan dalam kegiatan ini akan meningkatkan kapasitas untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat penyandang disabilitas yang inklusif dalam

menghadapi bencana terlebih yang tinggal di daerah rawan bencana.

b) Tujuan

- Meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam mengenali dan memahami potensi di wilayah mereka, ancaman bencana yang ada, kerentanan dan kapasitas serta menganalisis risiko bencana yang dihadapi;
- Meningkatkan dan menguatkan kapasitas lembaga organisasi penyandang disabilitas dalam pengelolaan data terpilah untuk lokasi rawan bencana, kajian kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi pada saat pra bencana, penanganan darurat dan pasca bencana.
- Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi penyandang disabilitas yang inklusif agar mampu terlibat secara aktif dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana sehingga dapat mengurangi kerentanan, meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penyelamatan.

c) Pelaksanaan

- PRBBK Inklusif Disabilitas, dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 di Hotel Sahid Mandarin Kota Pekalongan.

Peserta kegiatan sebanyak Sejumlah 100 orang Peserta dari 4 kabupaten, yaitu: Kab Pekalongan, Kab Pemalang, Kab Batang dan Kota Pekalongan. Masing-masing kab/kota terdiri dari: 2 orang Pejabat/Staf BPBD Kab/Kota, 5 orang keluarga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), 5 orang Difable Rungu Wicara (Tuli), 6 orang Difable Netra/Pendamping, 6 orang Difable Fisik (Daksa)

Narasumber dengan Materi kegiatan sebagai berikut :

- Hak, Kewajiban dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (LIDi, Suhardi Wiyanto);

- Best Practice Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Penyandang Disabilitas Kab Klaten (BPBD Kab. Klaten, Puguh Hargo Wibowo);
- Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi Penyandang Disabilitas (PMI Kota Pekalongan, Agit Anggoro).
- Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Penyandang Disabilitas di Kab. Karanganyar.

Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) Tahun 2018 yang kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 di Hotel Syariah, Ruang Ar Rayan Jl. Adi Sucipto, Solo.

Peserta kegiatan sebanyak 100 orang peserta yang terdiri dari: 1 orang pejabat/staf Bappeda Kab. Karanganyar; 6 orang pejabat/staf BPBD Kab. Karanganyar; 2 orang pejabat/staf Dinas Sosial Kab. Karanganyar; 2 orang pejabat/staf Dinas Pendidikan Kab. Karanganyar; 2 orang pejabat/staf Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar; 2 orang pejabat/staf Dinas Bapermades Kab. Karanganyar; 1 orang pejabat/staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar; 80 orang penyandang disabilitas dari Kab. Karanganyar; 2 orang dari Tim Advokasi Difabel Kab. Karanganyar; dan 2 orang pejabat/staf Palang Merah Indonesia Kab. Karanganyar.

d) Hasil

- Peserta menyadari peran penyandang disabilitas saat ini bukan merupakan obyek dalam penanggulangan bencana, namun merupakan pelaku.
- Munculnya semangat dari kabupaten lain karena sudah ada contoh kabupaten yang berhasil melaksanakan kegiatan inklusi penyandang disabilitas.
- Meningkatnya pengetahuan peserta dalam penanggulangan bencana sehingga mereka dapat mengetahui ancaman yang mereka hadapi dan dapat melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana.

- Adanya akses informasi kebutuhan yang diperlukan penyandang disabilitas baik itu dalam bidang penanggulangan bencana atau lainnya sehingga menjadi dasar dalam rencana penanggulangan bencana inklusi penyandang disabilitas.
- Petunjuk bagi penyandang disabilitas terhadap masalah yang mereka hadapi dari pembuat kebijakan di lingkungan Jawa Tengah.
- Kegiatan yang sama dan lanjutan perlu dilakukan kepada setiap penyandang disabilitas agar setiap individu tangguh terhadap bencana.
- Adanya penekanan dan dorongan pada penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas bukan obyek dalam penanggulangan bencana (PB), akan tetapi dapat menjadi subyek dalam PB dan menjadi mitra pemerintah dalam PB;
- Terbukanya akses kepada penyandang disabilitas dari berbagai keterbatasan fisik maupun orang dengan kebutuhan khusus terhadap PB;
- Terbentuknya Unit Inklusi Disabilitas (LIDi) Kab. Karanganyar Periode 2018 s/d 2023 sebagai wadah organisasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- LIDi Kab. Karanganyar dapat dijadikan akses bagi penyandang disabilitas untuk berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana (PRB).

e) Foto dokumentasi



PRBBK Inklusif Disabilitas

Gambar 8 PRBBK Inklusif Disabilitas

6) Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana (Mastana)

a) Gambaran kegiatan

Potensi bencana di Jawa Tengah yang cukup tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian yang ditimbulkan merupakan pertanda bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana. Upaya untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur.

Hal inilah yang kemudian menjadikan pertimbangan untuk mengajak, memperkuat, serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah. Penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana diwujudkan pula melalui pembentukan Masyarakat tangguh bencana (Mastana). Mendasarkan pada wilayah administratif. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) kelurahan dan 7.807 (tujuh ribu delapan ratus tujuh) desa sehingga jumlah desa/kelurahan di Jawa Tengah adalah 8.578 (delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan). Mendasarkan data jumlah tersebut dan dipadukan dengan jumlah desa/kelurahan di daerah rawan bencana Jawa Tengah (Buku DRB Jateng 2013) sangat memerlukan perhatian secara khusus dan serius.

Oleh karena itu BPBD Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya aktif melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui program pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana.

b) Tujuan

- Mendorong terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang lebih terarah, terencana, terpadu dan terkoordinasi.

- Mendorong sinergi dan integrasi seluruh program yang ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, organisasi non pemerintah dan lembaga usaha/swasta.
- Meningkatkan kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.
- Mendorong integrasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan desa.

c) Pelaksanaan

Sasaran kegiatan ini adalah Aparatur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Karang Taruna Desa, PKK Desa, Lembaga usaha desa di 8 (delapan) desa terpilih pada 6 (enam) Kabupaten di Jawa Tengah.

Tabel 21
Pelaksanaan Kegiatan Mastana Tahun 2018

NO	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1.	Mastana di Kab. Kudus	19 s/d 24 Maret	Balai Desa Menawan Kec. Gebog	50 orang
2.	Mastana di Kab. Sragen	19 s/d 24 Maret	Balai Desa Bukuran Kec. Kalijambe	50 orang
3.	Mastana di Kab. Banyumas	23 s/d 27 April 2018	Balai Desa Cihonje Kec. Gumelar	50 orang
4.	Mastana di Kab. Tegal	23 s/d 27 April 2018	Balai Desa Maribaya Kec. Kramat	50 orang
5.	Mastana di Kab. Banjarnegara	17 s/d 20 Juli 2018	Balai Desa Tlaga Kec. Punggelan	50 orang
6.	Mastana di Kab. Banjarnegara	17 s/d 20 Juli 2018	Balai Desa Mlaya Kec. Punggelan	50 orang
7.	Mastana di Kab. Pemasang	15 s/d 19 Oktober 2018	Balai Desa Bongas Kec. Watukumpul	50 orang

NO	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
8.	Mastana di Kab. Pemalang	15 s/d 19 Oktober 2018	Balai Desa Tlagasana Kec. Watukumpul	50 orang

d) Hasil

- Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana 2018 telah memfasilitasi 400 orang masyarakat di 6 Kabupaten, yang tinggal di daerah rawan bencana terdiri dari unsur Muspika, Aparatur Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Masyarakat, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Unsur Perempuan dan Penyandang Disabilitas.
- Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di 6 Kabupaten (8 Desa)
- Mendorong integrasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan desa. Serta meningkatkan kemandirian ekonomi Desa.
- Mendorong sinergi dan integrasi seluruh program yang ada di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, organisasi-organisasi non pemerintah dan lembaga usaha/swasta lainnya.

e) Foto dokumentasi



Pengembangan Mastana, 12-16 di Ds. Menawan Kec. Gebog Kab. Kudus



Mastana di Ds. Bukuran Kec. Kalijambe Kab. Sragen



Pengembangan Mastana, Mastana di Ds. Cihonje
Kec. Gumelar Kab. Banyumas



Mastana di Ds. Maribaya
Kec. Kramat Kab. Tegal



Pengembangan Mastana, Mastana di Ds. Mlaya
Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara



Mastana di Desa Tlaga
Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara



Pengembangan Mastana, Mastana di Desa Bongas
Kec. Watukumpul Kab. Pemalang



Mastana di Desa Tlagasana
Kec. Watukumpul Kab. Pemalang
Gambar 9 Pengembangan Mastana 2018

7) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung berapi

a) Gambaran kegiatan

Paska Erupsi merapi di Jawa Tengah yang melanda masyarakat di tiga wilayah Kabupaten untuk dua belas Kecamatan adalah salah satu Provinsi yang memiliki Risiko Bencana sangat tinggi dengan karakteristik bencana yang seringkali terjadi, sehingga kegiatan penguatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Kawasan Gunung Berapi Paska meletusnya gunung merapi di 3 (tiga) Kabupaten 12 (dua belas) Kecamatan di Jawa Tengah di

selenggarakan guna memberikan sosialisasi dan lokalatih kepada Masyarakat di Kawasan Merapi akibat bencana erupsi dengan harapan masyarakat di daerah/desa dapat melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mengetahui gejala/tanda adanya bencana yang akan menyimpannya.

Gunung Merapi (ketinggian puncak 2.930 mdpl, per-2010) adalah gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kawasan hutan di sekitar puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak tahun 2004.

Gunung ini sangat berbahaya karena menurut catatan modern mengalami erupsi (puncak keaktifan) setiap dua sampai lima tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman yang sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten adalah wilayah terdekat, berjarak di bawah 25 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman sampai ketinggian 1700 m dan hanya berjarak 3 sampai 4 kilometer dari puncak. Oleh karena tingkat kepentingannya ini, Merapi menjadi salah satu dari enam belas gunung api dunia yang termasuk dalam proyek Gunung Api Dekade ini (Decade Volcanoes).

Karakteristik Letusan G. Merapi berbentuk sebuah kerucut gunungapi dengan komposisi magma basaltik andesit dengan kandungan silika (SiO_2) berkisar antara 52 - 56 %. Morfologi bagian puncaknya dicirikan oleh kawah yang berbentuk tapal kuda, dimana di tengahnya tumbuh kubah lava. Letusan G. Merapi dicirikan oleh keluarnya magma ke permukaan membentuk kubah lava di tengah kawah aktif di sekitar puncak.

Munculnya lava baru biasanya disertai dengan pengrusakan lava lama yang menutup aliran sehingga terjadi guguran lava. Lava baru yang mencapai permukaan membetuk kubah yang bisa tumbuh membesar. Pertumbuhan kubah lava sebanding dengan laju aliran magma yang bervariasi hingga mencapai ratusan ribu meter kubik per hari.

Yang perlu diingat dan diketahui bahwa Letusan terkuat dan terbesar sepanjang sejarah Merapi adalah letusan pada Tahun 1006, Tahun 1872, Tahun 1995, dan Tahun 2010. (Sumber Data: Ahli Botani & Geologi Franz Wilhelm Junghuhn; BPPTKG Yogyakarta; United States Geological Survey; dan Kementerian ESDM).

Mengacu pada sejarah letusan Merapi tersebut di atas maka semua unsur baik dari kalangan aparaturnya, dunia usaha maupun masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana Merapi baik melalui bentuk pencegahan maupun kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

b) Tujuan

- memberikan sosialisasi dan lokalatih kepada Masyarakat di Kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi
- memberikan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat tetap dapat hidup aman, selamat dari ancaman bencana (*Living in Harmony with Disaster*).

c) Pelaksanaan

Kegiatan PKPBK Gunung Merapi dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018, di Gedung TEA Merapi-Merbabu, Jl. Prambanan – Manisrenggo Desa Kebondalem Lor Kec. Prambanan Kab. Klaten.

Pelaksanaannya bertempat di The Oxalis Regency Hotel Magelang, Jl. Cempaka No. 17, Kemirirejo, Kota Magelang dengan jumlah peserta Kegiatan PB Merapi :

- Kab. Magelang sejumlah 50 orang (KRB III, KRB II);

- Kab. Boyolali sejumlah 50 orang (KRB III, KRB II);
- Kab. Klaten sejumlah 50 orang (KRB III, KRB II);

Rincian peserta terdiri dari Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Relawan, Karang Taruna, Gender, dan Difable/Kaum Rentan

Materi, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Api (Merapi) adalah sebagai berikut :

- "Kondisi Terkini Status Gunung Merapi", disampaikan oleh Kepala BPPTKG Yogyakarta Dr Hanik Humaida MSc.
- "Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Gunung Merapi", oleh Dewi Sri Sayudi BPPTKG.
- "Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Merapi", disampaikan oleh pejabat BNPB sdr. Bambang Surya Putra.
- "Psikologi Masa Penanggulangan Bencana Gunung Merapi", disampaikan dari UNDIP oleh Dra. Hj. Frieda Nuzuli Ratna Hidayati, M.Psi.

d) Hasil

- Meningkatnya Kapasitas, Kesadaran, Kepekaan, Masyarakat yang tinggal di Kawasan Risiko Bencana II dan III Ancaman Erupsi Merapi.
- Tersedianya Masyarakat dan aparat pemerintah yang terlatih untuk melakukan Pengurangan Risiko Bencana serta terjalinnya koordinasi dengan pihak terkait untuk menghadapi ancaman dan Risiko bencana Merapi.
- Terciptanya kerjasama yang harmonis, dan koordinasi yang baik antar komunitas KRB III Gunung Merapi di 3 (tiga) Kabupaten, yakni Kab. Magelang, Kab. Boyolali, & Kab. Klaten.
- Terciptanya kerjasama yang harmonis, dan koordinasi yang baik antar komunitas KRB III dengan KRB II dengan konsep Desa

Paseduluran (Klaten), Sister Village (Magelang), Desa Persaudaraan (Boyolali).

- Tersedianya penyelenggaraan fasilitasi, sinergi serta integrasi program yang ada di masyarakat KRB III, KRB II Merapi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) serta meningkatkan kemandirian ekonomi Desa.
- Manfaat utama kedepan kegiatan ini adalah agar warga masyarakat tetap dapat hidup nyaman, aman, selamat dari ancaman bencana (Living in Harmony with Disaster).
- Serta Terwujudnya peran dan aktif Masyarakat dari Responsif menjadi Prefentif (Mencegah), dan Tanggap Darurat menjadi Pengurangan Risiko Bencana.
- Sebagai wujud Kewaspadaan Dini Masyarakat, adanya dukungan spirit antar masyarakat di KRB III, serta secara tidak langsung masyarakat yang tinggal di KRB III saling menjaga kekompakan, bertukar informasi, dan bersama mengelola risiko terhadap ancaman Gunung Merapi.

e) Foto dokumentasi



Gambar 10 Kegiatan Pencegahan & Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Merapi Tahun 2018

Rincian dan gambaran menyeluruh dari kegiatan pada Seksi Pencegahan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 22
Kegiatan Seksi Pencegahan 2018

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Peta Resiko Bencana Prov. Jateng			
a	Sosialisasi Peta Risiko	13 Pebruari	Kota Salatiga	30
b	FGD I	22 Mei	Kota Pekalongan	30
c	FGD II	24 Mei	Kab. Semarang	30
e	Ekspose Hasil	28 September	Kab. Semarang	30
2	Gladi Manajemen Bencana			
a	Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontingensi Tsunami	26 Februari	Hotel Mexolie, Kebumen	100
b	Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Bencana Tsunami Kabupaten Purworejo	11-12 April	Hotel Sanjaya Inn Purworejo	60
c	Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Kebumen	17-18 April	Hotel Mexolie Kebumen,	65
d	Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Cilacap	19-20 April	Fave Cilacap,	61
e	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Tsunami untuk Kab. Wonogiri	2 Oktober	Kantor BPBD Kab. Wonogiri	60
f	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Renkon Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah	29-30 Oktober	Hotel Aston Imperium Purwokerto	100
g	<i>Initial Planning Conference</i> (IPC)	17 November	Swiss Bell Inn, Sari Petojo Solo	
h	<i>Final Planning Conference</i> (FPC)	20 November	Mexolie Hotel Kebumen,	
j	<i>Tabletop Exercise</i> Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	21 November	Hotel Mexolie Jl. Merak II Kebumen	100
k	<i>Tabletop Exercise</i> (TTX)	22 November	Hotel Mexolie	100

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami		Kebumen	
	Finalisasi Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	3 Desember	BPBD Provinsi Jawa Tengah,	30
3	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana			
	Idensos di Kota Semarang	13 Maret	Kec. Genuk Kel. Bangetayu Wetan	105
	Idensos di Kota Semarang	14 Maret	Kec. Semarang Timur Kel. Kemijen	105
	Idensos di Kota Semarang	8 Mei	Kec. Candisari Kel. Tegalsari	105
	Idensos di Kota Semarang	9 Mei	Kec. Ngaliyan Kel. Wonosari	105
	Idensos di Kab. Pati	12 Mei	Kec. Pati Kel. Pati Lor	105
	Idensos di Kab. Pemalang	14 Mei	Kec. Belik Ds. Sikasur	105
	Idensos di Kota Semarang	15 Mei	Kec. Semarang Timur Kel. Kemijen	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	16 Mei	Kec. Purbalingga Kel. Purbalingga Lor	105
	Idensos di Kab. Cilacap	9 Juli	Kec. Sidareja Desa Sidareja	105
	Idensos di Kab. Cilacap	10 Juli	Kec. Cipari Desa Cipari	105
	Idensos di Kota Semarang	23 Juli	Kec. Mijen Kel. Wonolopo	105
	Idensos di Kota Semarang	24 Juli	Kec. Gayamsari Kel. Tambakrejo	105
	Idensos di Kota Semarang	26 Juli	Kec. Ngaliyan Kel. Beringin	105
	Idensos di Kota Semarang	27 Juli	Kec. Semarang Tengah Kel. Kauman	105
	Idensos di Kab. Banjarnegara	6 Agustus	Kec. Banjarmangu Ds. Kalilenjar	105
	Idensos di Kab. Demak	7 Agustus	Kec. Sayung Ds. Bedono	105
	Idensos di Kab. Banjarnegara	8 Agustus	Kec. Banjarmangu Kel. Paseh	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	11 Agustus	Kec. Rembang Ds. Makam	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	13 Agustus	Kec. Batuwarno Ds. Sumberejo	105
	Idensos di Kab. Demak	14 Agustus	Kec. Bonang Kel. Purworejo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	15 Agustus	Kec. Baturetno Ds. Watuagung	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	Idensos di Kab. Purbalingga	16 Agustus	Kec. Bojongsari Kel. Pekalongan	105
	Idensos di Kab. Brebes	24 Agustus	Kec. Jatibarang Kel. Jatibarang Lor	105
	Idensos di Kab. Rembang	24 Agustus	Kec. Rembang Kel. Leteh	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	7 September	Kec. Ngadirojo Kel. Kerjo Lor	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	10 September	Kec. Sidoharjo Ds. Mojorejo	105
	Idensos di Kab. Demak	10 September	Kec. Wedung Kel. Kedung Mutih	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	12 September	Kec. Pracimantoro Kel. Giribelah-Sambiroto	105
	Idensos di Kota Semarang	14 September	Kec. Semarang Timur Kel. Sarirejo	105
	Idensos di Kab. Magelang	14 September	Kec. Srumbung Kel. Jeruk Agung	105
	Idensos di Kab. Rembang	17 September	Kec. Rembang Kel. Leteh	105
	Idensos di Kab. Rembang	18 September	Kec. Rembang Kel. Leteh	105
	Idensos di Kab. Pemalang	19 September	Kec. Pemalang Kel. Mulyoharjo	105
	Idensos di Kab. Sragen	20 September	Kec. Masaran Ds. Jiparan	105
	Idensos di Kab. Karanganyar	21 September	Kec. Tasikmadu Ds. Pandeyan	105
	Idensos di Kota Semarang	21 September	Kec. Gunungpati Kel. Pongangan	105
	Idensos di Kab. Batang	22 September	Kec. Wonotunggal Ds. Kedungmalang	105
	Idensos di Kab. Batang	22 September	Kec. Batang Kel. Karangasem Utara	105
	Idensos di Kota Semarang	28 September	Kec. Gajah Mungkur Kel. Gajah Mungkur	105
	Idensos di Kab. Magelang	29 September	Kec. Srumbung Ds. Pucanganom	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	29 September	Kec. Polokarto Ds. Wonorejo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	29 September	Kec. Jatipurno Ds. Jatipurno	105
	Idensos di Kab. Banyumas	3 Oktober	Kec. Lumbir Ds. Lumbir	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	4 Oktober	Kec. Kismantoro Ds. Kismantoro	105
	Idensos di Kab. Temanggung	5 Oktober	Kec. Bulu Ds. Wonotirto	105
	Idensos di Kota Semarang	5 Oktober	Kec. Semarang Barat Kel.	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
			Karangayu	
	Idensos di Kab Pekalongan	6 Oktober	Kec. Kedungwuni Ds. Karangdono	105
	Idensos di Kota Pekalongan	6 Oktober	Kec. Pekalongan Barat Kel. Bendan	105
	Idensos di Kab. Demak	8 Oktober	Kec. Karangtengah Ds. Karangtowo	105
	Idensos di Kab. Magelang	10 Oktober	Kec. Dukun Ds. Sumber	105
	Idensos di Kab. Pati	12 Oktober	Kec. Tayu Kel. Tayu Kulon	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	12 Oktober	Kec. Sukoharjo Ds. Begajan	105
	Idensos di Kab. Tegal	14 Oktober	Kec. Bumijawa Kel. Cempaka	105
	Idensos di Kota Semarang	15 Oktober	Kec. Ngaliyan Kel. Mangkang Kulon	105
	Idensos di Kab. Pemalang	15 Oktober	Kec. Petarukan Kel. Serang	105
	Idensos di Kab. Magelang	15 Oktober	Kec. Kajoran Kel. Kajoran	105
	Idensos di Kota Surakarta	20 Oktober	Kec. Petarukan Kel. Pesucen	105
	Idensos di Kab. Klaten	21 Oktober	Kec. Delanggu Ds. Getak	105
	Idensos di Kab. Pati	23 Oktober	Kec. Kayen Ds. Kayen	105
	Idensos di Kab. Karanganyar	23 Oktober	Ngargoyoso	105
	Idensos di Kab. Magelang	24 Oktober	Kec. Dukun Kel. Dukun	105
	Idensos di Kab. Karanganyar	25 Oktober	Kec. Tasikmadu Ds. Papahan	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	26 Oktober	Kec. Wojolaban Kel. Bekonang	105
	Idensos di Kab. Klaten	27 Oktober	Kec. Ceper Ds. Pokak	105
	Idensos di Kab. Rembang	28 Oktober	Kec. Rembang Kel. Pandean	105
	Idensos di Kab. Wonosobo	29 Oktober		105
	Idensos di Kab. Wonogiri	10 Nopember	Kec. Purwantoro Ds. Joho	105
	Idensos di Kab. Rembang	10 Nopember	Kec. Rembang Ds. Sidowayah	105
	Idensos di Kab. Wonosobo	12 Nopember	Kec. Kretek Ds. Ngadikusuman	105
	Idensos di Kab. Grobogan	12 Nopember	Kec. Karangrayung Ds. Mangin	105
	Idensos di Kota Semarang	14 Nopember	Kec. Semarang Tengah Kel. Sekayu	105
	Idensos di Kab. Batang	15 Nopember	Kec. Sidorejo Ds. Warungasem	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	Idensos di Kab. Sukoharjo	16 Nopember	Kec. Bendosari Ds. Gabusan Jombor	105
	Idensos di Kab. Magelang	16 Nopember	Kec. Muntilan Ds. Keji	105
	Idensos di Kab. Pekalongan	19 Nopember	Kec. Kajen Ds. Linggo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	20 Nopember	Kec. Puhpelem Ds. Puhpelem	105
	Idensos di Kab. Cilacap	22 Nopember	Kec. Kesugihan Babusalam	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	22 Nopember	Kec. Mojolaban Ds. Wirun	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	24 Nopember	Kec. Rembang Ds. Bantar Barang	105
	Idensos di Kota Semarang	24 Nopember	Kec. Semarang Barat Kel. Krobokan	105
	Idensos di Kab. Demak	24 Nopember	Kec. Karangtengah Ds. Wonoagung	105
	Idensos di Tegal	24 Nopember	Kec. Bojong Ds. Tuwel	105
	Idensos di Kota Surakarta	25 Nopember	Kec. Kartasuro Kel. Pabelan UMS	105
	Idensos di Kab. Batang	26 Nopember	Kec. Tulis Ds. Cluwak	105
	Idensos di Kab. Sragen	28 Nopember	Kec. Ngrampal Ds. Kebonromo	105
	Idensos di Kab. Wonosobo	29 Nopember	Kec. Wonosobo Kel. Wonosobo Timur	105
	Idensos di Kab. Pekalongan	29 Nopember	Kec. Wonokerto Ds. Babel	105
	Idensos di Kab. Karanganyar	1 Desember	Kec. Matesih Kel. Sidodadi	105
	Idensos di Kab. Klaten	2 Desember	Kec. Trucuk Ds. Jatipuro	105
	Idensos di Kota Semarang	6 Desember	Kec. Semarang Barat Kel. Puri Anjasmoro	105
	Idensos di Kota Semarang	6 Desember	Kec. Tembalang Kel. Tandang	105
	Idensos di Kota Semarang	7 Desember	Kec. Semarang Utara Kel. Tanjung Mas	105
	Idensos di Kota Semarang	8 Desember	Kec. Candisari Kel. Candi	105
	Idensos di Kota Semarang	8 Desember	Kec. Banyumanik Kel. Tinjomoyo	105
	Idensos di Kab. Klaten	8 Desember	Kec. Kalikotes Ds. Gembengan	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	9 Desember	Kec. Kalimanah Ds. Mewek	105
	Idensos di Kab. Tegal	9 Desember	Kec. Slawi Kel. Slawi Kulon	105
	Idensos di Kab. Rembang	9 Desember	Kec. Rembang Kel. Sidowayah	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	Idensos di Kab. Semarang	10 Desember	Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	10 Desember	Kec. Girimarto Ds. Selorejo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	11 Desember	Kec. Jatiroto Ds. Jatirejo	105
	Idensos di Kab. Klaten	12 Desember	Kec. Gantiwarno Ds. Mlese	105
	Idensos di Kota Semarang	15 Desember	Banyumanik	105
	Idensos di Kab. Pekalongan	15 Desember	Kec. Talun Kel. Talun	105
	Idensos di Kab. Klaten	15 Desember	Kec. Prambanan Kel. Tlogo	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	16 Desember	Kec. Karangmoncol Ds. Tamansari	105
	Idensos di Kab. Semarang	17 Desember	Kec. Ambarawa Ds. Lodoyong	105
	Idensos di Kota Semarang	18 Desember	Kec. Ngaliyan Kel. Tambakaji	105
4	Penyusunan Rencana Kontinjensi (<i>Contingency Plan</i>)			
a	Sosialisasi Penyusunan Renkon Tsunami	26 Februari	Kebumen	100
b	FGD Penyusunan Renkon pemangku Kepentinga Purworejo	11 – 12 April	Purworejo	50
c	FGD Penyusunan Renkon pemangku Kepentinga Kebumen	17 – 18 April	Kebumen	50
d	FGD Penyusunan Renkon pemangku Kepentingan Cilacap	19 – 20 April	Cilacap	50
e	Workshop Finalisasi Renkon	3 Desember	Semarang	30
5	Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)			
a	PRBBK inklusi Kota Pekalongan	12 Juli	Hotel Sahid Mandarin Kota Pekalongan	100
b	PRBBK inklusi Kab. Karanganyar	21 Agustus	Hotel Syariah, Ruang Ar Rayan Jl. Adi Sucipto, Solo	100
6	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana (Mastana)			
a	Pengembangan Mastana Kab. Kudus	19 s/d 24 Maret	Balai Desa Menawan Kec. Gebog	50 orang

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
b	Pengembangan Mastana Kab. Sragen	19 s/d 24 Maret	Balai Desa Bukuran Kec. Kalijambe	50 orang
c	Pengembangan Mastana Kab. Banyumas	23 s/d 27 April 2018	Balai Desa Cihonje Kec. Gumelar	50 orang
d	Pengembangan Mastana Kab. Tegal	23 s/d 27 April 2018	Balai Desa Maribaya Kec. Kramat	50 orang
e	Pengembangan Mastana Kab. Banjarnegara	17 s/d 20 Juli 2018	Balai Desa Tlaga Kec. Punggelan	50 orang
		17 s/d 20 Juli 2018	Balai Desa Mlaya Kec. Punggelan	50 orang
f	Pengembangan Mastana Kab. Pemalang	15 s/d 19 Oktober 2018	Balai Desa Bongas Kec. Watukumpul	50 orang
		15 s/d 19 Oktober 2018	Balai Desa Tlagasana Kec. Watukumpul	50 orang
7	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Berapi			
a	Pencegahan dan Kesiapsiagaan PB Kawasan Berapi	28 Agustus	The Oxalis Regency Hotel Magelang, Jl. Cempaka No. 17, Kemirirejo, Kota Magelang	150 (Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten)

b. Seksi Kesiapsiagaan

1) Pengembangan Budaya Sadar Bencana

a) Gambaran kegiatan

Kegiatan ditekankan pada aspek Pengurangan Risiko Bencana, terutama melalui perubahan paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi dan dari mayoritas peran pemerintah ke peran komunitas/masyarakat. Komunitas merupakan pihak yang pertama-tama berhadapan dengan risiko bencana. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif bila masyarakat sadar akan pentingnya peran mereka dalam upaya penanggulangan bencana.

b) Tujuan

- Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko bencana berdasarkan potensi bencana di daerahnya masing-masing;
- Meningkatkan partisipasi, dan membangun budaya gotong royong, kerelawanan serta kedermawanan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Mengetahui capaian (tolok ukur) tingkatan kesiapsiagaan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menghadapi ancaman bencana;
- Meningkatkan masyarakat agar sadar dan selalu siap siaga untuk menghadapi bencana serta dapat hidup berdampingan dengan bencana (Living harmony with disaster);
- Sukses HKB Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2018.

c) Pelaksanaan

- Budaya Sadar Bencana berupa dialog interaktif dilaksanakan di Lobby Hotel MEOTEL – DAFAM Purwokerto Jln. Dr. Soeparno Selatan No. 1 Arcawinangun Purwokerto Kab. Banyumas pada tanggal 16 April 2018 untuk mendukung dan mensukseskan HKB Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui media Radio ELSHINTA 91 FM Semarang.
- Sedangkan untuk Tahap II (Kedua) dilaksanakan di Puri Gedeh Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah Jl. Gubernur Budiono/Gajahmungkur No. 8 Semarang pada tanggal 6 Desember 2018 dalam acara Siaran Taping Dialog Interaktif melalui PT. Media Televisi Indonesia Stasiun Metro TV Jawa Tengah

d) Foto dokumentasi



Dialog interaktif, Kesiapsiagaan untuk mendukung dan mensukseskan HKB Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui media Radio ELSHINTA 91 FM Semarang



Siaran Taping Dialog Intertaktif melalui PT. Media Televisi Indonesia Stasiun Metro TV Jawa Tengah Tahun 2018

Gambar 11 Dialog Interaktif dan Taping Dialog Interaktif Tahun 2018

2) Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Jateng

a) Gambaran kegiatan

Sebuah platform atau forum pengurangan risiko bencana yang terdiri dari para pemangku kepentingan dapat membantu untuk menyediakan dan memobilisasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengarusutamakan PRB ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan.

Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana merupakan prioritas kegiatan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, di mana masyarakat mampu memperkecil dampak bencana yang timbul, khususnya di tingkat Desa dan atau Kelurahan. Di tingkat desa, FPRB Desa/kelurahan menjadi ujung tombak pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dimana

keberadaannya didasari oleh Perka BNPB Nomer 12 tahun 2012 yakni merupakan salah satu indikator dari Desa/Kelurahan Tangguh. Masing-masing FPRB Desa memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan agar semakin efektif dan efisien dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tangguh bencana.

Kegiatan Pengembangan Forum PRB memberi ruang bagi FPRB Desa untuk mengembangkan kapasitas yang dimiliki, membuka ruang komunikasi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antar desa, menemukenali potensi dan hambatan serta solusi, membuka jalur komunikasi FPRB dengan Pemerintah Daerah. Untuk diselenggarakan “Pertemuan FPRB Tingkat Desa Lintas Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah” yang difasilitasi oleh BPBD Jawa Tengah.

b) Tujuan

- Melaksanakan pelatihan penyusunan rencana kontinjensi di tingkat Desatana se Jawa Tengah dengan peserta pengurus / anggota Forum PRB Desatana se Jawa Tengah dan peserta pengurus / anggota Forum PRB Jawa Tengah;
- Sinkronisasi dan sinergitas program-program Forum PRB Jawa Tengah terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah.

c) Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana di BPBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada 25 – 26 September 2018 di Gedung Eks. Kampus UNIKA Semarang Jl. Pandanaran No. 100 Semarang. Peserta yang diundang berjumlah 70 orang, dari 28 Desatana masing – masing 2 orang pengurus/anggota Forum PRB Desa. Sambutan Pembukaan oleh Bpk. Kalakhar BPBD Prov. Jateng. Narasumber 2 orang dari :

Staf Khusus Gubernur Bapak Dr. Warsito Ellwein dan Pengurus Forum PRB Jawa Tengah Bapak Prijo Wasono, S.Sos dengan Moderator Bapak Sutrisno dari Pengurus Forum PRB Jateng.

d) Hasil

- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama Forum PRB Desa dalam penanggulangan bencana baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana;
- Terciptanya pengurangan risiko bencana akibat meningkatnya kapasitas masyarakat, aparatur dan dunia usaha;
- Forum PRB Desa dapat menyusun dokumen Renkon sesuai dengan ancaman desanya;
- Forum PRB Desa dapat menyinkronkan dan menyinergikan program-program Forum PRB Jawa Tengah terkait dengan penanggulangan bencana di Jawa Tengah;
- Menyamakan persepsi atau pola pikir dan tindakan Forum PRB Desa dengan para pemangku kepentingan / stakeholder antara Pemerintah (Pusat maupun Daerah) dan relawan kebencanaan dalam Pengurangan Risiko Bencana.

e) Foto dokumentasi



Pelatihan Penyusunan Renkon Destana Forum PRB se – Jawa Tengah



Rapat Koordinasi Forum PRB se – Jawa Tengah

Gambar 12 Kegiatan Pengembangan Forum PRB

3) Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

a) Gambaran kegiatan

Polusi udara dan kontaminasi air dari limbah rumah tangga dan industri akan menjadi masalah yang besar bagi kota-kota di masa depan, bila tidak ditangani dengan baik. Artinya, perubahan iklim akan membawa tantangan baru dalam hal kemiskinan, konflik sumber daya, konflik sosial dan keamanan manusia yang semakin terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Masyarakat miskin adalah terdampak utama dari perubahan iklim yang ekstrem dan meningkatnya degradasi lingkungan, karena penghidupan yang sangat tergantung iklim, dan polusi telah menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari mereka.

Dan tantangan terbesar untuk membangun Provinsi/kabupaten/kota yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim adalah mengurangi risiko bencana dan kejadian ekstrim terkait iklim. Membangun Jawa Tengah yang tangguh terhadap bencana, jelas membutuhkan seperangkat strategi yang tepat bila ingin membuat pembangunan menjadi aman, produktif dan berkelanjutan melalui Gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat.

Gubernur Jawa Tengah sejak Tahun 2015 telah melakukan berbagai upaya membangun Provinsi/Kabupaten/Kota Tangguh Bencana dan menggalakkan Budaya dan Gerakan Pengurangan

Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat di Jawa Tengah. Ketangguhan akan tercapai dengan dukungan, komitmen dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam PRB. Kesiapan dan kecepatan dalam penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kemampuan para relawan yang terampil menjadi tolok ukur ketangguhan dalam penanggulangan bencana. Wujud nyata dari budaya dan atau gerakan tersebut melalui Latihan atau Simulasi Kesiapsiagaan menghadapi Bencana yang dilaksanakan di jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada saat Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tahun 2018.

b) Tujuan

- Terselenggaranya dukungan, komitmen dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam PRB.
- Terwujudnya kesiapan dan kecepatan dalam penanganan bencana oleh seluruh aparat pemerintah daerah.
- Terwujudnya kemampuan para relawan yang terampil menjadi tolok ukur ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

c) Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana di BPBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada 9 Juli 2018 di Ruang Pertemuan Rumah Makan Ayam Goreng Bu Tatik di Jl. Sarwo Edi Wibowo No. 5 Mertoyudan Magelang. Peserta yang diundang berjumlah 27 orang. Sambutan Pembukaan oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah. Narasumber 3 orang dari : Kasubdit Peran Masyarakat BNPB, Kasubdit Peran Lembaga Usaha BNPB dan Kasubdit Pusdatin BNPB.

d) Hasil

- Output

- Bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran dan pelaksanaan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana di Jawa Tengah;
 - Kesiapan aparaturnya pemerintah daerah dalam menghadapi penanggulangan bencana;
 - Gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat di Jawa Tengah.
- Outcome
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara terpadu, terencana dan berkesinambungan menggalakkan dan melakukan peningkatan Budaya dan atau Gerakan Pengurangan Risiko Bencana berbasis komunitas/masyarakat di Jawa Tengah;
 - Adanya dukungan, komitmen dan partisipasi dalam PRB oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melalui berbagai kegiatan atau gerakan Pengurangan Risiko Bencana atau Ketangguhan terhadap Bencana berbasis komunitas/masyarakat.

e) Foto dokumentasi





Gambar 13 Koordinasi PRB dan Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana

4) Koordinasi Pengembangan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk Reduksi Bencana

a) Gambaran kegiatan

Lembaga usaha memiliki peran yang signifikan dalam manajemen bencana. Hal ini karena dampak negatif bencana, dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berpengaruh buruk terhadap keberlangsungan perusahaan di masa datang. Peran lembaga usaha dalam manajemen bencana adalah merupakan potensi untuk membantu dua komunitas bisnis, yaitu dalam melindungi dirinya sendiri dan masyarakat luas serta sebagai bentuk investasi yang saling menguntungkan.

Kegiatan dilakukan untuk peningkatan pelibatan dan peningkatan peran dunia usaha dalam menanggulangi potensi kebencanaan yang mungkin terjadi dan menangani bencana yang terjadi hingga masyarakat yang terdampak dapat mandiri kembali, melalui program *Corporate Social Responsibility*. BPBD Provinsi Jawa Tengah juga melakukan sosialisasi Perda Prov Jateng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Pergub Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 tentang TJSLP (pengembangan tata kelola risiko pemerintah dan dunia usaha, merubah pengelolaan risiko bencana menjadi peluang bisnis, serta

mengintegrasikan informasi risiko bencana dalam keputusan investasi).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 ini melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Reduksi Bencana yang bertujuan untuk menyamakan persepsi sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan Koordinasi dilakukan untuk membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

b) Tujuan

- Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana;
- Tersosialisasinya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Pergub Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang TJSLP dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana;
- Terdorongnya lembaga/dunia usaha untuk berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana.

c) Pelaksanaan

- Kegiatan CSR Untuk Reduksi Bencana di BPBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada 15 Februari 2018. Peserta yang diundang berjumlah 120 orang. Narasumber 3 orang dari : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Tim *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Jateng Pusat dan Sekretaris BAPPEDALITBANG Kabupaten Pekalongan. Moderator dari Ketua Forum PRB Jawa Tengah.

d) Hasil

- Tersosialisasinya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Pergub Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang TJSLP dalam upaya PRB kepada seluruh stakeholder kebencanaan di Jawa Tengah;
- Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya BPBD agar bekerja sama dalam mengimplementasikan Perda dan Pergub dimaksud dengan dunia usah, antara lain : pengembangan tata kelola risiko pemerintah dan dunia usaha, merubah pengelolaan risiko bencana menjadi peluang bisnis, serta mengintegrasikan informasi risiko bencana dalam keputusan investasi;
- Meningkatnya upaya seluruh stake holder dalam penanggulangan bencana dalam lingkup Pra Bencana/ Pengurangan Risiko Bencana.

e) Foto dokumentasi



Gambar 14 Koordinasi dan Pengembangan CSR untuk Reduksi Bencana Tahun 2018

5) Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana

a) Gambaran kegiatan

Bencana tanah longsor dan banjir bandang merupakan bencana dengan sebaran yang cukup luas di wilayah Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah yang sering mengalami bencana tanah bergerak/tanah longsor di antaranya adalah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Sedangkan yang sering mengalami bencana banjir bandang diantaranya Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pemalang. Pada umumnya, upaya mitigasi bencana tanah longsor dan banjir bandang dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Mitigasi secara struktural antara lain dapat dilakukan melalui penataan geometri lereng, perkuatan maupun perlindungan lereng, normalisasi sungai, dan perbaikan sistem drainase. Mitigasi struktural tentunya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi upaya relokasi kerap kali harus ditempuh, walaupun menghadapi tantangan berat karena adanya resistensi dari aspek sosial-ekonomi-budaya di masyarakat maupun terbatasnya anggaran. Pada kondisi ini, upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan adalah melalui mitigasi non-struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi. Mitigasi bencana berupa pemasangan rambu-rambu masih belum banyak dipasang, sehingga ketika bencana tanah bergerak /tanah longsor maupun banjir bandang terjadi, banyak masyarakat yang bingung tentang kemana mereka harus menyelamatkan diri, sehingga yang terjadi kepanikan ditengah-tengah masyarakat saat kejadian bencana. Oleh karena itu, di lokasi yang rentan terhadap bencana di 6 (enam) kabupaten yang dimaksud perlu adanya pemasangan jalur-jalur evakuasi ini disertai dengan peningkatan kapasitas

masyarakatnya. Sehingga apabila terjadi bencana gerakan tanah/tanah longsor dan banjir bandang dapat dihindari ataupun diminimalisir adanya korban jiwa dan kerugian harta benda.

Hal inilah yang mendasari pentingnya pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi pada daerah rawan bencana kepada masyarakat di Kabupaten yang terdampak tanah bergerak / tanah longsor banjir bandang maupun tsunami. Harapan kedepannya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut akan merasa pentingnya rambu-rambu pada jalur evakuasi, sehingga akan tercipta kesiapsiagaan untuk penyelamatan dan evakuasi kearah tempat pengungsian yang aman. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun Anggaran 2018 ini melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana, sehingga diharapkan dalam kegiatan ini akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah bergerak / tanah longsor banjir bandang maupun tsunami sehingga jatuhnya korban baik korban jiwa manusia, ternak maupun harta benda dapat dapat diminimalisir

b) Tujuan

- Memberikan arahan lokasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana karena rambu-rambu tersebut menunjukan rute penyelamatan diri dan tempat-tempat yang aman;
- Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat saat bencana datang, sehingga mereka mengetahui arah jalur penyelamatan dan evakuasi untuk mengurangi risiko bencana;
- Mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

c) Pelaksanaan

- Dilaksanakan selama 75 (Tujuh puluh lima) hari kalender dari tanggal 9 Februari 2018 s/d 24 April 2018, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No: 027.1/0545/2018 tanggal 9 Februari 2018, Pelaksana CV. Usaha Mandiri,

d) Hasil

- Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana mampu memahami rambu-rambu jalur evakuasi yang terpasang karena rambu-rambu tersebut menunjukkan rute penyelamatan diri dan tempat-tempat yang aman;
- Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana saat bencana datang, sehingga mereka mengetahui arah jalur penyelamatan dan evakuasi untuk mengurangi risiko bencana dan jatuhnya korban jiwa;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
- Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana.

Tabel 23
Lokasi Rambu Jalur Evakuasi

No	Kabupaten	Lokasi	Penguatan	Jumlah Rambu	Ancaman Bencana
1	2	3	4	5	6
1.	Wonosobo	1. Ds. Kapencar Kec. Kertek	Destana	8 buah	Longsor
		2. Ds. Reco Kec. Kertek	Destana	8 buah	Longsor
2.	Purworejo	1. Ds. Donorejo Kec. Kaligesing	EWS	8 buah	Longsor
3.	Purbalingga	1. Ds. Kramat Kec. Karangmoncol	Destana	8 buah	Longsor
		2. Ds. Sirau	Destana	8 buah	Longsor

No	Kabupaten	Lokasi	Penguatan	Jumlah Rambu	Ancaman Bencana
		Kec. Karangmoncol			
4.	Wonogiri	1. Ds. Bugelan Kec. Kismantoro	Destana	8 buah	Longsor
		2. Ds. Lemahbang Kec.Kismantoro	Destana	8 buah	Longsor
5.	Kebumen	1. Ds. Glontor Kec. Karanggayam	EWS	8 buah	Longsor
		2. Ds. Surejan Kec. Petanahan	Permohonan BPBD Kab.	8 buah	Tsunami
6.	Magelang	1. Ds. Sidosari Kec. Salaman	EWS	8 buah	Longsor
7.	Banjarnegara	1. Ds. Mlaya Kec. Punggelan	EWS	8 buah	Longsor
		2. Ds. Bantar Kec. Wanayasa	Permohonan BPBD Kab.	8 buah	Longsor
8.	Karanganyar	1. Ds. Gerdu Kec. Karangpandan	EWS	8 buah	Longsor
9.	Semarang	1. Ds. Gemawang Kec. Jambu	Permohonan BPBD Kab.	8 buah	Longsor
10.	Brebes	1. Ds. Sutamaja Kec. Kersana	Permohonan BPBD Kab.	8 buah	Banjir
11.	Cilacap	1. Ds. Widoropayung Kulon Kec. Adipala	Permohonan BPBD Kab.	15 buah	Tsunami
		2. Ds. Widoropayung Wetan kec. Adipala		15 buah	Tsunami
Jumlah total rambu				150 buah	

Tabel 24
Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi s.d 2018

TAHUN	RAMBU JALUR EVAKUASI
1	2
Sebelumnya (< 2013)	90
2014	90
2015	90
2016	120
2017	90
2018	150
TOTAL	780

e) Foto dokumentasi



Rambu Petunjuk Arah Jalur Evakuasi Bencana Tanah Longsor



Rambu Petunjuk Arah Jalur Evakuasi Bencana Tsunami



Rambu Petunjuk Arah Jalur Evakuasi Bencana Banjir Bandang



Rambu Evakuasi Sementara (Titik Kumpul) dan Rambu Evakuasi Akhir (Tempat Pengungsian)

Gambar 15 Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Jawa Tengah

6) Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (*Early Warning System*) berbasis Masyarakat

a) Gambaran kegiatan

Upaya mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan secara struktural maupun non-struktural. Mitigasi secara struktural antara lain dapat dilakukan melalui penataan geometri lereng, perkuatan maupun perlindungan lereng, dan perbaikan sistem drainase. Mitigasi struktural tentunya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pada daerah dengan tingkat risiko

bencana tinggi atau sangat tinggi, upaya relokasi kerap kali harus ditempuh, walaupun menghadapi tantangan berat karena adanya resistensi dari aspek sosial-ekonomi-budaya di masyarakat maupun terbatasnya anggaran. Selain itu, pada umumnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor umumnya memiliki pendidikan yang tidak tinggi, ekonomi menengah ke bawah, lokasi dengan aksesibilitas yang sulit, dan infrastruktur yang terbatas. Pada kondisi ini, upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan adalah melalui mitigasi non-struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem peringatan dini). Oleh karena itu, di lokasi yang rentan terhadap bencana gerakan tanah di 5 (lima) kabupaten yang dimaksud perlu adanya pemasangan alat sistem peringatan dini (Early Warning System) ini dan juga disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakatnya. Sehingga apabila terjadi longsor, kerugian jiwa, harta, dan benda dapat dihindari ataupun dikurangi.

b) Tujuan

- Memasang sistem peringatan dini (EWS) di daerah rawan longsor dan padat penduduk;
- Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan longsor;
- Mendukung untuk mewujudkan desa tangguh bencana.

c) Pelaksanaan

- Dusun Dukuh Seman Desa Wonosari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2018 s/d. 15 Maret 2018;
- Dusun Mundong Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 s/d. 16 Maret 2018;

- Desa Pasirpanjang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, dilaksanakan pada tanggal 8 Maret s/d 15 Maret 2018;
- Dusun Gandring, Desa Pucung Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 s/d 11 April 2018;
- Dukuh Bungkah Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret s/d 16 Maret 2018;
- Desa Donorati Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dilaksanakan pada tanggal 22 Maret s/d 28 Maret, 6 s/d 8 April dan 12 s/d 14 April 2018;
- Dusun Legok Desa Blater Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 s/d. 16 April 2018;
- Dusun Kalibombong Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s/d 10 April 2018.

d) Hasil

- Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor mampu memahami kegunaan dan fungsi peralatan dan sistem peringatan dini yang dipasang di daerah tersebut;
- Meningkatnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor saat bencana datang, sehingga mereka dapat segera mengevakuasi secara mandiri sesuai dengan arah jalur evakuasi ketempat aman (zona hijau);
- Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana longsor untuk mengurangi ancaman dan kerentanan bencana dalam upaya pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana longsor

Tabel 25
Peralatan EWS

No	Lokasi	Lokasi	Jenis Alat	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Temanggung	Dusun Dukuh Seman Desa Wonosari Kecamatan Bulu	1. <i>Crackmeter</i> dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set
2.	Pemalang	Dusun Mundong Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul	1. Crackmeter dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set
3.	Brebes	Desa Pasirpanjang Kecamatan Salem	1. Crackmeter dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set
4.	Kab. Wonogiri	Dusun Gandring, Desa Pucung Kecamatan Kismantoro	1. Crackmeter dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set
5.	Semarang	Dukuh Bungkah Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru	1. Crackmeter dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set
6.	Purworejo	Desa Donorati Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	1. Crackmeter dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set
7.	Kebumen	Dusun Legok Desa Blater Kecamatan Poncowarno	1. Crackmeter dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set
8.	Banjarnegara	Dusun Kalibombong Desa Kalibombong Kecamatan Kalibening	1. Crackmeter dengan Alarm 2. <i>Rain Detector</i> dengan Alarm	3 Set 1 Set

Tabel 26
Pemasangan ALAT EWS (Early Warning System)

TAHUN	EWS		JUMLAH
	BPBD	ESDM	
1	2	3	4
Sebelumnya (< 2013)	-	13	13
2013	-	3	3
2014	-	14	14
2015	2	12	14
2016	2	-	2

TAHUN	EWS		JUMLAH
	BPBD	ESDM	
1	2	3	4
2017	5	-	5
2018	8	-	8
TOTAL	17 **	42	59

e) Foto dokumentasi



Pemasangan dan instalasi alat



Sosialisasi bencana tanah longsor



Pembuatan dan Pemasangan Jalur Evakuasi



Pelaksanaan Gladi evakuasi



Membangun Komitmen bersama

Gambar 16 Perangkat EWS Bencana Tanah Longsor

Rincian dan gambaran menyeluruh dari kegiatan pada Seksi Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tahun 2018 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 27
Kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2018

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Peta Resiko Bencana Prov. Jateng			
a	Sosialisasi Peta Risiko	13 Pebruari	Kota Salatiga	30
b	FGD I	22 Mei	Kota Pekalongan	30
c	FGD II	24 Mei	Kab. Semarang	30
e	Ekspose Hasil	28 September	Kab. Semarang	30
2	Gladi Manajemen Bencana			
a	Sosialisasi Penyusunan Rencana Kontingensi Tsunami	26 Februari	Hotel Mexolie, Kebumen	97
b	Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Bencana Tsunami Kabupaten Purworejo	11-12 April	Hotel Sanjaya Inn Purworejo	58
c	Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Kebumen	17-18 April	Hotel Mexolie Kebumen, Jl. Merak II No.8 Panjer	65
d	Gladi Ruang (Tabletop Exercice/TTX) Rencana Kontijensi Kabupaten Cilacap	19-20 April	Fave Cilacap, Jl. Budi Utomo No. 38 Cilacap	61
e	Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Tsunami untuk Kab. Wonogiri	2 Oktober	Kantor BPBD Kab. Wonogiri, Jl. Jendral Sudirman No. 503 Wonogiri	
f	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Renkon Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah	29-30 Oktober	Hotel Aston Imperium Purwokerto Jl. Observe Isdiman No. 33 Glumpang Purwokerto	97
g	<i>Initial Planning Conference</i> (IPC)	17 November	Swiss Bell Inn, Sari Petojo Solo	

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
h j k l	<i>Final Planning Conference (FPC)</i>	20 November	Mexolie Hotel Kebumen, Jln. Merak II No. 8 Panjer Kab. Kebumen	
	<i>Tabletop Exercise</i> Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	21 November	Hotel Mexolie Jl. Merak II Kebumen	97
	<i>Tabletop Exercise (TTX)</i> Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami	22 November	Hotel Mexolie Jl. Merak II Kebumen	97
	Finalisasi Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Tsunami Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	3 Desember	Ruang Rapat Lantai 4 BPBD Provinsi Jawa Tengah, Jln Imam Bonjol No. 1 F Semarang	30
3	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana			
	Idensos di Kota Semarang	13 Maret	Kec. Genuk Kel. Bangetayu Wetan	105
	Idensos di Kota Semarang	14 Maret	Kec. Semarang Timur Kel. Kemijen	105
	Idensos di Kota Semarang	8 Mei	Kec. Candisari Kel. Tegalsari	105
	Idensos di Kota Semarang	9 Mei	Kec. Ngaliyan Kel. Wonosari	105
	Idensos di Kab. Pati	12 Mei	Kec. Pati Kel. Pati Lor	105
	Idensos di Kab. Pemalang	14 Mei	Kec. Belik Ds. Sikasur	105
	Idensos di Kota Semarang	15 Mei	Kec. Semarang Timur Kel. Kemijen	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	16 Mei	Kec. Purbalingga Kel. Purbalingga Lor	105
	Idensos di Kab. Cilacap	9 Juli	Kec. Sidareja Desa Sidareja	105
	Idensos di Kab. Cilacap	10 Juli	Kec. Cipari Desa Cipari	105
	Idensos di Kota Semarang	23 Juli	Kec. Mijen Kel. Wonolopo	105
	Idensos di Kota Semarang	24 Juli	Kec. Gayamsari Kel. Tambakrejo	105
	Idensos di Kota Semarang	26 Juli	Kec. Ngaliyan Kel.	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
			Beringin	
	Idensos di Kota Semarang	27 Juli	Kec. Semarang Tengah Kel. Kauman	105
	Idensos di Kab. Banjarnegara	6 Agustus	Kec. Banjarmangu Ds. Kalilenjar	105
	Idensos di Kab. Demak	7 Agustus	Kec. Sayung Ds. Bedono	105
	Idensos di Kab. Banjarnegara	8 Agustus	Kec. Banjarmangu Kel. Paseh	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	11 Agustus	Kec. Rembang Ds. Makam	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	13 Agustus	Kec. Batuwarno Ds. Sumberejo	105
	Idensos di Kab. Demak	14 Agustus	Kec. Bonang Kel. Purworejo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	15 Agustus	Kec. Baturetno Ds. Watuagung	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	16 Agustus	Kec. Bojongsari Kel. Pekalongan	105
	Idensos di Kab. Brebes	24 Agustus	Kec. Jatibarang Kel. Jatibarang Lor	105
	Idensos di Kab. Rembang	24 Agustus	Kec. Rembang Kel. Leteh	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	7 September	Kec. Ngadirojo Kel. Kerjo Lor	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	10 September	Kec. Sidoharjo Ds. Mojorejo	105
	Idensos di Kab. Demak	10 September	Kec. Wedung Kel. Kedung Mutih	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	12 September	Kec. Pracimantoro Kel. Giribelah-Sambiroto	105
	Idensos di Kota Semarang	14 September	Kec. Semarang Timur Kel. Sarirejo	105
	Idensos di Kab. Magelang	14 September	Kec. Srumbung Kel. Jeruk Agung	105
	Idensos di Kab. Rembang	17 September	Kec. Rembang Kel. Leteh	105
	Idensos di Kab. Rembang	18 September	Kec. Rembang Kel. Leteh	105
	Idensos di Kab. Pemalang	19 September	Kec. Pemalang Kel. Mulyoharjo	105
	Idensos di Kab. Sragen	20 September	Kec. Masaran Ds.	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
			Jiparan	
	Idensos di Kab. Karanganyar	21 September	Kec. Tasikmadu Ds. Pandeyan	105
	Idensos di Kota Semarang	21 September	Kec. Gunungpati Kel. Pongangan	105
	Idensos di Kab. Batang	22 September	Kec. Wonotunggal Ds. Kedungmalang	105
	Idensos di Kab. Batang	22 September	Kec. Batang Kel. Karangasem Utara	105
	Idensos di Kota Semarang	28 September	Kec. Gajah Mungkur Kel. Gajah Mungkur	105
	Idensos di Kab. Magelang	29 September	Kec. Srumbung Ds. Pucanganom	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	29 September	Kec. Polokarto Ds. Wonorejo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	29 September	Kec. Jatipurno Ds. Jatipurno	105
	Idensos di Kab. Banyumas	3 Oktober	Kec. Lumbir Ds. Lumbir	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	4 Oktober	Kec. Kismantoro Ds. Kismantoro	105
	Idensos di Kab. Temanggung	5 Oktober	Kec. Bulu Ds. Wonotirto	105
	Idensos di Kota Semarang	5 Oktober	Kec. Semarang Barat Kel. Karangayu	105
	Idensos di Kab Pekalongan	6 Oktober	Kec. Kedungwuni Ds. Karangdono	105
	Idensos di Kota Pekalongan	6 Oktober	Kec. Pekalongan Barat Kel. Bendan	105
	Idensos di Kab. Demak	8 Oktober	Kec. Karangtengah Ds. Karangtowo	105
	Idensos di Kab. Magelang	10 Oktober	Kec. Dukun Ds. Sumber	105
	Idensos di Kab. Pati	12 Oktober	Kec. Tayu Kel. Tayu Kulon	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	12 Oktober	Kec. Sukoharjo Ds. Begajan	105
	Idensos di Kab. Tegal	14 Oktober	Kec. Bumijawa Kel. Cempaka	105
	Idensos di Kota Semarang	15 Oktober	Kec. Ngaliyan Kel. Mangkang Kulon	105
	Idensos di Kab. Pemalang	15 Oktober	Kec. Petarukan Kel.	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
			Serang	
	Idensos di Kab. Magelang	15 Oktober	Kec. Kajoran Kel. Kajoran	105
	Idensos di Kota Surakarta	20 Oktober	Kec. Petarukan Kel. Pesucen	105
	Idensos di Kab. Klaten	21 Oktober	Kec. Delanggu Ds. Getak	105
	Idensos di Kab. Pati	23 Oktober	Kec. Kayen Ds. Kayen	105
	Idensos di Kab. Karanganyar	23 Oktober	Ngargoyoso	105
	Idensos di Kab. Magelang	24 Oktober	Kec. Dukun Kel. Dukun	105
	Idensos di Kab. Karanganyar	25 Oktober	Kec. Tasikmadu Ds. Papahan	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	26 Oktober	Kec. Wojoyaban Kel. Bekonang	105
	Idensos di Kab. Klaten	27 Oktober	Kec. Ceper Ds. Pokak	105
	Idensos di Kab. Rembang	28 Oktober	Kec. Rembang Kel. Pandean	105
	Idensos di Kab. Wonosobo	29 Oktober		105
	Idensos di Kab. Wonogiri	10 Nopember	Kec. Purwantoro Ds. Joho	105
	Idensos di Kab. Rembang	10 Nopember	Kec. Rembang Ds. Sidowayah	105
	Idensos di Kab. Wonosobo	12 Nopember	Kec. Kretek Ds. Ngadikusuman	105
	Idensos di Kab. Grobogan	12 Nopember	Kec. Karangrayung Ds. Mangin	105
	Idensos di Kota Semarang	14 Nopember	Kec. Semarang Tengah Kel. Sekayu	105
	Idensos di Kab. Batang	15 Nopember	Kec. Sidorejo Ds. Warungasem	105
	Idensos di Kab. Sukoharjo	16 Nopember	Kec. Bendosari Ds. Gabusan Jombor	105
	Idensos di Kab. Magelang	16 Nopember	Kec. Muntilan Ds. Keji	105
	Idensos di Kab. Pekalongan	19 Nopember	Kec. Kajen Ds. Linggo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	20 Nopember	Kec. Puhpelem Ds. Puhpelem	105
	Idensos di Kab. Cilacap	22 Nopember	Kec. Kesugihan	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
			Babusalam	
	Idensos di Kab. Sukoharjo	22 Nopember	Kec. Mojolaban Ds. Wirun	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	24 Nopember	Kec. Rembang Ds. Bantar Barang	105
	Idensos di Kota Semarang	24 Nopember	Kec. Semarang Barat Kel. Krobokan	105
	Idensos di Kab. Demak	24 Nopember	Kec. Karangtengah Ds. Wonoagung	105
	Idensos di Tegal	24 Nopember	Kec. Bojong Ds. Tuwel	105
	Idensos di Kota Surakarta	25 Nopember	Kec. Kartasuro Kel. Pabelan UMS	105
	Idensos di Kab. Batang	26 Nopember	Kec. Tulis Ds. Cluwak	105
	Idensos di Kab. Sragen	28 Nopember	Kec. Ngrampal Ds. Kebonromo	105
	Idensos di Kab. Wonosobo	29 Nopember	Kec. Wonosobo Kel. Wonosobo Timur	105
	Idensos di Kab. Pekalongan	29 Nopember	Kec. Wonokerto Ds. Babel	105
	Idensos di Kab. Karanganyar	1 Desember	Kec. Matesih Kel. Sidodadi	105
	Idensos di Kab. Klaten	2 Desember	Kec. Trucuk Ds. Jatipuro	105
	Idensos di Kota Semarang	6 Desember	Kec. Semarang Barat Kel. Puri Anjasmoro	105
	Idensos di Kota Semarang	6 Desember	Kec. Tembalang Kel. Tandang	105
	Idensos di Kota Semarang	7 Desember	Kec. Semarang Utara Kel. Tanjung Mas	105
	Idensos di Kota Semarang	8 Desember	Kec. Candisari Kel. Candi	105
	Idensos di Kota Semarang	8 Desember	Kec. Banyumanik Kel. Tinjomoyo	105
	Idensos di Kab. Klaten	8 Desember	Kec. Kalikotes Ds. Gembegan	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	9 Desember	Kec. Kalimanah Ds. Mewek	105
	Idensos di Kab. Tegal	9 Desember	Kec. Slawi Kel. Slawi Kulon	105

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	Idensos di Kab. Rembang	9 Desember	Kec. Rembang Kel. Sidowayah	105
	Idensos di Kab. Semarang	10 Desember	Kec. Ungaran Barat Ds. Lerep	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	10 Desember	Kec. Girimarto Ds. Selorejo	105
	Idensos di Kab. Wonogiri	11 Desember	Kec. Jatiroto Ds. Jatiorejo	105
	Idensos di Kab. Klaten	12 Desember	Kec. Gantiwarno Ds. Mlese	105
	Idensos di Kota Semarang	15 Desember	Banyumanik	105
	Idensos di Kab. Pekalongan	15 Desember	Kec. Talun Kel. Talun	105
	Idensos di Kab. Klaten	15 Desember	Kec. Prambanan Kel. Tlogo	105
	Idensos di Kab. Purbalingga	16 Desember	Kec. Karangmoncol Ds. Tamansari	105
	Idensos di Kab. Semarang	17 Desember	Kec. Ambarawa Ds. Lodoyong	105
	Idensos di Kota Semarang	18 Desember	Kec. Ngaliyan Kel. Tambakaji	105
4	Penyusunan Rencana Kontinjensi (<i>Contingency Plan</i>)			
a	Sosialisasi Penyusunan Renkon Tsunami	26 Februari	Kebumen	100
b	FGD Penyusunan Renkon pemangku Kepentingan Purworejo	11 – 12 April	Purworejo	50
c	FGD Penyusunan Renkon pemangku Kepentingan Kebumen	17 – 18 April	Kebumen	50
d	FGD Penyusunan Renkon pemangku Kepentingan Cilacap	19 – 20 April	Cilacap	50
e	Workshop Finalisasi Renkon	3 Desember	Semarang	30
5	Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)			
a	PRBBK inklusi Kota Pekalongan	12 Juli	Hotel Sahid Mandarin Kota Pekalongan	100
b	PRBBK inklusi Kab. Karanganyar	21 Agustus	Hotel Syariah, Ruang Ar Rayan Jl. Adi Sucipto, Solo	100
6	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana (Mastana)			

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
a	Pengembangan Mastana Kab. Kudus	19 s/d 24 Maret	Balai Desa Menawan Kec. Gebog	50 orang
b	Pengembangan Mastana Kab. Sragen	19 s/d 24 Maret	Balai Desa Bukuran Kec. Kalijambe	50 orang
c	Pengembangan Mastana Kab. Banyumas	23 s/d 27 April 2018	Balai Desa Cihonje Kec. Gumelar	50 orang
d	Pengembangan Mastana Kab. Tegal	23 s/d 27 April 2018	Balai Desa Maribaya Kec. Kramat	50 orang
e	Pengembangan Mastana Kab. Banjarnegara	17 s/d 20 Juli 2018	Balai Desa Tlaga Kec. Punggelan	50 orang
		17 s/d 20 Juli 2018	Balai Desa Mlaya Kec. Punggelan	50 orang
f	Pengembangan Mastana Kab. Pemalang	15 s/d 19 Oktober 2018	Balai Desa Bongas Kec. Watukumpul	50 orang
		15 s/d 19 Oktober 2018	Balai Desa Tlagasana Kec. Watukumpul	50 orang
7	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Berapi			
a	Pencegahan dan Kesiapsiagaan PB Kawasan Berapi	28 Agustus	The Oxalis Regency Hotel Magelang, Jl. Cempaka No. 17, Kemirirejo, Kota Magelang	150 (Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten)

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
8	Pengembangan Budaya Sadar Bencana			
a	Dialog Interaktif Radio Elshinta Siaga bencana dimulai dari diri kita, keluarga dan komunitas	16 April	Hotel MEOTEL – DAFAM Purwokerto	20
b	Siaran Taping Dialog Intertaktif melalui PT. Media Televisi Indonesia Stasiun Metro TV Jawa Tengah	6 Desember	Puri Gedeh Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah	
9	Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Prov. Jawa Tengah			
a	Pelatihan Penyusunan Renkon Destana Forum PRB se – Jawa Tengah	25-26 September	Gedung Eks. Kampus UNIKA Semarang	70
b	Rapat Koordinasi Forum	7 – 8	Hotel UTC	80

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	PRB se – Jawa Tengah	Desember	Semarang	
10	Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)			
a	Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah	9 Juli	Magelang	40
b	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Provinsi Jawa Tengah	14 November	Kota Surakarta	
11	Koordinasi Pengembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk Reduksi Bencana			
a	Koordinasi dan Pengembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk Reduksi Bencana Tahun 2018	15 Februari	Kab. Pekalongan	120
12	Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana			
a	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Wonosobo	16 unit
b	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Purworejo	8 unit
c	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Purbalingga	16 unit
d	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Wonogiri	16 unit
e	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Kebumen	16 unit
f	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Magelang	8 unit
g	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Banjarnegara	16 unit
h	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Karanganyar	8 unit
i	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Semarang	8 unit
j	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Brebes	8 unit
k	Pemasangan rambu	9 Feb -24 apr	Cilacap	30 unit
13	Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (<i>Early Warning System</i>) berbasis Masyarakat			
a	Pemasangan dan Simulasi EWS,	8 – 15 Maret	Temanggung	@1 paket (3 crakmeter, 1 raindetector)
b	Pemasangan dan Simulasi EWS	7 – 16 Maret	Pemalang	
c	Pemasangan dan Simulasi EWS	8 – 15 Maret	Brebes	
d	Pemasangan dan Simulasi EWS	23 Maret - 11 April	Wonogiri	
e	Pemasangan dan Simulasi EWS	8 – 16 Maret	Kab. Semarang	
f	Pemasangan dan Simulasi EWS	22 – 28 Maret	Purworejo	
g	Pemasangan dan Simulasi EWS	23 Maret - 16	Kebumen	

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
		April		
h	Pemasangan dan Simulasi EWS	29 Maret - 10 April	Banjarnegara	
JUMLAH				org

3. Bidang Penanganan Darurat

Kegiatan Bidang Penanganan Darurat diselenggarakan oleh 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi dan seksi Sarana Dan Prasarana Darurat. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.860.000.000,- Bidang Penanganan Darurat melaksanakan 6 kegiatan dengan. Kegiatan tersebut meliputi:

- Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
- Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
- SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura
- Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat
- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana

a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi

- 1) Bimbingan Teknis Relawan dan Latihan Gabungan SAR Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (PEPP)

a) Gambaran kegiatan

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

BPBD Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dukungan kepada BPBD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Sedangkan terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghargai budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan pengetahuan masyarakat setempat serta melibatkan peranserta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah bersifat komplementer.

Melalui kegiatan ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah berharap bahwa ketrampilan para aparat PB di Kabupaten/Kota dapat meningkat baik dalam hal pemahaman teori ilmu pengetahuan maupun praktek pelaksanaan di lapangan.

b) Tujuan

- Mendapatkan masukan dan mengkritisi eksistensi/keberadaan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan darurat bencana;
- Memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan singkat baik praktek maupun teori dalam hal penanggulangan bencana bagi para aparat PB di Kabupaten/Kota

c) Pelaksanaan

Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (PEPP) untuk Relawan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung. Yang dilaksanakan pada

Hari/tanggal : Selasa – Rabu, 3-4 April 2018
Tempat : 1. Aula Kecamatan Bulu, Kabupaten

Temanggung;
 2. Lapangan Wolodono Bulu, Kec.
 Bulu Kabupaten Temanggung.

Peserta : 100 (seratus) orang, yang berasal
 aparat Pemerintah Kecamatan Bulu;
 Aparat Polsek Bulu; Aparat Koramil
 12/Bulu; Komunitas Relawan Kec.
 Bulu (Relawan Campursari, Relawan
 Dukuh, Relawan Gabungan Anak
 Sumbing (GAS) Kwadungan, Relawan
 Gandurejo, Relawan Pagergunung,
 Relawan Malangsari, Relawan
 Ngimbrang, Relawan Wonotirto,
 Relawan Wonosari)

Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan
 Penanganan Pengungsi (PEPP) untuk Relawan Penanggulangan
 Bencana di Kabupaten Batang.

Hari/tanggal : Rabu – Kamis, 8-9 Agustus 2018
 Tempat : Agrowisata Kebun Teh Pagilaran Kec.
 Blado, Kabupaten Batang.

Peserta : 100 (seratus) orang, berasal dari
 Aparat Polsek Blado, Aparat Koramil
 09/Blado, Anggota Pramuka
 Kwarcab Batang, SATGA BPBD Kab.
 Batang, Komunitas Relindo Batang,
 Komunitas Relawan Batang Rescue,
 Komunitas Relawan Bagana Kab.
 Batang, Komunitas Relawan
 Jagabaya Kab. Batang, Komunitas
 Relawan SAR Bravo Batang,
 Komunitas Relawan SAR FKAM
 Batang, Komunitas Relawan ORARI
 Kab. Batang, Komunitas Relawan
 LSM Pelangi Nusa Batang,
 Komunitas Relawan Organisasi
 Difabel Batang (ODB), Komunitas
 Relawan MDMC Kab. Batang,
 Komunitas Relawan Racika Palm
 Batang, Komunitas Relawan PMI
 Kab. Batang, Komunitas Relawan
 PSC 119 Sislamet, Komunitas
 Relawan Mitra Senkom Polri Batang.

d) Hasil

Keluaran yang didapat dari pelaksanaan kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan PEPP Tahun Anggaran 2018 adalah “Fasilitasi Kegiatan Latihan Gabungan PEPP Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Batang”

e) Foto dokumentasi

Sebagai ilustrasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 17 Kegiatan LATGAB P.E.P.P di Kabupaten Temanggung



Gambar 18 Kegiatan LATGAB P.E.P.P di Kabupaten Batang

2) Kegiatan Pantauan Event Angkutan Hari Raya Lebaran, NATAL, Tahun Baru, 1 Suro dan Sedekah Laut.

a) Gambaran kegiatan

Melalui Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah hadir di tengah-tengah Masyarakat sebagai perwakilan Negara yang hadir dengan penuh tulus ikhlas membantu meringankan beban Masyarakat serta mewujudkan peran pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana. Salah satu cara menanggulangi kebencanaan adalah adanya partisipasi aktif masyarakat terutama sebelum terjadinya bencana. Berbagai tahapan untuk penanggulangan bencana yang dilakukan adalah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi).

Tanggap darurat menjadi bagian yang paling banyak disorot oleh berbagai kalangan. Dan salah satu hal yang menjadi pokok perhatian dalam tahapan tanggap darurat adalah Tugas Pokok dan Fungsi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (Tupoksi P.E.P.P). Tupoksi P.E.P.P sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 yang terutama adalah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, meliputi :

- Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaksanaan kegiatan bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- Penentuan status keadaan darurat bencana;
- Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak bencana;
- Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- Pemulihan sarana dan prasarana vital.

Didalam perjalanannya, Tupoksi P.E.P.P ini telah memberikan banyak manfaat kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses Penanggulangan Bencana (PB) mulai dari Relawan, Aparat BPBD, Aparat TNI/POLRI hingga Kalangan Dunia Usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan SAR, bimbingan teknis dan bekal ilmu pengetahuan lainnya tentang Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi (P.E.P.P).

b) Tujuan

- Mendapatkan masukan dan mengkritisi eksistensi/keberadaan BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan darurat bencana di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan Relawan PB di wilayah Kab/Kota terkait kejadian bencana pada saat pelaksanaan Hari Raya Lebaran, NATAL, Tahun Baru, 1 Suro dan Sedekah Laut;

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan Pantauan Hari Raya Idul Fitri dan Sedekah Laut dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Kebumen; Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap, pada Hari Jumat - Sabtu, 15 – 16 Juni 2018.

Pelaksanaan Pantauan Event 1 Suro Tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, pada hari Kamis - Jumat, 21 s/d 22 Juni 2018.

Pelaksanaan Pantauan Perayaan Tahun Baru Tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Grobogan; Kabupaten Blora; Kabupaten Rembang; Kabupaten Magelang; dan Kabupaten Purworejo, pada hari Senin – Selasa, 31 Desember 2018 s/d 1 Januari 2019.

d) Hasil

Keluaran yang didapat dari pelaksanaan kegiatan Bintek SAR dan Latihan Gabungan PEPP Tahun Anggaran 2018 adalah “Kegiatan

Pantauan Event Angkutan Hari Raya Lebaran, NATAL, Tahun Baru, 1 Suro dan Sedekah Laut”

e) Foto dokumentasi



Gambar 19 Pantauan Mudik/Lebaran, Suro, dan Tahun baru

3) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana

a) Gambaran kegiatan

Dalam situasi darurat bencana, sering terjadi kesimpangsiuran data dan informasi korban maupun kerusakan, sehingga mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Pelaksanaan tanggap darurat juga sering kurang saling mendukung, distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata, sulit terpantau dengan baik sehingga kemajuan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kurang bisa terukur secara obyektif. Situasi-situasi tersebut disebabkan antara lain

karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam kegiatan tanggap darurat bencana.

Dalam kondisi seperti itu, diperlukan suatu institusi yang menjadi pusat komando kedaruratan bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana. Pos Komando Siaga dan Tanggap Darurat Bencana dapat dilengkapi dengan pembentukan pos komando lapangan tanggap darurat bencana dan pos pendukung tanggap darurat bencana yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan tanggap darurat bencana.

b) Tujuan

Mendukung fungsi pelaporan dan respon cepat terhadap kejadian bencana di masyarakat, sehingga tim reaksi cepat dapat segera mengetahui dan mengambil langkah-langkah penanganan. Meningkatkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana di Provinsi Jawa Tengah serta terpantaunya kejadian bencana di Jawa Tengah sehingga dapat dilakukan antisipasi dan reaksi cepat dalam Penanggulangan Bencana.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana dilaksanakan di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah, Gedung Pusdalops Lantai II (Ruang Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana/Ruang Radio). Kegiatan dilaksanakan atas kerjasama dengan RAPI dan Orari Jawa Tengah. Frekuensi yang digunakan untuk posko bencana Jawa Tengah adalah 164.525 Mhz. Posko bencana radio ini dibuka dan Siaga terus menerus 24 jam selama 365 hari Posko selama Tahun 2018 yang dibagi dalam 2 (dua) shift, yaitu :

- Shift I (08.00 – 20.00 WIB)
- Shift II (20.00 – 08.00 WIB)

Peserta kegiatan Posko Siaga dan Penanganan Darurat Bencana merupakan petugas jaga yang terdiri dari Pengda RAPI Jawa

Tengah (4 orang), ORARI Jawa Tengah (4 orang), SARDA Jawa Tengah (4 orang), TAGANA Dinsosnakertrans Prov. Jawa Tengah (4 orang) dan Granat Rescue Jawa Tengah (4 orang)

d) Hasil

Dari hasil pemantauan melalui jejaring komunikasi menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, didapatkan hasil penanganan bencana selama tahun 2018 per tanggal 31 Desember sebagai berikut :

- Jumlah kejadian : 1.751 kejadian terdiri dari :
 - Angin : 415 kali;
 - Banjir : 172 kali;
 - Kebakaran 590 kali;
 - Erupsi GA : 5 kali dan;
 - Tanah longsor : 562 kali)
 - Jumlah korban meninggal : 40 jiwa
 - Dampak Kerusakan Rumah :
 - 941 rusak berat/roboh;
 - 3.563 rusak ringan/sedang
- Taksiran kerugian : Rp. 47 Milyar

e) Foto dokumentasi



Gambar 20 Posko Radio BPBD Prov Jateng

Rangkuman gambaran kegiatan pada Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi Bidang Penanganan Darurat tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 28
Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi			
a	Latihan Gabungan PEPP Temanggung	3 - 4 April 2018	Temanggung	100
b	Latihan Gabungan PEPP Batang	8 - 9 Agustus 2018	Batang	100
2	SAR Event Angkutan Lebaran, natal dan Tahun Baru			
a	Event Mudik Lebaran 2018	15 – 16 Juni 2018	Wonosobo; Temanggung; Banjarnegara; Kebumen; Purbalingga dan Cilacap	
b	Event 1 Syuro Tahun 2018	21 - 22 Juni 2018	Kabupaten Surakarta dan Karanganyar	
c	Natal dan Tahun Baru	31 Desember 2018 s/d 1 Januari 2019	Kabupaten Grobogan; Blora; Rembang; Magelang; dan Purworejo	
3	Kerjasama data dan informasi Bencana			
a	Posko Radio	Jan – Des	BPBD Jateng	

b. Seksi Sarana Dan Prasarana Darurat

1) Pengembangan Pusdalops Tanggap Darurat/SAR

a) Gambaran kegiatan

Penanggulangan bencana, khususnya pada saat tanggap darurat bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, maka pemerintah/pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala BNPB/BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan.

Untuk melaksanakan kemudahan akses di bidang komando tersebut, maka perlu dilaksanakan Latihan Komando Tanggap Darurat Bencana bagi aparat pemerintah, masyarakat dan lembaga penggiat kebencanaan. Latihan ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan system komando kepada BPBD, instansi/lembaga/organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

Kegiatan ini merupakan perwujudan dari implementasi data dan informasi bencana yang dikirimkan ke PUSDALOPS Penanggulangan Bencana untuk dijadikan sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan darurat selanjutnya. Untuk itu diperlukan pemahaman dan kapasitas para pemangku kepentingan (aparat pemerintah dan masyarakat) dalam hal percepatan perolehan data dan implementasi data menjadi dasar penentuan status keadaan darurat bencana, pembentukan Sistem Komando Penanganan Darurat serta pembagian gugus tugas menjadi bidang-bidang/klaster.

Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR, terbagi menjadi 2 sub bagian yaitu; 1) Kegiatan Latihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana dan 2) Kegiatan Latihan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

b) Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan ini adalah untuk memberikan panduan bagi aparat pemerintah, masyarakat dan lembaga penggiat kebencanaan sekaligus memberikan gambaran operasional pelaksanaan penyampaian informasi secara cepat, tepat dan akurat melalui simulasi percepatan jejaring komunikasi, memberikan panduan dalam menilai kerusakan infrastruktur secara cepat serta melaksanakan Komando Tanggap Darurat yang cepat, tepat dan terarah;

Tujuan dari kegiatan ini adalah demi terciptanya sistem komando yang terarah, terkoordinasi dan komprehensif melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.

c) Pelaksanaan

Latihan dan Simulasi Tim Reaksi Cepat Bencana

Latihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan Prosedur Tim Reaksi Cepat kepada BPBD, instansi/lembaga/ organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tanggap darurat bencana, serta bertujuan agar semua pihak terkait tersebut dapat melaksanakan tugas penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel.

Latihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana dilaksanakan pada Hari/Tanggal, Selasa/13 Februari 2018 bertempat di Gedung Futsal Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang Kab. Pekalongan. Kegiatan diikuti 100 orang peserta, terdiri dari : aparaturnya Pemerintah Kab Pekalongan (Dinas Sosial, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim dan LH, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, BPBD) Aparatur Kecamatan Kandangserang (Kantor Kecamatan, TNI, POLRI, Puskesmas, Perangkat Desa, PKK Kec., Bidan Desa Lambur, Tajur, Kandangserang, Bojongkoneng, Luragung dan Wangkelang,

Unsur Masyarakat Desa Kandangserang (Karang Taruna, Relawan PMI, Relawan TAGANA, Relawan BAGANA, Relawan MDMC, Relawan KOKAM, Relawan SENKOM, Relawan UBALOKA, RESCUE Al Fatah, Rescue Elang Pandowo, Rescue 99 Desa Kandangserang, Satgas BPBD, Siaga Bencana, RAPI dan ORARI). Narasumber kegiatan adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah, Kodim 0710/, Damkar Pekalongan, BPBD Kab. Pekalongan dan PMI Pekalongan.

Latihan Komando Tanggap Darurat Bencana

Pada saat tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana. Kegiatan dilaksanakan pada Hari Kamis 26 Juli 2018 bertempat di Balai Desa Tri Tunggal, Kecamatan Rembang Kab. Rembang dan Pantai Nyamplung Kab. Rembang, dengan 100 orang peserta yang terdiri dari Karangtaruna Ds. Tritunggal Kec. Rembang, PSC 119 Kab. Rembang, Ubaloka Rembang, Tagana Dinsosnakertrans, PKK Kec. Rembang, Satpol PP, Senkom, BAPPEDA, Rembang Bergerak, Pengelola Pantai Nyamplung, MDMC Rembang, Annida Rembang, Garda Bangsa, Polres Rembang, Dishubkominfo, MTA Rembang, Bidan Desa Tritunggal dan Kesbang Kab. Rembang. Narasumber dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, BAPPEDA Prov. Jawa Tengah, Kodim 0720/ Rembang, Damkar Rembang, BPBD Kab. Rembang dan PMI Rembang.

d) Hasil

Latihan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Komando Penanganan Darurat Bencana merupakan salah satu program fasilitasi latihan dan simulasi kepada aparat pemerintah dan unsur pelaksanaan penanggulangan bencana. Dengan Latihan ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan perspektif, pemahaman konsep, visi dan misi, kesatuan gerak dan terbentuknya jaring komunikasi dan koordinasi antar komponen penyelenggara PB. Pembentukan klaster sesuai dengan kewenangannya menjadi penting agar kesatuan rantai komando dapat tercipta, sehingga penanganan darurat bencana menjadi lebih terencana dan terpadu.

Dengan adanya Tim Reaksi Cepat Bencana dan Komando Penanganan Darurat Bencana ini, maka akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelam.

Kegiatan terdiri dari:

- Sesi akademik berupa paparan: a) identifikasi dan sosialisasi potensi bencana di Kec. Kandangserang dan Kec. Rembang dan b) Potensi Gerakan Tanah di Jawa Tengah dan Kebijakan Pemprov. Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana.
- Sesi Latihan yang dipandu oleh instruktur dari PMI, Damkar, BPBD Kabupaten dan BPBD Prov. Jawa Tengah.

e) Foto dokumentasi



a. Simulasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana



b. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana

Gambar 21 Kegiatan Pengembangan Pusdalops Bencana

2) Evaluasi dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat

a) Gambaran kegiatan

Kegiatan ini bertitik berat pada fasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka penanganan darurat bencana, baik itu di dalam masa Siaga Darurat, Tanggap Darurat maupun Pemulihan Dini. Adanya anggaran dari BNPB (APBN) berupa Dana Siap Pakai, membutuhkan dukungan kegiatan dan anggaran untuk pendampingan pelaksanaan kegiatan yang tidak terfasilitasi oleh DSP. Pelibatan pihak eksternal, diantaranya TNI, POLRI, aparat pemerintah kecamatan dan desa membutuhkan koordinasi yang bagus sehingga kegiatan duduk bersama membahas permasalahan darurat bencana mutlak diperlukan. Satu hal yang tidak kalah penting, yaitu pada saat musim kemarau ekstrim, yang ditandai dengan menurunnya debit air tanah dan air permukaan, menyebabkan pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat menjadi sangat kurang, sehingga

dibutuhkan dukungan sarana pemenuhan kebutuhan air bersih untuk warga terdampak di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini memiliki anggaran untuk memfasilitasi dukungan pemenuhan kebutuhan air bersih dimaksud.

b) Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan ini adalah untuk memastikan koordinasi antar pemangku wilayah dalam rangka penanganan darurat bencana serta pemenuhan kebutuhan sarpras darurat, sedangkan Tujuan dari kegiatan ini adalah terjalannya komunikasi terarah melalui rapat koordinasi dan pendistribusian kebutuhan penanganan darurat kekeringan.

c) Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB Siaga Darurat Bencana Angin, banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017/2018

Tujuan Rakor ini adalah untuk memastikan penggunaan Dana Siap Pakai sudah akuntabel dan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Rakor ini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/13 Maret 2018

Pukul : 13.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat BPBD Prov. Jawa Tengah,
Gedung A Lantai IV

Peserta : 46 orang, terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Dana Siap Pakai BNPB di 20 Kab/Kota di Jawa Tengah (Brebes, Blora, Karanganyar, Kebumen, Demak, Pati, Banjarnegara, Purbalingga, Temanggung, Kendal, Pekalongan, Banyumas, Pemalang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Wonosobo dan Wonogiri) serta 2 Kab di Prov. DIY (Bantul dan Kulonprogo)

Rapat Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Pada Musim Hujan dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018.

Tujuan Rakor ini adalah untuk menginventarisir hal-hal sebagai berikut : 1) kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang kekeringan/ kelangkaan air bersih, terutama kebutuhan air bersih untuk konsumsi sehari-hari rumah tangga dan ternaknya; 2) distribusi air bersih dari sumber air ke wilayah desa yang mengalami kelangkaan air bersih 3) sumber-sumber air baku sebagai cadangan sumber air untuk mengatasi kekeringan; 4) sumber-sumber air baru dengan menyiapkan peralatan dan sumberdaya material yang sesuai; dan 5) ketahanan sosial dan suasana yang kondusif bagi warga masyarakat terdampak bencana alam kekeringan/kelangkaan air bersih di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rakor ini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/16 Mei 2018

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat BPBD Prov. Jawa Tengah,
Gedung A Lantai IV

Peserta : sebanyak 100 orang, terdiri dari : Kepala Pelaksana, Kabag TU, dan Kepala Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah

Rapat Rapat Antisipasi Dampak Musim Hujan di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018-2019.

Tujuan Rakor ini adalah untuk menginventarisir hal-hal sebagai berikut: 1) kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang kekeringan/kelangkaan air bersih, terutama kebutuhan air bersih untuk konsumsi sehari-hari rumah tangga dan ternaknya; 2) distribusi air bersih dari sumber air ke

wilayah desa yang mengalami kelangkaan air bersih 3) sumber-sumber air baku sebaga cadangan sumber air untuk mengatasi kekeringan; 4) sumber-sumber air baru dengan menyiagakan peralatan dan sumberdaya material yang sesuai; dan 5) ketahanan sosial dan suasana yang kondusif bagi warga masyarakat terdampak bencana alam kekeringan/kelangkaan air bersih di wilayah Provinsi Jawa Tenga. Rakor ini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/9 Oktober 2018

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Aula Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III Surakarta, Jl. Slamet Riyadi No.1 Surakarta

Peserta : sebanyak 110 orang, terdiri dari : Kepala Pelaksanadan Kepala Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah, PMI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta OPD Unsur Pengarah BPBD Prov. Jawa Tengah

Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Tengah.

Tujuan Rakor ini adalah untuk mencari alternatif dan strategi dari semua pihak di lingkungan Pemprov. Jawa Tengah dan BPBD Kab. Kota se Jawa Tengah dalam menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor yang telah dan akan terjadi pada musim penghujan 2018/2019. Rakor ini dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 19 Desember 2018

Pukul : 14.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Gubernur Jawa Tengah, Gedung A Lantai 2, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

Peserta : Sebanyak 72 orang, terdiri dari : Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, Balai Besar Wilayah Sungai (Bengawan Solo, Pemali Juwana, Serayu Opak, Cimanuk Cisanggarung, Citanduy), Pemporv Jateng (Asisten Pemerintahan dan Kesra, Dinas PU Sumberdaya Air dan Tata Ruang, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah, BPBD, Balai PSDA Pemali Comal, Balai PSDA Bodri Kuto, Balai PSDA Serang Lusi Juwana, Balai PSDA Bengawan Solo, Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo, Balai PSDA Serayu Citanduy) Instansi Vertikal, terdiri dari BPTJ (Wilayah Semarang Wilayah Pati, Wilayah Purwodadi, Wilayah Surakarta, Wilayah Magelang, Wilayah Wonosobo, Wilayah Tegal, Wilayah Pekalongan, Perhutani Jawa Tengah, PMI Jawa Tengah, Kantor SAR Semarang dan BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Fasilitasi Dropping Air Bersih

Dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan/kekurangan air bersih di Provinsi Jawa Tengah, BPBD Prov. Jawa Tengah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan air bersih dengan kerjasama dengan PDAM kabupaten/kota di Jawa Tengah. Mekanismenya pelaksanaannya adalah dengan bekerjasama dengan BPBD Kabupaten/Kota dan atau dengan PDAM Kabupaten/Kota.

Sampai dengan akhir musim kekeringan Tahun 2018, sebanyak 6 (enam) kabupaten telah mengajukan permohonan untuk dilaksanakan dropping air bersih, yaitu

1. Kabupaten Wonogiri melalui Surat Bupati Wonogiri, tanggal 21 Agustus 2018, Nomor: 360/4444, perihal Permohonan Penanganan Bencana Kekeringan Tahun 2018
2. Kabupaten Semarang melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Semarang, tanggal 18 September 2018, Nomor: 360/198/2018, perihal Permohonan Bantuan Air Bersih
3. Kabupaten Purbalingga melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Purbalingga, tanggal 13 September 2018, Nomor: 365/615, perihal Permohonan Bantuan Air Bersih
4. Kabupaten Boyolali melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Boyolali, tanggal 24 Juli 2018, Nomor: 360/404/2018, perihal Permohonan Bantuan Air Bersih
5. Kabupaten Demak melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Demak, No: 380/213/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 perihal Usulan Permohonan Bantuan Air Bersih
6. Kabupaten Wonogiri melalui Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kendal, Nomor: 027/1435/BPBD, tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor: 027/1659/BPBD, tanggal 16 Oktober 2018 perihal Permohonan Bantuan Air Bersih

BPBD Prov. Jawa Tengah menindaklanjuti dengan menyurati Kepala PDAM setempat perihal permohonan kerjasama untuk memberikan dukungan bantuan air bersih ke wilayah terdampak dimaksud. Penandatanganan Naskah Kerjasama dilakukan antara BPBD Prov. Jawa Tengah dengan PDAM/BPBD Kabupaten setempat pada Bulan September – November 2018, dengan mempertimbangkan percepatan pelaksanaan dan kemudahan akses.

d) Hasil

- Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB Siaga Darurat Bencana Angin, banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017/2018.

Keluaran yang didapat dari pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai BNPB Tahun Anggaran 2015 adalah : 1) Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Yang tertib dan akuntabel; dan 2) Sistem pelaporan yang rutin.

- Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Pada Musim Hujan dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018.

Keluaran yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa Pemprov. Jawa Tengah telah merumuskan langkah-langkah antisipasi bencana kekeringan sebagai berikut:

- Menerbitkan Surat Edaran Kepala Pelaksana Harian kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah Nomor : 368/2577/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Antisipasi Dampak Musim Kemarau 2018 agar mengidentifikasi daerah rawan kekeringan serta strategi dan rencana kegiatan yang akan dilakukan Inventarisasi titik-titik sumber mata air baku dan perpipaan/sarpras pendukung yang mengalami rusak.
- Menghimbau kepada Pemkab/Kota agar menerbitkan Surat Keputusan tentang Status Siaga Darurat Kekeringan, berdasarkan rekomendasi dari BMKG
- Gubernur Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan Dana Tak Terduga Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp. 40 Milyar untuk penanganan bencana se Jawa Tengah.

- Menganggarkan di DPA untuk Dropping Air Bersih, sebanyak Rp. 600 Juta dengan alokasi sebanyak 2.000 tanki air bersih;
 - Mempersiapkan rencana kegiatan penanganan darurat bencana kekeringan serta usulan kepada BNPB dan Kementerian PU untuk pembiayaannya
- Rapat Rapat Antisipasi Dampak Musim Hujan di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018-2019

Keluaran yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa Pemprov. Jawa Tengah telah merumuskan langkah-langkah antisipasi bencana banjir dan tanah longsor sbb:

- BPBD Prov Jateng telah mengadakan Rapat Koordinasi perihal Kesiapan dan Antisipasi menghadapi ancaman Bencana Banjir dan Tanah Longsor dengan BPBD Kab/Kota dan PMI se Jateng yang dilaksanakan di Kota Surakarta pada tanggal 9 Oktober 2018
- Menyiapkan konsep SK Siaga darurat banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah sesuai rekomendasi dari BMKG mulai November 2018 s.d Maret 2019
- Senantiasa Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah, seperti BMKG, PMI, ESDM, Basarnas, TNI, POLRI, dll
- Menginventarisir data Nomor Posko Bencana BPBD se Jawa Tengah
- Mengaktifkan posko aju bencana di BPBD Prov Jateng (Nomer Tlp posko aju BPBD Prov Jateng 024 3562293)
- Menyebarkan nomor telpon posko Bencana BPDB Kab/Kota dan pemangku kepentingan melalui media social (twitter, instagram, facebook, dll)

- Mengalokasikan Dana /anggaran belanja tidak terduga (BTT) Gubernur Jawa Tengah untuk penanganan bencana sebesar RP. 20 M
 - Pengadaan bahan logistic kebencanaan melalui lelang ULP Prov Jateng senilai 569 Juta meliputi; Beras, Mie Instan, Air mineral, Kecap, Saos, Minyak goreng, Gula pasir, Teh, Kopi, Susu saset, Susu dan bubur bayi, dan Sarden. Pengadaan langsung Tahap I sebesar Rp. 200 juta, Tahap II sebesar Rp. 200 Juta dan Tahap III sebesar 200 Juta
 - Memutakhirkan Daerah Rawan/Berpotensi Bencana Banjir dan Tanah Longsor di 35 Kab/Kota di Jateng
 - Memutakhirkan peta potensi terdampak bencana banjir longsor tahun 2018 – 2019. (terlampir)
- Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Tengah

Keluaran yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

- Dalam rangka percepatan arus informasi dan optimalisasi pelayanan publik, Gubernur Jawa Tengah mengumpulkan Admin Media Sosial masing-masing OPD di lingkungan Pemprov. Jawa Tengah. Harapannya, melalui media sosial (facebook, twitter, dsb), Pemerintah telah hadir untuk melayani masyarakat, termasuk diantaranya dalam penyampaian informasi kebencanaan.
- Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah juga telah mengadakan Rapat Koordinasi yang dilanjutkan dengan Rapat Teknis di masing-masing Balai PSDA. Posko Banjir juga telah diaktifkan di 12 tempat, yaitu 1 (satu) Kantor Dinas PUSDATARU, 5 (lima) BBWS dan 6 (enam) Balai PSDA se Jawa Tengah. Logistik banjirban berupa karung

dan bronjong juga sudah disiapkan, termasuk langkah-langkah mitigasi struktural melalui perbaikan tanggul dan penambahan anggaran.

- Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah telah mengambil langkah diantaranya: penyiagaan alat berat dan dump truck untuk membersihkan sampah di sungai maupun material yang menutupi jalan. Sebanyak 9 (sembilan) Balai di lingkungan Binmarcipka Prov. Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Penanganan Bencana beserta sumberdaya peralatannya.
- Banjir dan rob di wilayah Kota Semarang dan Demak merupakan sebuah keniscayaan, sehingga BBWS Pemali Juwana telah menutup tanggul-tanggul yang berlubang di sepanjang sungai di wilayah kerjanya. Sebanyak 30 (tiga puluh) pompa portable telah disiagakan di 10 (titik) lokasi, diantaranya: Banjardowo, Terboyo, Sringin Baru dan Muara Kali Tenggang.
- Sejak tahun 2017, Kali Pelus di wilayah Kab. Banyumas telah mengalami longsoran sehingga telah merusak setidaknya 6 (enam) unit rumah. BBWS Serayu Opak telah mendistribusikan 500 bronjong, namun karena keterbatasan sumberdaya di Pemkab. Banyumas, bronjong belum dipasang. BBWS Serayu Opak akan mengatasinya dengan menganggarkan pada TA 2019.
- Wilayah Kabupaten Demak merupakan langganan banjir dari tahun ke tahun. Sungai Dombo menjadi salah satu penyumbang debit air penyebab banjir di wilayah Sayung. BBWS Pemali Juwana menganggarkan Rp. 5 Milyar untuk normalisasi awal Kali Dombo selain memberikan karung plastik banjiran sebagai langkah darurat.

- Kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terutama dalam penanganan jalan rusak akibat bencana. Tokoh masyarakat di wilayah Kab. Banjarnegara siap bersinergi dengan pemerintah dalam penyediaan alat berat untuk membantu keterbatasan Satker Bina MargaProv Jateng (BPTJ Wonosobo) dalam penyediaan alat berat.
 - Dalam percepatan penanganan akibat bencana, kiranya perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di masing-masing OPD/Lembaga, sehingga koordinasi dan komando menjadi lebih cepat dan terarah.
- Fasilitas Dukungan Dropping Air Bersih
- Hasil kegiatan Fasilitas Dropping Air Bersih Tahun 2017, bahwa Sesuai dengan alokasi yang diberikan dan kemampuan armada Kabupaten terdampak, maka alokasi jumlah pengiriman air bersih sebagai berikut: Kabupaten Wonogiri sebanyak 200 tanki, Kabupaten Demak sebanyak 300 tanki, Kabupaten Kendal sebanyak 300 tanki, Kabupaten Purbalingga sebanyak 200 tanki, Kabupaten Boyolali sebanyak 16 tanki dan Kab. Semarang sebanyak 200 tanki.

e) Foto dokumentasi





Gambar 22 Kegiatan Evaluasi Dana Siap Pakai BNPB Siaga Darurat Bencana Angin, banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017/2018



Gambar 23 Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Pada Musim Hujan dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018





Gambar 24 Rapat Rapat Antisipasi Dampak Musim Hujan di Prov. Jawa Tengah Tahun 2018-2019



Gambar 25 Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Jawa Tengah

3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana

a) Gambaran kegiatan

Jenis ancaman bencana sangat beragam, meliputi: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kondisi dan tingkatan ancaman menuntut profesionalisme dan kompetensi para petugas dengan penguasaan iptek, peralatan dan skill yang tinggi dan terspesialisasi.

Kejadian banjir dan tanah longsor yang terjadi pada bulan-bulan basah dan kejadian kebakaran serta kekeringan yang terjadi pada bulan-bulan kering diperparah dengan tidak

adanya jejaring komunikasi yang bagus antar lembaga dan dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pemantauan yang mendalam pada saat kejadian bencana, sehingga didapatkan informasi tentang kronologis, dampak yang ditimbulkan serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Tujuan

Maksud dilaksanakannya Kegiatan ini adalah untuk melakukan peninjauan lapangan untuk mendapatkan informasi akurat tentang suatu kejadian bencana beserta dampak serta kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan Tujuan dari kegiatan ini adalah informasi yang detail sebagai konsumsi pengambil kebijakan untuk penanganan selanjutnya

b) Pelaksanaan

- Pemantauan langsung Tim reaksi Cepat di lapangan Bulan Januari - Desember 2018.

c) Hasil

Selama Tahun 2018, Gubernur telah memberikan bantuan melalui Anggaran Dana Tak Terduga total sebesar Rp. 15,2 Milyar, untuk korban terdampak bencana sebagai berikut:

Bencana Angin Putting Beliung di Kab. Cilacap (Rp. 420 Juta),
Bencana Tanah Longsor di Kab. Purbalingga (Rp. 47,5 Juta),
Bencana Tanah Longsor di Kab. Purworejo (Rp. 2.010 Juta),
Bencana Kebakaran di Kota Pekalongan (Rp. 1.5 M), Bencana
Gempa Bumi di Kab. Banjarnegara (Rp. 2.430 Juta), Bencana
Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Kebumen (Rp. 85 Juta),
Bencana Angin Putting Beliung di Kab. Blora (Rp. 225 Juta).

d) Foto dokumentasi



Gambar 26 Banjir di Kab. Blora



Gambar 27 Erupsi Merapi di Kab. Klaten



Gambar 28 Tanah Longsor di Kab. Purworejo



Gambar 29 Tanah Longsor di Kab. Wonosobo



Gambar 30 Kegiatan Tim Reaksi Cepat bencana Jawa Tengah

Kegiatan pada Seksi sarana dan prasarana darurat Bidang Penanganan Darurat tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 29
Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Darurat Tahun 2018

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR			
a	Lat TRC	13 Feb 2018	Pekalongan	100
b	Lat TRC Komando Penanganan Darurat	26 Juli 2018	Rembang	100
2	Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat			
a	Rakor Monitoring Evaluasi Penggunaan DSP BNPB	18 Maret 2018	Semarang	46
b	Rakor Evaluasi Musim Hujan dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau	16 Mei 2018	Semarang	100
c	Rakor Antisipasi Dampak Musim Hujan	9 Oktober 2018	Surakarta	100
d	Rakor Penanganan Banjir dan Tanah Longsor	19 Desember 2018	Semarang	72
e	Dropping air bersih	September – November 2018	6 kab/kota	
4	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat			
a	Assesment Banjir	20 Maret 2018	Kab. Blora	
b	Assesment Erupsi Merapi	1 Juni 2018	Kab. Klaten	
c	Assesment Tanah Longsor	26 Juni 2018	Kab. Purworejo	

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
d	Assesment Tanah Longsor	14 Desember 2018	Kab. Wonosobo	
e	Assesment Tanah Longsor	29 Februari 2018	Kab. Brebes	
f	Assesment Gempa Bumi	18 April 2018	Kab. Banjarnegara	

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan 8 kegiatan dengan anggaran Rp. 1.150.000.000,- dan pada anggaran perubahan ada penambahan anggaran pada Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng sebanyak Rp 400.000.000,- menjadi Rp 1.550.000.000,- terdapat kenaikan anggaran sebesar 34,78%. Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh 2 (dua) seksi, yaitu seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana;
- b. Kegiatan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca;
- c. Kegiatan Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah;
- d. Kegiatan Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana;
- f. Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Damage and Losses Assesment) dan JITU PB;
- g. Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian (Damage and Losses Assesment) dan JITU PB;
- h. Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jawa Tengah;
- i. Kegiatan Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana.

a. Seksi Rehabilitasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi rehabilitasi antara lain adalah:

1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana

a) Gambaran kegiatan

Kegiatan Pemberian bantuan Alat dan Pelatihan melalui Kegiatan Pemulihan dan peningkatan Sosial dan Ekonomi Pascabencana Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Banjarnegara dan Purworejo.

b) Tujuan

- Membantu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pengoperasian alat yang diberikan.
- Membantu meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat di daerah pascabencana melalui kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya.

c) Pelaksanaan

Kegiatan Bantuan alat dan pelatihan kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Pascabencana 2018 dilaksanakan Sebagai Berikut:

(1) Kabupaten Banjarnegara

- Pelatihan dilaksanakan dengan sharing cost bersama BPBD kabupaten Banjarnegara dan dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 23-24 Juli 2018 bertempat di Balai Desa Clapar, Madukara- Banjarnegara.
- Pelatihan yang diampu oleh BPBD Banjarnegara dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018 dengan Narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Banjarnegara.
- Pelatihan yang diampu oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 24 Juli 2018 dengan Narasumber dari Fasilitator PT Lintang Tama Malang dengan tema Pengolahan dan Pengoperasian alat acuum Vrying

- Peserta pelatihan berjumlah 40 orang terdiri dari Kelompok Wanita Tani mekar Sari Desa Clapar Kec. Madukara

(2) Kabupaten Purworejo

- Pelatihan juga dilaksanakan dengan sharing cost bersama BPBD kabupaten Purworejo dan dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 25-26 Juli 2018 bertempat di Balai Desa Jelok, Kaligesing-Purworejo
- Pelatihan yang diampu Oleh BPBD Purworejo dilaksanakan tanggal 25 juli 2018 dengan materi pengenalan dan praktek alat pengolahan gula semut yang didampingi oleh fasilitasi CV. Manoreh Politan
- Pelatihan yang diampu oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 26 juli 2018 dengan Narasumber Kalaksa BPBD Purworejo dan Dinas UKM dan Perdagangan Kab. Purworejo
- Peserta Pelatihan berjumlah 110 Peserta dari 2 Desa; Desa Jelok, kaligesing dan Desa Sokoagung, Bagelen

d) Hasil

- (1) Pelaksanaan pelatihan di 2 Kabupaten berjalan dengan baik serta para peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan sampai selesai
- (2) Dalam rencana jangka pendek, pengolahan keripik salak akan difasilitasi tempat oleh pihak desa
- (3) Untuk penguatan dan menjaga kesinambungan usaha kelompok, pihak kecamatan akan mengupayakan bantuan dan pelatihan yang dibiayai oleh anggaran desa
- (4) Kepala desa jelok akan memberdayakan BUMDES serta akan menjalain kerjasama dengan pihak koperasi dan exportir untuk penyaluran hasil produksi kelompok
- (5) BPBD kabupaten Purworejo siap mamfasilitasi kelompok pengolah gula semut melakukan studi lapangan ke industri-

industri gula semut di Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pembelajaran kelompok

- (6) BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan BPBD Kabupaten Banjarnegara dan Purworejo akan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kepada kelompok penerima bantuan alat untuk memantau keberhasilan program kegiatan.

e) Foto dokumentasi



Kegiatan Pelatihan dilaksanakan di Balai Desa Clapar



Pemberian Contoh Pengoperasian Alat Oleh Narasumber



Penyerahan Simbolis Alat Pengolah Gula semut Oleh Plt Kasi Rehabilitasi BPBD Prov Jateng



Pendampingan Pelatihan Pengolahan Gula Semut oleh Narasumber

Gambar 31 Acara Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana

2) Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana

a) Gambaran kegiatan

Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

b) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi ini adalah memfasilitasi proses integrasi prioritas kebutuhan penganan pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor sehingga

dapat diambil kebijakan yang tepat sinergi dengan konsep penyusunan RPJMD Prov. Jateng 2018 – 2023.

c) Pelaksanaan

Rakor dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan ditutup oleh Kasi Rehabilitasi mewakili Bapak Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah.

1) Narasumber :

- Ir. Taufik Kartiko – Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi BNPB;
- Suprpto, SH MT – Kasi Perumahan Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- Ir. Slamet Kasira – Kabid Bidang Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- Herawati Prarastyani – Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

2) Moderator : Agung Koenmarjono, SH – Kasubbid Kessos Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

3) Peserta yang hadir 40 (empat puluh) orang dari unsur :

- Kabid/Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/ Kota
- OPD terkait Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasnabencana di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

d) Hasil

Terinventarisasinya usulan pemulihan pascabencana dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya perlu diverifikasi kepantasan untuk diintegrasikan dalam konsep RPJMD Tahun 2018-2023.

e) Foto dokumentasi



Gambar 32 Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kabid dan Kasi BPBD se-Jawa Tengah dan OPD terkait

3) Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah

a) Gambaran kegiatan

Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pascabencana mengkoordinasikan penanganan rehabilitasi pascabencana di Jawa Tengah dengan tujuan penganggaran bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana khususnya penganggaran penanganan rehabilitasi pascabencana di Jawa Tengah difokuskan pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

b) Tujuan

Menyamakan persepsi, mendorong keterpaduan, dan sinergitas pembiayaan pelaksanaan pemulihan/peningkatan perumahan pasca bencana. Fokus utama adalah untuk percepatan relokasi korban pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Kegiatan Rekor secara umum membahas Penganggaran penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

c) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2018, bertempat di Hotel Regina Pemalang, jalan Raya Pantura KM.6

No.10, Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52362. Peserta berjumlah 40 (empat puluh) orang peserta dari 33 BPBD Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Pelaksana dan Sekretaris.

Acara dibuka oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah dan ditutup oleh Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah yang mewakili Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah.

d) Hasil

- Penanganan pascabencana merupakan tahap terakhir dalam siklus penanganan akibat bencana yang bertujuan agar kehidupan masyarakat yang mengalami bencana dapat pulih kembali sehingga dapat memulai kembali kegiatan sosial-budaya dan usaha ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- Salah satu untuk mencapai tujuan diperlukan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah terdampak bencana seperti bantuan alat untuk kelompok masyarakat.
- Peran Kepala dan Sekretaris di BPBD sangat penting dalam penganggaran dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan diharapkan ke depan untuk penganggaran penanggulangan pascabencana diharapkan mampu memberikan bantuan alat kepada pemerintah desa/kecamatan terdampak bencana.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPKAD bahwa penanganan pascabencana dapat diberikan melalui Bantuan Sosial dengan salah satu tujuan penggunaan pemberian bansos adalah penanggulangan bencana.
- Program Rehabilitasi dan rekontruksi Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Pemalang mengacu pada Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 Indikasi Rencana Program Prioritas.

- BPKAD Kabupaten Pemalang menginformasikan bahwa mekanisme penganggaran pascabencana Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui :

- 1) Penyediaan anggaran antisipatif melalui program dan kegiatan pascabencana.
- 2) Penyediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana terdampak bencana.
- 3) Pergeseran anggaran.
- 4) Perencanaan anggaran untuk tahun rencana berikutnya.
- 5) Kondisi darurat dan keperluan mendesak.
- 6) pemanfaatan belanja tidak terduga dan uang kas yg tersedia.
- 7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya.
- 8) BPBD Kabupaten Pemalang selalu berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD dalam penanggulangan bencana.

e) Foto dokumentasi



Gambar 33 Rakor Rehabilitasi Pascabencana Jawa Tengah

Rangkuman pelaksanaan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 30
Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2018

No	Kegiatan /Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana			
a	Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah TA. 2018	20-21 Maret	Kab. Magelang	40
2	Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana			
a	Proses Relokasi Pendampingan Pengelolaan Huntap dan Pemulihan Lahan Kritis pasca	20-21 Agustus	Hotel Regina Pemalang	40
3	Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pascabencana			
a	Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pascabencana di Jawa Tengah	30 Agustus	Kab. Sragen	40

b. Seksi Rekonstruksi

1) Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana

a) Gambaran kegiatan

Pelaksanaan inventarisasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di Jawa Tengah merupakan inventarisasi dan verifikasi data kerusakan infrastruktur terdampak bencana di kabupaten/kota se Jawa Tengah dengan melibatkan Dinas terkait berkepentingan di penanggulangan bencana baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Jawa Tengah. Kegiatan ini diisi dengan rapat kecil dan observasi lapangan sebagai upaya verifikasi data yang telah diajukan/dilaporkan BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan dikoordinasikan bagaimana cara penanganannya sesuai dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b) Tujuan

Penanganan Pascabencana dititik beratkan pada kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat dalam rangka pemulihan social ekonomi pascabencana.

c) Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Pemulihan dan peningkatan social ekonomi pascabencana bertempat di Aula BPBD Kab. Sragen, 30 Agustus 2018.

Kegiatan dibuka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tnegah dan hadir pula dalam kegiatan Sekretaris daerah Kabupaten Sragen Peserta sebanyak 40 orang terdiri dari Kalaksa BPBD se Jawa Tengah, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi 7 Kabupaten Pelaksana Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pascabencana yang bersumber dari APBD dan APBN.

Narasumber terdiri dari:

- (1) Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dengan tema” Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peningkatan Sosial dan ekonomi Pascabencana di Jawa Tengah”
- (2) BPBD Kab. Banjarnegara dengan tema “Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan dan peningkatan Sosial dan ekonomi pascabencana di Kabupaten Banjarnegara”
- (3) BPBD Kabupaten Purworejo dengan tema “Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan ekonomi Pascabencana di Kabupaten Purworejo.

d) Hasil

- (1) Kegiatan Rakor membahas penanganan Sosial ekonomi Pascabencana di Jawa Tengah dan sharing pengalaman penanganan sosek pascabencana yang dilaksanakan di Kab. Banjarnegara dan Purworejo sebagai penerima bantuan alat untuk peningkatan ekonomi produktif dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Kegiatan dilakukan dengan memeberikan stimulus atau rangsangan untuk pemulihan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat, antara lain melalui :
 - Revitalisasi kelompok tani, kebun dan ternak.

- Diversifikasi/alternative usaha pertanian dan penyediaan bibit tanaman/ternak.
 - Bantuan Modal usaha untuk pedagang dan industri kecil menengah.
 - Pemulihan aktivitas perdagangan dan jasa.
- (3) - Bappeda akan membantu fasilitasi dan mengawal usulan kegiatan pascabencana pemulihan social ekonomi masyarakat.

e) Foto dokumentasi



Acara Pembukaan oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Sekda Kabupaten Sragen



Rapat Koordinasi dihadiri oleh Kalaksa BPBD se-Jawa Tengah

Gambar 34 Inventarisasi sector terdampak bencana Jawa Tengah

2) Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Losses Assesment*) dan JITU PB

a) Gambaran Kegiatan

Kajian Kebutuhan Pascabencana atau Post Disaster Need Assessment (PDNA) adalah suatu rangkaian kegiatan Pengkajian dan Penilaian akibat bencana, Analisa dampak bencana dan Perkiraan kebutuhan pascabencana yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi (RENAKSI) rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi Proses Identifikasi, penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, social dan lintas sektor.

b) Tujuan

Tujuan Pelatihan adalah meningkatkan Kapasitas BPBD dan PMI kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Pengkajian Kebutuhan Pascabencana untuk kesiapsiagaan Pascabencana wilayah pascabencana.

c) Pelaksanaan

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2018 bertempat di Hotel Oxalis Magelang, Jl. Cempaka No. 17, Kemirirejo, Kota Magelang.

Acara dibuka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah yang di damping oleh Plt. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah beserta staaf dan ditutup oleh Ketua Pujiono Center yang didampingi Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah serta dihadiri 50 orang peserta dari BPBD Kabupaten/Kota dan PMI Kabupaten/Kota.

Narasumber dari Pujiono Center dan Moderator/Pendamping Lapangan dari BPBD Kabupaten Magelang, Masyarakat Desa Progowati Kecamatan Mungkid serta Desa Ngawen Kecamatan

Muntilan, dengan peserta dari BPBD dan PMI dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

d) Hasil

Dari Hasil kerja masing-masing kelompok, dapat disimpulkan bahwa secara umum peserta pelatihan sudah dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan dalam pelatihan ini, sehingga diharapkan apa yang didapat pada pelatihan ini dapat diaplikasikan pada kejadian yang sebenarnya di masing-masing daerah peserta.

e) Foto dokumentasi



Acara Pembukaan oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Magelang



Narasumber dari Pujiono Center memaparkan materi

Gambar 35 Kegiatan JITU PASNA

3) Kordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jateng

a) Gambaran kegiatan

Kegiatan koordinasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan memfasilitasi BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk memperoleh dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi penanganan rekonstruksi pasca bencana dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna penanganan rekonstruksi pascabencana di wilayah terdampak bencana.

b) Tujuan

Maksud dari kegiatan adalah koordinasi dan fasilitasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan rapat koordinasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah yang melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk menyamakan persepsi perlunya dana hibah daerah sebagai pendukung kegiatan penanganan rekonstruksi pasca bencana.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan koordinasi penanganan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang dalam bentuk rapat koordinasi dengan melibatkan BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan 70 (tujuh puluh) orang peserta dari 33 BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Rapat koordinasi diselenggarakan pada tanggal 11-12 Mei 2018 di Aula Kantor BPBD Kabupaten Kudus di Jln. Gang 3 Timbangan Mlati Norowito Kota Kudus. Rapat koordinasi mengambil tema “Manajemen Penanggulangan Pasca Bencana” dengan narasumber dari:

- Sigit Sulistyono – Kalaksa BPBD Kabupaten Kendal
- Boedi Hardjono – Kalaksa BPBD Kabupaten Purworejo
- Moderator – Kalaksa BPBD Kabupaten Kudus

d) Hasil

- Penanganan paska bencana merupakan tahap terakhir dalam siklus penanganan akibat bencana yang bertujuan agar kehidupan masyarakat yang mengalami bencana dapat pulih kembali sehingga dapat memulai kembali kegiatan sosial-budaya dan usaha ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- Penanganan rekonstruksi Paska Bencana mempunyai sasaran untuk menurunkan indeks risiko bencana dengan cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah Paska Bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak.
- Peningkatan kapasitas BPBD dan OPD terkait dalam penyusunan dokumen pemulihan paska bencana sebagai upaya penanganan rekonstruksi Paska Bencana.
- Kegiatan kajian kebutuhan Paska Bencana (Jitu Pasna) sudah dimulai saat tahap transisi dari darurat ke pemulihan.
- Pembangunan sementara fasilitas sosial dan umum yang rusak akibat bencana, tanpa harus menunggu rehabilitasi dan rekonstruksi agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus terlayani dengan baik.
- BPBD Kabupaten Purworejo dalam penanganan rekonstruksi paska bencana telah terintegrasi dengan kegiatan pengurangan risiko bencana, sebagai contoh penanganan rekonstruksi paska bencana tanah di Desa Donorati Dusun Caok tahun 2016 bahwa BPBD Kabupaten Purworejo telah melakukan penanganan rekonstruksi paska bencana dengan perancangan rumah instan sederhana sehat (RISHA) untuk warga terdampak bencana.
- BPBD Kabupaten Kendal dalam penanganan rekonstruksi paska bencana melakukan penanganan bersama OPD terkait dengan

melakukan inventarisasi sektor-sektor terdampak bencana yang belum ditangananni.

e) Foto dokumentasi



Gambar 36 Kegiatan Rakor Rekonstruksi pasca bencana

4) Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jawa Tengah

a) Gambaran kegiatan

Kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana di Jawa Tengah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai komando, koordinator dan pelaksana pada tahapan pasca bencana dengan cara mempertemukan semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana multi sektor baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun wadah pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi ataupun forum diskusi terfokus (FGD) sebagai kegiatan koordinasi dan fasilitasi serta konsultasi semua pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Jawa Tengah, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, kegiatan sinergitas multi sektor pasca bencana di Jawa Tengah, juga merupakan *sharing* pendanaan APBD

Provinsi Jawa Tengah untuk pendampingan pengelolaan pelaksanaan dana hibah daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah. Dengan demikian terbentuklah suatu pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan penanggulangan bencana bahwa pada tahapan pasca bencana diperlukan usaha bersama untuk pemulihan dan rekonstruksi kembali sarana dan prasarana umum terdampak bencana.

b) Maksud dan Tujuan

Untuk Mensinergikan Data-data dalam Pelaksanaannya di Lapangan dalam Penanggulangan bencana di Jawa Tengah

c) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : 30 April 2018

Tempat : R. Rapat Lt. IV Gedung A Kantor BPBD
Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol
No. 1 F Semarang

Peserta : 35 (Tiga Puluh Lima) peserta

Narasumber :

- Tuban Wiyoso – BMKG Semarang Jateng
- Nanang Dwi Saputro - Bappeda Provinsi Jateng
- Swasono RR- BNPB

5) Pelaksanaan Forum Group Discussion Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Pekalongan tanggal 29-30 November 2018 di Hotel Dafam Pekalongan.

a) Maksud dan Tujuan

FGD untuk mengevaluasi Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Pekalongan serta Mendiskusikan Kelanjutan dari Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

b) Pelaksanaan

- 1) FGD I di Pekalongan tanggal 29-30 November 2018 di Hotel Dafam Pekalongan dibuka oleh Bapak Kalakhar BPBD Prov. Jateng, dan hadir sebagai, Narasumber:

Bambang Sudjarmiko, SH - Kalaksa BPBD Kabupaten Pekalongan

- Moderator:

Nanang Dwi Saputra, SE – Analis Program Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

- Peserta yang hadir 35 (tiga puluh) orang dari unsur:

BPBD Provinsi Jawa Tengah, Tim Pendamping Teknis, BPBD Kabupaten Pekalongan, OPD Teknis terkait Kabupaten Pekalongan, Konsultan Perencana, Konsultan Pelaksana, Konsultan Pengawas.

- 2) FGD II di Pekalongan tanggal 19-20 Desember 2018 di Hotel Dafam Pekalongan dibuka oleh Bapak Kalakhar BPBD Prov. Jateng, dan hadir sebagai, Narasumber :

Gatot Satria Wijaya – Kasubdit Rehab Rekon FASOS pada Kedeputan Bidang RR BNPB

- Moderator:

Nanang Dwi Saputra, SE – Analis Program Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

- Peserta yang hadir 35 (tiga puluh) orang dari unsur :

BPBD Provinsi Jawa Tengah, Tim Pendamping Teknis, BPBD Kabupaten Pekalongan, OPD Teknis terkait Kabupaten Pekalongan, Konsultan Perencana, Konsultan Pelaksana, Konsultan Pengawas

c) Hasil

1. Focus Group Discussion (FGD) yang telah diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh BPBD Kabupaten Pekalongan, Inspektorat, Konsultan Pengawas,

Konsultan Pelaksana menghasilkan Berita Acara sebagai berikut :

- a. Dari 8 paket pekerjaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang ada di Kab. Pekalongan, ada 1 paket pekerjaan dikhawatirkan tidak akan selesai 100 % yaitu paket pekerjaan rekonstruksi jalan dan jembatan Yosorejo-Curug Muncar Kecamatan. Petungkriyono dimana progres sampai tanggal 22 November 2018 baru mencapai 42,40 %. Hal ini disebabkan karena :
 - 1) Penyedia jasa tidak melaksanakan metode kerja secara professional mestinya mengutamakan pekerjaan yang sulit terlebih dahulu untuk dikerjakan seperti pemasangan Sheetpile sehingga tidak terbentur cuaca ekstrem yang saat ini telah terjadi di lokasi pekerjaan.
 - 2) Tingkat kesulitan pekerjaan yang dialami oleh penyedia jasa PT. Melindo berupa pemasangan Sheet Pile sebanyak 120 buah dengan panjang 6 meter dan lebar 1 meter karena dipasang di daerah yang sangat berbahaya dengan tingkat kemiringan 80 %.
 - 3) Penyedia jasa tidak berani mengambil resiko terhadap para pekerjanya dan lebih baik dibayar sesuai progress fisik saja.
- b. Perlu ada opname pekerjaan sesuai progress oleh tim PPHP pekerjaan sebagai dasar pembayaran pekerjaan dan harus dilakukan secara komprehensif.
- c. Focus Group Discussion (FGD) menghasilkan kesepakatan apabila dalam pelaksanaan terdapat pekerjaan yang belum selesai, masa waktu pekerjaan telah diperpanjang dan apabila masih terdapat sisa anggaran maka dana akan kembali ke kas negara.

2. Delapan Paket pekerjaan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pekalongan, 5 (lima) pekerjaan sudah selesai dengan progress 100% sedangkan 3 (tiga) pekerjaan rekonstruksi belum bisa di selesaikan seluruhnya yaitu paket pekerjaan Rekonstruksi jalan Pecakaran Api-Api di Kecamatan Wonokerto (94,51%), Paket Pekerjaan Jalan Desa Timbangsari Kecamatan Lebakbarang (94,63%) dan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Yosorejo-Curugmuncar Kecamatan Petungkriyono (48,387%);
- Apabila terdapat pekerjaan yang belum selesai maka BPBD yang bersangkutan dapat mengajukan dana hibah ulang maksimal 2 (dua) kali pengajuan dengan lama waktu pertama satu tahun dan dilanjut 9 bulan;
 - Pemerintah Daerah Penerima Dana Hibah bertanggungjawab atas pekerjaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terselesaikan;
 - Sisa dana hibah atas paket pekerjaan yang dilaksanakan dikembalikan ke kas Negara dan dilaporkan ke aplikasi simponi dan e-pelaporan;
 - Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri.

d) Foto dokumentasi





Rakor dan FGD

Gambar 37 Kegiatan Sinergitas Multisektor

6) Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi

a. Gambaran Kegiatan

Kegiatan Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan BPBD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah dan sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat Membangun sinergitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terintegrasi dan tersinergi diantara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan pascabencana; Menyamakan persepsi/cara pandang dalam mengimplementasikan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; serta dapat memujudkan rekomendasi dan rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan yang lebih baik serta memberi manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sering terjadi dalam pelaksanaan dilapangan kiranya dapat teratasi dengan baik. Pemahaman dan kesepahaman dapat terwujud serta dapat menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi program kedepan yang lebih baik dan tepat sasaran dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana di Jawa Tengah.

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Membangun sinergitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terintegrasi dan tersinergi diantara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan pascabencana;
 - a. Menyamakan persepsi/cara pandang dalam mengimplementasikan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Memujudkan rekomendasi dan rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan yang lebih baik serta memberi manfaat kepada masyarakat.

2) Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terintegrasi dan tersinergi diantara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan pascabencana;
- b. Terwujudnya persamaan persepsi/cara pandang dalam mengimplementasikan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. Terwujudnya rekomendasi dan rumusan kebijakan dalam rangka perbaikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan yang lebih baik serta memberi manfaat kepada masyarakat.

c. Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertempat di Hotel Lor In, Jln. Adi Sucipto No.47, Kenaiban, Bulukan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 27-28 Agustus 2018. Kegiatan dibuka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah dan hadir pula dalam kegiatan Deputi Bidang Peralatan dan Logistik, BNPB, Bapak Rudi Phadmanto.

Peserta sebanyak 50 orang terdiri dari Kalaksa BPBD se Jawa Tengah, Kabid, dan Para Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 7 Kabupaten Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang bersumber dari APBD dan APBN.

Narsum Kegiatan terdiri :

- Kasubdit RR Fasos BNPB, dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Jawa Tengah”
- BPBD Kab. Cilacap dengan tema “Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Cilacap” serta;
- BPBD Kab. Magelang dengan tema “Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Cilacap”.

d. Hasil

- Kegiatan Rakor membahas manfaat dan dampak pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Pascabencana di Jawa Tengah;
- Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Pascabencana telah banyak memberi dampak dan manfaat baik secara langsung maupun kepada masyarakat pasca kejadian bencana;
- Program relokasi telah dapat mengangkat kembali harkat kehidupan masyarakat yang menempati hunian sementara;
- Bagi masyarakat korban bencana seperti longsor yang sudah terbiasa hidup berkelompok, relokasi merupakan alternatif tepat untuk tetap dapat hidup bersama kelompoknya;
- Rencana anggaran RR akan lebih diarahkan pada kegiatan pengembangan sosial ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana/relokasi melalui Usulan anggaran untuk bantuan peralatan bagi usaha ekonomi produktif masyarakat dan penyaluran bantuan.

e. Dokumentasi



Gambar 38 Kegiatan Sinergitas Multisektor

Pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31
Kegiatan Seksi Rehabilitasi Tahun 2018

No	Kegiatan /Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1.	Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana Jateng			
a	Inventarisasi dan Verifikasi kerusakan infrastruktur		Brebes	
b	Inventarisasi dan Verifikasi kerusakan infrastruktur		Pekalongan	
c	Inventarisasi dan Verifikasi kerusakan infrastruktur		Blora	
d	Inventarisasi dan Verifikasi kerusakan infrastruktur		Karanganyar	
e	Inventarisasi dan Verifikasi kerusakan infrastruktur		Kebumen	
f	Inventarisasi dan Verifikasi kerusakan infrastruktur		Wonosobo	
2.	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian (<i>Damage and Losses Assesment</i>) dan JITU PB			
a	Pelatihan DALA dan JITU Pasna	17-19 Juli	Magelang	50 Orang
3.	Kordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah			
a	Rakor Pendampingan Kab/Kota terdampak bencana	11-12 Mei	BPBD Kabupaten Kudus	70 orang
4.	Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jawa Tengah			
a	FGD Ke-I	29-30 November	Hotel Dafam Pekalongan	35 orang
b	FGD Ke-II	19-20 Desember	Hotel Dafam Pekalongan	35 orang

No	Kegiatan /Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
5.	Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi	27-28 Agustus	Hotel Lor In	50 orang

5. Bidang Logistik dan Peralatan

Bidang Logistik dan Peralatan melaksanakan 4 kegiatan dengan nilai anggaran Rp. 3.800.000.000,-. Kegiatan dikoordinasikan oleh 2 (dua) seksi, yaitu seksi peralatan dan seksi logistik, meliputi :

- Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana
- Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah
- Kegiatan Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana

a. Seksi Logistik

- 1) Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengelolaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah

a) Gambaran kegiatan

Pengelolaan logistik bencana yang sistematis, pelayanan yang cepat, tepat sasaran, efektif dan efisien penyelenggaraan dan akuntabel menjadi salah satu penentu penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. Dengan adanya sifat kedinamisan bencana, yaitu :

- Tingkat ketidakpastian yang tinggi, sulit diprediksi (kapan, di mana, berapa besar intensitasnya);
- Keunikan/spesifik (bencana tidak pernah persis sama maka harus ditangani dengan khusus tidak bisa dilaksanakan sebagai kegiatan rutin);
- Dinamis dan kompleks, tidak pernah terjadi karena sebab tunggal ada interaksi multi pihak (alam dan manusia serta lingkungan).

- Harus menggunakan Pendekatan multi disiplin, multi pihak dan multi keahlian;
- Borderless, tidak mengenal batas wilayah administrasi;
- Berdampak pada pihak-pihak yang luas (Rantai pasokan, ekonomi global);
- Bencana merupakan urusan bersama.

Tantangan perspektif teknis bidang logistik adalah adanya permintaan/kebutuhan barang yang tidak terduga (sesuai lokasi bencana), lokasi pemberian bantuan berubah-ubah, infrastruktur yang ada kadang mengalami kerusakan, sedangkan alokasi waktu yang singkat dengan keterbatasan sumber daya serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kondisi demikian Pengelolaan Logistik Bencana bukan merupakan pekerjaan yang sepele dan hanya sekedar menyampaikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Oleh sebab itu perlu diadakan Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan Logistik di seluruh Jawa Tengah sesuai dengan Peta Rawan Bencana. Disamping itu juga perlu diadakan inventarisasi usulan kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas petugas dan penguatan kelembagaan.

b) Tujuan

Adanya Pemetaan kebutuhan, ketersdiaan dan kekurangan logistik di masing-masing wilayah dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana.

- Adanya kesamaan visi dan misi dalam pengelolaan logistik bencana,
- Adanya pemetaan kondisi real kebutuhan lapangan dan terinventarisasikannya permasalahan-permasalahan yang muncul pada pengelolaan logistika bencana.

- Adanya kesepahaman prosedur tetap dalam penyelenggaraan pengelolaan logistic bencana.

c) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018, bertempat di Ruang Pertemuan Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Provinsi Jawa Tengah dengan 80 orang peserta yang berasal dari 33 BPBD kabupaten/Kota se Jateng. Narasumber kegiatan

- Deputi Logistik dan Peralatan BNPB.
- Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Prov Jateng.
- BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kebumen.

d) Hasil

1) Output

- Pengelolaan Logistik Bencana BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki data dukung pemetaan kebutuhan, ketersediaan dan kekurangan logistik.
- Peserta memahami mekanisme pengelolaan logistik bencana,
- Dilaksanakannya pemetaan kondisi real kebutuhan lapangan dan terinventarisasikannya permasalahan-permasalahan yang muncul pada pengelolaan logistika bencana.
- Peserta memahami prosedur tetap dalam penyelenggaraan pengelolaan logistic bencana.

2) Outcome.

- Para Penyelenggara Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Adanya prosedur tetap dan mekanisme yang baku dalam penganggaran dan pengadaan barang-barang logistik.
- Adanya prosedur tetap dan mekanisme yang baku sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas bagi para pelaksana penanggulangan bencana di lapangan.

- Adanya protret pemetaan kendala-kendala di lapangan dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

e) Foto dokumentasi



Gambar 39 Rakor Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengelolaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah

2) Rakor Klaster Logistik Bencana

a) Gambaran kegiatan

Tiga pilar utama dalam Penanggulangan Bencana adalah seluruh pihak yang berperan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah sebagai leader, Dunia Usaha sebagai stakeholder dan masyarakat sebagai subyek harus bekerja secara sinergi dan koordinatif agar pelaksanaan penanggulangan bencana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Perka BNPB No. 18 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Terdampak Bencana, bahwa Pemerintah dalam hal ini BPBD Provinsi

mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembentukan Klaster logistik yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan pengelolaan logistik. Klaster Logistik terdiri dari para stakeholder dan para penggiat di bidang logistik. Sebagai awal pembentukan klaster logistik diperlukan satu kesamaan persepsi dalam penanggulangan bencana. Tujuan diadakan rakor adalah pemberian wawasan dan pengetahuan tentang program-program penanggulangan bencana kepada stakeholder dan para penggiat di bidang logistik agar terbangun satu kesamaan visi dan misi dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

b) Tujuan

- Adanya satu kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Adanya pemahaman dan pengetahuan tentang program-program layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- Adanya pemahaman dan pengetahuan tentang pergudangan dan pengelolaan logistik bencana.
- Adanya perencanaan terhadap pembentukan klaster logistik tingkat Provinsi.

c) Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2018, bertempat di Ruang Pertemuan Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Provinsi Jawa Tengah dengan 50 orang peserta yang berasal dari instansi terkait Se-Jateng aparaturnya dan relawan.

(1) Materi yang disampaikan oleh :

- Direktorat Logistik BNPB;
- BULOG Divre Jawa Tengah dan DIY;

- Mercy Corps program TATTs Jawa Tengah;
- BPBD Provinsi Jawa Tengah.

(2) Metode Penyampaian Materi pembentukan klaster logistik ini menggunakan metode :

- Paparan dari Narasumber;
- Diskusi dan Tanya jawab;
- Paparan hasil diskusi.

d) Hasil

(1) Output :

- Kesamaan visi dan misi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada stakeholder dan penggiat bidang logistik bencana.
- Pemahaman dan pengetahuan tentang program-program layanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- Pemahaman dan pengetahuan tentang pergudangan dan pengelolaan logistik bencana.
- Perencanaan terhadap pembentukan klaster logistik tingkat provinsi.

(2) Outcome :

- Stakeholder dan penggiat bidang logistik memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan penanggulangan bencana.
- Stakeholder dan penggiat bidang logistik memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan pengelolaan logistik bencana.
- Adanya kesepahaman terhadap pergudangan dan pengelolaan logistik bencana.
- Terbentuknya klaster logistik di tingkat provinsi.

e) Foto dokumentasi



Gambar 40 Kegiatan pengoperasional mobil lapangan

3) Pengelolaan Logistik Dan Pergudangan

a) Gambaran singkat kegiatan

Dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tataran penanganan darurat bencana, ketersediaan logistik menjadi aspek penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Untuk mewujudkan dukungan logistik baik maka dibutuhkan upaya pengelolaan terhadap barang-barang logistik sebaik-baiknya. Manajemen logistik yang meliputi perencanaan, pengadaan/penerimaan, pergudangan/penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, penerimaan di tujuan, penghapusan dan penatausahaan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, sistematis dan terkoordinatif.

Untuk mendukung kecepatan tindak, kebijakan mendekatkan dukungan logistik ke lokasi bencana menjadi sangat strategis. Distribusi Logistik kepada BPBD Kab/Kota untuk penguatan

kelembagaan dan penanganan darurat sangat penting dilaksanakan.

b) Tujuan

- (1) Adanya pengelolaan logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Adanya pengelolaan pergudangan yang efektif, efisien dan sistematis.
- (3) Adanya dukungan terhadap penanganan darurat bencana di wilayah Jawa Tengah secara cepat dan tepat pada kesempatan pertama.
- (4) Adanya manajemen pengelolaan logistik yang baik.

c) Pelaksanaan

Manajemen logistik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan strategi distribusi yang berorientasi kepada kecepatan tindak dan penguatan kelembagaan. Setelah dilaksanakan pengadaan/penerimaan, maka barang-barang logistik tersebut segera didistribusikan kepada BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah sebagai upaya mendekatkan logistik ke lokasi bencana dan penguatan kelembagaan. Strategi pendistribusian adalah 70% didistribusikan Ke BPBD Kab/Kota dan 30% digunakan untuk buffer stock. Jumlah pendistribusian masing-masing Kab/Kota didasarkan kepada banyaknya ancaman dan kejadian bencana di suatu wilayah.

d) Hasil

(1) Output

- Pengelolaan logistik dan pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Adanya kecepatan tindak dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- Pendistribusian logistik yang cepat dan tepat sasaran.

(2) Outcome

- Layanan pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Manajemen logistik yang dikelola dengan baik akan mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinatif dan sistematis.
- BPBD Kabupaten/Kota memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan logistik pada kesempatan pertama saat terjadi bencana.

e) Dokumentasi



Gambar 41 Pengelolaan Logistik Dan Pergudangan

4) Layanan Dapur Umum Pada Event Ukm Cullinary Festival Tahun 2018

Dukungan event Regional/Nasional

1. Layanan Dapur Umum Pada Event Ukm Cullinary Festival Tahun 2018

a. Penyelenggara :

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kota Semarang.

b. Pelaksanaan (waktu dan tempat) :

1) Waktu : 20-22 April 2018

2) Tempat : Kawasan Kota Lama Semarang.

Bentuk dukungan :

Dalam rangka mendukung Layanan Dapur Umum kepada penyelenggara UKM Cullinary Festifal tahun 2018. BPBD Provinsi Jawa Tengah partisipasi dalam bentuk penyediaan konsumsi kepada penyelenggara.

c. Hasil

Pada event ini Layanan dapur Umum Lapangan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyajikan makanan untuk konsumsi penyelenggara selama 3 hari yaitu untuk setiap hari disediakan:

1) Makan Pagi = 350 porsi

2) Makan Siang = 350 porsi

3) Makan Malam = 400 porsi

Pada event ini Tim DU BPBD Prov. Jateng dibantu oleh beberapa pihak, diantaranya :

1) Tim DU BPBD Kota Semarang.

2) Dharma wanita BPBD Provinsi Jawa Tengah.

d. Dokumentasi



Gambar 42 Layanan Dapur Umum Pada Event Ukm Cullinary Festival Tahun 2018

2. Jateng Fair 2018

a. Penyelenggara :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

b. Pelaksanaan (waktu dan tempat) :

1) Waktu : 17 Agustus – 10 September 2018

2) Tempat : Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan
Jl. Anjasmoro Tawang Sari Semarang

c. Bentuk dukungan :

1) Stand Pameran.

Pada event ini BPBD Prov. Jateng diberikan tempat di Bale Marbabu dengan tema pameran “Kawasan Bencana Gas Beracun”. Materi yang dipamerkan adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan BPBD Prov. Jateng, Peralatan penyelamatan dan Pertolongan, Penghargaan dan trophy, serta Profil BPBD Prov. Jateng.

2) Dapur Umum Lapangan

Dalam rangka pembelajaran dan sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat, BPBD prov. Jateng menyelenggarakan dapur umum lapangan dengan aktifitas memasak makanan siap santap dan menyajikan kepada pengunjung PRPP secara Gratis. Tujuan penyelenggaraan Dapur Umum Lapangan ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami mekanisme penyediaan dan pemenuhan logistic dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

d. Hasil

1) Stand Pameran.

BPBD Prov. Jateng mendapat penghargaan menjadi Juara ke-2 Stand terbaik untuk Kategori Organisasi Pemerintah Daerah dan Instansi.

2) Dapur Umum Lapangan

Antusias dan perhatian masyarakat sangat tinggi terhadap hasil masakah dapur umum lapangan. terbukti jumlah 350 bungkus masakan siap santap yang disajikan habis dalam waktu kurang dari 2 jam. Disamping itu pengunjung juga banyak belajar tentang mekanisme penyediaan dan pemenuhan logistic dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

e. Dokumentasi





Gambar 43 Jateng Fair 2018

3. Pesta Rakyat Jawa Tengah 2018

a. Penyelenggara :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

b. Pelaksanaan (waktu dan tempat) :

1) Waktu : 25 – 27 Agustus 2018

2) Tempat : Kawasan Pantai Widuri Pemalang
Kabupaten Pemalang

c. Bentuk dukungan :

Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ke-68 tahun 2018 BPBD Prov. Jateng berpartisipasi dalam kegiatan :

1) Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana.

2) Dapur Umum Lapangan

d. Hasil

1) Gelar Peralatan PB.

BPBD Prov. Jateng bersama dengan BPBD Kab. Pemalang memamerkan peralatan-peralatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban khususnya korban bencana. BPBD Prov. Jateng menampilkan tema penyelamatan di air.

2) Dapur Umum Lapangan

Pada event ini Tim dapur Umum Lapangan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyajikan masakan siap santap berjumlah 2.500 porsi dalam 1 hari. Hasil masakan juga dibagikan

secara gratis kepada pengunjung dengan persyaratan khusus yaitu belajar tentang Penanggulangan Bencana.

Pada event ini Tim DU BPBD Prov. Jateng dibantu oleh beberapa pihak, diantaranya :

- a) Tim Dapur Umum BPBD Kab. Jepara
- b) Tim Dapur Umum BPBD Kota Semarang
- c) Tim Dapur Umum BPBD Kab. Magelang
- d) Tim Dapur Umum BPBD Kab. Pekalongan
- e) Tim Dapur Umum BPBD Kab. Karanganyar
- f) Tim Dapur Umum BPBD Kab. Banjarnegara
- g) Ubaloka Pramuka Kwarcab Pemalang
- h) SAR Daerah Jawa Tengah
- i) PMI Cabang Pemalang
- j) Ibu-ibu Dharma wanita BPBD Kab. Pemalang.

e. Dokumentasi



Gambar 44 Pesta Rakyat Jawa Tengah 2018

4. Layanan Dapur Umum Pada Dukungan Penanganan Darurat Bencana Gempa Dan Tsunami Di Provinsi Sulawesi Tengah

a. Penyelenggara :

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

b. Pelaksanaan (waktu dan tempat) :

1) Waktu : 6 - 23 Oktober 2018

2) Tempat : BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

Bentuk dukungan :

Dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana Gempa dan tsunami di Kab. Donggala, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Provinsi Jawa Tengah partisipasi memberikan layanan dapur umum untuk pengungsi korban gempa dan tsunami serta layanan untuk para personil "TIM JATENG PEDULI".

c. Hasil

Layanan dapur Umum Lapangan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyajikan makanan untuk konsumsi pengungsi korban gempa dan tsunami serta layanan untuk para personil "TIM JATENG PEDULI" setiap hari berjumlah :

1) Makan Pagi : 1.500 porsi

2) Makan Siang : 2.000 porsi

3) Makan Malam : 1.500 porsi

Tim DU BPBD Prov. Jateng dibantu oleh beberapa pihak, diantaranya :

1) Relawan BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah.

2) MDMC Jawa Tengah

3) PMI Jawa Tengah

4) Rumah Zakat Jawa Tengah

5) Pegawai BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

6) Relawan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

7) Satuan Resimen Mahasiswa DKI Jakarta.

d. Dokumentasi



Gambar 45 Layanan Dapur Umum Pada Dukungan Penanganan Darurat Bencana Gempa Dan Tsunami Di Prov Sulawesi Tengah

5. Gladi pengelolaan dapur umum dan apel kesiapsiagaan bencana Kab. Demak tahun 2018

a) Penyelenggara :

Pemda kab. Demak dan bpbd kab. Demak

b) Pelaksanaan (waktu dan tempat) :

1) Waktu : 27 – 28 November 2018

2) Tempat : BPBD Kab. Demak dan Alun-alun Kota Demak

Bentuk dukungan :

Dalam rangka mendukung Gladi Pengelolaan Dapur Umum Dan Apel Kesiapsiagaan Bencana Kab. Demak Tahun 2018, BPBD Provinsi Jawa Tengah partisipasi dalam bentuk pelatihan dan layanan dapur umum untuk konsumsi peserta.

c) Hasil

Pada event ini Layanan dapur Umum Lapangan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyajikan makanan untuk konsumsi peserta dan panitia berjumlah :

1) Makan Pagi : 700 porsi

2) Makan Siang : 1.500 porsi

Pada event ini Tim DU BPBD Prov. Jateng dibantu oleh beberapa pihak, diantaranya :

- 1) Peserta Diklat DU BPBD Kab. Demak.
- 2) Pegawai BPBD Kab. Demak.
- 3) PMI Cabang Demak
- 4) Ubaloka Pramuka Kwarcab Demak

d) Dokumentasi



Gambar 46 Gladi pengelolaan dapur umum dan apel kesiapsiagaan bencana Kab. Demak tahun 2018

6. Layanan dapur umum dan apel kesiapsiagaan bencana kab. Grobogan tahun 2018

a. Penyelenggara :

Pemda kab. Grobogan dan bpbd Kab. Grobogan

b. Pelaksanaan (waktu dan tempat) :

1) Waktu : 17 – 24 September 2018

2) Tempat : BPBD Kab. Grobogan dan Alun-alun Kota Purwodadi.

Bentuk dukungan :

Dalam rangka mendukung Layanan Dapur Umum dan Apel Kesiapsiagaan Bencana Kab. Grobogan Tahun 2018, BPBD Provinsi Jawa Tengah partisipasi dalam bentuk pelatihan dan layanan dapur umum untuk konsumsi peserta.

c. Hasil

Pada event ini layanan dapur umum lapangan BPBD Provinsi Jawa Tengah menyajikan makanan untuk konsumsi peserta dan panitia berjumlah 2.000 porsi untuk makan siang. Tim DU BPBD Prov. Jateng dibantu oleh beberapa pihak, yaitu :

- 1) Pegawai BPBD Kab. Grobogan.
- 2) Dharma wanita BPBD Kab. Grobogan.
- 3) PMI Cabang Grobogan
- 4) Ubaloka Pramuka Kwarcab Grobogan.

d. Dokumentasi



Gambar 47 Layanan dapur umum dan apel kesiapsiagaan bencana kab. Grobogan tahun 2018

Tabel 32
Kegiatan Seksi Logistik Tahun 2018

No	KEGIATAN /Sub kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana			
a	Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan Dan Pengelolaan Logistik Bencana Provinsi Jawa Tengah	23 Juli	Ruang Pertemuan Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Prov Jawa Tengah, Kota Surakarta	80
b	Rakor Klaster Logistik Bencana	23 Juli	Ruang Pertemuan Balai Pengembangan Pendidikan Menengah dan Kejuruan Provi Jawa Tengah, Kota Surakarta	50
c	Pengelolaan Logistik dan Pergudangan			
2	Dukungan event Regional/Nasional			
a	Layanan Dapur Umum Pada Event Ukm Cullinary Festival 2018	20-22 April	Kota Semarang	
b	Jateng Fair 2018	17 Agustus – 10 September	Kota Semarang	PL
c	Pesta Rakyat Jawa Tengah 2018	25 – 27 Agustus	Kab. Pemalang	
d	Layanan Dapur Umum pada Dukungan Penanganan Darurat Bencana Gempa Dan Tsunami Di Provinsi Sulawesi Tengah	6 - 23 Oktober	BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	
e	Gladi Pengelolaan Dapur Umum dan Apel Kesiapsiagaan Bencana Kab. Demak 2018	27 – 28 November	BPBD Kab. Demak dan Alun-alun Kota Demak	
f	Layanan Dapur Umum dan Apel Kesiapsiagaan Bencana Kab. Grobogan Tahun 2018	17 – 24 September	BPBD Kab. Grobogan dan Alun-alun Kota Purwodadi	

b. Seksi Peralatan

- 1) Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB
 - a) Gambaran kegiatan

Peralatan-peralatan yang ada di BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota saat ini belum memadai untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu guna memenuhi standar ketersediaan peralatan yang baik maka setiap tahun dilakukan kegiatan Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan Penanggulangan Bencana. Fokus kegiatan tersebut adalah Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, pemetaan ketersediaan peralatan penanggulangan bencana dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Peralatan PB yang ada baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b) Tujuan

- Memetakan dan mensinkronisasikan potensi sumberdaya peralatan penanggulangan bencana yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penanganan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/korban bencana.
- Mengetahui ketersediaan peralatan penanggulangan bencana yang ada pada masing-masing Kabupaten/kota.
- Mengetahui kekurangan/gap peralatan di suatu daerah serta mempercepat pergerakan/distribusi bantuan peralatan pada saat terjadi bencana.
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan peralatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.
- Pemetaan peralatan penanggulangan bencana dan hasil monitoring evaluasi peralatan diperlukan sebagai dasar bagi BNPB untuk pemenuhan kebutuhan peralatan penanggulangan bencana di daerah.

c) Pelaksanaan

- Untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27-28 Maret 2018 dengan jumlah peserta adalah 90 orang.
- Untuk pelaksanaan Monev dilakukan selama setahun dengan tujuan melakukan monev peralatan PB di Kab/Kota.
- Penyusunan Laporan Ketersediaan Peralatan PB Provinsi Jawa Tengah.

d) Hasil

- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 pada tanggal 27-28 Maret 2018 di Ruang Arjuna Hall Lantai II Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III Prov. Jateng (Eks Bakorwil II Surakarta) dengan peserta adalah 90 orang.
- Terselenggaranya Monitoring Evaluasi Peralatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten/Kota.
- Tersusunnya Laporan Ketersediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

e) Foto dokumentasi





Gambar 48 Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan

2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah

a) Gambaran kegiatan

Guna memenuhi standar ketersediaan peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana maka setiap tahun dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah. Fokus kegiatan tersebut adalah Pengenalan Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, pengadaan berbagai macam peralatan penanggulangan bencana seperti : Chainsaw, Drone dan Handy Transciver (HT). Disamping itu juga dilakukan kegiatan fasilitasi petugas/penjaga repeater, fasilitasi BPBD Kabupaten/Kota dalam memperoleh bantuan peralatan dari BNPB, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana serta melakukan fasilitasi dukungan peralatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

b) Tujuan

- Pengadaan peralatan/sarana penanggulangan bencana untuk penanganan tanggap darurat bencana di Jawa Tengah.
- Memfasilitasi petugas/penjaga Repeater BPBD Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Gunung Telomoyo, Gunung Prahur dan Sendang Tawangmangu.

- Fasilitasi BPBD Kab/Kota dalam rangka memperoleh bantuan hibah peralatan penanggulangan bencana dari BNPB.
- Pemeliharaan dan perawatan peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Prov Jateng
- Pengenalan Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah.
- Melakukan fasilitasi dukungan peralatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

c) Pelaksanaan

- Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- Fasilitasi petugas repeater BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Fasilitasi BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka memperoleh bantuan hibah peralatan PB dari BNPB.
- Pelaksanaan Pengenalan Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan PB Bagi Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan PB.
- Fasilitasi Dukungan Peralatan PB di Kabupaten/Kota.

d) Hasil

- Telah dilaksanakan Pengadaan Peralatan PB pada bulan Juni 2018 yaitu Pengadaan 3 unit drone, 52 unit HT dan 45 unit Chainsaw.
- Telah dilaksanakannya Pengenalan Teknis Peralatan Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh 60 peserta dari 33 BPBD Kab/Kota pada tanggal 7 s/d 9 Mei 2018 di Surakarta.
- Telah dilaksanakannya pemeliharaan dan perawatan peralatan dan kendaraan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Telah dilaksanakan Fasilitasi Dukungan Peralatan PB di Kabupaten/Kota

- Telah dilaksanakannya Fasilitasi BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka memperoleh bantuan hibah peralatan penanggulangan bencana dari BNPB.
- Telah diberikannya honor petugas reapter BPBD Provinsi Jawa Tengah.

e) Foto Dokumentasi



Gambar 49 Peningkatan Pengelolaan dan Praktik Peralatan PB

Tabel 33

Kegiatan Seksi Peralatan Tahun 2018

No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan		
		Tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB			
a	Rakor Inventarisasi Kebutuhan dan Ketersediaan Peralatan PB Prov. Jateng	27-28 Maret	Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III Prov. Jateng (Eks Bakorwil II Surakarta)	90
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah			
a	Pengadaan Peralatan PB	Juni 2018	Kota Semarang	-
b	Pengenalan Teknis Peralatan PB Prov. Jateng	7-9 Mei	Surakarta	60

**Tabel 34 Inventarisasi ketersediaan Peralatan PB
Di BPBD Provinsi Jawa Tengah**

Status : Bulan Des 2018

NO	KODE	JENIS PERALATAN	SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3	4	5
I	01	Alat Transportasi		
		1 Mobil Ambulance	unit	3
		2 Mobil Tangki BBM	unit	
		3 Mobil Evakuasi	unit	
		4 Mobil Pemadam Kebakaran	unit	
		5 Helikopter	unit	
		6 Mobil Komando	unit	1
		7 Mobil Patroli	unit	
		8 Mobil Jelajah	unit	
		9 Mobil Operasional	unit	9
		10 Mobil Komunikasi	unit	1
		11 Mobil Rescue	unit	10
		12 Motor Ops	unit	14
		13 Motor Trail	unit	12
		14 Motor Damkar	unit	1
		15 Damkar Mini	unit	2
		16 Pick Up	unit	1
		17 Mobil Logpal	unit	1
		18 Truk Serbaguna	unit	1
		19 Mobil Dapur Lapangan	unit	1
		20 Truk Logistik	unit	1
		21 Truk Tangki Air	unit	5
		22 Truk Urinoir MCK	unit	2
		23 Mobil Water Treatmen	unit	1
		24 Truk bak terbuka	unit	2
		25 Kapal Motor	unit	
		26 Mini Bus Elf	unit	1
		27 Mobil Klik	unit	
		Jumlah		69
II	02	Alat Komunikasi dan Informasi		
		1 Sistem Komunikasi Cepat	paket	
		2 Portable Communication Mobile	unit	

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		3	HT	unit	63
		4	RIG	unit	6
		5	GPS	unit	3
		6	Telpon Internet Satelit	unit	
		7	Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini	unit	
		8	SSB/RPP	unit	3
		9	Drone	unit	4
		10	Wireless	unit	
		11	Megaphone	unit	3
		12	Repiter / Antena	unit	4
		13	Video Shooting	unit	
		14	Camera Digital	unit	4
		15	Handycam	unit	2
		16	Power Supply	unit	2
			Jumlah		55
III	03	Alat Pencarian Penyelamatan dan Evakuasi			
		1	Alat Pemotong Baja dan Beton	unit	5
		2	Rompi	unit	
		3	Life Jacket/Rompi Pelampung	unit	48
		4	Lifebouy	unit	8
		5	Perahu Karet 12 org	unit	
		6	Perahu Karet 10 org	unit	14
		7	Perahu Karet 8 org	unit	2
		8	Perahu Karet 6 org	unit	1
		9	Masker Full Face	unit	6
		10	Perahu Lipat	unit	1
		11	Trailer	unit	2
		12	Rescue Jetski	unit	
		13	Mesin Perahu 40 PK	unit	5
		14	Mesin Perahu 25 PK	unit	5
		15	Mesin Perahu 18 PK	unit	5
		16	Mesin Perahu 15 PK	unit	1
		17	Dolphin / speed boat	unit	2
		18	Peralatan Selam	unit	7

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		19	Vertical Rescue	unit	6
		20	Teropong / Teleskop	unit	4
		23	Chain Saw	unit	51
		24	Helm SAR	unit	4
		25	Pulay	unit	10
		26	Breathing Appars	unit	2
		27	Life Detector	unit	
		28	Alat/Paket Pemadam Kebakaran	unit	
		29	Pakaian Tahan Panas	unit	2
		30	Pompa Perahu	unit	14
		31	Rak Tempat Perahu Karet	unit	5
		32	Selang BBM	unit	14
		33	Sandaran Mesin Tempel	unit	4
		34	Perahu Alumunium	unit	
		35	Jangkar	unit	
		36	Ring Buoy	unit	
		37	Tali PP 10 mm	unit	
		38	Tangki BBM	unit	14
		39	Dayung	unit	20
		40	Pakaian Tahan Api	unit	
		41	Helm Tahan Panas	unit	
		42	Sepatu	unit	
		43	Sarung Tangan	unit	
		44	Helm Biasa	unit	
		45	Perahu Polyetheline	unit	2
		46	Bidai Spinal	unit	2
		47	Perahu Amphibi	unit	1
		Jumlah			268
IV	04	Alat Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
		1	WTP 250 lt	unit	2
		2	WTP 500 lt	unit	
		3	WTP mini	unit	2
		4	Dapur Lapangan/Umum	unit	
		5	Fleksible Tank 2000 lt	unit	2
		6	Fleksible Tank 1000 lt	unit	2

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		7	Toilet Lapangan	unit	
		8	Tenda Posko	unit	13
		9	Tenda Keluarga	unit	100
		10	Tenda Regu	unit	30
		11	Tenda Pleton	unit	24
		12	Tenda Pengungsi	unit	5
		13	Tenda Sekolah	unit	
		14	Tenda Lapangan	unit	
		15	Tenda RS Lapangan	unit	
		16	Tenda Individu	unit	2
		17	Tenda Doom	unit	
		18	Tandu Lipat	unit	6
		19	Echosounder	unit	2
		20	Velbed	unit	125
		21	Tandon Air Plastik	unit	
		22	Tandon Air Fiber Glas	unit	1
		23	Tenda Dapur Umum	unit	
		24	Tenda Terpal Plastik	unit	
		25	Jas Hujan	unit	
		26	MCK Komunal	unit	
			Jumlah		316
V	05	Alat Berat			
		1	Scope Loader	unit	
		2	Back Hoe	unit	
		3	Truck W Crane 3 Ton	unit	
		4	Tandem Vibration Roller 4 Ton	unit	
		5	Crane on Wheel 15 Ton	unit	
		6	Wheel Looder 1,2 - 1,5 M3	unit	
		7	Head Tractor & trailer	unit	
		8	Loader	unit	
		9	Exavator	unit	
		10	Dump Truck	unit	
		11	Grader	unit	
		12	Bulldoser	unit	
		13	Ponton	unit	
		14	Vibro Hammer	unit	

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		15	Wheel Loader	unit	
		16	Ulhantor Roller	unit	
		Jumlah			0
VI	06	Alat Penerangan dan Kelistrikan			
		1	Senter	unit	9
		2	Solar Sel Generator	unit	
		3	Lampu Senter HID	unit	2
		4	Lampu Srt Halogen	unit	3
		5	Lampu Badai	unit	
		6	Genset 5 KVA	unit	2
		7	Genset 10 KVA	unit	1
		8	Genset 1,2 KW	unit	4
		9	Genset 1000 watt	unit	6
		10	Solar Handle Lamp	unit	60
		11	Lampu Penerangan (Solar Cell)	unit	7
		12	Light Tower Port	unit	2
		13	Lampu senter HID Seacrh Light	unit	4
		14	Kabel	roll	3
		15	Tiang Lampu Lapangan	unit	
		16	Lampu Lapangan (Sport Light)	unit	4
		17	Senter Besar	unit	
		18	Lampu Rotator	unit	
		19	Lampu Sorot	unit	
		20	Emergency Lamp	unit	6
		Jumlah			113
VII	7	Alat Pergudangan			
		1	Froklift	unit	2
		2	Hand Froklift	unit	1
		3	Gerobak Sorong	unit	
		4	Trolley	unit	2
		5	Rak Gondola	unit	
		6	Palka	unit	100
		7	Safety Equipment	unit	
		8	Tenda Gudang	unit	
		9	Water Closed	unit	

NO	KODE	JENIS PERALATAN		SATUAN	BPBD Jateng
1	2	3		4	5
		10	Tabung Gas 12 Kg	unit	
		11	Tabung Gas 3 Kg	unit	
		12	Selang	unit	
		13	Helm Kerja / PMK	unit	
		14	Topi Proyek	unit	
		Jumlah			105
VIII	8	Alat Lainnya			
		1	Pompa air	unit	6
		2	Kawat Bronjong	unit	
		3	Karung Plastik	unit	
		4	Garpu Sampah	unit	
		5	Dirigen 40 L	unit	
		6	Hand Sprayer	unit	
		7	Knock Down Closet	unit	
		8	Mesin Fogging	unit	
		9	Drag Bar	unit	
		10	Water furifier	unit	
		11	CCTV	unit	
		Jumlah			6
		Jumlah Total			880

6. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha melaksanakan 8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh) kegiatan dengan total anggaran sejumlah Rp. 11.598.000.000,-. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) subbagian, yaitu Subbagian Umum dan kepegawaian, Subbag Keuangan, dan Subbag Program. Program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
- 13) Kegiatan Penyediaan Logistik dan Sarana Pendukung Poliklinik

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
 - 6) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 7) Kegiatan Rehab Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - 2) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
- e. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 1) Kegiatan Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Penyelenggara Bencana
 - 2) Kegiatan Pembelajaran Wawasan Kebencanaan
 - 3) Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antara Unsur Pengarah BPBD Jawa Tengah dengan Para Pemangku Kepentingan Penanggulangan Bencana
 - 4) Kegiatan Koordinasi Penanganan Bencana
- f. Program Pos, Telekomunikasi dan SAR
- 1) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
- g. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 1) Kegiatan Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Prov Jateng

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

- 1) Kegiatan Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)
- 2) Kegiatan Perencanaan Bidang Kebencanaan
- 3) Kegiatan Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan
- 4) Kegiatan Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi antara lain penyediaan, pemeliharaan serta pelayanan aktivitas perkantoran seluruh bagian/bagian seperti Surat menyurat, pemeliharaan (gedung, mobil, sarana dan prasarana Kantor), pelayanan tamu, dll. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi subbagian ini adalah sbb.

Tabel 35
Kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian

No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan	
		tanggal	Lokasi
1	2	3	4
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jan - Des	Kota Semarang
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik	Jan – Des	Kota Semarang
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jan – Des	Kota Semarang
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Jan – Des	Kota Semarang
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jan – Des	Kota Semarang
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jan – Des	Kota Semarang
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jan - Des	Kota Semarang
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jan – Des	Kota Semarang
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jan – Des	Kota Semarang
10	Penyediaan Makanan Minuman	Jan – Des	Kota Semarang

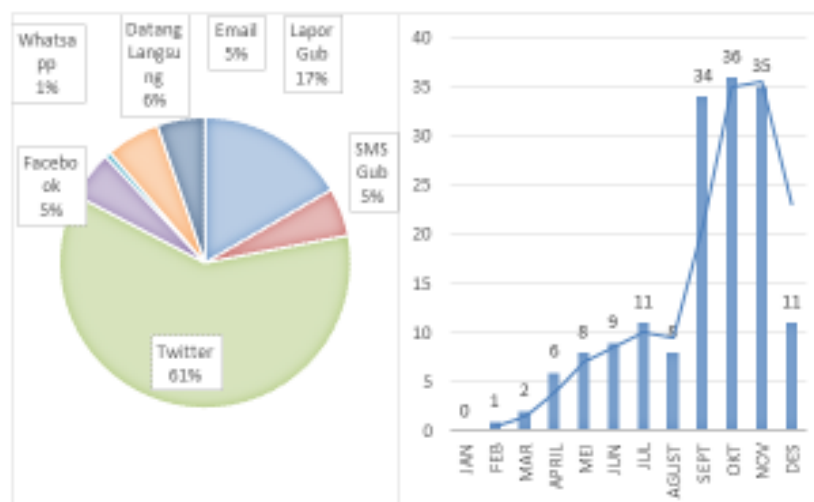
No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan	
		tanggal	Lokasi
1	2	3	4
11	Penyediaan Sarana Kesehatan	Jan – Des	Kota Semarang
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jan – Des	Kota Semarang
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jan – Des	Kota Semarang
14	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasnal	Jan – Des	Kota Semarang
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT	Jan – Des	Kota Semarang
16	Peningkatan Sarana Prasarana Kantor	Jan – Des	Kota Semarang
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Maret	Kota Semarang
18	Peningkatan Kapasitas SDM	Jan – Des	Kota Semarang
19	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana	Oktober	Kota Semarang,

Dalam rangka memenuhi kewajiban keterbukaan informasi public dalam hal penyampaian informasi public, BPBD Prov Jawa Tengah melalui website (bpbddjateng.info bpbddjatengprov.go.id) telah menyediakan berbagai informasi tentang BPBD Prov Jawa Tengah, memanfaatkan media sosial. Adapun media sosial yang digunakan BPBD Prov Jawa Tengah antara lain adalah:

email		bpbdd@jatengprov.go.id , bpbdd_jateng@yahoo.com poskoaju.bpbddjateng@gmail.com
websiter		www.bpbddjateng.info www.bpbdd.jatengprov.go.id
Whatsapp		08813809409
Twitter		@bpbddjateng
facebook		BPBD Provinsi Jawa Tengah
Instagram		@bpbddjateng

Melalui berbagai media tersebut, komunikasi dengan masyarakat menjadi lebih terbuka dan interaktif. Sebagai implementasi komunikasi tersebut, beberapa pihak (para pemangku kepentingan) memerlukan data dan informasi terkait penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Jumlah pemohon data dan informasi masyarakat ke BPBD Prov Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2018



Gambar 50 Pemohon Informasi Publik

Mendasarkan gambar tersebut, penggunaan media sosial terutama twitter mempunyai komunikasi yang banyak (61%). Berbagai hal terkait kejadian bencana dan penanganan bencana menjadi bahan pertanyaan atau aduan, sehingga mensikapi hal tersebut, BPBD Prov Jateng terus berupaya untuk tetap memberikan layanan data dan informasi dari media sosial.

Selain pelayanan, surat menyurat, data informasi, tugas pokok dan fungsi subbagian umum kepegawian adalah pengelolaan aset. Data pengelolaan aset BPBD Prov Jateng tahun 2018, disajikan pada tabel berikut.

Perubahan asset baik dari pengadaan barang maupun limpahan asset dari OPD berpengaruh terhadap jumlah total asset di BPBD

Prov Jateng. Belanja barang mempengaruhi penambahan jumlah asset dan sangat berarti dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Rekapitulasi data asset menurut kategori barang adalah sbb.

Tabel 36
Sarana dan Prasarana Kedinasan Umum Tahun 2018

No	Nama Bidang	31 Des 2017		31 Des 2018	
		Jmlh	Harga (Rp)	Jmlh	Harga (Rp)
1	2	3	4		
1	Tanah	2	3.100.000.000	2	3.100.000.000
	Tanah	2	3.100.000.000	2	3.100.000.000
2	Peralatan Dan Mesin				
	Alat-alat besar	35	2.972.653.000	35	2.972.653.000
	Alat-alat Angkutan	114	12.503.679.043	127	14.436.497.543
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	6	309.100.000	11	374.850.000
	Alat-alat Pertanian / Peternakan	-	-	-	-
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.104	5.883.017.901	2.133	4.658.085.079
	Alat-alat Studio dan Komunikasi	576	1.625.556.949	576	1.625.556.949
	Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-
	Alat-alat Laboratorium	-	-	-	-
	Alat-alat Keamanan	294	1.563.276.003	289	1.561.776.003
	Alat Komputer			297	1,943,784,892
	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur				
	Alat Olah Raga				
3	Gedung Dan Bangunan	3	6.877.783.968	4	8.523.869.968
	Bangunan Gedung	3	6.877.783.968	4	8.523.869.968
4	JALAN, DAN IRIGASI				
	Jalan dan Jembatan				
	Bangunan Air / Irigasi	7	89.000.000	7	89,000,000
	Instalasi Jaringan	1	91.433.000	1	91,433,000
5	ASET TETAP LAINNYA				
	Buku Perpustakaan	484	53.422.955	503	55.083.955
	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	7	875.000	7	875.000
	Hewan Ternak dan Tumbuhan				
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				

No	Nama Bidang	31 Des 2017		31 Des 2018	
		Jmlh	Harga (Rp)	Jmlh	Harga (Rp)
1	2	3	4		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	JUMLAH	3.640	35.187.864.885	3.992	39.433.465.389

Sumber: Jurnal Mutasi Barang Desember 2018

Selain kegiatan rutin pelayanan kantor dan rumah tangga, subbagian Umum dan kepegawain menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengkoordinasian dengan premangku kepentingan PB lainnya, yaitu :

1) Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana

a. Gambaran kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kegiatan APBD BPBD Prov. Jateng Tahun 2018 pada kegiatan Koordinasi Penanggulangan Bencana sebagai pemembangun kerjasama yang sinergis antara BPBD Prov. Jateng dengan BPBD Kab/Kota serta institusi terkait dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

b. Tujuan

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan bencana bagi Aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari efektif yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 bertempat di lantai 4 Gedung A Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah.

d. Hasil

Kegiatan dihadiri sebanyak 350 peserta dari dari berbagai unsur antara lain:

- BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah (Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang);
- Pusdalop BPBD Kab/Kota (@ Kab/Kota 6 orang);
- Instansi Terkait.

e. Dokumentasi



Gambar 51 Rakor Sinergitas Penanggulangan Bencana

2) Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas

a. Gambaran Kegiatan

Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Untuk Penanggulangan Bencana Di Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 di Donohudan Boyolali, Rakor dibuka oleh Kepala BPBD Prov. Jateng (Bp. Sarwa Pramana, SH, M.Si) dilanjutkan dengan , MSCE.

b. Tujuan

- Membangun kerjasama yang sinergis antara BPBD Prov. Jateng dengan BPBD Kab/Kota serta institusi terkait dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan bencana bagi Aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

c. Pelaksanaan

Rakor dilaksanakan selama 1 (satu) hari efektif yaitu tanggal 8 Januari 2018 bertempat di Kantor BPBD Prov. Jateng Jl. Imam Bonjol 1 F Semarang. Dengan narasumber:

- Sekretaris Utama BNPB dengan materi Program Prioritas BNPB 2018;
- Kepala Pusdatin dan Humas BNPB dengan materi Manajemen Pengelolaan Pusdalop;
- Unsur Pengarah BNPB dengan materi Teknik Penanganan Banjir, Longsoran dan Kebakaran;
- Kepala Kantor SAR dengan materi Penanganan Dampak Gedung Roboh.

d. Hasil

- Meningkatkan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah dalam bidang Pengurangan Resiko Bencana.
- Menambah pengetahuan dan ketrampilan karyawan/staf BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana.
- Terlaksananya program dan kegiatan peningkatan Koordinasi Penanganan Bencana.
- Rakor Penanggulangan Bencana BPBD se Jawa Tengah perlu untuk meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM BPBD Kab/Kota se Jateng dalam misi kebencanaan serta kemanusiaan guna mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan.

e. Dokumentasi



Gambar 52 Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas

3) Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Personil Damkar

a. Gambaran Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam rangka penanggulangan bencana perlu melakukan Peningkatan kapasitas, hal tersebut harus dilakukan dari sektor sumber daya manusia, kelembagaan, dan sinergi dengan pihak terkait. Pemikiran dan upaya kreatif diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dalam aktualisasi penanggulangan bencana. Bencana tidak mengenal waktu dan bisa datang kapan saja. Keberadaan Dinas Kebakaran sebagai salah satu dinas yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang bertugas memberikan pelayanan kebakaran antara lain :

1. Pelayanan pelatihan dan bimbingan penyuluhan penanggulangan bencana kebakaran;

2. Pelayanan pemeriksaan gambar dan kelayakan peralatan pemadam kebakaran yang telah terpasang;
3. Pelayanan pemadam kebakaran.

Penanggulangan Bencana kebakaran membutuhkan penanganan secara khusus, demikian pula untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, maka fungsi pemadam kebakaran yang ditangani Dinas Kebakaran. Setelah berlakunya otonomi Daerah secara rinci kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan bagan organisasi Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut: (UU No.22, tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) pembentukan SOTK Dinas Kebakaran berdasarkan Perda No. 2 tahun 2001.

b. Tujuan

- Adanya pemahaman kebencanaan untuk personil damkar, sehingga apabila terjadi bencana kebakaran, upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan efektif.
- Dapat meningkatkan kapasitas personil damkar di kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

c. Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Personil Damkar untuk Penanggulangan Bencana se-Jawa Tengah, dengan undangan sebanyak 827 orang dan dihadiri oleh peserta sebanyak 773 orang, yang terdiri-dari : Kalak BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Sekretaris BPBD Kab/Kota, dan Personil Damkar se-Jawa Tengah.

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Januari 2018 di Gedung Jeddah Donohudan Boyolali. Dengan narasumber kegiatan dimaksud:

- Gubernur Jawa Tengah
- Kalakhar BPBD Prov. Jateng
- Jakarta Rescue

d. Hasil

- Kegiatan Koordinasi Penanganan Bencana diselenggarakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Menambah pengetahuan dan ketrampilan karyawan/staf BPBD Prov. Jawa Tengah serta Peningkatan Kapasitas Personil Damkar se-Jawa Tengah Untuk Penanggulangan Bencana.
- Meningkatkan Peningkatan Kapasitas Personil Damkar Untuk PB di Kab/Kota se Jawa Tengah dalam bidang Pengurangan Resiko Bencana.
- Menambah pengetahuan dan ketrampilan Personil Damkar dan BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah dalam Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana.
- Terlaksananya program dan kegiatan peningkatan Koordinasi Penanganan Bencana.

e. Dokumentasi





Gambar 53 Rakor Peningkatan Kapasitas Personil Damkar

4) Rapat Koordinasi Sinergitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

a. Gambaran Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam menanggulangi bencana. Peningkatan kapasitas harus dilakukan dari sektor sumber daya manusia, kelembagaan, dan sinergi dengan pihak terkait. Pemikiran dan upaya kreatif diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dalam aktualisasi penanggulangan bencana.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai upaya sinkronisasi dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah, Palang Merah Indonesia (PMI) adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Tujuannya semata – mata hanya untuk mengurangi penderitaan sesama manusia sesuai dengan kebutuhan dan mendahulukan keadaan yang lebih parah.

Suatu Perhimpunan Palang Merah Nasional, yang terikat dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, maka PMI jelas merupakan lembaga yang independen serta berstatus sebagai Organisasi Masyarakat,

namun dibentuk oleh Pemerintah serta mendapat tugas dari Pemerintah.

Sinergitas antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan PMI di Jawa Tengah merupakan hal yang mutlak perlu dijalin, agar dalam pelayanan dan penanggulangan bencana di Jawa Tengah dapat berjalan seiring sejalan, dengan tujuan utama pengabdian kepada masyarakat Jawa Tengah, rapat koordinasi ini juga penting dalam meningkatkan kapasitas relawan PMI di Jawa Tengah, menambah wawasan tentang penanggulangan bencana.

b. Tujuan

- Penyelerasan pola pikir dan tugas pokok fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan PMI;
- Memberikan masukan yang bermanfaat agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan cepat, tepat dan efektif;
- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal penanganan bencana;
- Saling bertukar informasi apabila terjadi bencana;
- Komunikasi antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dan PMI berjalan dengan baik dan selaras dalam bidang penanggulangan bencana;
- Meningkatkan kapasitas personil PMI dalam bidang penanggulangan bencana.

c. Pelaksanaan

Menindaklanjuti arahan Bapak Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah perihal Rakor Sinergitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah, maka BPBD Prov. Jawa Tengah berkoordinasi dengan Markas PMI Jawa Tengah dan PMI unit di 35 Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan persepsi dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat khususnya dalam hal penanggulangan bencana.

Kegiatan dilaksanakan 1 (satu) hari pada tanggal 12 Februari 2018 di Gedung A Lantai IV BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Dengan narasumber kegiatan dimaksud:

- Gubernur Jawa Tengah
- Kalakhar BPBD Prov. Jateng
- PMI Jawa Tengah

d. Dengan Outpun dan kesimpulan:

- Kegiatan Rapat Koordinasi Sinergitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diselenggarakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Menambah pengetahuan dan ketrampilan seluruh personil PMI di Jawa Tengah dan Peningkatan Kapasitas para personil PMI Untuk Penanggulangan Bencana.
- Terlaksananya program dan Koordinasi Penanganan Bencana.

e. Dokumentasi



Gambar 54 Rakor Sinergitas Penyelenggaraan Penanggulangan

5) Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Untuk Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Bencana

1) Gambaran Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk penanggulangan bencana perlu melakukan Peningkatan kapasitas sumber daya, hal tersebut harus dilakukan dari sektor sumber daya manusia, kelembagaan, dan sinergi dengan pihak terkait. Pemikiran dan upaya kreatif diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas dalam aktualisasi penanggulangan bencana. Bencana tidak mengenal waktu dan bisa datang kapan saja. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana sebagai salah satu dinas yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang bertugas memberikan pelayanan antara lain :

- Sosialisasi Daerah Rawan Bencana ;
- Pelayanan Peta Daerah Rawan Bencana, sehingga desa memahami tentang daerah rawan bencana;
- Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana Alam Atau Early Warning System (EWS) Di Daerah Rawan Bencana.

Penanggulangan Bencana membutuhkan penanganan secara khusus, demikian pula untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan usaha penanggulangan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, maka fungsi Penanggulangan Bencana sangat strategis.

2) Tujuan

- Adanya pemahaman kebencanaan untuk pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, sehingga apabila terjadi bencana, upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan efektif.

- Dapat meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara.

3) Hasil

1. Kabupaten Banjarnegara

Sosialisasi Daerah Rawan Benacana untuk Penanggulangan Bencana di Pendopo Bupati Banjarnegara, dengan undangan sebanyak 350 orang dan dihadiri oleh peserta sebanyak 273 orang, yang terdiri-dari Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara.

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 10 April 2018 bertempat di Pendopo Dipayuda (Pendopo Bupati) Kabupaten Banjarnegara. Dengan narasumber berasal dari:

- PVMBG Bandung;
- PVMBG Kabupaten Banjarnegara
- Kalakhar BPBD Prov. Jateng

2. Kabupaten Kebumen

Sosialisasi Daerah Rawan Benacana untuk Penanggulangan Bencana di Aula Setda Kab. Kebumen, dengan undangan sebanyak 500 orang dan dihadiri oleh peserta sebanyak 438 orang, yang terdiri-dari Camat, Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari tanggal 1 Agustus 2018 bertempat di Ruang Aula Setda Kab. Kebumen. Dengan narasumber kegiatan:

- Wagub Jateng
- Kalakhar BPBD Prov. Jateng
- BMKG Banjarnegara
- UGM Yogyakarta

3. Kabupaten Purbalingga

Sosialisasi Daerah Rawan Bencana untuk Penanggulangan Bencana di Aula Setda Kab. Purbalingga, dengan undangan sebanyak 300 orang dan dihadiri oleh peserta sebanyak 294 orang, yang terdiri-dari Camat, Kepala Desa/Kelurahan di Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 2 Agustus 2018 bertempat di Pendopo Bupati Kab. Purbalingga. Dengan narasumber kegiatan:

- Wagub Jateng
- Kalakhar BPBD Prov. Jateng
- BMKG Banjarnegara
- UGM Jogjakarta

Dengan hasil kesimpulan:

- Kegiatan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana diselenggarakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kepada para pemangku kepentingan di daerah yang rawan bencana sehingga dapat secara cepat untuk penanggulangan bencana dikarenakan di Kabupaten Banjarnegara angka kejadian bencana cukup tinggi, terutama bencana tanah longsor, dari kejadian yang terbaru bencana gempa bumi juga terjadi di Kabupaten Banjarnegara.
- Meningkatkan Kapasitas para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara di bidang Pengurangan Resiko Bencana.
- Menambah pengetahuan dan ketrampilan para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan bencana (terutama camat dan kepala desa) dan relawan di Kabupaten Banjarnegara dalam Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

- Terlaksananya program dan kegiatan peningkatan Koordinasi Penanganan Bencana.

4) Dokumentasi



Gambar 55 Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Untuk Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Bencana

b. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi meliputi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, jasa pelayanan perkantoran. Pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 37
Kegiatan Subbagian Keuangan

No	KEGIATAN	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di luar Daerah	Jan – des	35 kab/kota Jakarta	Pejabat dan Staf BPBD
2	Jasa Pelayanan Perkantoran	Jan - des	Semarang	

c. Subbagian Program

Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi subbagian program adalah sebagai berikut.

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

a) Media Gathering dengan Forum Wapena Jateng

(1) Gambaran kegiatan

Informasi bencana harus mampu memperkuat masyarakat bukan memperlemah, Jawa Tengah memiliki karakter yang sangat unik antara lain memiliki sistem keresidenan, dari berbagai lokasi pelatihan wartawan hanya Jawa Tengah yang membentuk wartawan peduli bencana. Kita hadir pada detik pertama dan harus tetap hadir sampai detik terakhir. Pelatihan wartawan ini menjadi bagian dari proses panjang bahwa mengurus bencana ada tahapan-tahapannya.

Forum Komunikasi Wartawan bertujuan menghimpun langkah-langkah strategis kemitraan secara sehat berdasarkan profesionalisme yang sinergi, meningkatkan kemampuan wartawan dalam menjalankan fungsinya sebagai wartawan serta dalam peliputan bencana dan tersedianya personil wartawan yang memiliki kompetensi pengetahuan bencana teori dan praktek.

(2) Tujuan

- Untuk meningkatkan kapasitas wartawan dalam pengetahuan dasar dalam penanganan kebencanaan diharapkan wartawan menjadi lebih paham dan memiliki keterampilan serta pemahaman kebencanaan.

(3) Pelaksanaan

Tema : Media Gathering dengan Fom
Wartawan Peduli Bencana

Waktu Selasa, 9 Januari 2019

Tempat : Ruang Rapat Kantor Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Provinsi Jawa Tengah

Peserta : 45 orang, dari unsur Wartawan Peduli
Bencana

(4) Hasil

- Meningkatkan komunikasi wartawan untuk peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana.
- Peningkatan sumber daya manusia serta sosialisasi untuk publikasi penanggulangan bencana.
- Diharapkan dengan terbentuknya forum wartawan peduli bencana membantu tugas-tugas BPBD dan BNPB pada umumnya dalam pengurangan risiko bencana.

(5) Foto dokumentasi



Gambar 56 Media Gethering Refleksi Penanggulangan Bencana

b) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PB dan Manajemen

Penganggaran di Jawa Tengah Tahun 2018

(1) Gambaran kegiatan

Sebagai bagian dari nawaitu kita dalam terus menggulirkan semangat reformasi birokrasi, kegiatan Rakor Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Manajemen Penganggaran di Jawa Tengah juga menjadi bagian upaya kita dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Jawa Tengah terus berupaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan politik anggaran, yaitu dilakukan melalui rembukan dengan masyarakat dan berbagai elemen, dan DPRD agar anggaran pembangunan Jawa Tengah dapat dioptimalkan pemanfaatannya namun tetap menganut azas transparansi dan akuntabilitas. Akses informasi kepada masyarakat dibuka seluas-luasnya dengan maksud kontrol efektif dan konstruktif bagi berjalannya pemerintahan di Jawa Tengah.

E-government terus dikembangkan, dengan tujuan diperoleh integrasi antar data di dalam proses internal birokrasi sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi yang *real time*.

(2) Tujuan

- Diharapkan dapat meningkatkan performa dalam koordinasi dan kinerja dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah.
- Mewujudkan *good governance* dan *clean government* terutama dalam manajemen penganggaran.

(3) Pelaksanaan

Tema : Penyelenggaraan PB dan Manajemen Penganggaran di Jawa Tengah Tahun 2018

Waktu Sabtu - Minggu, 19 - 20 Januari 2019

Tempat : Kantor BPBD Kab. Rembang

Peserta : 70 orang, dari BPBD Kab/Kota Se-Jateng

(4) Foto Dokumentasi



Gambar 57 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PB dan Manajemen

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

a) Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas di BPBD Kab/Kota

(1) Gambaran kegiatan

Penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas saat ini merupakan isu global paska konferensi dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Sendai Jepang yang menghasilkan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030 dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mendukung pencapaiannya. Di tingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai lebih awal dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan,

Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan menjadikan momentum Peringatan Bulan PRB tahun 2015 di Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan penyandang disabilitas dan organisasinya. Pemerintah Indonesia sendiri pada tahun 2016 menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana penanggulangan bencana merupakan salah satu bab yang dimuat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan komitmen kami sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana sangat mendukung dan memberikan bukti nyata bahwa upaya-upaya penanggulangan bencana yang inklusif disabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama antara pelaku penanggulangan bencana dan organisasi penyandang disabilitas.

(2) Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pentingnya pembentukan unit LIDI di lingkup Kabupaten/Kota untuk memberikan rincian arahan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan layanan yang menjadi tugas Unit LIDI PB di Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(3) Pelaksanaan

Tema : Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan
Inklusi Disabilitas BPBD Kab/Kota

Waktu Selasa, 8 Mei 2019

Tempat : Kantor BPBD Kab. Magelang

Peserta : 100 orang, dari BPBD Kab/Kota Se-
Jateng

(4) Hasil

- Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) berpartisipasi aktif dalam seluruh proses perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk memastikan pelaksanaan inklusi disabilitas penanggulangan bencana.
- Unit LIDi PB mendorong dan memfasilitasi keterlibatan OPDis dalam kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan di atas, dengan memprioritaskan kepada OPDis yang berada di sekitar lokasi kegiatan.
- Unit LIDi PB mensosialisasikan keberadaan, hak, dan peran penyandang disabilitas kepada para pelaku penanggulangan bencana, baik pada pra, saat, dan pasca.
- Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Sifat suatu kegiatan yang inklusi disebut inklusif.

(5) Foto dokumentasi



Gambar 58 Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas

b) Sosialisasi Program *Cash Management System* (CMS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

(1) Gambaran Kegiatan

Merealisasikan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Transaksi Non Tunai, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) bekerja sama dengan Bank Jateng untuk memberikan pelatihan aplikasi *Cash Management System* (CMS) kepada para bendahara pengeluaran dan pembantu di setiap BPBD Provinsi Jawa Tengah agar semakin mudah dalam menjalankan tugas.

CMS merupakan salah satu jenis layanan pengelolaan keuangan di mana pihak yang bersangkutan dapat melakukan keuangan langsung menggunakan fasilitas online.

Sosialisasi program *cash management system* (CMS) sangat bermanfaat bila menerapkan CMS bagi

perkembangan suatu organisasi terutama pada organisasi yang berhubungan dengan finansial.

Sosialisasi cash management system (CMS) dilaksanakan di gedung B lantai 2 Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah. Hadir dalam acara dimaksud Staff BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kasubbag dari Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah dan Bank Jateng.

(2) Tujuan

Diselenggarakannya sosialisasi *cash management system* (CMS) untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi/OPD yang berhubungan dengan finansial yang bekerjasama dengan Bank Jateng.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Sosialisasi Program Cash Management System (CMS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Waktu	Rabu, 16 Mei 2019
Tempat	: Kantor BPBD Kab. Magelang
Peserta	: 30 orang, dari BPKAD, Kominfo dan Bank Jateng

(4) Hasil

- Terwujudnya transparansi penggunaan dan pelaporan anggaran, mempermudah arus transaksi kas oleh OPD maupun pihak ketiga sebagai pengguna APBD dan meningkatkan pengamanan bagi pengguna kas daerah.
- Bendahara dapat dengan cepat memahami penggunaan teknologi informasi yang diterapkan pada pengelolaan keuangan dan segera dapat dipraktikkan dalam menjalankan tugas.

(5) Dokumentasi



Gambar 59 Sosialisasi Program Cash Management System (CMS)

3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

a) Sinergi PB Berbasis Masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah Tangguh Bencana

(1) Gambaran kegiatan

Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang memiliki Sistem Informasi Logistik dan Peralatan yang baik untuk mendukung bantuan bisa segera sampai ke daerah, karena sektor logistik dan peralatan sangat memengaruhi 80% keberhasilan upaya penanggulangan bencana.

Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi serta penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri.

Salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 dalam bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya. Dibutuhkan peran dari

seluruh pihak termasuk masyarakat agar rantai mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat diharapkan tetap memantau informasi MKG melalui BMKG @infoBMKG. Agar terhindar dari isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita *hoaks* dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi dasar manajemen bencana melalui penyelenggaraan diklat yang mengacu pada standar kurikulum, modul, dan bahan ajar dari Pusdiklat BNPB.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan perhitungannya oleh masing-masing daerah, dan untuk menilai IKD Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus dihitung IKD masing-masing Kab/Kota se Jawa Tengah, karena IKD Provinsi tidak bisa dinilai tanpa ada IKD Kab/Kota.

BPBD mengadakan Rapat Koordinasi Sinergi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Untuk Mewujudkan Jawa Tengah tangguh bencana dilaksanakan pada hari Kamis, 15 November 2018 pukul 08.00 WIB – Selesai di Ruang Rapat Arjuna Lt. II, Kantor Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III (BP2MK) atau Gedung Eks. Bakorwil II Surakarta, Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 15 Surakarta.

Kegiatan ini dibuka oleh Kalakhar BPBD Prov. Jateng Bapak Sarwa Pramana, SH, M.Si dalam arahannya Bapak Kalakhar menghimbau Program 2019 BPBD Kab/Kota diharapkan mulai mengerjakan program mitigasi

bencana yang berkerjasama dengan PTN/PTS untuk melaksanakan program KKN Tematik yang bertujuan untuk mendukung pembentukan Destana.

BPBD Kab/Kota diminta untuk segera melaksanakan Rakor Persiapan Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor karena sudah mulai memasuki musim penghujan; BPBD Kab/Kota dihimbau untuk mengaktifkan “Posko Bencana Bansor” 24 jam dengan melibatkan relawan; BPBD Kab/Kota bisa segera mengajukan permohonan dana siap pakai langsung ke BNPB untuk persiapan penanganan bencana banjir dan longsor, serta untuk pengajuan pengadaan logistik yang dapat segera dipenuhi adalah jas hujan dan *chain saw*.

(2) Tujuan

Maksud dari kegiatan sinergi PB berbasis masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah Tangguh Bencana adalah untuk menyelaraskan upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat melalui program dan kegiatan yang tepat mutu, sasaran dan manfaat, agar terwujud sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Sinergi PB Berbasis Masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah Tangguh Bencana
Waktu	Kamis, 15 November 2018
Tempat	: Ruang Rapat Arjuna Lt. II, Kantor Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III (BP2MK) atau

- Gedung Eks. Bakorwil II Surakarta, Jl.
Brigiend Slamet Riyadi No. 15 Surakarta
- Peserta : 100 orang, peserta dari BPBD Kab/Kota
Se Jawa Tengah
- Narasumber : 1. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
BNPB (Rudi Phadmanto, Ak., MBA)
dengan materi Penggunaan Sistem
Informasi Logistik dan Peralatan
untuk Mendukung Upaya
Penanggulangan Bencana
2. Kepala Biro Keuangan BNPB (Ir. Sri
Widayani, MM) dengan materi
Implementasi Dana Siap Pakai BNPB
oleh BPBD Kab/Kota sesuai
Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun
2018
3. Kepala Sub Direktorat Rawan
Bencana Wilayah I, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Ir. Yani
Ganefianto, M.Si) dengan materi
Sinergi Pemanfaatan Dana APBDes
untuk Pengurangan Risiko Bencana
4. Kepala Kelompok Teknisi Stasiun
Geofisika Kelas III Banjarnegara
(Haryanta, S.Kom) dengan materi
Optimalisasi Pemanfaatan Informasi
Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika untuk Penanggulangan
Bencana di Wilayah Provinsi Jawa
Tengah

5. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB (Ade Nugraha, ST) dengan materi Pengantar Penilaian Kapasitas Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah untuk Kajian Risiko Bencana; Kepala Bidang Sertifikasi LSP PB (Catur Sudiro) dengan materi Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana.

(4) Hasil

- Pada tahun 2019 BPBD Kab/Kota diharapkan mulai menggerakkan program mitigasi bencana yang berkerjasama dengan PTN/PTS untuk melaksanakan program KKN Tematik yang bertujuan untuk mendukung pembentukan Destana.
- BPBD Provinsi akan mengagendakan kegiatan FGD dengan BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah untuk menghitung Penilaian IKD Provinsi Jawa Tengah; BPBD Provinsi akan membiayai 20 orang ASN BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah yang ingin mengikuti Uji Kompetensi Dasar Manajemen Bencana.

(5) Foto dokumentasi





Gambar 60 Sinergi PB Berbasis Masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah Tangguh Bencana

4) Penyusunan Studi-studi Bidang Kebencanaan (Disaster Study)

- a) Rakor Kerjasama BPBD dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha “Gerakan Revolusi Akademik melalui PRB untuk Mewujudkan Jateng Tangguh Bencana”

(1) Gambaran kegiatan

Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam pengarahannya mengatakan bahwa BPBD Provinsi Jawa Tengah berterima kasih kepada CSR Dunia Usaha yang selalu berperan dan siap membantu dalam penanggulangan bencana. Diharapkan CSR Perusahaan juga mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana secara keseluruhan, mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, karena selama ini alokasi anggaran dari CSR Perusahaan lebih banyak untuk bantuan penanganan darurat.

Sebagian besar daerah Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana yang memiliki ancaman bencana tinggi. Oleh karena itu, sesuai penegasan Gubernur Jawa Tengah dihimbau untuk mulai memperbaiki kualitas lingkungan dalam pengelolaan pemanfaatan air dan darurat sampah untuk menyikapi banyaknya alih fungsi lahan dan perubahan iklim.

PTN dan PTS dimohon membentuk forum LPPM bergabung dengan BPBD dan Dunia Usaha untuk membuat MoU tentang Program KKN Tematik Kebencanaan yang nantinya bisa dilaporkan ke Gubernur dan BNPB sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini. Adakan pertemuan secara rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi output dari program kerjasama BPBD, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.

(2) Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kapasitas baik pemerintah dan masyarakat dalam bidang kebencanaan melalui kerjasama pemerintah dengan civitas akademika dan dunia usaha.

(3) Pelaksanaan

Tema : Rakor Kerjasama BPBD dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha
“Gerakan Revolusi Akademik melalui PRB untuk Mewujudkan Jateng Tangguh Bencana”

Waktu : Senin, 24 September 2018

Tempat : BPBD Prov Jateng
Jl. Imam Bonjol No.1 F Semarang

Peserta : 100 orang, berasal dari BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se Jawa Tengah, Perwakilan Dunia Usaha.

Narasumber : 1. Kasubdit Peran Masyarakat BNPB (Drs. Pangarso Suryotomo) dengan materi Meningkatkan Ketangguhan Multipihak dalam Penguatan Desa

Tangguh Bencana.

2. Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Mitigasi Kebencanaan (GAMA-InaTEK) UGM (Dr. Didit Hadi Barianto) dengan materi Integrasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana.
3. Forum CSR Kesos Jawa Tengah (Drs. Setyo Adi Paminto, MM) dengan materi Membangun Partisipasi dan Kemitraan Dunia Usaha Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana.
4. Sekolah Sungai Klaten (Prof. Dr. Suratman Worosuprojo, M.Sc) dengan materi Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana.
5. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN (Dr. Eko Teguh Paripurno) dengan materi Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui KKN Tematik Kebencanaan.
6. Fakultas Teknik UGM (Dr.Ir.Ing.Agus Maryono) dengan materi Pengurangan Risiko Bencana melalui Gerakan Restorasi Sungai untuk Menuju Jawa Tengah

Tangguh.

7. Moderator kegiatan tersebut antara lain Sorja Koesuma, S.Si, M.Si (FMIPA UNS) dan Ir. Sunaryo, MURP, Ph.D (Tim Gubernur Jateng untuk Percepatan Pembangunan).

(4) Hasil

- Mewujudkan masyarakat tangguh bencana fokusnya adalah pada pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dengan gerakan perubahan paradigma, revolusi, akademis, mental dan sistem kerja yang mulai menyikapi kodrat hidup di daerah rawan bencana.
- Dunia Usaha akan mulai berpartisipasi dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan (pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) sampai kepada pemberdayaan masyarakat.
- Sungai sangat berfungsi dalam mendukung kehidupan, karena baik buruknya kondisi sungai akan mempengaruhi dampak kehidupan sosial.
- Mulai gerakan “Politik Air” dengan memaksimalkan semua sumber daya air yang ada di bumi untuk dimanfaatkan seefisien dan berkelanjutan.

b) Foto dokumentasi



Gambar 61 Gerakan Revolusi Akademik melalui PRB untuk Mewujudkan Jateng Tangguh Bencana

5) Perencanaan Bidang Kebencanaan

a) Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan BPBD se-Jawa Tengah Tahun 2018

(1) Gambaran kegiatan

Kegiatan ini dibuka dan pemaparan materi oleh kalakhar BPBD Prov. Jateng Bapak sarwa Pramana SH, M.Si dalam paparannya kalakhar BPBD Prov. Jateng mengungkapkan bahwa rata-rata anggaran 2018 BPBD Kab/Kota Se-Jawa Tengah naik, Kalakhar menghimbau agar dalam pembuatan perencanaan anggaran didasarkan berdasarkan data-data.

Kalakhar menyarakan dalam perencanaan anggaran untuk memberikan porsi yang lebih kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, hal ini berfungsi sebagai mitigasi bencana dan pencegahan hal tersebut berguna bagi masyarakat apabila wilayah tersebut tertimpa bencana tidak terdapat banyak korban; mendorong kepada BPBD yang belum memiliki Perda PB unruk segera membuat dan membuat Renstra, RPB, RENKON, Laporan Rutin yang diberikan kepada bupati dan SOP PB hal ini berfungsi pada saat audiensi dengan DPR guna membuka pandangan DPR apa itu bencana dan apa itu BPBD; Mengingatkan agar BPBD Kab/Kota mengawal alokasi DSP dan menekankan akuntabilitas dalam pelaporan nya.

BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Rakor Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bpbd Se-Jawa Tengah Tahun 2018 pada tanggal 25-26 Januari 2018. kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BPBD Kabupaten Pati, Jalan Raya Pati-Kudus KM 3,5 Kec. Margorejo, Kab. Pati. Peserta dari kegiatan ini terdiri

dari sekretaris dan kasubag program/staf BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah.

(2) Tujuan

Perencanaan anggaran untuk memberikan porsi yang lebih kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, hal ini berfungsi sebagai mitigasi bencana dan pencegahan hal tersebut berguna bagi masyarakat apabila wilayah tersebut tertimpa bencana tidak terdapat banyak korban; mendorong kepada BPBD yang belum memiliki Perda PB unruk segera membuat dan membuat Renstra, RPB, RENKON, Laporan Rutin yang diberikan kepada bupati dan SOP PB hal ini berfungsi pada saat audiensi dengan DPR guna membuka pandangan DPR apa itu bencana dan apa itu BPBD; Mengingatkan agar BPBD Kab/Kota mengawal alokasi DSP dan menekankan akuntabilitas dalam pelaporan nya.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan BPBD se-Jawa Tengah Tahun 2018
Waktu	Kamis – Jumat, 25-26 Januari 2018
Tempat	: Ruang Rapat Kantor BPBD Kabupaten Pati, Jalan Raya Pati-Kudus KM 3,5 Kec. Margorejo, Kab. Pati.
Peserta	: 90 orang terdiri dari sekretaris dan kasubag program/staf BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah
Narasumber	: 1. Kepala Biro Perencanaan BNPB Ibu Ir. Sri Widayani, MM, materi yang disampaikan antara lain : Pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dengan perkuatan kebijakan Money Follow Program.

(4) Hasil

Terwujudnya sinergitas program perencanaan BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah dan meningkatnya pelayanan BPBD dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan didukung oleh manajemen perencanaan program/kegiatan yang terpadu dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kab/Kota. ke dalam perencanaan dan penganggaran, termasuk penataan ruang yang berbasis risiko bencana.

(5) Foto dokumentasi



Gambar 62 Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan BPBD se-Jawa Tengah Tahun 2018

b) Rapat Koordinasi Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

1) Gambaran Kegiatan

Kegiatan Rapat Koordinasi dengan tema Akuntabilitas, Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran dibuka secara resmi oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah serta pengarahan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah disampaikan dalam kegiatan Sekda Prov. Jateng memberikan apresiasi terselenggaranya forum ini.

Selain sebagai bagian dari nawaitu kita dalam terus menggulirkan semangat reformasi birokrasi, forum ini juga

menjadi bagian upaya kita dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Jawa Tengah terus berupaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dengan politik anggaran, yaitu dilakukan melalui rembugan dengan masyarakat dan berbagai elemen, dan DPRD agar anggaran pembangunan Jawa Tengah dapat dioptimalkan pemanfaatannya namun tetap menganut azas transparansi dan akuntabilitas.

Akses informasi kepada masyarakat dibuka seluas-luasnya dengan maksud kontrol efektif dan konstruktif bagi berjalannya pemerintahan di Jawa Tengah.

E-government terus dikembangkan, dengan tujuan diperoleh integrasi antar data di dalam proses internal birokrasi sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi yang real time.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah mewujudkan integritas kinerja pemerintah khususnya BPBD Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, melalui akuntabilitas, perencanaan yang terintegrasi antar dokumen, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, tepat guna/manfaat serta tepat mutu.

3) Pelaksanaan

Tema	: Rapat Koordinasi Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran.
Waktu	Senin – Selasa, 14 -15 Mei 2018
Tempat	: Hotel Swiss Belinn Surakarta.
Peserta	: 100 peserta, terdiri dari Kepala

Pelaksana dan Sekretaris BPBD serta Bappeda 33 Kab/Kota di Jawa Tengah.

Narasumber : 1. Kepala Biro Keuangan BNPB (Ir. Sri Widayani, MM).

Judul materi: Mekanisme Pelaksanaan Anggaran PB Sumber Dana dari APBN.

2. Bappenas (Ir. Kuswiyanto, M.Si).

Judul materi: Strategi dan langkah Pengintegrasian PRB dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran.

3. Tenaga Ahli BNPB (Ir. Fathul Hadi, Dipl. HE).

Judul materi: Best Practice Penyelenggaraan PB 5th awal terbentuknya BNPB.

4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si).

Judul materi: Membangun Sinergitas Pelaksanaan Program Kegiatan PB di Jawa Tengah.

5. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Soni Sumarsono, S.Sos).

Judul materi: Peran dan Dukungan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan Bencana.

6. Inspektur I BNPB (Drs. Kahartomi, MPd).

Judul materi: Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana.

7. BPK Perwakilan Jawa Tengah (A.M. bagus Pantja PD, SE, MSi, AK).

Judul materi: Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran di Bidang PB Pada Pra, Saat Dan Pasca Bencana

4) Hasil

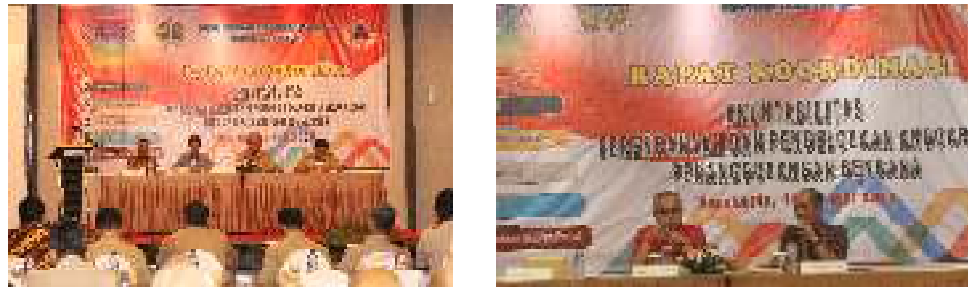
Penyusunan program kerja/kegiatan di daerah sebaiknya berdasarkan kepada permasalahan/tantangan di daerah tersebut, sehingga diharapkan dapat meyakinkan TAPD, Kepala Daerah dan DPRD untuk dapat menyetujui program kerja/kegiatan dan anggaran dimaksud.

Bappeda dan BPBD mengawal pengarusutamaan PRB dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan RENSTRA SKPD dalam Forum Musrenbang di Daerah.

Prinsip penyelenggaraan PB dengan berpedoman tata kelola keuangan yang baik hendaknya tidak menghambat kinerja kemanusiaan yang harus cepat dan tepat, namun tetap dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana PB harus dilakukan secara benar, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku, apabila terdapat keragu-raguan Pemda/BPBD dapat meminta pendampingan dari Perwakilan BPKP Provinsi.

5) Foto Dokumentasi



Gambar 63 Rapat Koordinasi Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

6) Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan

a) Pameran Pembangunan PRPP

(1) Gambaran Kegiatan

Jateng Fair 2018 yang akan dibuka mulai tanggal 17 Agustus sampai 9 September 2018 di PRPP Semarang akan mengangkat tema Magical Dieng.

Titah Listyorini Direktur PT PRPP Jateng mengatakan konsep menggunakan tema ini dimaksudkan untuk menarik perhatian sekaligus memperkenalkan potensi daerah di Jawa Tengah.

"Sejak tahun lalu ada tema icon dihubungkan dengan kekhasaan Jawa Tengah dan tahun lalu tema Karimunjawa dan sekarang Dieng yang merupakan tempat wisata unggulan yang ada gunung, danau, candi dan kebudayaan dengan diangkat tema Dieng harapannya mengenalkan objek wisata Dieng di Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah," katanya di Semarang, Selasa (3/7).

Tak hanya menampilkan produk-produk unggulan daerah seperti wisata, kuliner maupun kerajinan tangan, di Jateng Fair 2018 juga akan menyuguhkan beberapa

konsep menarik yang berbeda dengan tahun lalu antara lain penambahan wahana baru seperti dino show, hulk show, magic liquid serta akan menghadirkan Doraemon show yang langsung didatangkan dari Jepang. Dengan menghadirkan konsep yang menarik ini diharapkan akan menarik pengunjung yang banyak.

(2) Maksud dan Tujuan

Jateng Fair ini bisa memberikan alternatif hiburan di Jawa Tengah dan ditargetkan realisasi 500 ribu pengunjung dan target gilanya bisa sampai 1 juta pengunjung dan Jateng Fair akan bisa menumbuhkan perekonomian serta devisa negara di sektor pariwisata dan promosi, selain itu kegiatan yang digelar setahun sekali ini akan menjadi salah satu kalenser wisata tingkat nasional.

(3) Pelaksanaan

Tema : “Magical Dieng”
Pameran Pembangunan PRPP
Waktu : 17 Agustus s/d 9 September 2018
Tempat : PRPP Semarang

(4) Foto Dokumentasi



Gambar 64 Pameran Pembangunan PRPP “Magical Dieng”

7) Koordinasi Lintas Sektor Lintas wilayah Bidang Kebencanaan

a) Forum Organisasi Perangkat Daerah

(1) Gambaran kegiatan

BPBD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan pada hari Selasa 6 maret 2018, pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Lt. IV Gedung A Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang. Adapun peserta dari kegiatan tersebut meliputi. OPD Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah, Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi se Jawa Tengah, Perwakilan CSR/Dunia Usaha di Jawa Tengah, Perwakilan Penggiat Kebencanaan di Jawa Tengah.

Acara Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP dan menyampaikan point sambutan sebagai berikut : Sinkronisasikan dan sinergikan Penyusunan Rencana PB di Jawa Tengah dengan OPD pendukung karena bencana tidak mengenal wilayah; Koordinasikan selalu upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dengan OPD pendukung saat terjadi maupun nihil bencana; Pimpinan OPD untuk dapat menginformasikan dan terbuka terkait alokasi anggaran kegiatan yang menunjang upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah; Dayagunakan forum ini untuk memanage risiko bencana seawal mungkin dan sedini mungkin, sehingga kita semua siap untuk melaksanakan tugas kebencanaan dengan senantiasa waspada dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan muncul; Aparatur Sipil Negera (ASN) harus menjaga netralitas dan meningkatkan

sinergitas serta kondusivitas wilayah di tengah iklim pilkada saat ini.

(2) Maksud dan Tujuan

Untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan Kegiatan tersebut adalah Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, Nasional, dan kabupaten/ kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan rancangan RKP; Menyelaraskan pendanaan indikatif program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut antarlain Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Forum Organisasi Perangkat Daerah
Waktu	: Selasa, 6 Maret 2018
Tempat	: Gedung Balai Merbabu, PRPP Jawa Tengah
Peserta	: 100 orang, terdiri dari OPD Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah, Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi se Jawa Tengah, Perwakilan CSR/Dunia Usaha di Jawa Tengah, Perwakilan Penggiat

Kebencanaan di Jawa Tengah.

- Matreri : 1. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah “Penanganan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.
2. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah “Pemerintah dan masyarakat sama-sama bersiap untuk menghindari atau merespon bencana dengan tepat dan efektif sehingga kerugian dapat dikurangi”

(4) Hasil

- Perguruan tinggi untuk bisa memfasilitasi/ mengarahkan mahasiswanya melalui kegiatan KKN untuk ditempatkan di daerah rawan bencana/pasca bencana yang bertujuan melaksanakan pendampingan dan pelatihan yang akan dibantu oleh BPBD; TATTs dan ASB untuk tetap giat melakukan pendampingan dan edukasi untuk masyarakat dan penyandang disabilitas guna meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana;
- BPBD, CSR dan dunia usaha bergerak bersama untuk melaksanakan program prioritas penanggulangan bencana;
- Diharapkan akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

(5) Foto dokumentasi



Gambar 65 Forum Organisasi Perangkat Daerah

b) Forum Organisasi Perangkat Daerah Renstra BPBD

(1) Gambaran Kegiatan

Kegiatan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Prov. Jateng 2018-2023 dilaksanakan pada Kamis, 11 Oktober 2018 dengan Narasumber dan Rangkuman materi rakor dari Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I BNPB (Yuz Rizal, DCN, M.Epid) dengan materi Kebijakan dan Prioritas Program Kegiatan Pusat untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (Agung Koenmarjono, SH) dengan materi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 di Bidang Kebencanaan.

(2) Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka menyelaraskan indikator, sasaran serta target program dalam rancangan Rencana Strategis Bidang Kebencanaan.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Forum Organisasi Perangkat Daerah Renstra BPBD
Waktu	: Kamis, 11 Oktober 2018

- Tempat : Ruang Rapat Gd. A Lt. IV Kantor BPBD
Prov. Jateng.
- Peserta : 100 orang, Peserta kegiatan terdiri dari
OPD Provinsi Jawa Tengah, BPBD
Kab/Kota se Jawa Tengah, Perwakilan
Perguruan Tinggi Negeri, Perwakilan
Dunia Usaha, Komunitas/Pemangku
Kepentingan PB Jawa Tengah.
- Matreri : 1. Program prioritas BNPB untuk 5
tahun ke depan fokus pada
internalisasi pengurangan risiko
bencana dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan di Pusat
dan Daerah yang bertujuan untuk
menurunkan tingkat kerentanan
terhadap bencana;
2. Strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan daerah Jawa
Tengah dalam bidang kebencanaan
akan diarahkan pada
pengembangan masyarakat tangguh
bencana, pengembangan EWS
berbasis masyarakat, peningkatan
upaya PRB lintas sektor, identifikasi
daerah rawan bencana dan
inventarisasi daerah terdampak
bencana untuk meningkatkan
ketangguhan masyarakat Jateng
dalam penanggulangan bencana;
3. Peningkatan koordinasi dan
sinkronisasi PB antara Pusat,

Daerah, Lembaga Usaha dan Masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan peran dan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan PB dalam penanggulangan bencana.

(4) Hasil

Kegiatan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Prov. Jateng 2018-2023 adalah Forum Perangkat Daerah yang telah diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri pemangku kepentingan PB menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan Provinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

(5) Foto Dokumentasi



Gambar 66 Forum Organisasi Perangkat Daerah Renstra BPBD

8) Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

a) Bintek Pengisian Indeks Ketahanan Daerah

(1) Gambaran kegiatan

Hal hal penting yang disampaikan oleh narasumber antara lain Perlu suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan mereka, karena faktanya yang menyelamatkan masyarakat dari bencana, > 96% adalah dirinya sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. Kosep PRB dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang ada dengan ketangguhan, mencegah risiko bencana baru dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dapat dimulai pada level administrasi terkecil yaitu Desa/Kelurahan melalui program Desa Tangguh Bencana.

Pelibatan masyarakat tidak lagi sebagai obyek dalam bencana, tetapi sudah menjadi subyek yang berdaya. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah salah satu cara untuk melibatkan masyarakat sebagai subyek yang berdaya, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka untuk bisa melakukan pengkajian risiko bencana, membuat laporan kajian risiko bencana dan diseminasi, membuat rencana pengelolaan risiko bencana, melakukan serangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana dan melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi.

Perlu adanya komitmen bersama dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana oleh Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) karena keduanya saling terkait untuk mengoptimalkan terlaksananya program masing-masing dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan perlindungan, serta pelestarian kegiatan pembangunan desa yang terintegrasi dengan kegiatan

PRB sehingga ketangguhan masyarakat dalam PB dapat terwujud.

(2) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur daerah khususnya BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah baik secara teori ataupun aplikasi pada daerah dengan karakteristik yang beragam dalam melakukan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah secara mandiri.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Bintelk Pengisian Indeks Ketahanan Daerah
Waktu	: Senin – Selasa/10 – 11 Desember 2018
Tempat	: Hotel Syariah Solo Jl. Adi Sucipto No. 47 Surakarta.
Peserta	: 100 orang, terdiri dari Sekretaris dan Kasubbag Program/ Perencanaan. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Sub Direktorat Peran Masyarakat BNPB (Drs. Pangarso Suryotomo). Fasilitator dari BNPB antara lain Ageng Nur Ichwana; Ade Nugraha; Pratomo Cahyo Nugroho; Rizky Tri Septian; Suparlan.

(4) Hasil

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemaparan materi/teori pengantar dari narasumber dan dilanjutkan praktek dengan fasilitator. Point sambutan Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) : Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 adalah menurunnya indeks risiko bencana

pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dengan target penurunan sebesar 30%.

Tahun 2016 s.d. 2017, BNPB telah melakukan pendampingan dan pengukuran IKD Provinsi Jawa Tengah melalui Kegiatan Penguatan Kelembagaan PRB di 12 Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat menjadi pioner dan percontohan untuk wilayah lainnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam perhitungan mandiri IKD diharapkan dapat menjadi sebuah langkah untuk mengukur ketahanan dan risiko bencana secara mandiri di daerah masing-masing, sehingga dari hasil perhitungan tersebut diketahui prioritas mana yang harus diperbaiki untuk menurunkan risiko bencana dan prioritas mana yang perlu ditingkatkan.

Tindak lanjut kegiatan ini adalah BPBD Kab/Kota secara bertahap dapat segera mengambil langkah-langkah yang konkret dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri dengan melibatkan seluruh OPD terkait di daerah masing-masing dan secara kontinyu meng-update penilaian tersebut.

(5) Foto Dokumentasi





Gambar 67 Bintek Pengisian Indeks Ketahanan Daerah

9) Pembelajaran Wawasan Kebencanaan

a) Uji Kompetensi/Sertifikasi Penanggulangan Bencana

(1) Gambaran Kegiatan

Keberadaan LSP PB sangat penting, terutama untuk menjamin kualitas SDM dan memberikan pengakuan serta penghargaan profesi di bidang penanggulangan bencana. Adanya uji kompetensi/ sertifikasi dapat membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/ industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi, karena tantangan di era globalisasi menuntut setiap SDM memiliki bukti profesi yang legal.

Lembaga ini dapat mencetak/mensertifikasi tenaga penanggulangan bencana yang berkompeten dan mempunyai daya saing, berjaminan mutu yang dihasilkan melalui uji kompetensi keahlian serta dapat memperkuat penanganan bencana yang berkualitas dan berkelanjutan baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi PB meliputi Pengumpulan portofolio peserta uji kompetensi/calon asesi yang merupakan informasi pribadi yang berisi catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi dalam penanggulangan bencana; Asesor meneliti portofolio bersama calon asesi.

Proses rekomendasi, persetujuan asesmen, serta catatan perubahan jika ada. Penilaian portofolio, Wawancara peserta uji kompetensi oleh asesor untuk mengukur sejauh mana penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dari peserta uji kompetensi terhadap standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan.

Berkas-berkas asesmen selanjutnya diserahkan ke Komite Teknis LSP PB untuk diteliti lagi kesesuaiannya, yang nantinya kurang lebih dalam waktu 1 (satu) bulan akan disampaikan keputusan asesmen dari asesor kepada para peserta uji kompetensi apakah Kompeten (mendapatkan sertifikat) atau Belum Kompeten (tidak mendapatkan sertifikat).

(2) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan uji kompetensi atau sertifikasi penanggulangan bencana adalah untuk menjamin kualitas SDM dan memberikan pengakuan serta penghargaan profesi di bidang penanggulangan bencana.

Meningkatkan kompetensi kerja yang wajib dimiliki oleh pelaku PB yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Menciptakan para pelaku PB dengan mutu tinggi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Uji Kompetensi/Sertifikasi PB
Waktu	: Kamis – Jum’at 13 – 14 Desember 2018
Tempat	: Ruang Rapat Lt. IV Gd. A, BPBD Prov. Jateng Jl. Imam Bonjol No. 1 F

Semarang

Peserta : Peserta kegiatan dari BPBD Kab/Kota
se Jawa Tengah.

(4) Hasil

- Para pelaku PB harus memiliki standar kompetensi yang tinggi, karena bencana menjadi suatu hal yang penting dalam penanganannya.
- Jawa Tengah diharapkan menjadi pioner dalam persaingan kualitas tenaga kerja/sumber daya manusia khususnya dalam bidang penanggulangan bencana yang berjaminan mutu dan berdaya saing tinggi.
- Tempat Uji Kompetensi (TUK) bisa didirikan di Kabupaten/Kota, agar daerah semakin go public dan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten.

(5) Foto Dokumentasi



Gambar 68 Uji Kompetensi/Sertifikasi Penanggulangan
Bencana

10) Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan PB antar Unsur
Pengaruh BPBD Prov. Jateng dengan Para Pemangku
Kepentingan

a) Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana
Kekeringan Tahun 2018

(1) Gambaran Kegiatan

Pengarahan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi
Jawa Tengah (H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP) antara lain

bahwa selama ini hubungan antara BNPB dan BPBD terjalin dengan semangat Esprite de corp, yang artinya dapat terselenggaranya integrasi dalam penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat.

Aktivitas Gunung Merapi yang selama 2 bulan ini pada level waspada tingkat 2 harus sama-sama kita antisipasi terutama di 3 Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Tugas dan kewajiban dari BPBD adalah OPD pertama yang harus siap siaga dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi bencana kekeringan perlu adanya kerjasama dengan BMKG dalam memperoleh informasi bahaya laten kekeringan di beberapa daerah di Jawa Tengah.

Televisi dan Media Sosial seperti instagram, twitter dan facebook digunakan sebagai media untuk sarana komunikasi dan sumber informasi pertama dalam proses penanggulangan bencana.

Pelayanan publik dalam hal ini adalah pelayanan kepada masyarakat harus siap siaga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.

(2) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah meningkatkan kesiapan Pemerintah Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana khususnya dalam rangka menghadapi bencana kekeringan dan menjalin kebersamaan para penggiat PB di BPBD se

Jawa Tengah. Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan metode pemaparan materi terkait dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab.

(3) Pelaksanaan

Tema	: Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana Kekeringan Tahun 2018
Waktu	: Selasa 03 Juli 2018, pukul 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Gedung A Lantai IV BPBD Provinsi Jawa Tengah Jalan Imam Bonjol 1 F Semarang.
Peserta	: 165 peserta, terdiri dari Kepala Pelaksana dan Pejabat Struktural BPBD dari 33 Kab/Kota di Jawa Tengah.

(4) Hasil

- BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah telah siap dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan.
- BNPB mendukung BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun BPBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam penganggaran penanganan bencana kekeringan.
- Perlu adanya pelayanan yang prima berbasis teknologi dalam penanggulangan bencana.
- Letusan-letusan freatik Gunung Merapi terjadi sejak 2012 hingga Mei 2018 bersumber dari akumulasi gas dan tidak melibatkan material magma yang kental.

(5) Foto Kegiatan



Gambar 69 Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana Kekeringan Tahun 2018

11) Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah

a) Talk Show Masyarakat Merapi Tangguh Bencana

(1) Gambaran Kegiatan

BPBD Prov. Jateng menyelenggarakan kegiatan Dialog Interaktif (Talk Show) dengan tema “Masyarakat Merapi Tangguh Bencana” disiarkan langsung dari Aula Kantor BPBD Kab. Magelang oleh Radio Elshinta Semarang pada hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB dengan dihadiri oleh Komunitas Merapi. Adapun narasumber kegiatan tersebut antara lain Kalaksa BPBD Kabupaten Magelang, Kalaksa BPBD Kabupaten Klaten, Kalaksa BPBD Kabupaten Boyolali, Kepala BPPTKG Yogyakarta.

(2) Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah untuk menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana erupsi Gunung Merapi agar masyarakat mengetahui upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan.

(3) Pelaksanaan

- Tema : Talk Show Masyarakat Merapi Tangguh Bencana
- Waktu : Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB
- Tempat : Aula Kantor BPBD Kab. Magelang oleh Radio Elshinta Semarang
- Peserta : Dihadiri oleh Komunitas Merapi. Narasumber kegiatan tersebut antara lain:
1. Kalaksa BPBD Kabupaten Magelang;
 2. Kalaksa BPBD Kabupaten Klaten;
 3. Kalaksa BPBD Kabupaten Boyolali;
 4. Kepala BPPTKG Yogyakarta.

(4) Foto Dokumentasi



Gambar 70 Talk Show Masyarakat Merapi Tangguh Bencana

Tabel 38
Kegiatan Subbagian Program

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			
	Media Gathering dengan Forum Wapena Jateng	Selasa, 9 Januari 2019	Kota Semarang	45

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PB dan Manajemen	Sabtu - Minggu, 19 - 20 Januari 2019	Kab. Rembang	70
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			
	Sosialisasi Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas di BPBD Kab/Kota	Selasa, 8 Mei 2019	Kab. Magelang	100
	Sosialisasi Program Cash Management System (CMS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rabu, 16 Mei 2019	Kab. Magelang	30
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			
	Sinergi PB Berbasis Masyarakat untuk mewujudkan Jawa Tengah Tangguh Bencana	Kamis, 15 November 2018	Kota Surakarta	100
4	Penyusunan Studi-Studi Bidang Kebencanaan (<i>Disaster Study</i>)			
	Rakor Kerjasama BPBD dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha “Gerakan Revolusi Akademik melalui PRB untuk Mewujudkan Jateng Tangguh Bencana”	Senin, 24 September 2018	Kota Semarang	100
5	Perencanaan Bidang Kebencanaan			
	Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kegiatan BPBD se-Jawa Tengah Tahun 2018	Kamis – Jumat, 25-26 Januari 2018	Kab. Pati	90
	Rapat Koordinasi Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	Senin – Selasa, 14 - 15 Mei 2018	Kota Surakarta	100
6	Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan			
	Pameran Pembangunan PRPP	17 Agustus s/d 9 September 2018	Kota Semarang	
7	Koordinasi Lintas Sektor Lintas wilayah Bidang Kebencanaan			
	Forum Organisasi Perangkat Daerah	Selasa, 6 Maret 2018	Kota Semarang	100
	Forum Organisasi Perangkat Daerah Renstra BPBD	Kamis, 11 Oktober 2018	Kota Semarang	100
8	Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
	Bintek Pengisian Indeks Ketahanan Daerah	Senin – Selasa/10 – 11 Desember	Kota Surakarta	100

No	KEGIATAN / Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan		
		tanggal	Lokasi	Peserta
1	2	3	4	5
		2018		
9	Pembelajaran Wawasan Kebencanaan			
	Kegiatan Uji Kompetensi Bidang Penanggulangan Bencana	Kamis – Jum'at 13 – 14 Desember 2018	Kota Semarang	
10	Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan PB antar Unsur Pengarah BPBD Prov. Jateng dengan Para Pemangku Kepentingan			
	Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana Kekeringan Tahun 2018	Selasa 03 Juli 2018	Kota Semarang	165
11	Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah			
	Talk Show Masyarakat Merapi Tangguh Bencana	Jum'at tanggal 24 Agustus 2018	Kab. Magelang	

D. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA JAWA TENGAH

1. Kejadian Bencana di Jawa Tengah

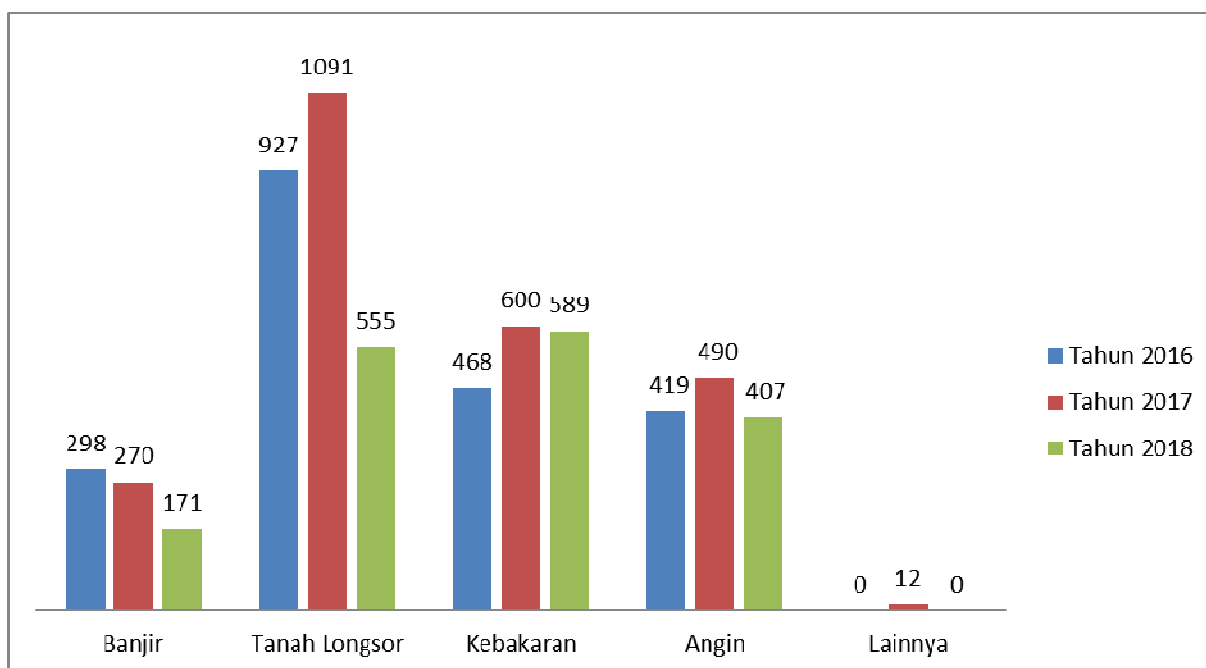
Data kejadian bencana di Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak **1.734 (Seribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat)** kejadian bencana, dengan taksiran kerugian akibat bencana mencapai Rp 47.470.620.000,-. Kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana Kebakaran yaitu 589 kejadian atau 33,96%. Sedangkan dari aspek kerusakan/kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah bencana kebakaran dengan taksiran sebesar Rp 33.866.505.000,-. Rekapitulasi kejadian bencana dan taksiran kerugian di Jawa Tengah selama tahun 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 39
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah 2018

No	Jenis Bencana	2018*		
		Jumlah	%	Kerugian (x 000,-)
1	2	3	4	5
1	Angin Topan	415	23,70	5.462.366
2	Banjir	172	9,86	2.924.463
3	Tanah Longsor	562	32,09	5.117.186
4	Kekeringan	-	-	-
5	Kebakaran	590	33,69	34.166.505
6	Gempa Bumi	3	0,17	65.000
7	Letusan Gn. Api	5	0,28	-
	Total	1.751	100	47.792.520

* Laporan sampai dengan 31 Desember 2018

Dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun terakhir, kejadian bencana di Jawa Tengah, adalah sebagai berikut



Gambar 71 Perbandingan Kejadian Bencana Jateng

Tabel 40
Perbandingan Kejadian Bencana 2016-2018

Bencana	2016	Kerugian (000)	2017	Kerugian (000)	2018	Kerugian (000)
1	2	3	4	5	6	7
Banjir	298	1.914.023.342	270	7.731.340	172	2.924.463
Tanah Longsor	927	185.627.303	1.091	21.025.867	562	5.117.186
Kebakaran	468	1.127.741.291	600	40.622.373	590	34.166.505
Angin	419	7.648.565	490	8.016.727	415	5.462.366
Lainnya	-	-	12	9.771.788	-	-
	2.112	3.235.040.501	2.463	87.168.095	1.751	47.792.520

2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2018

a. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah dilakukan secara simultan dan bekerjasama baik lintas sector maupun lintas wilayah. Komitmen dan kerjasama para pemangku kepentingan

PB, diwujudkan dalam beberapa aspek, baik kerjasama lingkup kelembagaan maupun teknis operasional penyelenggaraan penanggulangan. Sebagai landasan operasional masih didasarkan pada Instruksi Gubernur No. 360/009205 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penanganan Darurat Bencana, bahwa seluruh pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah agar :

- 1) Melaksanakan PB di seluruh wilayah Jateng terhadap seluruh ancaman bencana yang mengancam dan menyebabkan kehilangan jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur vital mulai dari status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan dini.
- 2) Melakukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan penanganan darurat bencana;
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk kegiatan penanganan darurat bencana

Sebagai tindaklanjut Instruksi tersebut, maka ketika terjadi bencana, pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana (PB) Daerah wajib :

- 1) Melaporkan ke Kepala Daerah (Bupati/Walikota) sebagai penanggungjawab pertama dalam penanganan bencana.
- 2) Mengadakan rapat dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk menggerakkan sumberdaya yang dimiliki.
- 3) Menunjuk komandan Penanganan Darurat (*Incident Commander*) pada setiap kejadian bencana/kedaruratan.
- 4) Membentuk klaster sesuai kebutuhan
- 5) Jika satu kabupaten/kota terdampak, maka kabupaten/kota terdekat segera merapat untuk memberikan dukungan dan bantuan
- 6) Melakukan upaya penanggulangan bencana sejak dini untuk mencegah meluasnya dampak bencana
- 7) Memprioritaskan keselamatan jiwa, dan kelompok rentan.

- 8) Memberdayakan potensi masyarakat dan dunia usaha secara optimal.
- 9) Memperhatikan kearifan lokal dan Norma yang berlaku.

b. Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor

Bencana banjir, tanah longsor merupakan bencana hidrometeorologis yang selama ini mendominasi jumlah kejadian bencana. Tingkat ancaman bencana ini hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota. Para pemangku kepentingan PB di kabupaten/kota terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi ancaman bencana tersebut. Bencana tersebut selalu menjadi pemberitaan baik di awal tahun dan akhir tahun seiring dengan datangnya musim penghujan.

Langkah-langkah Antisipasi dan kesiapan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi ancaman bencana di Jawa Tengah, antara lain adalah:

- 1) Mengaktifkan **Posko Siaga Darurat Bencana** di BPBD Prov Jateng (Telp/ Fax. 024-3562293)
- 2) Menyebarkan **Nomor Telpon Posko Bencana BPDB** Kab/Kota dan pemangku kepentingan melalui media sosial (twitter, instagram, facebook, dll)
- 3) Memetakan **Daerah Rawan/Berpotensi Bencana Banjir Dan Tanah Longsor** di 35 Kabupaten/Kota di Jateng sebagai berikut:
 - Banjir : 334 Kecamatan di 1.719 desa
 - Tanah Longsor : 335 Kecamatan di 1.594 desa

1) Penanganan Bencana Banjir di Kab. Tegal

Hujan deras yang melanda di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Tegal sejak Jumat tanggal 11 Februari 2018 pukul 20.57 WIB menyebabkan banjir terjadi di wilayah Kabupaten Tegal, dengan ketinggian air 60 cm hingga 1,5 meter serta 1 rumah roboh serta 1 tembok rumah roboh.

Tabel 41
Wilayah Terdampak Banjir Kab. Tegal

No	Kecamatan	Desa	Lokasi lain	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Adiwerna	Adiwerna		1 Kecamatan 10 Desa 1 Lokasi lain
		Kedungsukun		
		Pagedangan		
		Lemah Duwur		
		Pagianten		
		Pedes Lohor		
		Tembok		
		Singkil		
		Penarukan		
		Bersole		
			Belakang pasar Banjaran	
2.	Dukuhturi	Kupu Dukuhturi Sidakaton Sidapurna		1 Kecamatan 4 Desa
3.	Suradadi	Padaharja		1 Kecamatan 1 Desa
4.	Kramat	Kemuning		1 Kecamatan 7 Desa
		Kertaharja		
		Kramat		
		Maribaya		
		Mejasem		
		Padaharja		
		Dampyak		
5.	Dukuhwaru	Blubuk		1 Kecamatan 1 Desa
6.	Slawi	Kalisapu Kudaile		1 Kecamatan 2 Desa
				6 Kecamatan 25 Desa 1 Lokasi lain

Tabel 42
Dampak Banjir Kabupaten Tegal

No.	Desa	Dampak
1	2	3
1.	Tarub	Ketinggian air $\pm$ 10-20 cm
2.	Pecabean	Ketinggian air $\pm$ 25 cm
3.	Pedes Lohor	Ketinggian air $\pm$ 20 cm
4.	Pagedangan	Ketinggian air 30 cm
5.	Jatilawang	52 rumah terendam air dengan ketinggian air $\pm$ 20-30 cm
6.	Padaharja	Ketinggian air $\pm$ 25 cm
7.	Maribaya	Ketinggian air $\pm$ 50-80 cm
8.	Adiwerna	1 (satu) rumah roboh dan 1 (satu) tembok rumah roboh
9.	Wader RT 03 RW 05	Robohnya bangunan milik warga a.n Bpk. Hendra (26 TH, Wiraswasta)

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal adalah :

Dampak dari kejadian tersebut, ruas jalan di 6 Kecamatan (Adiwerna, Dukuhturi, Suradadi, Kramat, Dukuhwaru, Slawi) terendam air setinggi 30cm – 200cm.

Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Terdapat 25 KK Desa Kudaile mengungsi di SMK Walisongo dan Banjir belakang pasar Banjaran mengungsi di Masjid Darussalam. BPBD Kab. Tegal terus melakukan evakuasi dan mengirim bantuan ke korban banjir di beberapa wilayah Kab. Tegal, serta melakukan pendataan pengungsi sekaligus kebutuhan yang mendesak bagi pengungsi, Pemantaun beberapa sungai yang ada di wilayah Kab. Tegal.

Kondisi banjir yang terjadi menurun perlahan dengan signifikan dan air genangan mulai surut di tiap-tiap kecamatan. BPBD Kab. Tegal meluncur ke lokasi kejadian bencana mengerahkan beberapa personil untuk melakukan assesment dan dilanjutkan dengan melakukan

evakuasi warga di lokasi banjir ke tempat yang lebih aman dengan membawa perahu karet, jaket pelampung, APD.



Gambar 72 Banjir 6 Kecamatan di Kabupaten Tegal

2) Penanganan Bencana Banjir di Kota tegal

Bencana banjir di Kota Tegal terjadi bebarengan dengan kejadian banjir di Kabupaten Tegal terjadi pada hari Senin, 12 Februari 2018, Pukul 02.13 WIB karena hujan dengan intensitas tinggi.

Banjir di Kota Tegal terjadi di 3 (tiga) kecamatan 6 (enam) kelurahan mengakibatkan Jalan di 6 (enam) Kelurahan tergenang air dengan ketinggian 20 cm – 100 cm.

TRC PB BPBD Kota Tegal mendatangi Lokasi dan mendata kerugian bersama Perangkat Kelurahan. Pompa air terus di nyalakan untuk membuang air ke Sungai Gansa. Dampak dari kejadian tersebut, 7 (tujuh) Kelurahan di 3 Kecamatan tergenang air dengan ketinggian 60 cm – 120 cm.

Tabel 43
Wilayah Terdampak Banjir Kab. Tegal

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	2	3	4
1.	Margadana	Kaligangsa	1 Kecamatan 4 Desa
		Krandon	
		Sumurpanggang	
		Kalinyamat Kulon	
2.	Tegal Barat	Pesurungan Kidul	1 Kecamatan 1 Desa

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	2	3	4
3.	Tegal Timur	Mintaragen	1 Kecamatan
		Kraton	1 Desa
			3 Kecamatan 6 Desa

Kondisi posko **pengungsian** korban terdampak banjir di SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal:

1. Kurang lebih 6.000 jiwa di 3 kecamatan terdampak,
2. Terdapat 5 titik Dapur Umum yang dilaksanakan oleh ibu PKK

Kebutuhan makanan di suplai oleh Dapur Umum Swadaya Masyarakat dan Kelompok Donatur (Politeknik Tegal, Polsek Kota Tegal, PO. Dewi Sri telah men-supply konsumsi selama 3 hari berturut-turut).

Kebutuhan Mendesak:

1. Selimut,
2. Minyak Kayu Putih,
3. Obat-obat Ringan (Tolak Angin, Bodrex, dkk),
4. Makanan anak-anak.



Gambar 73 Dampak banjir Kota Tegal

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan bencana tersebut adalah sebagai berikut:

Mendirikan Dapur Umum di tiga kelurahan, untuk kebutuhan logistik sudah tersedia untuk 1 (satu) hari. SK Tanggap Darurat sudah ditandatangani Walikota Tegal.

- 3) Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Brebes
Bencana tanah longsor di Kab. Brebes pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2018 Pukul 08.00 WIB di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes.

Areal hutan produksi milik Perhutani di Gunung Lio Salem, Kab. Brebes. Tanah longsor dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi dan kontur tanah yang labil serta gravitasi.

Longsor menutup akses jalan Provinsi antara Kecamatan Salem menuju Kecamatan Banjargarjo Kabupaten Brebes sehingga tidak dapat dilalui.

Tabel 44
Korban Meninggal Bencana Tanah Longsor
di Kab. Brebes

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Desa
1	2	3	4	5
1.	Karsini	Perempuan	66th	Pasir Panjang
2.	Casto	Laki-laki	48th	Bentarsari
3.	Wati	Perempuan	80th	Pasir Panjang
4.	Radam	Laki-laki	59th	Cikokol
5.	Kiswan	Laki-laki	45th	Pasir Panjang
6.	Wartinah	Perempuan	46th	Ciputih
7.	Carki	Perempuan	53th	Pasir Panjang
8.	Sarmah	Perempuan	th	Pasir Panjang
9.	Casti	Perempuan	85th	Pabuaran
10.	Rasminah	Perempuan	th	Pasir Panjang

Terdapat korban luka yang dirawat di Puskesmas dengan jumlah 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Korban Luka-Luka Bencana Tanah Longsor
di Kab. Brebes

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Desa
1	2	3	4	5
1.	Dadang	Laki-laki	45 th	Ds. Pasirpanjang (dirujuk ke RS Majenang)
2.	Turti	Perempuan	46 th	Ds. Pasirpanjang (dirawat di Puskesmas Bentar)
3.	Watirah	Perempuan	50 th	Pasirpanjang (dirawat di Puskesmas Bentar)
4.	Minarto	Laki-laki	46 th	Pasirpanjang (dirawat di Puskesmas Bentar)
5.	Indi	Perempuan	19 th	Ds. Bentar (dirujuk Ortopedi Banyumas)

Dalam kejadian bencana tanah longsor tersebut terdapat beberapa korban longsor yang belum diketemukan atau hilang dan diduga korban tertimpa material longsor dengan data korban sebagai berikut:

Tabel 46
Korban Hilang dalam Bencana Tanah Longsor
di Kab. Brebes

No	Nama	Desa
1	2	3
1.	Turkiah	Pasirpanjang
2.	Haryanto	Pasirpanjang
3.	Tarsinah	Pasirpanjang
4.	Sujono	Pasirpanjang
5.	Kuswanto	Pasirpanjang
6.	Rustam Rusyadi	Bentar
7.	Warsui	Ciputih
8.	Wastim Wahyu	Salem
9.	Suwirso	Pasirpanjang
10.	B Darsip	Pasirpanjang

Pengungsian didapati di beberpa titik di Kab. Brebes dengan jumlah pengungsi sejumlah 120 KK terdampak dan 63 KK terdampak

dengan rincian lokasi pengungsian di 6 (enam) titik pengungsian dengan jumlah jiwa sebanyak 182 Jiwa mengungsi.

Dengan rincian pengungsi di beberapa titik dan beberapa di rumah warga :

Tabel 47
Lokasi pengungsi di 6 titik pengungsian Akibat Bencana Tanah Longsor di Kab. Brebes

No	Lokasi	Alamat	Jiwa
1	2	3	4
1.	Rumah Bu Ulis	Ds. Pebuaran	66 Jiwa
2.	Rumah Pak Sarya		29 Jiwa
3.	MADIN AL-Amin	Ds. Pasirpanjang	14 Jiwa
4.	SMPN 2 Salem	Ds. Pasirpanjang	50 Jiwa
5.	Rumah Bpk Toni	Ds. Pabuaran Rt 3/1	10 Jiwa
6.	Rumah Bpk Maryadi	Ds. Pabuaran Rt 2/1	13 Jiwa
Jumlah			182 Jiwa

Penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes dan Provinsi Jawa Tengah melalui OPD terkait dalam penanganan bencana adalah dengan BPBD Kab. Brebes bersama relawan, TNI, POLRI, Banser, dan masyarakat sekitar lokasi melakukan *assessment* ke lokasi bencana, mengevakuasi korban dan mencatat mendata korban serta kerugian.

Tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari terhitung tanggal 22 Februari 2018, Posko siaga bertempat di SDN Pasir Panjang 02 serta untuk Dapur Umum berada di Desa Pambuaran.



Gambar 74 Dampak banjir Kab. Brebes

c. Erupsi Gunung Api

1) Letusan Kawah Sileri Kab. Banjarnegara

Kawah Sileri yang terletak di Gunungapi Dieng, Kab. Banjarnegara dengan posisi geografi di wilayah Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Aktivitas terakhir terjadi pada tanggal 2 Juli 2017 terjadi letusan freatik kawah sileri pada pukul 11:54:24 WIB, berupa material lumpur setinggi 150 m dengan jarak lontaran sejauh 50 meter dari bibir kawah ke arah selatan dan utara. Material lain yang dikeluarkan pada saat letusan adalah batu dengan diameter 5 cm – 40 cm ke arah selatan dan timur, sedangkan batu berukuran diameter 1 cm – 10 cm dominan ke arah utara dan barat.

Pada tanggal 1 April 2018 pukul 13:42:55 WIB kembali terjadi letusan freatik di kawah Sileri, yang mengeluarkan semburan lumpur dengan tinggi kurang lebih 150 m. Pemantauan di lokasi kejadian hingga pukul 16:00 WIB menunjukkan tidak adanya letusan susulan. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan letusan freatik berupa semburan lumpur dengan tinggi kurang lebih 150 m, dengan sebaran material lumpur sejauh sekitar 100 m ke arah timur, sejauh 50 m ke arah utara, 200 m ke arah selatan, ke arah barat laut (D Qiano) 100 m, dan ke arah barat 50 m. Pengukuran Gas di udara pada jarak sekitar 40 m dari pusat titik letusan freatik, tidak terdeteksi gas berbahaya. Gas CO₂ 0.04 % volume (di bawah ambang batas normal 0,5 % Volume), H₂S dan SO₂ 0 ppm (tidak terdeteksi).

PVMBG dan BPBD merekomendasikan masyarakat dan wisatawan tidak mendekati kawah Sileri pada jarak 200 meter dari bibir Kawah. Masyarakat agar tetap tenang tidak terpancing isu-isu terkait dengan aktivitas Gunungapi Dieng dan agar selalu mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kab Banjarnegara, BPBD Kab Wonosobo, serta BPBD Kab Batang agar selalu berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau melalui Pos Pengamatan Gunungapi Dieng di Desa Karang tengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Telp. 082330123236, tentang aktivitas Gunungapi Dieng.



Gambar 75 Letusan Kawah Sileri Kab. Banjarnegara

2) Erupsi Gunung Merapi

Fase peningkatan aktifitas Gunung Merapi

- a) Pada tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan informasi dan release dari BPPTKG dari pukul 00.00-18.00 WIB bahwa telah terjadi tiga kali letusan freatik. Letusan pertama terjadi pada pukul 01.25 WIB selama 19 menit dengan ketinggian asap 700 meter dan teramati dari pos Babadan. Amplitudo seismik terukur 20 mm dan letusan kedua terjadi pada pukul 09.38 WIB selama 6 menit dengan ketinggian kolom letusan 1200 meter mengarah ke barat. Letusan ketiga terjadi pada pukul 17.50 WIB, letusan ini memiliki durasi 3 menit dengan Amplitudo maksimum 50 mm. Ketinggian kolom letusan tidak teramati.
- b) Pada tanggal 22 Mei 2018 erupsi freatik kembali terjadi pada pukul 01.47 WIB terjadi selama 3 menit dengan amplitudo maksimal 40 mm. Secara visual teramati dari pos Pengamatan

Gunung Merapi Babadan ketinggian kolom asap 3500 meter. Pukul 23.00 WIB tingkat aktivitas merapi dinaikkan dari Normal menjadi Waspada dan pukul 04.12 WIB warga Desa Balerante beberapa mengungsi di Koramil Manisrenggo.

- c) Pada tanggal 23 Mei 2018 terjadi dua kali letusan, letusan yang pertama terjadi pada pukul 03.31 WIB selama 4 menit dengan ketinggian letusan 2000 meter dan mengarah barat daya. Letusan kedua terjadi pukul 13.49 WIB dengan durasi 2 menit, terdengar dari pos Pengamatan Gunung Merapi Babadan namun kolom letusan tidak teramati dari semua pos Pengamatan Gunung Merapi.
- d) Pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 02.55 WIB terjadi erupsi dengan ketinggian kolom 6000 m ke arah barat, amplitudo maks 60 mm dan terjadi selama 4 menit. Terjadi letusan pada pukul 10.48 WIB dengan durasi 2 menit, amplitudo maksimal 44 mm, tinggi kolom 1500 m diamati dari PGM selo. Akibat dari letusan ini warga desa Tegalmulya sempat panik.
- e) Pada tanggal 25 Mei 2018 kondisi warga sekitar lereng merapi sudah kondusif, namun status Gunung Merapi masih pada level II yaitu Waspada.
- f) Pada tanggal 26 Mei 2018 Perkembangan aktivitas Gunung Merapi tidak ada perubahan yang signifikan. Kegiatan masyarakat sekitar lereng merapi terutama desa Tegalmulyo sudah kondusif dan beraktivitas seperti biasanya.
- g) Pada tanggal 27 Mei 2018 informasi dari SIBAT Tegalmulyo untuk cuaca cerah, visual merapi tertutup kabut dan masyarakat giat seperti biasa.

h) Pada tanggal 28 Mei 2018 visual merapi terpantau jelas pada pagi hari di lereng merapi dengan cuaca cerah, giat masyarakat seperti biasa, lain-lain mandali.

Pos - pos pemantauan melaporkan terjadi suara gemuruh bersamaan dengan erupsi freatik sebanyak tiga (3) kali pada tanggal 21 Mei 2018 masing-masing pada pukul 01.25 WIB durasi 19 menit ketinggian kolom erupsi 700 m, pukul 09.38 WIB durasi 6 menit ketinggian kolom erupsi 1200 m, dan pukul 17.50 durasi 3 menit ketinggian kolom erupsi tidak teramati. Erupsi freatik yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2018 terhitung intensif. Erupsi freatik sebelumnya terjadi pada tanggal 11 Mei 2018 setelah sekitar 4 tahun tidak terjadi letusan freatik.

Pada minggu ini, kegempaan G. Merapi tercatat 1 kali gempa vulkanik (VT), 12 kali gempa multiphase (MP), 1 kali gempa tremor, 12 kali gempa guguran (RF), 3 kali gempa letusan, dan 5 kali gempa tektonik (TT). Gempa guguran yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 21.30 WIB tergolong besar dan sempat terdengar oleh penduduk.

Pada tanggal 21 Mei 2018, kegempaan G. Merapi tercatat 1 kali gempa vulkanik (VT), 1 kali gempa tremor, 2 kali gempa guguran (RF), 3 kali gempa letusan, dan 3 kali gempa tektonik (TT). Gempa VT dan Tremor terjadi setelah letusan pukul 17.50 WIB. Gempa Tremor berfrekuensi sekitar 0,2 Hz dengan amplitudo rata-rata 5-10 mm. Suhu pusat kawah sekitar 85 °C meningkat dari kondisi normal (<50 °C).

Sehubungan telah terjadi peningkatan aktivitas letusan freatik dan diikuti dengan kejadian gempa VT dan gempa Tremor maka disimpulkan bahwa aktivitas vulkanik G. Merapi mengalami peningkatan.

Dengan meningkatnya aktivitas tersebut, maka terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 pukul 23.00 WIB, status aktivitas G. Merapi dinaikkan dari tingkat NORMAL menjadi WASPADA.

Dengan peningkatan status aktivitas G. Merapi dari NORMAL menjadi WASPADA kepada para pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana G. Merapi direkomendasikan sebagai berikut :

- a) Kegiatan pendakian G. Merapi untuk sementara tidak direkomendasikan kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana.
- b) Radius 3 km dari puncak agar dikosongkan dari aktivitas penduduk.
- c) Masyarakat yang tinggal di KRB III mohon meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas G. Merapi.
- d) Jika terjadi perubahan aktivitas G. Merapi yang signifikan maka status aktivitas G. Merapi akan segera ditinjau kembali.
- e) Masyarakat agar tidak terpancing isu-isu mengenai erupsi G. Merapi yang tidak jelas sumbernya dan tetap mengikuti arahan aparat pemerintah daerah atau menanyakan langsung ke Pos Pengamatan G. Merapi terdekat melalui radio komunikasi pada frekuensi 165.075 MHz melalui website www.merapi.bgl.esdm.go.id, media sosial BPPTKG, atau ke kantor BPPTKG, Jalan Cendana No. 15 Yogyakarta, telepon (0274) 514180-514192.
- f) Pemerintah daerah direkomendasikan untuk mensosialisasikan kondisi G. Merapi saat ini kepada masyarakat.

Adapun Wilayah Jawa Tengah Yang terdampak meliputi:

Kab. Klaten

Berdampak pada kecamatan Kemalang terdapat 3 desa di KRB3 desa Balerante, Sidorejo, Tegalmulyo. Untuk saat ini wilayah tersebut terdapat hujan abu. TRC BPBD Kabupaten Klaten telah melakukan assessment ke beberapa wilayah /desa wilayah kecamatan Kemalang dan sekitarnya, serta membagikan masker kepada warga masyarakat terdampak.

Kab. Boyolali

Dampak dari kondisi Merapi saat ini mengakibatkan beberapa warga Stabelan Desa Tlogolele, Kec. Selo, Kab. Boyolali Mengungsi di TPS Desa Tlogolele adapun rinciannya :

Balita : 35.

Lansia : 12.

Remaja : 41.

Dewasa : 235.

Anak : 39.

Total = 362 Jiwa

Kab. Magelang

Berdampak pada Kecamatan Srumbung dan Dukun. Wilayah tersebut terdapat hujan abu. TRC BPBD telah melakukan assessment ke beberapa wilayah, serta membagikan masker kepada warga masyarakat terdampak.

LANGKAH – LANGKAH PROVINSI JAWA TENGAH (11 MEI 2018)

- a) BPBD Provinsi Jawa Tengah melalui Kabupaten Klaten, Magelang dan Boyolali melakukan pemantauan perkembangan erupsi G. Merapi.
- b) BPBD Provinsi Jawa Tengah mengirimkan bantuan masker ke BPBD Kab. Boyolali 6.000 pcs dan Kab. Klaten 20.000 pcs

(Stock masker di gudang 120.000 pcs) serta menurunkan personil ke Kab. Boyolali dan Kab. Klaten.

- c) BPBD Kab. Magelang, Klaten dan Boyolali membagikan masker kepada masyarakat diarea terdampak erupsi G. Merapi.
- d) BPBD Kab. Magelang bagikan masker 9.000 pcs dan stock gudang 50.000 pcs.
- e) BPBD Kab. Klaten bagikan masker 26.000 pcs dan stock gudang 8.000 pcs.
 - Kecamatan Kemalang (10.000 pcs)
- f) Desa Balairantai (2.000 pcs)
- g) Desa Sidorejo (2.000 pcs)
- h) Desa Tegalmulyo (2.000 pcs)
 - Kecamatan Manisrenggo (6.000 pcs)
- i) BPBD Kab. Boyolali siap bagikan 500 pcs dan stock gudang 2.000 pcs.
 - Kecamatan Selo
 - Desa Klakah
 - Desa Jrasah
 - Desa Tlogolele
 - Kecamatan Cempogo
 - Desa Wonodoyo
 - Kecamatan Musuk
 - Desa Merian

Jalur pendakian G. Merapi sudah ditutup oleh Muspika Selo dan sampai saat ini masih terdapat 160 orang pendaki di Pos Pelawan dan sudah disiapkan 2 ambulance juga petugas TRC untuk membantu para pendaki.

LANGKAH – LANGKAH PROVINSI JAWA TENGAH (23 MEI 2018)

- a) BPBD Provinsi Jawa Tengah melalui Kabupaten Klaten, Magelang dan Boyolali melakukan pemantauan perkembangan erupsi G. Merapi.
- b) BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menurunkan personil di 3 Kabupaten terdampak guna pendataan kebutuhan mendesak dan koordinasi penanganan erupsi Gunung Merapi serta membantu membagikan masker kepada masyarakat terdampak.
- c) BPBD Provinsi Jawa Tengah telah mengirimkan bantuan logistik ke Kab. Boyolali pada tanggal 23 Mei 2018 (gel. I) yang mengirimkan Alat Dapur, Tikar, Matras dan Alat Kebersihan.
- d) Droping (gel. II) tanggal 23 Mei 2018, BPBD Provinsi Jawa Tengah mengirimkan logistik ke Kab. Boyolali berupa Saus, Sarden, Kecap, Minyak Goreng, Gula Pasir, Kopi, Susu, Pembalut Wanita, The Serbuk, Family Kid, Air Mineral, Pampers, Mie Instant, Beras, Perlengkapan sekolah dan Kidsware.

Dokumentasi Erupsi Gunung Merapi



Gambar 76 Erupsi Gunung Merapi 2018

d. Gempa Bumi Kabupaten Banjarnegara

Update Gempa Bumi per-minggu, 22 april 2018, pukul 11.23 WIB di Kecamatan Kalibening, Kab. Banjarnegara.

Kondisi cuaca di wilayah Kecamatan Kalibening pagi hari secara visual terpantau cerah, akan tetapi pada siang hari hujan dengan intensitas lebat dan disertai angin sampai dengan sore hari. Dihari ke 5 (lima) masa Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Kecamatan Kalibening tidak terasa adanya gempa susulan. Posko Gabungan masih terus melakukan upaya – upaya penanganan baik untuk pengungsian maupun pembersihan material bangunan rumah ataupun fasilitas umum lainnya.

Hasil Rakor Evaluasi Kegiatan Pada Hari Minggu, 22 April 2018

- 1) Validasi data pengungsi dan kerusakan akibat bencana gempa masih terus dilakukan agar tidak ada warga pengungsi dan kerusakan rumah mapun fasilitas umum yang tidak terdata.
- 2) Pelayanan Dapur umum pada hari ini memproduksi makanan 6927 yang dilakukan oleh TAGANA dan MDMC dibantu oleh relawan lainnya.
- 3) Logistik yang ada cukup untuk 5-7 hari kedepan
- 4) Pelayanan Kesehatan pengungsi sejumlah 195 pasien, dengan diagnose pasien antara Hipertensi, Scabies, ispa dan mielgia
- 5) Persipan kunjungan Presiden republik indonesia di Desa kasinoman dan Sidakangen.
- 6) Pembersihan material bangunan rumah yang terdampak bencana gempa oleh relawan gabungan
- 7) Penerimaan dan pengelolaan logistik yang berasal dari donator
- 8) Penyajian dan perapian data kesekretarian Posko Lapangan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi.
- 9) Kajian oleh Tim Geologi untuk mengkaji kondisi wilayah terdampak sehingga nantinya ada rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilakukan.
- 10) Pengamanan area terdampak bencana gempa bumi.

Tabel 48 Rencana Giat Penanganan Bencana Gempa Bumi Hari

No.	Hari/Tanggal	Rencana Giat
1	2	3
1	Minggu, 22 April 2018	1) Apel Pagi dan pembagian tugas relawan gabungan; 2) Produksi Makanan untuk pengungsi dan relawan; 3) Distribusi logistik permakanan dan non permakanan ke pengungsi dan Dapur Umum Lapangan; 4) Pendataan Pengungsi dan dampak bencana; 5) Pembersihan material bangunan di lokasi kejadian dan Jalan Provinsi Banjarnegara-Kalibening; 6) Pelayanan kesehatan untuk pengungsi dan relawan; 7) Melanjutkan pembentukan Pokmas Penanggulangan bencana; 8) Pengamanan area terdampak; 9) Penerimaan logistik dari donator; 10) Pendataan barang dan penataan gudang logistik; 11) Pendampingan pengungsi; 12) Pendataan dan pembenahan Sanitasi; 13) Rakor evaluasi kegiatan.
2	Senin 23 April 2018	1) Apel Pagi dan pembagian tugas relawan gabungan; 2) Produksi Makanan untuk pengungsi dan relawan; 3) Stock Opnam Logistik dan distribusi logistik permakanan untuk pengungsi; 4) Assessmen Pengungsi; 5) Pembersihan material bangunan di lokasi kejadian dan Jalan Provinsi Banjarnegara-Kalibening; 6) Pelayanan kesehatan untuk pengungsi dan relawan; 7) Menerima kunjungan dari Presiden Republik Indonesia; 8) Pengamanan area terdampak; 9) Penerimaan logistik dari donator; 10) Pendampingan pengungsi; 11) Pendataan dan pembenahan Sanitasi; 12) Rakor evaluasi kegiatan.

Dari dampak bencana gempa bumi yang mengguncang kabupaten Banjarnegara terdapat beberapa bangunan rusak dari rumah hingga fasilitas umum lainnya antara lain:

Tabel 49
Kerusakan Infrastruktur dan Fasilitas Umum

No.	BANGUNAN	KERUSAKAN			ALAMAT	TOTAL KERUSAKAN
		RR	RS	RB		
1	2	3			4	5
1	Rumah	30 unit	37 unit	62 unit	Desa Kertosari	129 unit
		127 unit	73 unit	79 unit	Desa Kasinoman	279 unit
		40 unit	7 unit	5 unit	Desa Plorengan	52 unit
		-	8 unit	3 unit	Desa Sidakangen	11 unit
TOTAL		197 unit	125 unit	149 unit	4 Desa	471 unit
2	Masjid				Desa Plorengan	1 unit
					Desa Kertosari	1 unit
					Desa Kasinoman	1 Unit
3	Mushola				Desa Kasinoman	1 Unit
					Kertosari	2 unit
4	Gedung SMP 2				Kalibening	1 Unit
5	SDN 1				Desa Kasinoman	1 Unit
	SDN 2				Desa Kertosari	1 Unit
	SDN 3				Desa Kasinoman	1 Unit
6	Aula Kantor Desa				Desa Kertosari	1 unit
TOTAL					4 Desa	11 Unit

Total masjid & Mushola 6 unit, Sekolah 4 Unit, Aula Kantor Desa Kertosari 1 unit.

Kerusakan bangunan yang mengakibatkan beberapa jumlah warga kehilangan tempat tinggal dan belum berani kembali kerumah masing-masing. Jumlah pengungsi yang terdata sementara sebanyak 942 KK, 3.624 Jiwa titik pengungsian di 10 Desa di Kecamatan Kalibening dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 50
Data Pengungsian Dampak Gempabumi
Kab. Banjarnegara

No.	Alamat	KK	Jiwa
1	2	3	4
1	Desa Kasinoman	314 KK	1.293 Jiwa
2	Desa Kertosari	178 KK	534 Jiwa
3	Desa Plorengan	46 KK	168 Jiwa
4	Desa Sidakangen	151 KK	613 Jiwa
5	Desa Kalibening	48 KK	180 Jiwa
6	Desa Karanganyar	149 KK	650 Jiwa
7	Desa Majatengah	4 KK	15 Jiwa
8	Desa Kalisat Kidul	18 KK	53 Jiwa
9	Desa Sirukem	15 KK	56 Jiwa
10	Desa Kubang Wanayasa	19 KK	62 jiwa
TOTAL		942 KK	3.624 Jiwa

Dari bencana gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan bangunan infrastruktur dan fasilitas umum ini memakan korban luka-luka sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dan korban jiwa sebanyak 2 (dua) orang atas nama Asep berusia 13 Tahun dengan alamat di Desa Kasinoman dan bapak Kasri berusia 100 Tahun dengan alamat Dusun Bakalan Desa Kasinoman.

Relawan yang tergabung dalam penanganan bencana alam Gempa Bumi di Kecamatan Kalibening sejumlah kurang lebih 598 relawan terdiri dari berbagai unsur diantaranya: BPBD Kab. Banjarnegara, TNI, POLRI, PMI Kab. Banjarnegara, Dirjen DPUPR, DPKAP Kab. Banjarnegara PERHUTANI, DINSOS, DINKES, SATPPOL PP Kab. Banjarnegara, BPBD Kab. Pekalongan, BASARNAS, SARKAB Banjarnegara, DISHUB Kab. Banjarnegara, PEMKEC. Kalibening, PEMDES Sidakangen, PEMDES Kasinoman, PEMDES Kertosari, PEMDES Plorengan, PKH, FPI, ORARI Banjarnegara, Deswantana, Ralawan PKS, Garda Rescue, Laziz Jateng, BRI Unit Kalibening, GP Ansor, RDS, Anteb, MTA, TAGANA, BAGANA, BANSER, PMI Kab.

Banjarnegara, BMKG, BMS Jafar Rescue, Rumah Zakat, SAR Kokam Solo, MDMC, LAZIZMU, KOKAM, RAPI Banjarnegara, Dinkes Prov Jateng, SARDA JATENG, KPG, FKPAB, PMI Kab. Pekalongan, Dompot Duafa, LSM Yogyakarta, Posma Tegal, Universitas Sains Al Qur'an, CB Karangobar, Ubaloka Kwarcab PKI, Poker Balun, Muhamadiyah, Karang Taruna, SARKAB Wonosobo, PMI Purbalingga, DT Peduli, DPC Sigap Kab. Banjarnegara, ACT, RSM Karanganyar, Sigap Solo Peduli, SAR FKAM, Brimob Jateng, PKPU Purwokerto, Ubaloka Pekalongan, Destana-Destana, Relawan Posyan Muhamadiyah Sidakangen, Grab Pejawaran, BRD Pokmas Tlaga dan Masyarakat.

Dokumentasi Gempa Bumi



Gambar 77 Gempa Bumi di Kabupaten Banjarnegara

e. Bencana Kekeringan

Sejak Bulan Juli 2018, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, organisasi sosial dan masyarakat sudah berupaya mengatasi permasalahan kekurangan air bersih bagi warga masyarakat di beberapa wilayah, melalui pembangunan sarana prasarana air bersih skala kecil/terbatas lokal dan melakukan distribusi (dropping) air bersih dari sumber air menuju daerah yang mengalami kekeringan/kelangkaan air. Namun kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah sangat terbatas, untuk percepatan mengatasi permasalahan tersebut, dibanding sarana pendukungnya, cakupan daerah layanan cukup luas dan jumlah warga terdampak relatif banyak. Jarak dan waktu tempuh (+ 2,5 jam) antara sumber air dengan lokasi kurang air menimbulkan biaya operasional distribusi menjadi tinggi. Hambatan lain adalah keterbatasan armada truk tanki

milik pemerintah dan ketersediaan sarana penampungan air bersih (tandon air) di desa-desa sangat terbatas, sehingga menghambat kelancaran dan kecepatan distribusi air bersihnya, karena petugas harus mengisi satu per satu wadah air yang dibawa setiap warga (+ 1 jam), yang juga sering saling berebut pengisian air bersih.

Pemerintah kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah bersama warga masyarakat yang peduli, Perusahaan dan Organisasi Sosial, sejak bulan Juni 2018 telah berupaya membantu dalam mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga masyarakat pada beberapa daerah yang mempunyai status rawan bencana kekeringan/kekurangan air bersih di 35 kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota masih mampu mencukupinya, karena tedampak kekeringan/kekurangan relatif kecil /sedikit.

Adapun gambaran permasalahan yang menentukan urgensi penanganan darurat bencana kekeringan/kelangkaan air bersih antara lain:

- Terbatasnya kemampuan layanan PDAM
- Debit air sungai dan mata air menurun
- Keberadaan air tanah dan air sungai payau/asin
- Sumber air baku (mata air, air sungai, waduk, embung, sungai dan PDAM relatif jauh dari permukiman (> 4 km)
- Aksesibilitas lokasi mata air dan permukiman yang sulit
- Sebagian warga tidak mampu mengakses sumber air karena miskin
- Terdapat kerusakan fungsi catchment area dan fungsi daerah resapan
- Jumlah penduduk relatif banyak dan tersebar tidak merata
- Topografi beberapa daerah berbukit bergunung
- Berdasarkan hasil laporan Kabupaten/Kota, dapat dipetakan wilayah terdampak bencana kekeringan sebagai berikut:

Tabel 51
Daerah Potensi Kekeringan di Jateng

NO	INSTANSI / LEMBAGA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TANGKI	KETERANGAN
				PER 06 NOVEMBER 2018	
1	2	3	4	5	6
1	BPBD KAB. CILACAP	15	41	414	18 Tangki dari PMI dan 2 Tangki dari PLN
2	BPBD KAB. BANYUMAS	14	51	1103	
3	BPBS KAB. PURBALINGGA	15	73	2776	2,328 Tangki dari APBD, 221 Tangki dari PMI, 60 Tangki dari BAZNAS 2 Tangki dari Paguyuban SEMUT
4	BPBD KAB. BANJARNEGARA	6	15	596	
5	BPBD KAB. KEBUMEN	11	52	1698	
6	BPBD KAB. PURWOREJO	12	36	799	5 Tangki dari Pihak Ketiga
7	BPBD KAB. WONOSOBO	2	7	16	
8	BPBD KAB. MAGELANG	4	11	352	1 Tangki dari PMI
9	BPBD KAB. BOYOLALI	7	31	264	6 Tangki dari CSR dan 21 Tangki dari PMI
10	BPBD KAB. KLATEN	7	16	407	
11	BPBD KAB. SUKOHARJO	2	7	123	3 Tangki dari Komunitas Cinlung (Cinta Lingkungan) dan PDAM Sukoharjo
12	BPBD KAB. WONOGIRI	10	27	314	85 Tangki dari pihak ketiga dan 195 Tangki dari PMI
13	BPBD KAB. KARANGANYAR				NIHIL
14	BPBD KAB. SRAGEN	8	40	1894	498 Tangki dari CSR dan 53 dari Pihak Ketiga
15	BPBD KAB. GROBOGAN	21	94	469	13 Tangki dari PMI dan 5 Tangki dari

NO	INSTANSI / LEMBAGA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TANGKI	KETERANGAN
				PER 06 NOVEMBER 2018	
1	2	3	4	5	6
					Panti Dinsos
16	BPBD KAB. BLORA	10	86	1368	4 Tangki dari PMI, 41 Tangki dari Alumni, 6 Tangki dari BPH, 18 Tangki dari Semen Gresik
17	BPBD KAB. REMBANG	13	53	730	
18	BPBD KAB. PATI	12	122	1013	416 Tangki dari PMI, 21 Tangki dari PRB, 8 Tangki dari POLRES, 63 Tangki dari KRI Pati, 37 Tangki dari BAZNAS, 6 Tangki dari DPUTR, 28 Tangki dari KORPRI, 10 Tangki dari PG TRANGKIL, 10 Tangki dari TOYOTA, 8 Tangki dari MDMC, 1 Tangki dari PDAM, 3 Tangki dari BPJS, 1 Tangki dari BRI dan 2 Tangki dari BNI
19	BPBD KAB. KUDUS	4	13	735	303 Tangki PDAM, 72 Tangki dari PMI, 20 Tangki dari PT DJARUM DAN 24 Tangki dari PT PURA
20	BPBD KAB. JEPARA	5	9	192	
21	BPBD KAB. DEMAK	11	37	577	
22	BPBD KAB. SEMARANG	9	27	602	
23	BPBD KAB. TEMANGGUNG	12	24	633	
24	BPBD KAB. KENDAL	1	2	54	
25	BPBD KAB. BATANG				NIHIL
26	BPBD KAB. PEKALONGAN	4	5	25	1 Tangki dari PMI

NO	INSTANSI / LEMBAGA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH TANGKI	KETERANGAN
				PER 06 NOVEMBER 2018	
1	2	3	4	5	6
27	BPBD KAB. PEMALANG	3	14	526	3 Tangki dari PLN
28	BPBD KAB. TEGAL	8	24	152	72 Tangki dari PMI, 2 Tangki dari Bank Jateng dan 29 Tangki dari BAZDA
29	BPBD KAB. BREBES	12	39	152	30 Tangki dari PMI
30	BPBD KOTA SURAKARTA	1	1	2	
31	BPBD KOTA SEMARANG	1	1	1	
32	BPBD KOTA PEKALONGAN	2	5	5	
33	BPBD KOTA TEGAL				NIHIL
JUMLAH		242	963	17,992	

Strategi Pemprov. Jateng dalam mengantisipasi penanganan bencana kekeringan dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) aktivitas, yaitu:

- 1) Penanganan kekurangan air secara terencana, dan komprehensif melalui program sarana air bersih berbasis masyarakat, diantaranya:
 - a) Pembangunan Instalasi Pengolah Air (IPA)
 - b) Sosialisasi dan inventarisasi daerah potensi terdampak kekurangan air baku
 - c) Pembuatan waduk/embung air baku rumah tangga dan irigasi
 - d) Pembuatan sumur
 - e) Pengembangan layanan PAM
 - f) Dalam bidang pertanian, untuk pemenuhan kebutuhan irigasi dan ketahanan pangan Pemprov Jateng menargetkan membangun 1.000 (seribu) embung selama 3 (tiga) tahun, :
 - Tahun 2016 direncanakan 323 embung,

- Tahun 2017 direncanakan 338 embung
 - Tahun 2018 direncanakan 339 embung.
- 2) Kegiatan yang bersifat darurat/insidental
- a) Dropping air di daerah kekurangan air bersih
 - b) Pompanisasi dan tandonisasi/ bak penampungan air
 - c) Optimalisasi dan Eksploitasi sumber-sumber air (sumur bor/pantek, mata air dan air waduk/sungai)
 - d) Instalasi Penampungan Air Hujan (PAH)
 - e) Penyiapan Tandon air dan jerigen air sebagai alat tampung sementara di permukiman.
- 3) Langkah-langkah yang dilakukan
- Mengirimkan Surat Edaran Kepala Pelaksana Harian kepada Kalak BPBD Kabuptaen/Kota agar segera mengidentifikasi daerah rawan kekeringan serta strategi dan rencana kegiatan yang akan dilakukan;
 - Mengadakan Rapat Koordinasi di Kantor BPBD Prov. Jawa Tengah, yang melibatkan unsur dari PDAM se-Jawa Tengah, PMI se-Jawa Tengah, dan BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, pada tanggal Rabu, 16 Mei 2018;
 - Sampai dengan tanggal 6 November 2018, jumlah dropping air yang telah disalurkan kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - Total air bersih yang disalurkan : 66.725.000 Liter
 - Cakupan layanan meliputi 242 Kecamatan dan 963 Desa

Tabel 52
Daerah terdampak Kekeringan Jawa Tengah

No	Kabupaten	Terdampak		
		Jml kec	Jml desa	Jml kk
1	2	3	4	5
1	Wonogiri	8	42	16,796
2	Klaten	6	33	29,250
3	Kendal	5	13	2,807
4	Pekalongan	5	8	588

No	Kabupaten	Terdampak		
		Jml kec	Jml desa	Jml kk
1	2	3	4	5
5	Purworejo	10	43	11,571
6	Demak	14	62	63,395
7	Jepara	8		5,567
8	Banjarnegara	5	5	1,246
9	Kebumen	16	82	2,000
10	Pemalang	2	14	8,393
11	Cilacap	3	10	53,488
12	Blora	16	164	20,139
13	Boyolali	6	58	24,438
14	Grobogan	15	116	21,352
15	Pati	10	87	61,162
16	Purbalingga	8	49	12,443
17	Temanggung	10	27	5,342
18	Sragen	10	38	15,000
19	Wonosobo	5	13	23,000
20	Kota Pekalongan	1	4	152
21	Kudus	8	22	1,253
JUMLAH		171	890	379,382

3. Peringatan HKBN 2018

Gambaran tren bencana global ke depan juga cenderung akan meningkat karena pengaruh beberapa faktor, seperti 1) Meningkatnya jumlah penduduk, 2) Urbanisasi, 3) Degradasi lingkungan, 4) Kemiskinan, dan 5) Pengaruh perubahan iklim global. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2015 yang disusun oleh BNPB (ina-risk.bnpb.go.id), potensi jumlah jiwa terpapar risiko bencana, jumlah kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan, berkategori sedang-tinggi yang tersebar di 34 provinsi, per jenis ancaman bencana adalah sebagai berikut:

- a. Lima jenis bencana dengan jiwa terpapar tertinggi adalah: cuaca ekstrem (puting beliung) sebanyak 244 juta jiwa, diikuti kekeringan sebesar 228 juta jiwa, dan banjir sebanyak 100 juta jiwa, lalu gempa

bumi sebesar 86 juta jiwa, dan bencana tanah longsor sebesar 14 juta jiwa.

- b. Sedangkan untuk potensi kerusakan dan kerugian fisik dan ekonomi tertinggi untuk ancaman gempa bumi sebesar 648.874 triliun, potensi kerusakan dan kerugian fisik dan ekonomi banjir serta banjir bandang sebesar 376.886 triliun, dan tanah longsor sebesar 78.279 triliun, sedangkan kekeringan sebesar 192.737 triliun.
 - c. Selain itu, untuk potensi dampak lingkungan tertinggi adalah ancaman bencana kekeringan 63 juta hektar, diikuti oleh bencana kebakaran hutan dan lahan 42 juta hektar, dan tanah longsor sebesar 41 juta hektar.
 - d. Di luar kejadian faktual tersebut, BNPB telah menyiapkan peta risiko bencana yang dapat menjelaskan jiwa terpapar, kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan kerugian lingkungan yang dapat terjadi.
- Hasil survei di Jepang, pada kejadian gempa Great Hanshin Awaji 1995, menunjukkan bahwa presentase korban selamat karena:
- Diri Sendiri Sebesar 35%,
 - Anggota Keluarga 31,9 %,
 - Teman/Tetangga 28,1%,
 - Orang Lewat 2,60%,
 - Tim SAR 1,70%, dan
 - lain-Lain 0,90%.

Berdasarkan data tersebut, sangat jelas bahwa faktor utama yang paling menentukan adalah penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh “diri sendiri” untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman risiko bencana. Oleh sebab itu, edukasi untuk meningkatkan pemahaman risiko tidak hanya tentang konsep namun juga Latihan Kesiapsiagaan Bencana. **Siap, Untuk Selamat!** merupakan pesan utama bersama yang akan didorong dalam proses penyadaran (*awareness*) dalam peningkatan kemampuan diri sendiri. Proses penyadaran tersebut berguna agar setiap orang dapat memahami risiko, mampu mengelola

ancaman dan, pada gilirannya, berkontribusi dalam mendorong ketangguhan masyarakat dari ancaman bahaya bencana. Di samping itu, kohesi sosial, gotong royong, dan saling percaya merupakan nilai perekat modal sosial yang telah teruji dan terus dipupuk, baik kemampuan perorangan dan masyarakat secara kolektif, untuk mempersiapkan, merespon, dan bangkit dari keterpurukan akibat bencana.

Pencanangan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dilaksanakan pada tanggal 26 April dengan pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disahkan. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 merupakan perangkat hukum pertama yang mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke preventif (pengelolaan risiko bencana). Dalam rangka 10 tahun lahirnya Undang-Undang tersebut, maka BNPB bersama seluruh instansi berwenang Kementerian/Lembaga, pihak lembaga usaha, dan lembaga internasional/nasional terkait akan berfokus melaksanakan kegiatan pendahuluan Latihan Kesiapsiagaan Bencana serentak dengan memastikan tersampainya edukasi pengetahuan secara garis besar kepada masyarakat tentang bagaimana merespon ancaman melalui latihan kesiapsiagaan dengan melaksanakan evakuasi mandiri, uji sirene peringatan dini, dan uji shelter yang sesuai ancaman masing-masing di daerahnya. Waktu pelaksanaan kegiatan ditetapkan pada tanggal 26 April 2018, dan dilaksanakan serentak seIndonesia pada pukul 10.00–12.00 WIB

Di Jawa Tengah kegiatan HKBN dilakukan antara lain melakukan simulasi penanganan darurat di gedung-gedung pemerintah, talkshow yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan PB di Jawa Tengah. Di tingkat provinsi dipusatkan di Kantor Gubernur Jawa Tengah dengan melibatkan relawan, Basarnas, BPBD dan komunitas disabilitas, dan peduli bencana lainnya.



Gambar 78 Persiapan dan Peringatan HKBN 2018

4. Dukungan Event Pemangku Kepentingan PB

a. Jateng Fair 2018

- 1) Nama Event : Jateng Fair 2018
- 2) Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 3) Pelaksanaan 17 Agustus s/d 9 September 2018 di PRPP, di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jl. Anjasromo Tawang Sari Semarang
- 4) Bentuk dukungan :

a) Stand Pameran.

Pada event ini BPBD Prov. Jateng diberikan tempat di Bale Marbabu dengan tema pameran “Magical Dieng”. Subsansi pameran adalah dokumentasi program kegiatan BPBD Prov. Jateng, Peralatan penyelamatan dan Pertolongan, Penghargaan dan trophy.

b) Dapur Umum Lapangan

Dalam rangka pembelajaran dan sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Bencana kepada masyarakat, BPBD prov. Jateng menyelenggarakan dapur umum lapangan dengan aktifitas memasak makanan siap santap dan menyajikan kepada pengunjung PRPP secara Gratis. Tujuan penyelenggaraan Dapur Umum Lapangan ini adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami mekanisme penyediaan dan pemenuhan logistic dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

5) Hasil

- a) BPBD Prov. Jateng mendapat penghargaan menjadi Juara ke-2 Stand terbaik untuk Kategori Organisasi Pemerintah Daerah dan Instansi.
- b) Dapur Umum Lapangan; Antusias dan perhatian masyarakat sangat tinggi terhadap hasil masakan dapur umum lapangan. terbukti jumlah 300 bungkus masakan siap santap yang disajikan habis dalam waktu kurang dari 2 jam. Selain itu pengunjung dapat belajar tentang mekanisme penyediaan dan pemenuhan logistic/kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

6) Foto Dokumentasi



Gambar 79 Stand Pameran PRPP Jateng Fair 2018

b. Pesta Rakyat Jawa Tengah 2018

- 1) Nama Event : Pesta Rakyat Jawa Tengah 2018
- 2) Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

3) Pelaksanaan: 18 – 20 Agustus 2018, di Pantai Wonodri Kab. Pemalang

4) Bentuk dukungan :

Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ke-68 tahun 2018 BPBD Prov. Jateng berpartisipasi dalam kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana dan Dapur Umum Lapangan

5) Hasil

a) Dapur Umum Lapangan

Tim dapur umum lapangan BPBD Prov. Jateng menyajikan masakan siap santap. Hasil masakan dibagikan secara gratis kepada pengunjung dengan persyaratan khusus yaitu belajar tentang Penanggulangan Bencana. Tim DU BPBD Prov. Jateng dibantu oleh beberapa pihak, diantaranya Tim Dapur Umum BPBD Kabupaten/Kota.

b) Stand Pameran

BPBD Provinsi Jawa Tengah selain mendirikan dapur umum untuk mendukung acara pesta rakyat di Pantai Wonodri Kab. Pemalang, BPBD Provinsi Jawa Tengah juga mendirikan pameran peralatan penanggulangan bencana bersama BPBD Kab/Kota. Barang-barang yang di pamerkan antara lain motor trail operasional BPBD, Peralatan dapur umum termasuk didalamnya makanan siap saji berserta rekreasional yang berisi bermacam-macam permainan untuk anak-anak. Juga didalam pameran tersebut kontribusi dari BPBD Kab/Kota ikut memeriahkan isi pameran antara lain hasil foto menggunakan drone dari BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota.

6) Foto Dokumentasi



Gambar 80 Dukungan BPBD untuk Pesta Rakyat Jawa Tengah

5. Alokasi Dana PB di Jawa Tengah

a. APBD Provinsi Jawa Tengah

Kejadian bencana berdampak pada seluruh sector pembangunan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama pada seluruh sektor pemerintahan melalui pendanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan penyelenggaraan PB di Jawa Tengah terdistribusi di beberapa SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sedangkan BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* bidang penanggulangan bencana. Sebagai *leading sector*, BPBD Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan identifikasi SKPD yang mempunyai program/kegiatan yang terkait penyelenggaraan PB

- 1) SKPD Badan;

- a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - b) Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD);
 - c) Badan Kesbangpol
- 2) SKPD Dinas, yaitu:
- a) Dinas Kesehatan;
 - b) Dinas Sosial;
 - c) Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM);
 - d) Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang ;
 - e) Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang;
 - f) Dinas Pendidikan;
 - g) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya;
 - h) Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 - i) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - j) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelaksanaan program dan kegiatan terkait penanggulangan bencana, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Berikut ini hasil inventarisasi program dan kegiatan SKPD yang mendukung penyelenggaraan PB di Jateng.

Tabel 53
Alokasi Dana PB di Provinsi Jawa Tengah 2018

No	SKPD PROV JAWA TENGAH	Anggaran (.000)
1	2	3
1	BPBD	17,900,000
2	Badan Kesbangpol	4,140,000
3	Dinas Sosial	2,625,000
4	Dinas Kesehatan	623,000
5	Dinas Pendidikan	224,197.5
6	Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM)	7,356,320
7	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Penataan Ruang	79,389,709
8	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	11,700,000
9	Dinas Pertanian dan Kehutanan	3,500,000
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	440,000

No	SKPD PROV JAWA TENGAH	Anggaran (.000)
1	2	3
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	61,084,525
12	Biro Kesra Setda Prov Jateng	325,000
	JUMLAH (dana PB Jateng)	189,307,751.5

Nilai perbandingan alokasi anggaran untuk PB dengan APBD Provinsi Jawa Tengah sebenarnya masih belum ideal. Dalam beberapa hasil kajian ditingkat nasional, anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 0.76% dari APBD. Oleh sebab itu di Jawa Tengah masih perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana agar dapat mendekati 1 %. Salah satu alternative lain adalah dengan mengajak seluruh SKPD untuk menginformasikan program dan kegiatan yang diampu SKPD yang menunjang upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah. Gambaran perkembangan alokasi anggaran PB di Jawa Tengah 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54
Alokasi Dana PB Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018

No	TA	ANGGARAN	APBD	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = 3/4 x 100%
1	2013	69.932.087.000	13.343.358.327.000	0.52
2	2014	84.808.624.000	15.159.741.864.000	0.55
3	2015	96.803.315.585	17.097.686.334.000	0.56
4	2016	96.207.526.000	21.155.201.299.000	0.45
5	2017	134.234.802.000	23.955.179.003.000	0.56
6	2018	254.901.930.500	24.993.659.858.000	1.02

b. Bantuan Gubernur Jawa Tengah

Bantuan Gubernur Jawa Tengah untuk masyarakat terdampak bencana berasal dari rekening belanja tidak terduga Gubernur Jawa Tengah untuk masyarakat terdampak bencana tahun 2018. Besarnya bantuan Gubernur untuk meringankan beban masyarakat yang

terdampak bencana berpedoman pada Pergub 77 tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub No 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Prov Jawa Tengah. Untuk dapat mencairkan dana bantuan ini, maka terdapat beberapa syarat dan kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Minimal 5 (lima) orang meninggal dan atau luka berat dalam waktu bersamaan di 1 kejadian bencana di 1 (satu) wilayah.
- 2) Minimal 5 (lima) unit rumah/tempat usaha roboh/rusak berat/tidak layak huni di 1 kejadian bencana di 1 (satu) wilayah.

Jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka BPBD Kabupaten/Kota dapat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Prov Jateng melalui BPBD Prov Jateng untuk memperoleh bantuan tidak terduga Gubernur. Besarnya nilai bantuan Gubernur sesuai dengan Pergub 77 tahun 2014 adalah sbb.

Tabel 55
Kriteria dan Nilai Bantuan Bencana (Pergub 77 Tahun 2014)

No	KRITERIA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3
1	Korban meninggal dunia	: Rp. 10.000.000,-
2	Korban luka berat dan dirawat di RS	: Rp. 7.500.000,-
3	Pemilik/penyewa rumah roboh/terbakar habis	: Rp. 15.000.000,-
4	Pemilik/penyewa rumah Rusak Berat	: Rp. 10.000.000,-
5	Tempat ibadah roboh	: Rp. 20.000.000,-
6	Tempat ibadah rusak berat	: Rp. 10.000.000,-
7	Antisipasi kekeringan	: Rp. 300.000,- per tangki kebutuhan per desa/kelurahan
8	Pembangunan sarana prasarana darurat : 50 % RAB Darurat yang diajukan Kab/Kota	
9	Bantuan Beras : a) 5 Ton untuk konsumsi penduduk yang bergotong-royong atau yang tidak dapat bekerja b) 15 Ton untuk daerah yang terisolir	

Periode Januari – Desember 2018, Gubernur Jawa Tengah telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di 4 (empat) kabupaten, yaitu:

Tabel 56
Bantuan Gubernur Jawa Tengah 2018

No	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Jumlah Bantuan (Rp)	Rincian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Temanggung	Kebakaran	7-Sep-17	70,000,000	4 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	60,000,000
					1 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	10,000,000
2	Blora	Kebakaran	4-Sep-17	75,000,000	5 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	75,000,000
3	Semarang	Kebakaran	6-Sep-17	135,000,000	9 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	135,000,000
4	Demak	Kebakaran	8-Sep-17	105,000,000	7 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	105,000,000
5	Wonosobo	Longsor	17-Nov-17	50,000,000	5 Rumah Roboh x Rp. 10.000.000	50,000,000
6	Purworejo	banjir Longsor	26 - 29 Nov 17	425,000,000	5 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	75,000,000
					33 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	330,000,000
					2 Tempat ibadah x Rp. 10.000.000	20,000,000
7	Banjarnegara	Angin	8-Nov-17	40,000,000	1 MD x Rp. 10.000.000	10,000,000
					4 Luka Berat x Rp. 7.500.000	30,000,000
8	Cilacap	Gempa	15 Des 17	3,325,000,000	93 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	1,395,000,000
					193 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	1,930,000,000
9	Banyumas	Gempa dan Longsr	15 Des 17	435,000,000	11 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	165,000,000
					27 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	270,000,000
10	Wonogiri	banjir Longsor	28-Nov-17	1,485,000,000	4 MD x Rp. 10.000.000	40,000,000
					2 Luka Berat x Rp. 7.500.000	15,000,000

No	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Jumlah Bantuan (Rp)	Rincian	
1	2	3	4	5	6	7
					58 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	870,000,000
					56 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	560,000,000
11	Wonogiri (tambahan)	banjir Longsor	28-Nov-17	400,000,000	40 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	400,000,000
12	Grobogan	Kebakaran	26 Agustus dan 1 Sept 2017	165,000,000	11 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	165,000,000
13	Pekalongan	Gempa dan Longsr	15 dan 21 Desember 2017	170,000,000	17 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	170,000,000
14	Purworejo	Gerakan Tanah	19 - 21 Desember 2017	190,000,000	19 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	190,000,000
15	Cilacap	Angin	26 Januari 2018	200,000,000	2 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	30,000,000
					17 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	170,000,000
16	Cilacap	Angin	2 Februari 2018	220,000,000	4 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	60,000,000
					16 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	160,000,000
17	Banjarnegara	Gerakan Tanah	8 Januari 2017	1,800,000,000	180 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	1,800,000,000
18	Purbalingga	Tanah Longsor	22 Februari 2018	47,500,000	4 MD x Rp. 10.000.000	40,000,000
					1 Luka Berat x Rp. 7.500.000	7,500,000
19	Purworejo	Tanah Longsor (Relokasi)	19 – 21 Desember 2018	2,010,000,000	134 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	2,010,000,000
20	Brebes	Tanah Longsor	28-Nov-17		18 MD x Rp. 10.000.000	180,000,000
					4 Luka Berat x Rp. 7.500.000	30,000,000
					2 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	30,000,000
					13 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	130,000,000
21	Kota Pekalongan	Kebakaran Pasar	24 Februari 2018	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

No	Kabupaten	Jenis Bencana	Tanggal Kejadian	Jumlah Bantuan (Rp)	Rincian	
1	2	3	4	5	6	7
22	Banjarnegara	Gempa Bumi	18-Apr-18	2,430,000,000	238 Rumah RB x Rp. 10.000.000	2,380,000,000
					5 Tempat Ibadah x Rp. 10.000.000	50,000,000
23	kebumen	Banjir dan Tanah Longsor	7 Desember 2018	85,000,000	5 Rumah Roboh x Rp. 15.000.000	75,000,000
					1 Rumah Rusak Berat x Rp. 10.000.000	10,000,000
24	Kendal	Kebakaran	27 Februari 2019	270,000,000	18 rumah roboh X 15.000.000	270,000,000
25	Blora	Angin	26-Nov-18	225,000,000	10 Rumah roboh x Rp. 15.000.000	150,000,000
					5 rumah terbakar habis x 15.000000	75,000,000
26	Banyumas	Kebakaran	9-Apr-19	120,000,000		120,000,000
						15,277,500,000

c. APBN TA 2018

1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Fasilitasi dan penguatan kapasitas BPBD terus dilakukan oleh BNPB. BNPB memfasilitasi dan melakukan penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

a) Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pengelolaan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) Pasca Bencana merupakan dana bantuan dari BNPB kepada BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan proses recovery sector terdampak bencana. Alokasi dana tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, jembatan, saluran air, dan untuk BPBD Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk pendampingan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota penerima dana hibah Rehab Rekon pasca bencana dari BNPB.

Tahun 2018, alokasi Dana rehab rekons pasca bencana untuk BPBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 20.000.000.000. Dana tersebut dipergunakan untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pecakaran – Api-api Kec. Wonokerto, pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ds. Timbangsari dan pekerjaan Rekonstruksi Jembatan 2 (dua) Ruas Jalan Ds. Timbangsari Kec. Lebakbarang.

Rencana dan tindaklanjut dari hibah anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pekalongan antara lain:

1. Setiap tahapan kegiatan dan evaluasi pekerjaan kami selalu berkoordinasi dengan Pimpinan, TP4D, Polres Kab. Pekalongan, Tim Percepatan Pembangunan Kab. Pekalongan dan OPD Terkait;
2. Setiap tahapan kegiatan dan evaluasi pekerjaan kami selalu berkoordinasi dengan Pimpinan, TP4D, Polres Kab. Pekalongan, Tim Percepatan Pembangunan Kab. Pekalongan dan OPD Terkait;
3. Setiap tahapan kegiatan dan evaluasi pekerjaan kami selalu berkoordinasi dengan Pimpinan, TP4D, Polres Kab. Pekalongan, Tim Percepatan Pembangunan Kab. Pekalongan dan OPD Terkait

Tabel 57
Alokasi Dana RR di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

No	Kabupaten	Jumlah	Paket Pekerjaan
1	2	3	4
1	Pekalongan	20.000.000.000	3 Jalan
	JUMLAH	20.000.000.000	3 Jalan

B.BPBD Kabupaten/Kota

Tabel 58
Alokasi Dana PB di Kabupaten/Kota Jawa Tengah

No.	Kab/Kota	TA 2018		
		BTL	BL	TOTAL
1.	2	3	4	(3+4) 5
1	Cilacap	4,172,437,000	7,262,000,000	11,434,437,000
2.	Banyumas	1,663,317,534	4,118,500,000	5,781,817,534
3.	Purbalingga	1,035,207,000	3,272,218,000	4,307,425,000
4.	Barjarnegara	1,215,411,000	2,347,182,000	3,562,593,000
5.	Kebumen	2,657,983,000	11,231,752,000	13,889,735,000
6.	Purworejo	3,021,470,790	3,131,693,920	6,153,164,710
7.	Wonosobo	2,646,978,738	2,085,550,000	4,732,528,738
8.	Magelang	2,378,143,000	6,029,912,460	8,408,055,460
9.	Boyolali	2,175,959,000	3,140,099,000	5,316,058,000
10.	Klaten	2,690,753,000	4,325,000,000	7,015,753,000
11.	Sukoharjo	928,049,000	908,730,000	1,836,779,000
12.	Wonogiri	1,504,500,000	1,167,958,000	2,672,458,000
13.	Karanganyar	1,388,255,000	4,703,252,000	6,091,507,000
14.	Sragen	1,017,536,000	1,279,844,000	2,297,380,000
15.	Grobogan	1,804,643,929	2,077,000,000	3,881,643,929
16.	Blora	1,277,900,000	2,415,494,500	3,693,394,500
17.	Rembang	2,792,175,000	3,361,000,000	6,153,175,000
18.	Pati	2,651,790,000	2,000,000,000	4,651,790,000
19.	Kudus	1,501,681,000	2,024,398,000	3,526,079,000
20.	Jepara	1,150,846,000	2,579,453,000	3,730,299,000
21.	Demak	2,264,197,000	3,205,000,000	5,469,197,000
22.	Semarang	1,690,534,000	2,751,213,000	4,441,747,000
23.	Temanggung	1,177,150,275	5,037,804,450	6,214,954,725
24.	Kendal	1,518,815,619	2,751,192,000	4,270,007,619
25.	Batang	953,676,406	1,040,000,000	1,993,676,406
26.	Pekalongan	1,104,623,000	21,995,540,000	23,100,163,000
27.	Pemalang	1,613,008,000	2,000,000,000	3,613,008,000
28.	Tegal	2,010,581,810	2,375,000,000	4,385,581,810
29.	Brebes	2,221,491,000	2,400,000,000	4,621,491,000
30.	Kota Surakarta	1,816,507,000	7,583,811,750	9,400,318,750
31.	Kota Semarang	5,834,307,000	8,538,917,000	14,373,224,000
32.	Kota Pekalongan	1,044,071,000	1,973,670,000	3,017,741,000

No.	Kab/Kota	TA 2018		
		BTL	BL	TOTAL
1.	2	3	4	(3+4) 5
33.	Kota Tegal	1,745,408,000	1,575,060,000	3,320,468,000

Keterangan :

* Tugas pokok dan fungsi PB bergabung dengan Satpol PP karena belum membentuk BPBD

BL: Belanja Langsung

BTL: Belanja Tidak langsung

Alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan BPBD Kab/Kota cukup beragam. Hal ini dipengaruhi beberapa antara lain:

- Jumlah APBD pada masing-masing Kabupaten/kota,
- Prioritas penanggulangan bencana
- Kelembagaan BPBD dan personel BPBD.

4. Data Personel BPBD Kabupaten/Kota

Jumlah personel sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten/Kota cukup bervariasi. Personel tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelompok PNS dan Non PNS. Rekapitulasi jumlah personel BPBD berdasarkan pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 59
Pegawai BPBD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

No	Kab/Kota	Tipe BPBD	Pegawai		
			PNS	NON PNS	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Cilacap	A	48	19	90
2	Banyumas	B	14	7	77
3	Purbalingga	B	14	22	4
4	Banjarnegara	B	15	17	30
5	Kebumen	A	29	15	48
6	Purworejo	A	30	39	42
7	Wonosobo	B	28	16	7
8	Magelang	A	26	22	35
9	Boyolali	A	21	26	56
10	Klaten	A	32	20	54

No	Kab/Kota	Tipe BPBD	Pegawai		
			PNS	NON PNS	Jumlah
1	2	3	4	5	6
11	Sukoharjo	B	7	3	32
12	Wonogiri	B	14	13	22
13	Karanganyar	B	17	42	56
14	Sragen	B	11	27	34
15	Grobogan	A	16	22	104
16	Blora	B	16	14	13
17	Rembang	A	32	15	28
18	Pati	A	28	11	28
19	Kudus	B	12	1	13
20	Jepara	B	13	20	27
21	Demak	A	20	14	31
22	Semarang	B	15	4	51
23	Temanggung	B	14	24	31
24	Kendal	B	15	16	28
25	Batang	B	10	1	10
26	Pekalongan	B	16	12	19
27	Pemalang	B	20	8	42
28	Tegal	A	30	2	33
29	Brebes	A	22	14	38
30	Kota Surakarta	B	18	15	69
31	Kota Semarang	A	50	-	55
32	Kota Pekalongan	B	10	17	17
33	Kota Tegal	B	5	10	18
JUMLAH		30	668	508	1.242

5. Sinergi Penanggulangan Bencana

a. *Technical Assistance And Training Teams (TATTs)*

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah didukung dari berbagai pemangku kepentingan baik diinternal Provinsi Jawa Tengah maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah melalui pendanaan dan penguatan BPBD. Hal ini dilakukan bersama dengan TATT's Program (*Technical Assistance and Training Teams*) yang merupakan konsorsium antara Mercy Corp, Cardno, sebagai tindak

lanjut Mou antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Mercy Corp Indonesia pada tanggal 23 Februari 2015 dengan nomor No. 390/693/2015 dan Nomor 018/601/YMCi/2015. Beberapa kegiatan dilakukan dengan pola sharing dan beberapa kegiatan lainnya dilakukan secara penuh oleh TATT's.

Tabel 60
Program Kegiatan TATT's Tahun Anggaran 2018

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	2	3
1	Asistensi Pengelolaan Pergudangan	18 – 20 Jan
2	Peningkatan kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas se-Provinsi Jawa Tengah	21 – 22 Jan
3	Technical Assistance Penyusunan Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah	Jan – Des 2018
1	Audiensi: Koordinasi dengan pimpinan Kabupaten dan Provinsi	
2	Diskusi dng BMKG, BPBD dan fasilitator untuk persiapan penyusunan renkon tsunami dan gambaran bencana tsunami	
3	Workshop Sosialisasi Rencana kontinjensi Tsunami Prov Jawa Tengah	
4	Pemutakhiran rencana kontinjensi Tsunami level Kabupaten:	
a.	Kab. Purworejo	
a.	Kab. Kebumen	
a.	Kab. Cilacap	
5	Pemantapan dokumen rencana kontinjensi Kabupaten	
6	FGD Penyusunan Renkon Tsunami Kab. Wonogiri	
7	FGD Penyusunan Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah	
8	Initial Planning Conference	
9	Final Planning Conference	
10	Table Top Exercise	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	2	3
11	Finalisasi Dokumen Rencana Kontinjensi Tsunami Provinsi Jawa Tengah	3 Des
4	Workshop Sosialisasi Pool of Fasilitator Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah,	28 Feb 2018
5	Asistensi pendampingan fasilitator pelatihan Psikososial di Kab Batang	8 -9 April 2018
6	Pendidikan dan Latihan Dasar Management Bencana untuk Aparatur Sipil Negara	2 – 5 Mei 2018
7	Asistensi / pendampingan fasilitator pelatihan Destana Kabupaten Banjarnegara	13–14 Mei 2018
8	Asistensi Pengelolaan Pergudangan kabupaten Banjarnegara	20–21 Juli 2018
9	Pelatihan Analisa Pengembangan Organisasi	30 Juli – 3 Agt
10	Workshop Pembelajaran Pusdalops	13–14 Sept 2018
11	Pelatihan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi untuk BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten / Kota dan stake holder terkait	17–21 Sept 2018
12	Diklat Dasar Management Bencana untuk PoF non ASN	24–28 Sept 2018
13	Penguatan kapasitas PoF melalui Pendampingan fasilitator untuk Pelatihan psikososial untuk staf BPBD Jepara, relawan dan organisasi Penyandang Disabilitas	5–7 Nov 2018
14	Sosialisasi Database PoF PB BPBD Provinsi Jawa Tengah	29 Nov 2018

b. Bantuan Bencana dari Provinsi Jawa Tengah

Dalam Tahun 2018 telah banyak terjadi bencana dan ada beberapa bencana skala Nasional yang butuh bantuan banyak pihak selain dari Pemerintah, Dunia Usaha dan Swadaya Masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah melalui perintah langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota terdampak bencana

yang dananya di himpun dari dana Pemprov, Dunia Usaha dan Masyarakat Jawa Tengah.

Beberapa kejadian bencana dimana Jawa Tengah ikut berperan aktif membantu korban bencana dari bantuan personil, material dan bantuan pendanaan berupa logistik, antara lain:

1). Bantuan Gempabumi Lombok

a) Kronologi

Gempabumi Lombok Agustus 2018 adalah sebuah gempa darat berkekuatan 7 SR yang melanda Pulau Lombok, pada tanggal 5 Agustus 2018, pukul 19.46 WITA. Pusat gempa berada di 18 km barat laut Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 32 km. Gempa bumi ini merupakan gempa utama dari rangkaian gempa bumi di Pulau Lombok sejak gempa awalan 6,4 SR akhir Juli 2018. Dengan memperhatikan lokasinya dan kedalaman hiposenter, maka gempa bumi ini merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Naik Busur Belakang *Flores (Flores Back Arc Thrust)*. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini masih sama, gempa bumi dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik (*thrust fault*).

Guncangan gempa bumi terkuat berada di seluruh wilayah Pulau Lombok berupa guncangan VI-VIII MMI terutama Lombok Utara. Sedangkan di Pulau Bali dan Pulau Sumbawa bagian barat dirasakan kuat berupa V-VI MMI. Kemudian Madura, Banyuwangi, Bima dirasakan IV MMI serta II-III MMI di Malang, Tulungagung dan Waingapu. Setelah gempa utama 7,0 SR pada pukul 19.04 WITA hingga tanggal 10 Agustus 2018 pukul 07.00 WITA telah terjadi 447 gempa bumi susulan, 18 diantaranya dirasakan dengan gempa susulan terbesar 6,2 SR pada 9 Agustus 2018, pukul 13.25 WITA.

b) Dampak:

Hingga Sabtu (11/8/2018) tercatat 387 orang meninggal dunia dengan sebaran Kabupaten Lombok Utara 334 orang, Lombok Barat 30 orang, Lombok Timur 10, Kota Mataram 9, Lombok Tengah 2, dan Kota Denpasar 2 orang.

Sementara itu, sebanyak 13.688 orang luka-luka. Pengungsi tercatat 387.067 jiwa tersebar di ribuan titik. Ratusan ribu jiwa pengungsi tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Utara 198.846 orang, Kota Mataram 20.343 orang, Lombok Barat 91.372 orang, dan Lombok Timur 76.506 orang.

Sedangkan kerusakan fisik masih sama jumlahnya, yaitu 67.875 unit rumah rusak, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit mushola rusak, dan 20 unit perkantoran rusak. Angka ini juga sementara. Pendataan dan verifikasi masih dilakukan petugas. Pendataan dan verifikasi rumah diprioritaskan agar terdata jumlah kerusakan rumah dengan nama pemilik dan alamat untuk selanjutnya di-SK-kan Bupati/Walikota dan diserahkan ke BNPB untuk selanjutnya korban menerima bantuan stimulus perbaikan rumah.

c) Bantuan Kemanusiaan

BPBD Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dengan mengirimkan bantuan logistik permakanan sejumlah 17 item senilai Rp 199.240.500,-. Serta mengirimkan bantuan personil relawan spesialis pendirian tenda yang berjumlah 20 personil ahli yang dalam waktu 15 hari telah mendirikan 94 unit tenda pengungsi untuk para pengungsi di Lombok NTB.

Dan bantuan pembangunan lainnya antara lain, 1 *Ecofriendly* AB6 house yang semua dari bahan galvanil, non deforestation,

WC umum 4 titik dan WC petugas di camp, *Clean Water Supply* dengan tower air dan perpipaan peralon, *Water Pot* 9 buah, UV D OZON *Sterilised Drinking Water Station* *Capasitas* 7500, Pengobatan bagi masyarakat terdampak, Membangun sekolah tanpa dindin, *Trauma healing* untuk anak - anak dan klien Khusus, Pembuatan Tsunami Capsul, Memotong Kurban 5 sapi, 8 kambing untuk pengungsi, Rehabilitasi Masjid, Workshop pembuatan rumah AB6 terlatih 64 pemuda serta Melatih kewirausahaan hasil sekitar yaitu jus jambu mete dan abon.

d) Dokumentasi



Gambar 81 **Pengiriman Bantuan dan Relawan Ke Lombok NTB**

2). Bantuan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Palu

a) Kronologi

Gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 SR diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia, bagian utara pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km.

Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu. Pusat gempa bumi (episentrum) berada di darat, sekitar Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Guncangan gempa bumi ini dilaporkan telah dirasakan cukup kuat di sebagian besar provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan sebagian Kalimantan Timur serta Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Dengan memperhatikan lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrum gempa bumi, tampak bahwa gempa bumi dangkal ini terjadi akibat aktivitas di zona sesar Palu Koro. Sesar ini merupakan sesar yang teraktif di Sulawesi, dan bisa pula disebut paling aktif di Indonesia dengan pergerakan 7 cm pertahun. Sesar yang diteliti di LIPI baru sampai sesar darat.

b) Dampak

Pada awalnya, 1 orang tewas dan 10 orang luka-luka dikabarkan akibat gempa pertama berkekuatan 6,0 SR pukul 15.00 WITA. Namun pada Selasa 2 Oktober 2018, BNPB mengabarkan bahwa, korban meninggal telah mencapai 1.234 orang. Adapun jumlah orang tertimbun yang dilaporkan masyarakat telah mencapai 152 orang. BPBD Kabupaten Donggala juga menyatakan bahwa puluhan rumah rusak karena adanya gempa ini.

Gempa bumi 7,4 SR yang disusul Tsunami di Kota Palu hingga Sabtu, 29 September 2018, pukul 15.00 WITA korban tewas mencapai 844 jiwa, lebih dari 500 orang luka berat, 29 orang hilang dan sebanyak 65.733 rumah rusak. Dari antara orang-

orang yang hilang itu, sebanyak satu keluarga sebanyak 5 orang hilang di tengah tsunami di Pantai Talise. Dari 400 lebih orang yang meninggal, baru teridentifikasi sebanyak 97 orang.

Data terakhir yang diinformasikan BNPB pada 10 Oktober 2018 bahwa korban meninggal gempa mencapai 2.045 orang, dengan rincian di Palu sebesar 1.636 orang. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang, dan 8.731 orang pengungsi di luar Sulawesi.

Sebagai akibat dari guncangan gempa ini, Hotel Roa-Roa yang ada di Palu, Rumah Sakit Anuntapura, Mal Tatura roboh. Ada puluhan sampai ratusan orang yang terjebak di dalamnya. Tsunami di Palu membuat KM Sabuk Nusantara terhempas puluhan meter dari Pelabuhan Wani. Pelabuhan dermaga dan bangunannya rusak. Pelabuhan Pantoloan rusak paling parah. Quay crane atau keran peti kemas yang biasa digunakan untuk bongkar muat peti kemas juga roboh. Dari sejumlah foto yang beredar, gempa Palu tergolong dahsyat. Kios-kios di pesisir Teluk Palu atau Pantai Talise tersapu gelombang besar. Jembatan Kuning yang merupakan ikon kota Palu turut ambruk.

Dari Teluk Talise, reruntuhan jembatan yang memisah antara Palu Barat dan Palu Utara. Selain itu, terlihat juga Masjid Arqam Bab Al Rahman atau Masjid Apung Palu yang roboh masuk ke dalam laut. Terlihat pula reruntuhan menara ATC Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu serta kerusakan di pelabuhan. Sebagai akibat daripada kerusakan pada Bandara Palu pula, bandara ini telah ditutup pada hari Jumat pukul 07.26 malam sampai 7.20 malam. Dilaporkan, Sigi, Parigi Moutong dan Donggala juga terdampak gempa ini. Jaringan air bersih, listrik, dan bahan bakar minyak menjadi sulit diakses.

Perhubungan komunikasi antara Donggala dan Palu menjadi sulit diakses akibat tak berfungsinya ratusan BTS tersebut.

Kemenkominfo menyatakan bahwa dari antara 3007 BTS, ada 431 BTS yang tak berfungsi, yakni 14,31%-nya. Ini disebabkan oleh karena mereka tidak mendapatkan akses listrik. ada beberapa jaringan telekomunikasi dari Palu ke Santigi, Mamuju, dan Poso terputus akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter itu.

c) Bantuan Kemanusiaan

BPBD Prov. Jateng mengirimkan bantuan relawan ke Palu - Donggala sebanyak 68 orang terdiri dari tim BPBD Prov. Jateng, Relawan Kab/Kota, Relawan MDMC, PMI, Rumah Zakat dan Mahasiswa.

Bantuan obat-obatan dan makanan dari Yayasan Kesehatan Telogorejo senilai Rp. 150.000.000,- serta bantuan gabungan dari perusahaan farmasi di Jawa Tengah antara lain PT. ifars pharmaceutical lab, PT. konimex, PT. zenith pharmaceuticals, PT. bufa aneka, PT. gratia husada farma, PT. erela, PT. erlimpex, PT. nufarindo, PT. etercon pharma, PT. sampharindo perdana, PT. itrasal, PT. global multi pharmlab, PT. yekatria farma, PT. amapharm (PBF).

Bantuan dari KORPRI Jawa Tengah berupa logistik permakanan dan peralatan senilai Rp 700.000.000,-, bantuan yang diadakan oleh masyarakat, dan organisasi-organisasi amal dalam negeri pun mulai terlihat. Korban gempa Lombok dari Gumantar, Kabupaten Lombok Utara, menyumbangkan uang dari penjualan hasil bumi untuk meringankan derita korban gempa Palu. Padahal, desa ini termasuk desa yang paling parah terdampak gempa karena hampir semua tembok rumah roboh.

Di Banyumas, Jawa Tengah, SD Negeri Kracak dan SMP Negeri 5 Purwokerto menggalang dana dan aksi keprihatinan pada hari Jumat, 5 Oktober 2018. Sebanyak Rp 6.490.000,- terkumpul dari SMP itu untuk meringankan derita gempa Palu dan Donggala.

d) Dokumentasi



Gambar 82 **Bantuan Kemanusiaan BPBD Prov. Jateng untuk warga Palu, Sulawesi Tengah**

3) Bantuan Bencana Banten dan Lampung

a) Kronologi

Pada tanggal 22 Desember 2018, peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut.

Guncangan terkuat berada di sekitar Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sukabumi, Bogor, Jakarta dan Tangerang Selatan berupa IV-V MMI dan di sekitar Banten lainnya berkisar adalah III-IV MMI serta dirasakan cukup keras di Bandung dan Purwakarta II-III MMI. Sedangkan di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul dan Lampung dirasakan sekitar I-II MMI. Sebanyak 1.231 rumah dan bangunan yang mengalami kerusakan. Rumah dan bangunan yang rusak itu terdiri atas 1.125 rusak ringan dan 106 rusak berat.

b) Dampak

Sementara dua orang mengalami luka dan satu orang meninggal. Sedangkan 10 unit sekolah, 3 unit masjid, 9 unit mushola mengalami rusak ringan hingga rusak berat.

Di Kabupaten Cianjur sebanyak enam pelajar luka berat dan dua pelajar luka ringan akibat tertimpa genteng yang runtuh di SMK Tenggeung Kecamatan Tanggeung. Di kecamatan ini dua rumah rusak berat. Di Kabupaten Sukabumi terdapat 9 rumah rusak ringan, 1 rumah rusak sedang, 1 masjid rusak berat, dan 2 fasilitas umum kesehatan rusak ringan. Sedangkan di Kabupaten Bogor terdapat 7 rumah rusak berat dan 5 rumah rusak ringan dan 12 warga alami luka ringan hingga berat.

Gempa bumi ini terjadi di zona tunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia di selatan Banten. Berdasarkan lokasi pusat gempa bumi dan kedalamannya, dan mekanis fokal sesar oblique atau sesar mendatar mengangan dengan komponen naik, dengan arah gerak baratdaya-timurlaut gempabumi diperkirakan berasosiasi dengan terusan sesar Cimandiri ke arah Teluk Pelabuhanratu.

c) Bantuan Kemanusiaan:

BPBD Provinsi Jawa Tengah mengirimkan 49 orang relawan yang terdiri 11 relawan BPBD Jateng, 16 orang relawan BPBD kabupaten/kota, 10 orang PMI Solo, 4 orang PMI Jateng, 7 orang relawan BPBD Kudus, dan 1 orang relawan KNPI Jateng.

Logistik yang dikirim dipilah-pilah secara garis besar yakni kebutuhan dasar pengungsi, tambahan gizi untuk anak-anak, alas tidur, obat-obat-obatan, dan kebutuhan wanita, total bantuan Rp 492 juta.



Gambar 83 Bantuan Kemanusiaan Korban Tsunami Banten dan Lampung

6. Prestasi dan Penghargaan 2018

a. Jateng Fair 2018

Jateng Fair 2018 dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus s/d 9 September 2018. Di Pusat Rekreasi dan Pameran Pembangunan (PRPP) Prov Jawa Tengah. Kembali BPBD Provinsi Jawa Tengah dipercaya menjadi Juara III dalam pameran Stand di PRPP dengan

Tema Stand terbaik untuk SKPD yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jateng Fair dilaksanakan sebagai sarana untuk memberikan informasi sekaligus sosialisasi hasil-hasil pembangunan di Jawa Tengah kepada masyarakat. Kegiatan pameran ini merupakan event tahunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh berbagai instansi, antara lain SKPD Prov Jawa Tengah, BUMD, 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan para mitra kerja/pemangku kepentingan di Jawa Tengah.



Gambar 84 Penghargaan Jateng Fair 2018

7. Tantangan, Permasalahan dan Solusi

Wilayah Jawa Tengah yang rawan dan berisiko terhadap bencana sebagian besar ditempati masyarakat sebagai tempat tinggal. Permasalahan kepemilikan lahan dan tidak ada pilihan lokasi lain menjadi penyebab klasik sehingga berpotensi terjadi korban yang cukup banyak ketika terjadi bencana. Untuk itu, dengan pendekatan kearifan local, dan didukung dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana,

pemasangan alat peringatan dini bencana, diharapkan mampu memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana.

Kelembagaan BPBD sebagai amanat UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana beserta peraturan turunannya belum dilaksanakan secara penuh oleh kabupaten/kota. Pembentukan BPBD sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan bencana belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan di daerah. BPBD dibentuk sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana dengan peran SKPD teknis tetap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tanggungjawab penanggulangan bencana bukan hanya pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, dunia usaha dinilai belum mempunyai peran yang optimal karena kehadirannya masih bertumpu saat tanggap darurat dengan bantuan-bantuan bencana yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Jika dikelola dengan baik, para pelaku dunia usaha sebenarnya dapat menggunakan dana CSR penanganan bencana sejak pra bencana melalui program pengurangan risiko bencana.

Ditingkat kabupaten/kota, pembentukan BPBD kabupaten/Kota masih mempunyai permasalahan tersendiri. Alokasi anggaran Pemerintah Kab/Kota untuk penyediaan stok logistic kebencanaan minim, begitu pula dengan sarana dan prasarana PB, kapasitas dan kapabilitas personel BPBD juga belum ideal. Dengan kata lain, kapasitas sumberdaya PB (jumlah, kondisi, dan distribusi sumberdaya belum merata) dibandingkan dengan cakupan wilayah yang harus ditangani dan tingkat risiko bencana maka rasio kecukupan peralatan harus dipertimbangkan kembali dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana merupakan paradigm penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana sejak dini, sehingga dalam kerangka pembangunan maka pembangunan harus berwawasan risiko bencana agar hasil-hasil pembangunan dapat lestari dan tidak

menjadi penyebab dari dampak bencana. Beberapa permasalahan selama tahun 2018, terangkum pada tabel berikut ini.

Tabel 61
Tantangan Permasalahan dan Solusi PB

No	TANTANGAN DAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3
1	Terdapat 2 (dua) Kota yang belum membentuk BPBD berdasar Perda, yaitu Kota Magelang dan Kota Salatiga	Pemerintah Prov Jateng melalui Gubernur membuat Surat Edaran pembentukan BPBD kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, serta advokasi untuk pembentukan BPBD
2	Belum seluruh BPBD Kabupaten/ Kota mempunyai dan menyusun Perda tentang Penyelenggaraan PB. 16 Kab/Kota yang mempunyai perda penyelenggaraan PB	Perlu advokasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan PB di Kabupaten/ Kota untuk disusun melalui Perda tentang Penyelenggaraan PB
3	Alokasi dana PB masih terbatas, sehingga perbandingan dana PB dengan APBD Kabupaten /Kota belum ideal	Perlu penambahan anggaran penanggulangan bencana agar memenuhi/mendekati ideal (alokasi dana PB 1 % dari APBD) Menggandeng lembaga donor untuk ikut serta dalam PB
4	Belum seluruh BPBD mempunyai gedung dengan kapasitas yang besar untuk logistik, peralatan, sarana/ prasarana PB dan PUSDALOPS	1) Mendorong Pemerintah Kab/ Kota untuk mengalokasikan anggaran pembangunan Gedung BPBD melalui APBD 2) Mengusulkan pembangunan Gedung melalui dana Tugas Pembantuan (TP) melalui APBN Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen PUM dengan Rekomendasi Gubernur 3) Optimalisasi asset daerah
5	Sumberdaya Manusia di BPBD sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas	1) Melakukan rekrutmen pegawai <i>outsourcing</i> sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ketentuan regulasi, 2) Membuka kesempatan untuk pelajar/ mahasiswa magang 3) Melakukan <i>in house training</i> dan optimalisasi personil 4) Pemberdayaan relawan PB untuk membantu kegiatan PB dilapangan
6	Penyediaan Logistik dan peralatan PB	1) <i>Back up</i> pengadaan logistik untuk buffer stock kab/kota dari BPBD Provinsi dan BNPB 2) Optimalisasi/bekerjasama dengan SKPD/ instansi yang mempunyai 3) Memberdayakan potensi dunia usaha untuk ikut serta membantu dalam logistik maupun sarana prasarana PB
7	Kerjasama PB (Dunia usaha, Media massa) Dunia usaha di Jateng sangat besar dan sangat potensial untuk ikut serta dalam PB melalui CSR	1) Peningkatan Kepedulian Dunia Usaha Melalui Dana CSR Khususnya Untuk PRB selain pada tanggap darurat

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Supporting Gubernur Jateng yang selalu menjadi motivator dan pemimpin di lapangan menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana di Jateng;
- b. Dukungan BNPB dibidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sangat membantu bagi BPBD se Jateng khususnya dana siap pakai dalam kondisi akhir tahun anggaran dan awal tahun anggaran;
- c. Kejadian bencana Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.734 kejadian, dengan taksiran kerugian sebesar Rp. 47,47 M. Dari data yang ada, yang tertinggi adalah bencana kebakaran;
- d. Pemasangan EWS, dan pembentukan desa tangguh bencana menjadi salah satu tolok ukur yang bisa menyelamatkan masyarakat dari bencana;
- e. Komitmen, kebersamaan dan sinergitas antar pemimpin relawan, dan dunia usaha sangat sangat membantuk dalam penanganan bencana di Jawa Tengah;
- f. Kekompakan dan komitmen BPBD se Jateng menjadi modal utama dalam mendorong kecepatan penanganan bencana di Jawa Tengah

2. Saran

- a. BNPB perlu mendorong percepatan untuk pembentukan Desa tangguh bencana di seluruh Indonesia, dengan diikuti pemasangan EWS dan petunjuk jalur evakuasi dengan priotitas untuk daerah rawan tsunami, gunung api dan tanah longsor
- b. Segera diwujudkan regulasi tentang dasar hukum pembentukan BPBD sesuai dengan amanat PP No 18 tahun 2016 pasal 117.
- c. Segera diwujudkan adanya dana alokasi khusus bagi BPBD se Indoensia untuk mitigasi, dalam rangka meminimalisasi korban dampak bencana

- d. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain (NGO, pusat studi, perguruan tinggi) perlu dikembangkan lebih lanjut baik secara formal nota kesepahaman /MoU dengan BPBD Prov Jawa Tengah maupun secara non formal
- e. Perlu segera diterbitkan Perka yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan, software/aplikasi tentang data relawan yang diikuti dengan kualifikasi keterampilan serta dukungan bagi relawan dalam bentuk pelatihan dan asuransi pada saat darurat bencana

Demikian laporan pelaksanaan program kerja BPBD tahun 2018 yang dapat kami laporkan. Semoga bermanfaat.

Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan.

F. LAMPIRAN

1. Indeks Rawan dan Indeks Risiko Bencana Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2. Peta Potensi Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kab/Kota Se-Jateng 2018-2019

Urutan kelas risiko dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 62
Indeks Risiko Bencana Indonesia

No	PROVINSI	Indeks Rawan 2011*			Indeks Risiko 2013**		
		Skor	Kelas	Ranking	Skor	Kelas	Ranking
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	169	Tinggi	5	160	Tinggi	1
2	Sumatera Utara	148	Tinggi	7	150	Tinggi	2
3	Sumatera Barat	154	Tinggi	6	153	Tinggi	3
4	Riau	109	Tinggi	22	147	Tinggi	4
5	Jambi	109	Tinggi	23	142	Sedang	5
6	Sumatera Selatan	126	Tinggi	15	142	Sedang	6
7	Bengkulu	105	Tinggi	26	172	Tinggi	7
8	Lampung	126	Tinggi	16	153	Tinggi	8
9	Bangka Belitung	46	Sedang	33	162	Tinggi	9
10	Kepulauan Riau	55	Sedang	32	116	Sedang	10
11	DKI Jakarta	113	Tinggi	21	103	Sedang	11
12	Jawa Barat	200	Tinggi	2	166	Tinggi	12
13	Jawa Tengah	203	Tinggi	1	158	Tinggi	13
14	DI Yogyakarta	124	Tinggi	18	165	Tinggi	14
15	Jawa Timur	189	Tinggi	3	171	Tinggi	15
16	Banten	133	Tinggi	11	180	Tinggi	16
17	Bali	129	Tinggi	13	170	Tinggi	17
18	Nusa Tenggara Barat	139	Tinggi	9	172	Tinggi	18
19	Nusa Tenggara Timur	187	Tinggi	4	156	Tinggi	19
20	Kalimantan Barat	108	Tinggi	24	157	Tinggi	20
21	Kalimantan Tengah	83	Sedang	30	141	Sedang	21
22	Kalimantan Selatan	108	Tinggi	25	152	Tinggi	22
23	Kalimantan Timur	125	Tinggi	17	165	Tinggi	23
24	Sulawesi Utara	133	Tinggi	12	151	Tinggi	24
25	Sulawesi Tengah	138	Tinggi	10	158	Tinggi	25
26	Sulawesi Selatan	140	Tinggi	8	167	Tinggi	26
27	Sulawesi Tenggara	116	Tinggi	20	169	Tinggi	27
28	Gorontalo	94	Sedang	28	140	Sedang	28
29	Sulawesi Barat	104	Tinggi	27	191	Tinggi	29
30	Maluku	128	Tinggi	14	179	Tinggi	30
31	Maluku Utara	89	Sedang	29	169	Tinggi	31
32	Papua Barat	67	Sedang	31	154	Tinggi	32
33	Papua	120	Tinggi	19	125	Sedang	33

Sumber: * = BNPB, IRBI Tahun 2011, ** BNPB IRBI 2013

